

BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

6. Peraturan ./.
/.

6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah yang di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
10. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disebut Bappelitbangda adalah PD yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
11. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Sistematika RKPD tahun 2026 sebagai berikut :
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII yang memuat penutup.

(2) Uraian./A..

- (2) Uraian sistematika RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2026 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD tahun 2026.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif.

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi melalui pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 3 OKTOBER 2025



Diundangkan di Tondano
pada tanggal 3 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Region of Kabupaten Minahasa.

LYNDA DEISYE WATANIA
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025 NOMOR 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah disetiap menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Kemudian selanjutnya sering disebut sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Dokumen RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 merupakan RKPD tahun perencanaan ketiga dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2026 merujuk pada RPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 dan RKP Tahun 2026.

Dokumen RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 ini disusun melalui tahapan Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD. Proses penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD Kabupaten Minahasa) mulai dari proses Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta penyusunan dan penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD, dilakukan penjangkaran saran dan masukan dari stakeholder melalui Konsultasi Publik. Selain itu, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD juga menjadi masukan dalam

penyusunan RKPD yang diharmonisasi dalam SIPD Kabupaten Minahasa. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

- Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2044;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025- 2045;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045;

1.3. Hubungan antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dasar dalam penyusunan APBD yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menjadi dasar penyusunan RAPBD.

RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 disusun dengan mengacu serta berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029. Selanjutnya Dokumen RKPD

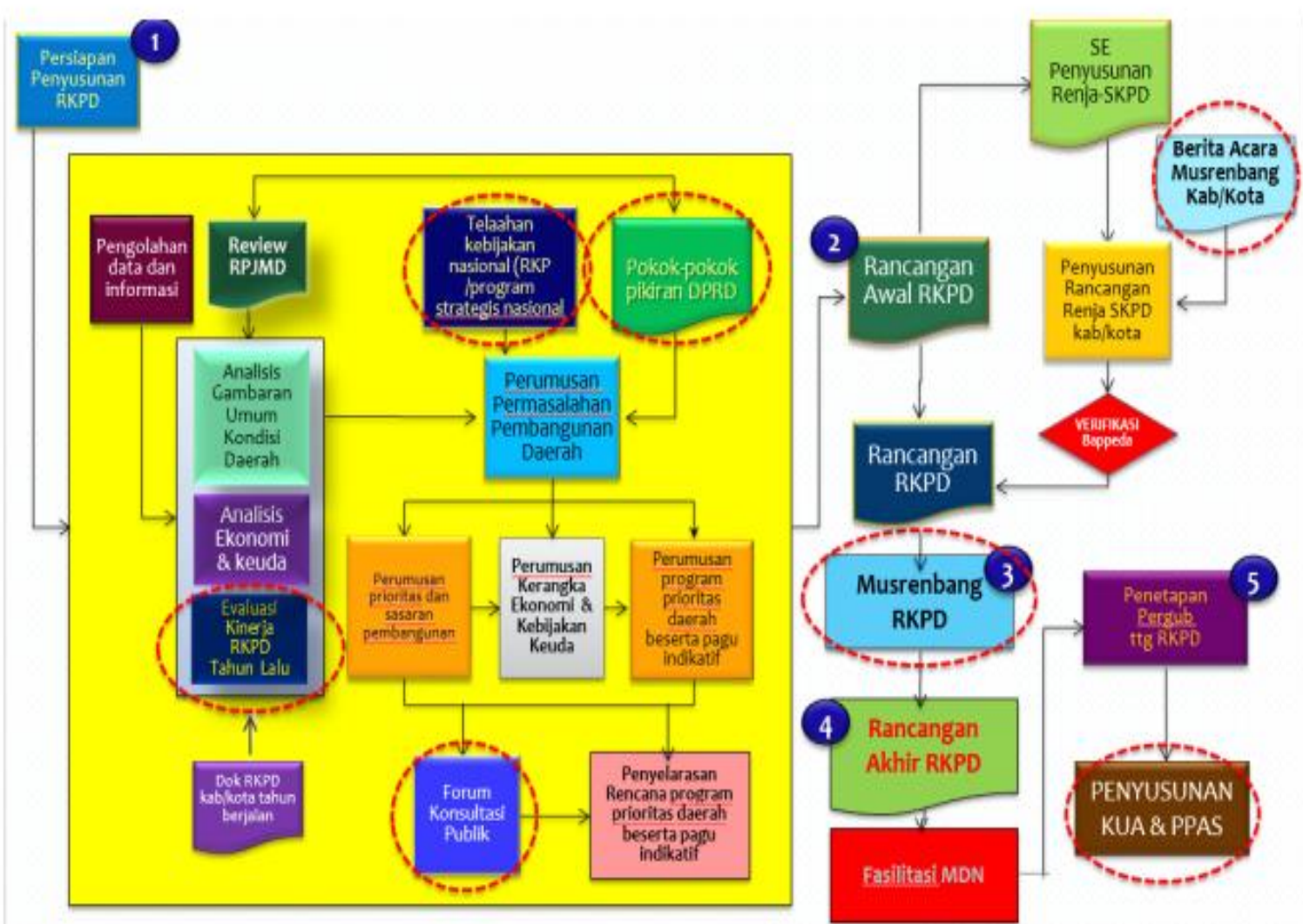
Kabupaten Minahasa Tahun 2026 akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Lebih tegas lagi bahwa RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, yang secara substansi harus melakukan penyesuaian dengan RKP Tahun 2026.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap RPJMN, RPJM Provinsi dan Rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 serta pokok-pokok pikiran DPRD selain hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD tahun lalu dan tahun berjalan.

Rancangan akhir RKPD diselaraskan dengan dokumen-dokumen hasil Musrenbangnas RKP, musrenbang RKPD Provinsi dan disinkronisasikan dengan hasil musrenbang RKPD Kecamatan.

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD dan keterkaitan antar dokumen dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD ini adalah menyediakan suatu acuan yang menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya akan disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai dasar penusunan RAPBD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan RKPD adalah dalam rangka mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumberdaya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, serta tercapainya tujuan pelayanan publik, Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun 2024, permasalahan pembangunan daerah serta inovasi pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Tondano. Luas wilayah Kabupaten Minahasa sesuai Permendagri tentang batas wilayah Kabupaten/Kota adalah **112,849 ha**, terdiri dari 25 Kecamatan, dan 270 Desa/Kelurahan.

Adapun batas-batas luar Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Laut Sulawesi, Kota Manado dan Kota Tomohon;
- 2) Sebelah Selatan : Laut Maluku dan Kota Tomohon;
- 3) Sebelah Barat : Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;
- 4) Sebelah Timur : Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak Kabupaten Minahasa menurut garis lintang dan bujur adalah: 124^o 33' 32,207" - 125^o 4' 16,982" BT dan 1^o 0' 45,81" - 1^o 28' 23,554" LU.

Kabupaten Minahasa pada umumnya berbukit, bergunung, dan dataran yang agak luas, hanya sekitar Danau Tondano. Dataran tersebut dijumpai dalam wilayah Tondano, Remboken, Tompaso, Langowan, dan Kakas. Lereng beragam dari datar hingga sangat curam. Lereng-lereng yang sangat curam dijumpai di dalam wilayah Kecamatan Kombi, Kecamatan Kakas, dan Kecamatan Langowan Selatan.

Kabupaten Minahasa memiliki 8 gunung dimana kawasan lindung yang terluas terdapat di Gunung Soputan yaitu 1.540,00 ha. Adapun hutan bakau yang terluas terdapat di Tanjung kelapa seluas 250 ha (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Gunung-Gunung di Kabupaten Minahasa

No	Gunung/Kelompok Hutan	Kecamatan	Lindung (Ha)
1	Gunung Mahawu	Pineleng/Tombulu	438,00
2	Gunung Masarang	Tondano Barat	16,00
3	Gunung Tampusu	Tondano Selatan	13,00
		Remboken	8,00
4	Gunung Soputan	Langowan Barat	1.540,00
		Tompaso	510,00
		Kawangkoan Barat	900,00
5	Gunung Lengkoan	Remboken	20,00
		Kawangkoan	25,00
		Sonder	11,00
6	Gunung Kawatak	Langowan	330,00
7	Gunung Kaweng	Kakas	417,86
8	Gunung Lembean	Tondano Timur	493,00
		Kombi	1.500,00
9	Hutan Bakau Tanjung Kelapa	Tombariri	250,00
10	Hutan Bakau Tanjung Tambala	Tombariri	50,00
TOTAL			6.521,86

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa. Tahun 2014-2034

3. Geologi

Dari batuan geologi menunjukan dataran sekitar Danau Tondano adalah endapan lakustrin maupun sungai. Wilayah berbukit sampai bergunung bagian timur Danau Tondano terdiri atas batuan vulkanis berupa lava basalt dan tufa basalt.

Wilayah Kecamatan Langowan Barat, Tompaso, dan Kawangkoan terdiri atas Abu Vulkan dan Tufa Tondano, Wilayah Lengkoan, Tampusu (Kecamatan Remboken), Masarang, Mahawu sampai lahan wilayah Kecamatan Tombulu berupa batuan Vulkanis Muda (abu, bom, lapilli, lawa). Di daerah ini tanah- tanah yang berkembang dari batuan basalt membentuk ordo Alfisolts, Tufa Tondano ordo Andisols. Tanah di wilayah dataran sekitar Danau Tondano umumnya Aquepts. Wilayah Kecamatan Tondano yang merupakan ibukota kabupaten berbatasan dengan Gunung Mahawu yang masih aktif.

4. Hidrologi

Danau Tondano merupakan danau terbesar dengan satu sungai (Sungai Tondano) dan merupakan bagian dari kawasan strategis nasional (KSN) DAS Tondano yang berfungsi untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik (PLTA Tonsea Lama-Tanggari), dan untuk diolah sebagai air minum oleh PDAM Kota Manado. Fungsi lain dari sungai-sungai tersebut adalah sebagai pengairan dan budidaya ikan air tawar. Adapun sungai sungai yang terdapat di Kabupaten Minahasa seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Daftar Sungai yang ditetapkan memiliki Kawasan Sempadan Sungai

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	S. Nimanga (Sebagian wilayah masuk Minsel dan Tomohon)	-	Sonder	34,00
			Kawangkoan.	
			Tomohon	
			Tompaso	
		Masarinsin	Sonder	1,50
		Naa	Sonder	2,50
		Sapa	Sonder. Tomohon	17,00
		Titiwoon	Sonder. Tomohon	4,00
		Ranoesem	Sonder. Tomohon	10,00
		Ranoinsandang	Sonder. Tomohon	10,00
		Loar	Sonder. Tomohon	2,50
		Nikoropit	Sonder. Tomohon	2,00
		Leilem	Sonder. Tomohon	4,50
		Munte	Sonder	7,00
		Keris	Sonder	5,50
		Coklat	Sonder	6,00
		Ranowangko	Kawangkoan	14,50
		Ranoesem	Kawangkoan	7,50
		Toang	Kawangkoan	7,00
		Tempak	Kawangkoan	7,50

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
		Maasem	Kawangkoan. Tompaso	13,00
		Ranoan	Kawangkoan	5,00
2	S. Maroondor	-		4,50
		Tuel	Kombi	5,00
3	S. Rariang	-	Kombi	4,00
4	S. Bulo	-	Kombi	9,00
		Uuan	Kombi	6,00
5	S. Rerer	-	Kombi	4,00
6	S. Sapaana	-	Kombi	3,00
7	S. Saluwangko		Langowan	20,00
8	S. Tombingon	-	Langowan	14,00
		Panasen	Kakas. Langowan	14,50
		Ranomperet	Langowan	10,00
		Walewangko	Langowan	5,50
		Ranolesi	Langowan	6,00
		Wuliling	Langowan	8,50
9	S. Tolour Oki	-	Tondano	5,00
		Pakawa	Tondano	2,50
10	S. Tonsaru	-	Tondano	2,50
11	S. Tougela			6,00
12	S. Toubeke			7,50
13	S. Manembo			20,50
14	S. Ranowangko			19,50
15	S. Sindoran Besar		Kakas	16,50
16	S. Sindoran Kecil		Kakas	10,50
17	S. Kaliakel		Kakas	7,50
18	S. Pinisin		Kakas	18,00
		Kakeretan	Kakas	7,50
		Kaweruan	Kakas	19,00
		Pinorutanresek	Kakas	10,00
19	S. Kayuwatu Oki		Kakas	12,50
		Silungan	Kakas	8,50
20	S. Kayuwatu Wangko		Kakas	18,50

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
		Katon	Kakas	10,50
21	S. Kinamang		Kakas	5,50
22	S. Tarandi		Kakas. Eris	21,50
		Karor	Kakas	16,00
23	S. Atep Oki		Eris	13,50
24	S. Raker		Eris	17,00
		Panungean	Eris	18,00
		Watuliney	Eris	7,50
25	S. Pakaretan		Eris	17,50
26	S. Kamenti		Eris. Kombi	16,50
		Tulap	Kombi	8,50
27	S. Kora-kora			9,50
28	S. Kanis			18,50
				5,50
29	S. Toulour			15,00
30	S. Awioki			6,00
31	S. Awiwangko			7,00
		Kaliawua		6,50
32	S. Kombi			18,00
33	S. Raker			13,50
34	S. Tulap			14,50
35	S. Buraran			6,00
				10,50
				10,50
				6,00
36	S. Mawalelong		Remboken	6,00

Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa. Tahun 2014-2034

5. Klimatologi

Kabupaten Minahasa beriklim tropis basah dan dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November-April dipengaruhi oleh angin barat yang membawa hujan. Angka curah hujan rata-rata per tahun berkisar 2.000-3.000 mm. dengan jumlah hari hujan rata-rata 90-130 hari per tahun. Suhu udara rata- rata 22°C (sekitar 21-23°C) dan memiliki

kelembaban udara rata-rata 87-92%.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Minahasa dengan luas wilayah sebesar 121.043.31 ha, sebagian besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun luas lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Minahasa

No	s Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	Bakau	178,37	0,15
2	Danau	4.446,90	3,67
3	Hutan	13.065,20	9,19
4	Hutan belukar	1.750,80	1,45
5	Kebun Campuran	27.888,80	23,04
6	Perkebunan /kebun	32.994,66	27,26
7	Permukiman	5.567,00	4,60
8	Rawa	102,50	0,08
9	Rumput	6.083,73	5,03
10	Sawah Irigasi	5.762,30	4,76
11	Sawah Tadah Hujan	1.227,20	1,01
12	Tanah kosong	9.224,40	7,62
13	Tegalan/Ladang	10.034,65	8,29
14	Lain-Lain	2.845,00	
Total		121.043,31	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034

Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah untuk perkebunan (27,26%) dan untuk kebun campuran (23,04%), sedangkan untuk permukiman hanya mencapai 4,6%.

7. Demografi

Jumlah penduduk kabupaten Minahasa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat dari 348,673 jiwa tahun 2021 meningkat menjadi 351,920 jiwa tahun 2023 dan menurun menjadi 330,843 jiwa tahun 2024, Pertmbuhan penduduk Kabupaten Minahasa tahun 2023-2024 sebesar negatif 3,70 persen, Penduduk terbanyak tahun 2024 berada di Kecamatan Pinekang dengan jumlah 27,295 jiwa, dan Kecamatan Kombi merupakan penurunan penduduk tertinggi

tahun 2024 sebesar -10,16 persen,

**Tabel 2.4. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan
Tahun 2021-2024**

Kecamatan	Jumlah				Laju Pertumbuha n 2023-2024 (%)
	2021	2022	2023	2024	
Langowan Timur	13,600	13,639	13,482	12,874	-5,16
Langowan Barat	16,629	16,657	17,634	16,843	-0,34
Langowan Selatan	8,094	8,099	8,306	7,979	-1,86
Langowan Utara	8,761	8,775	8,914	8,532	-2,94
Tompaso	7,458	7,475	7,561	7,271	-2,53
Tompaso Barat	9,290	9,311	9,422	9,038	-0,63
Kawangkoan	10,504	10,517	10,550	10,112	-2,24
Kawangkoan Barat	9,041	9,051	9,090	8,732	-0,89
Kawangkoan Utara	8,725	8,735	9,075	8,658	-2,60
Sonder	19,590	19,656	20,003	19,077	-3,60
Tombariri	18,247	18,306	18,526	17,674	-4,19
Tombariri Timur	10,431	10,465	10,877	10,279	-2,15
Pineleng	30,480	30,680	28,536	27,295	-3,09
Tombulu	19,627	19,964	18,120	17,151	-3,77
Mandolang	21,783	21,925	21,043	20,148	-3,34
Tondano Barat	21,665	21,787	20,305	19,542	-8,70
Tondano Selatan	17,906	17,918	17,103	16,544	-4,26
Remboken	12,853	12,946	12,902	12,355	-1,71
Kakas	12,677	12,716	12,675	12,166	-4,36
Kakas Barat	11,001	11,035	11,332	10,874	-0,73
Lembean Timur	8,487	8,522	8,600	8,183	-4,70
Eris	12,085	12,215	11,874	11,270	-8,01
Kombi	11,518	11,583	11,274	10,493	-10,16
Tondano Timur	15,105	15,129	15,647	15,044	-3,50
Tondano Utara	13,116	13,211	13,122	12,709	-1,93
Minahasa	348,673	350,317	351,920	330,843	-3,70

Sumber: Minahasa Dalam Angka Tahun 2023; Data Diolah.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa tahun 2024 mencapai 289,80 jiwa/km2, Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Langowan Timur dengan kepadatan sebesar 1,778,2 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kombi sebesar 94,15 jiwa/Km2.

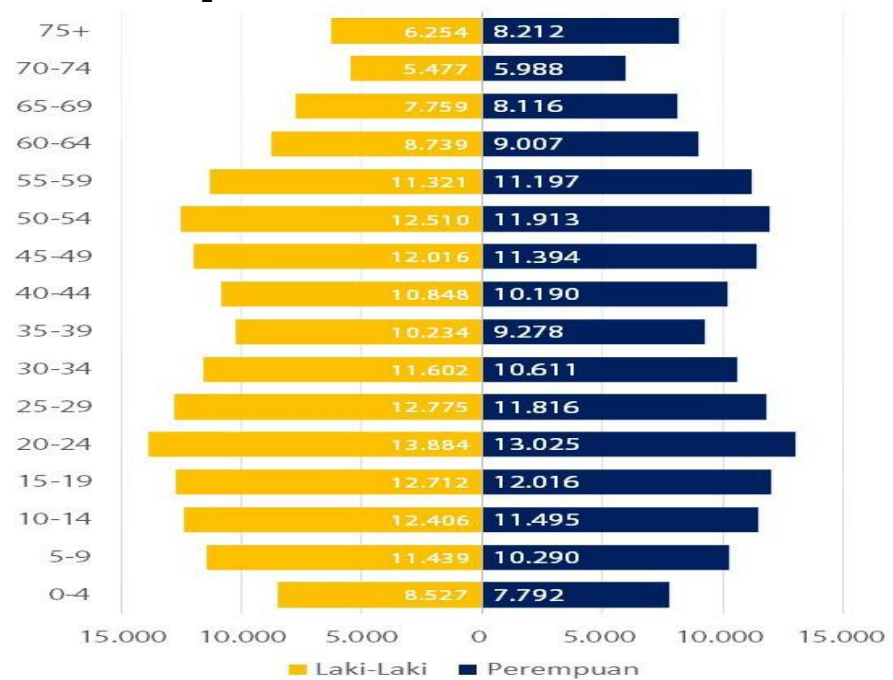
Tabel 2.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km ²
1	Langowan Timur	7,24	12,874	1,778,2
2	Langowan Barat	42,69	16,843	394,5
3	Langowan Selatan	69,65	7,979	114,6
4	Langowan Utara	8,27	8,532	1,031,7
5	Tompaso	17,32	7,271	419,8
6	Tompaso Barat	14,61	9,038	618,6
7	Kawangkoan	35,99	10,112	281,0
8	Kawangkoan Barat	19,27	8,732	453,1
9	Kawangkoan Utara	13,09	8,658	661,4
10	Sonder	52,52	19,077	363,2
11	Tombariri	56,43	17,674	313,2
12	Tombariri Timur	101,57	10,279	101,2
13	Pineleng	49,30	27,295	553,7
14	Tombulu	73,43	17,151	233,6
15	Mandolang	47,05	20,148	428,2
16	Tondano Barat	22,66	19,542	862,4
17	Tondano Selatan	25,34	16,544	652,9
18	Remboken	24,07	12,355	513,3
19	Kakas	88,85	12,166	136,9
20	Kakas Barat	45,16	10,874	240,8
21	Lembean Timur	76,94	8,183	106,4
22	Eris	33,25	11,270	338,9
23	Kombi	119,74	10,493	87,6
24	Tondano Timur	33,71	15,044	446,3
25	Tondano Utara	63,49	12,709	200,2
	TOTAL	1141,64	330,843	289,8

Sumber: Minahasa Dalam Angka Tahun 2025; Data diolah.

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Minahasa tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,80, Rasio jenis kelamin per kecamatan cukup beragam dengan rasio jenis kelamin tertinggi pada Kecamatan Langowan Selatan sebesar 109,20 dan terendah pada Kecamatan Langowan Timur sebesar 101,09 Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah laki-laki masih lebih banyak dari perempuan, Artinya, dalam setiap komunitas 100 perempuan, terdapat 109,20 sampai 101,09 orang laki-laki.

Grafik 2.1. Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Minahasa Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2024

Jika dilihat komposisi penduduk Kabupaten Minahasa seperti dijelaskan diatas, kelompok umur 15 – 64 tahun sebagai kelompok umur produktif terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 202 dibandingkan dengan kelompok umur lainnya (non produktif),

Selain itu juga terjadi peningkatan pada jumlah penduduk usia lanjut (65+), dan dikenal dengan istilah proses penuaaan (*aging process*) atau proses transisi penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua selang tahun 2019-2023, dan terjadi penurunan pada jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun selang tahun 2020-2022,, sebagaimana pada Tabel 2,6, Angka dalam tabel dibawah ini, tampak bahwa Rasio ketergantungan di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020 sampai 2022 cenderung ada kenaikan, yaitu Tahun 2020 sebesar 46,53, tahun 2021 sebesar 46,73, tahun 2022 sebesar 47, tahun 2023 sebesar 47.5 dan menurun pada Tahun 2024 mencapai angka 45,69

Tabel 2.6 Rasio Ketergantungan Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 14	72,337	71,694	71,153	72,450	61,949
15 – 64	237,013	237,625	238,310	238,670	227,088
65 +	37,940	39,354	40,854	40,800	41,806

Rasio Ketergantungan	46,53	46,73	47,00	47,45	45,69

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2024; Data diolah

Secara umum gambaran indikator kependudukan Kabupaten Minahasa hingga tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Indikator Kependudukan Kabupaten Minahasa

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	343,564	343,800	350,317	351,920	330,843
Luas Wilayah (Km ²)	1,141,64	1,141,64	1,141,64	1,141,64	1,141,64
Pertumbuhan (%)	1,09	0,80	0,47	0,40	-3,70
Sex Ratio (%)	104,5	104,3	104,3	104,37	103,80
Kelompok Umur					
0 – 14 (%)	21,88	20,56	20,31	20,58	18,72
15 – 64 (%)	68,27	68,15	68,23	67,82	68,64
65 + (%)	9,85	11,29	11,66	11,59	12,64
Rasio ketergantungan	46,53	46,73	47,00	47,45	45,69

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2024, Data diolah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menggambarkan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat lebih lanjut menjelaskan mengenai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Beberapa target indikator dari fokus Aspek dimaksud terdampak dengan adanya Pandemi Covid 19 sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 sehingga mempengaruhi capaian target indikator yang termuat dalam dokumen ini.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. PDRB dan Struktur ekonomi

Posisi strategis Kabupaten Minahasa yang berada pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dan KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado-Bitung, serta kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun ketidakstabilan ekonomi global juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Minahasa.

Posisi strategis Kabupaten Minahasa yang berada pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dan KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado-Bitung, serta kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, Namun ketidakstabilan ekonomi global juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Minahasa,

Kapasitas ekonomi yang tergambar dari nilai keseluruhan produk barang dan jasa yang dihasilkan di daerah ini yang tergambar pada data PDRB-nya menunjukkan bahwa perputaran roda ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun ini semakin meningkat,

Tahun 2018 PDRB ADHB sebesar lebih dari 15,745 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar lebih dari 11,159 triliun rupiah, Semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di daerah ini sehingga pada tahun 2023 PDRB ADHB sebesar lebih dari 22,127,99 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 13,523,80 Triliun rupiah,

Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih merupakan primadona dalam perekonomian Kabupaten Minahasa, Sektor ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini memiliki kontribusi besar dalam Peningkatan Perekonomian Kabupaten Minahasa, Tahun 2023 Lapangan Usaha ini memiliki kontribusi sebesar 26,52 % terhadap total PDRB ADHB dan 4,97% terhadap total PDRB ADHK, Selain itu di Tahun 2023 Konstruksi juga menjadi factor pendorong meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Minahasa yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 12,71 persen terhadap total PDRB ADHB pada tahun 2023 menjadi 12,63 persen terhadap total PDRB ADHB sebagaimana dapat dilihat pada Table 2.8 dibawah ini;

Tabel 2.8. PDRB Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Dan Distribusi PDRB (%)Tahun 2020-2024 (Jutaan Rupiah)

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.725,08	5.023,87	5.471,90	5.867,93	6.413,90
	27,11	26,95	26,86	26,52	26,67
Pertambangan dan Penggalian	1.083,39	1.150,25	1.223,54	1.317,95	1.372,20
	6,22	6,17	6,01	5,96	5,71
Industri Pengolahan	1.251,64	1.369,58	1.533,03	1.694,93	1.844,94

	7,18	7,35	7,53	7,66	7,67
Pengadaan Listrik dan Gas	21,27	22,92	26,24	28,37	30,96
	4,35	3,13	0,17	0,16	2,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,70	23,80	23,87	24,29	26,31
	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11
Konstruksi	2.197,12	2.380,13	2.589,80	2.793,94	2.897,67
	12,61	12,73	12,71	12,63	12,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.097,28	2.220,93	2.490,63	2.766,30	3.079,30
	12,03	11,95	12,23	12,5	12,81
Transportasi dan Pergudangan	981,96	1.061,76	1.293,47	1.523,98	1.652,79
	5,63	5,51	6,35	6,89	6,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142,91	168,15	187,27	212,30	235,16
	0,82	0,9	0,92	0,96	0,98
Informasi dan Komunikasi	434,99	465,99	512,99	558,89	626,47
	2,5	2,5	2,52	2,53	2,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	425,20	469,54	482,26	499,48	527,14
	2,44	2,5	2,37	2,26	2,19
Real Estate	717,07	729,05	747,90	797,99	883,61
	4,11	3,81	3,67	3,61	3,67
Jasa Perusahaan	12,51	13,31	14,83	16,98	18,53
	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.651,97	1.731,10	1.827,18	1.910,00	2.057,95
	9,48	9,29	8,97	8,63	8,56
Jasa Pendidikan	570,36	608,86	661,84	728,66	829,56
	3,27	3,27	3,25	3,29	3,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	751,30	817,30	838,69	876,66	967,28
	3,27	3,27	3,25	3,29	3,45
Jasa lainnya	340,39	386,59	443,66	509,33	582,73
	1,95	2,05	2,18	2,3	2,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.427,13	18.643,14	20.369,10	22.127,99	24.046,51
	100	100	100	100	100

Sumber BPS Minahasa Tahun 2025

Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Minahasa menurut Lapangan Usaha ADHK (Jutaan Rupiah) Dan Pertumbuhan PDRB (%) Tahun 2020-2024

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.951,07	3.070,97	3.291,53	3.458,76	3.633,06
	2,15	4,06	7,18	5,08	5,04
Pertambangan dan	785,63	815,19	821,13	855,98	883,01

Penggalian	(1,76)	3,76	0,73	4,24	3,16
Industri Pengolahan	933,85	990,11	1.062,38	1.149,05	1.198,10
	1,63	6,03	7,30	8,16	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	18,53	20,04	22,22	23,43	24,67
	7,07	8,14	10,92	5,45	5,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,96	16,46	16,49	16,52	16,93
	4,35	3,13	0,17	0,16	2,51
Konstruksi	1.755,27	1.812,27	1.897,92	2.012,79	2.085,71
	(6,05)	3,25	4,73	6,05	3,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.413,27	1.466,27	1.577,24	1.673,83	1.783,14
	(1,05)	3,75	7,57	6,12	6,53
Transportasi dan Pergudangan	559,78	581,88	649,06	704,73	740,76
	(13,05)	3,95	11,55	8,58	5,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,02	112,52	123,61	137,52	147,37
	(20,04)	13,63	9,86	11,26	7,16
Informasi dan Komunikasi	301,63	316,53	342,92	366,43	400,24
	11,87	4,94	8,34	6,86	9,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	303,01	317,95	297,60	302,25	314,93
	10,36	4,93	(6,40)	1,56	4,20
Real Estate	560,38	559,98	570,26	593,10	629,51
	(0,16)	(0,07)	1,84	4,01	6,14
Jasa Perusahaan	7,62	7,92	8,34	9,17	9,72
	(4,87)	3,94	5,28	10,06	5,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	922,13	952,13	973,86	999,03	1.080,15
	(2,15)	3,25	2,28	2,58	8,12
Jasa Pendidikan	340,60	352,50	370,32	391,52	418,94
	2,10	3,49	5,05	5,73	7,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512,50	545,20	553,71	565,37	604,78
	6,22	6,38	1,56	2,11	6,97
Jasa lainnya	205,13	210,13	234,29	264,30	294,60
	(10,57)	2,44	11,50	12,81	11,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.685,36	12.148,04	12.812,87	13.523,80	14.265,62
	(1,02)	3,96	5,47	5,55	5,49

Sumber BPS Minahasa Tahun 2025

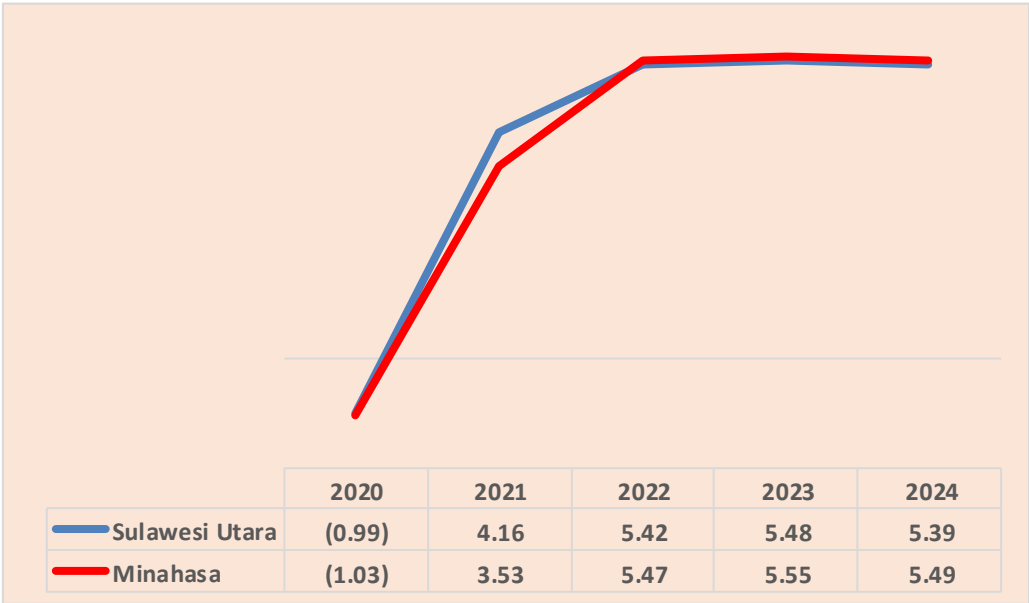
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Minahasa selang tahun 2020-2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 kontrkasi sebesar -1,02, Hal ini disebabkan terjadi bencana Pandemi Covid 19, tetapi pada tahun 2021-2023 terjadi kenaikan masing-masing sebesar 3,96, 5,47, 5,55 dan tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 5,49 persen, Sektor Jasa lainnya paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dengan

pertumbyhan sebesar 11,46 persen, diikuti sektor Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,23 dan sektor usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 8,12.

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 diangka 3,96 dan terus naik hingga ditahun 2023 diangka 5,55 Persen, namun di tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 5.49persen, namun masih diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional sebagaimana Grafik 2,2 di bawah ini,

Grafik 2,2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Sulut, Tahun 2024; Data diolah,

Pada grafik 2.2 nampak bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa terus tumbuh positif sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, namun sedikit melambat pada tahun 2024.

2. **PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk sehingga hasilnya menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau per satu orang penduduk dengan pendekatan menggunakan

data PDRB atas dasar harga berlaku, Data ini bermanfaat sebagai pendekatan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah tertentu, PDRB per kapita penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa mulai tahun 2020 Rp50.227.622 terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2024 dengan nilai Rp.68.016.377. Perkembangan Angka PDRB Per Kapita dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.10. PDRB Perkapita Kabupaten Minahasa 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita (Rp)	50,227,622	53,401,847	58,144,777	62,877,532	68,016,377**

Sumber: BPS Sulut Tahun 2023

- Angka sementara

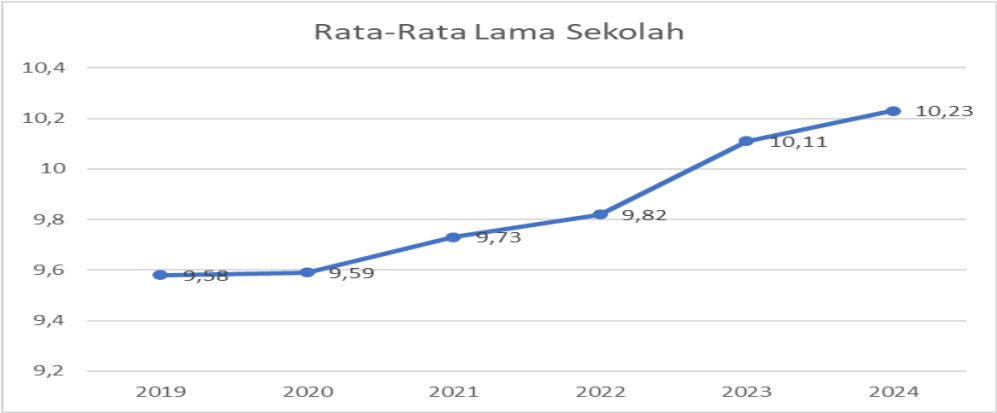
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Secara umum kondisi bidang sosial masyarakat berlangsung secara dinamis. didukung dengan budaya masyarakat Minahasa yang toleran, egaliter, dan demokratis dengan semangat mapalus yang masih melekat dalam masyarakat. Kondisi ini merupakan perwujudan upaya dalam rangka pengembangan seni budaya daerah. pembinaan olahraga, dan pemantapan kerukunan antar umat beragama.

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan selang tahun 2019 hingga tahun 2024, dimana pada tahun 2019 berada pada angka 9,58 dan pada tahun 2024 menjadi 10.23, yang berarti rata-rata telah menyelesaikan Pendidikan lanjutan pertama. Rata-Rata Lama Sekolah tersaji pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2024

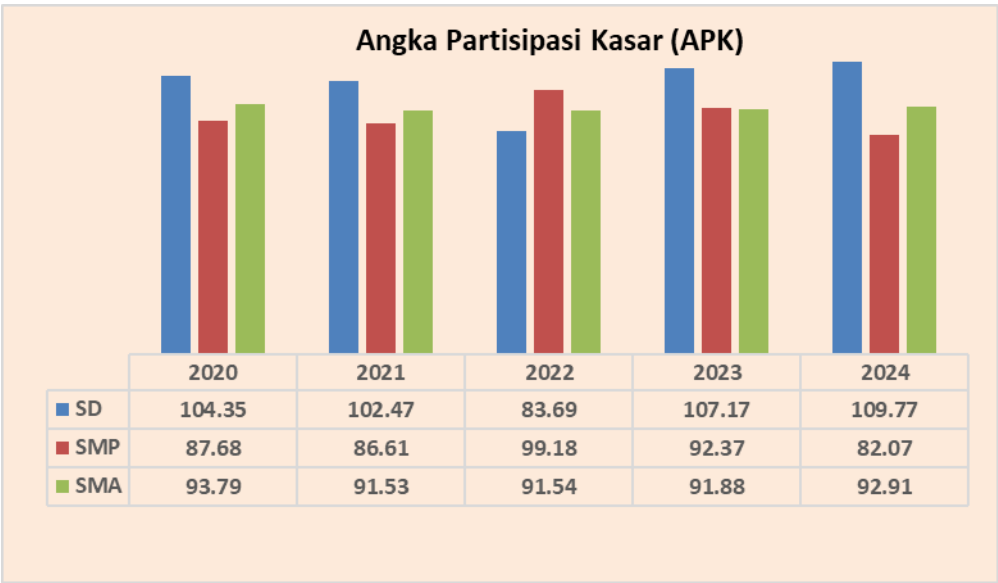


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Minahasa pada jenjang Pendidikan SD, dimana Rasio APK berfluktuasi selang tahun 2020– 2024, pada tahun 2020 APK Sekolah Dasar berada pada angka 104,35 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 102,47 persen, dan di tahun 2022 turun menjadi turun menjadi 83,69 pada tahun 2023 naik menjadi 107,17 dan naik lagi di tahun 2024 menjadi 109,77. APK SMP tahun 2020 sebesar 87,68 persen 87.68 86.61 99.18 92.37 82.07, tahun 2021 turun menjadi 86,61 persen, tahun 2022 naik menjadi 99,18, tahun 2023 turun menjadi 92,37 dan tahun 2024 turun menjadi 82,07. Penurunan yang terjadi kemungkinan karena usia masuk sudah makin ketat harus sesuai ketentuan yakni usia sekolah di SD harus 7 tahun. APK SD, SMP dan SMA dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2025
(Angka Rasio tidak tergambarkan pada grafik batang)

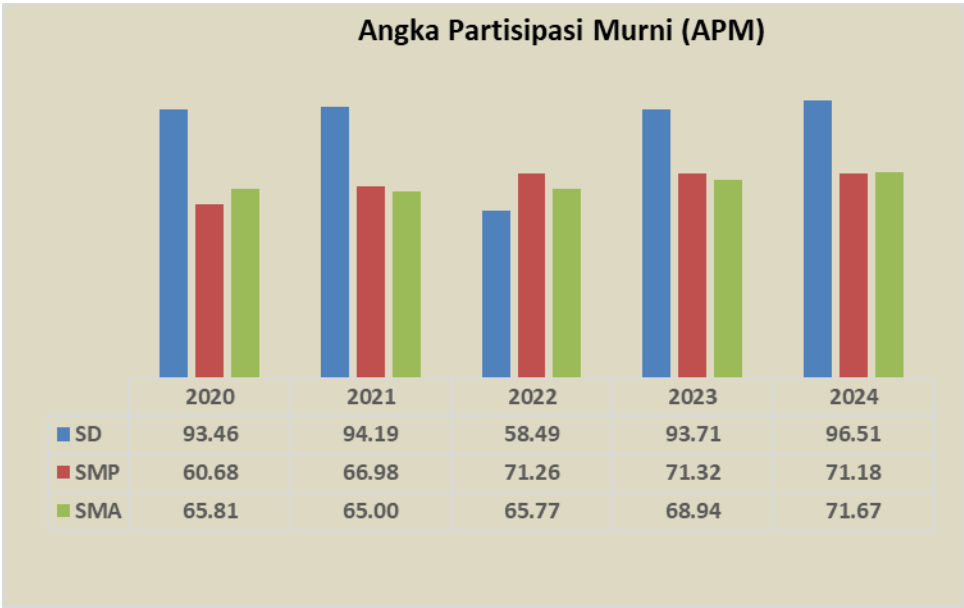
3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan tepat waktu dan pada rentang umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, Untuk setiap jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat capaian APM belum mencapai 100 persen, artinya masih terdapat masyarakat pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu belum mendapatkan layanan pendidikan,

Perkembangan APM SD/MI Tahun 2018-2024 Kabupaten Minahasa

Dikabupaten Minahasa Angka Partisipasi Murni mengalami penurunan pada tahun 2018 dimana Rasio APM SD/MI berada pada angka 89,5 kemudian menunjukan tren menurun di tahun 2019 menjadi 78,9 Namun di Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 92,22, lalu kembali naik ditahun 2021 menjadi 95,41 dan terus naik hingga angka 97,22 di tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 96,1 Seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini,

Grafik 2,13 Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024



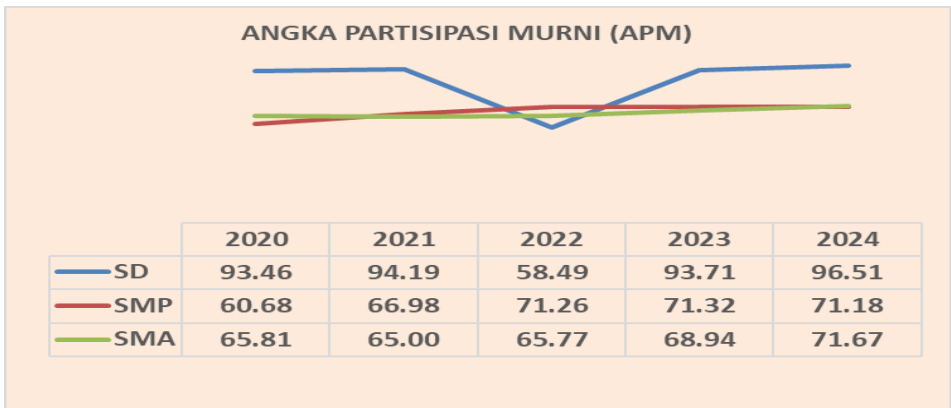
Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Perkembangan APM SD, SMP, dan SMA/SMK Tahun 2020-2024
Kabupaten Minahasa

Perkembangan SD, SMP, dan SMA/SMK menunjukan tren menurun sejak tahun 2018 pada angka 66,12 persen ke tahun 2019 menjadi 56,54

persen dan terus mengalami penurunan ditahun 2020 dengan angka 54,5 persen, Pada Tahun 2021 Angka Partisipasi Murni SMP kembali menunjukan perbaikan dengan tren yang kembali naik menjadi 78,88 persen dan terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 64,83 persen, Namun pada Tahun 2023 menunjukan kenaikan yang cukup drastis menjadi 91,83, Pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs belum mencapai 100% disebabkan oleh Jumlah Siswa SMP di tahun 2018 sampai 2023 lebih kecil dibandingkan dengan Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun, hal ini dapat dilihat pada Grafik dibawah ini,

Grafik 2,14 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP DAN SMA Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab Minahas Tahun 2025

4. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT ditentukan dari banyaknya pelajar yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah, APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah, Perkembangan APT di Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel 2,11.

**Tabel 2.11 Perkembangan Angka Pendidikan yang di Tamatkan (APT) % Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Tahun 2020-2024
Kupaten Minahasa**

No	APT	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak Berijazah	15,03	20,09	20,15	20,19	17,77
2	SD/Mi	21,03	20,51	20,56	21,05	23,70
3	SMP/MTs	18,42	10,15	10,16	10,17	18,24
4	SMA/SMK	35,67	40,06	40,07	40,08	18,46
5	Perguruan Tinggi	9,86	9,19	9,21	9,35	6,98

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Minahasa berusia 10 tahun ke atas berdasarkan kepemilikan ijazah sampai pada tahun 2023 menunjukkan sebagian besar memiliki ijazah SMA yaitu sebesar 40,08 persen (Tabel 2.11). Dengan tingkat kelulusan mencapai 99,87% untuk SD/MI dan 99,96% untuk SMP/MTs.

Tabel 2.12 Tingkat Kelulusan Siswa SD dan SMP Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2023

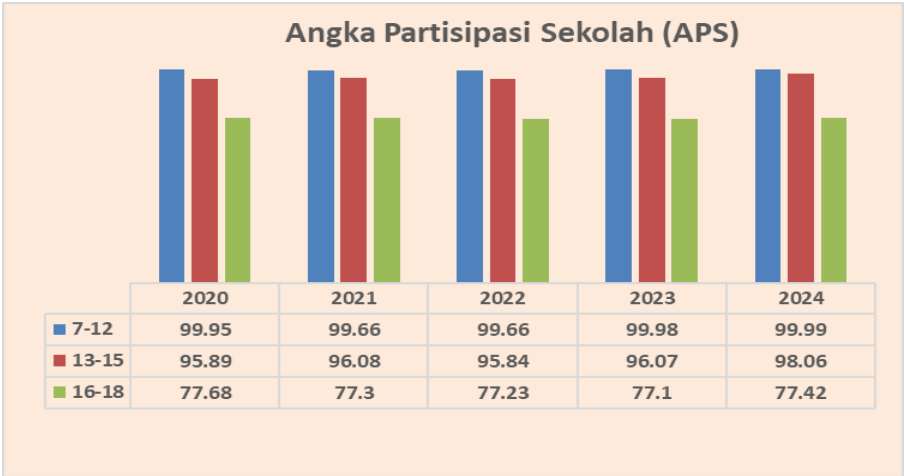
No.	Tingkat Sekolah	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI				
	Peserta Ujian (Siswa)	4.518	4486	4495	4799
	Lulus Ujian (Siswa)	4.518	4484	4489	4799
	Prosentasi	100	99,95	99,96	100
	Nilai Rata-Rata	100	99,95	99,87	99,97
2	SMP/MT				
	Peserta Ujian (Siswa)	4.455	4526	4535	4612
	Lulus Ujian (Siswa)	4.455	4523	4533	4612
	Prosentasi	100	99,93	99,95	100
	Nilai Rata-Rata	100	99,93	99,96	99,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. APS merupakan indikator keberhasilan program pembangunan pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tahun (usia sekolah SD) dan umur 13-15 tahun (usia sekolah SMP) di Kabupaten Minahasa secara umum hampir mencapai 100 persen. Hal ini memberi indikasi bahwa pada usia sekolah ini hampir tidak ada yang tidak bersekolah apa lagi usia sekolah SD. Hanya sedikit saja usia sekolah 13-15 tahun atau usia sekolah SMP yang tidak bersekolah.

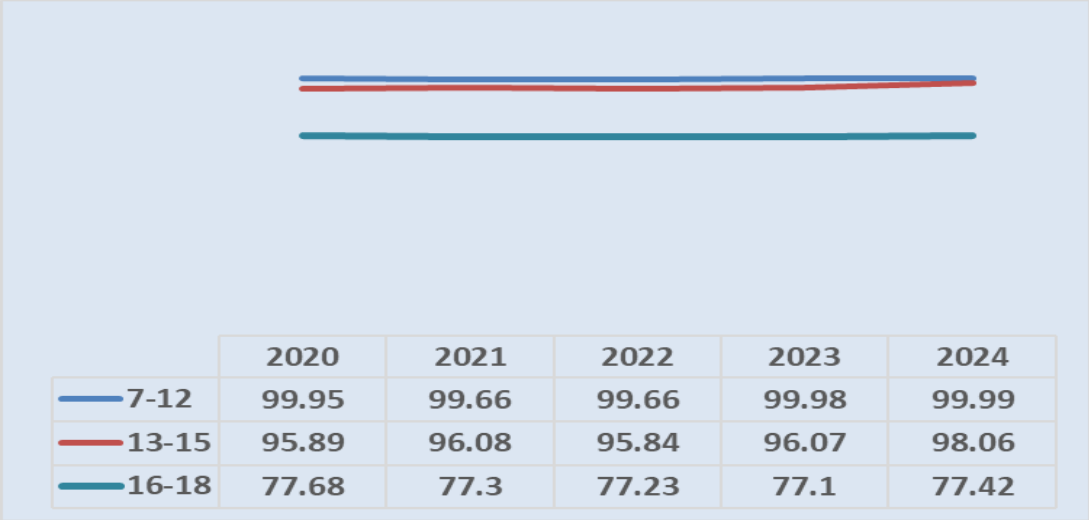
Grafik 2.15, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Minahasa (%) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2025

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

Grafik 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Minahasa (%) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2025

Dalam grafik nampak tingkat partisipasi sekolah usia 16-18 tahun yakni usia sekolah SMA masih sangat rendah, hal ini akan mempengaruhi Rata-rata lama Sekolah dan IPM.

6. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) tahun 2019 sebesar 6,97 mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 6,80 dan tahun 2021 turun drastis mencapai angka 2,19, Namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan hingga angka sebesar 7,71 dan dapat turun pada tahun 2023, Pada umumnya yang menjadi penyebab utama kematian bayi adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dibawah 2,5 kg, Biasanya terjadi pada bayi yang lahir secara prematur atau mengalami gangguan perkembangan dalam kandungan,

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi), AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1,000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 mencapai 993,03 per 1000 kelahiran hidup, Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2019 masing-masing sebesar 993,20 dan 997,81, lalu kembali menurun ditahun 2022 menjadi 992,29, naik lagi

mencapai angka 993,31 di tahun 2023, seperti pada Tabel 2,14,

Tabel 2,14. Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	AKHB
2018	26	4,862	5,35	994,65
2019	34	4,875	6,97	993,03
2020	16	2,352	6,80	993,20
2021	10	4562	2,19	997,81
2022	33	4582	7,71	992,29
2023	27	4030	6,69	993,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

b. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja Kesehatan oleh Pemerintah, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat Kesehatan pada Khususnya, Pada tahun 2019 usia harapan hidup penduduk Kabupaten Minahasa sebesar 70,98 terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 71,08, tahun 2021sebesar 71,16, tahun 2022 sebesar 71,49 dan tahun 2023 sebesar 71,82, seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini,



Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan trend meningkat dari tahun ketahun, Hal ini berarti pelayanan Kesehatan kepada Lanjut Usia dilaksanakan secara baik oleh Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya yang

mencakup Posyandu Lansia maupun pelayanan skrining sesuai kebutuhan,

c. Persentase Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan status gizi ke dalam 4 kelompok, yaitu:rendah = di bawah 10%, sedang = 10-19%, tinggi = 20-29%, sangat tinggi = 30%, Status gizi buruk balita di Kabupaten Minahasa selang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Status Gizi Buruk di Kabupaten Minahasa

Tahun	Sasaran Balita	Gizi Buruk	Per-10.000
2018	24.284	1	0,41
2019	22.880	3	1,31
2020	20.976	0	0
2021	16.312	0	0
2022	20976	2	0,95
2023	17.397	12	0,68
2024	16247	5	0,31

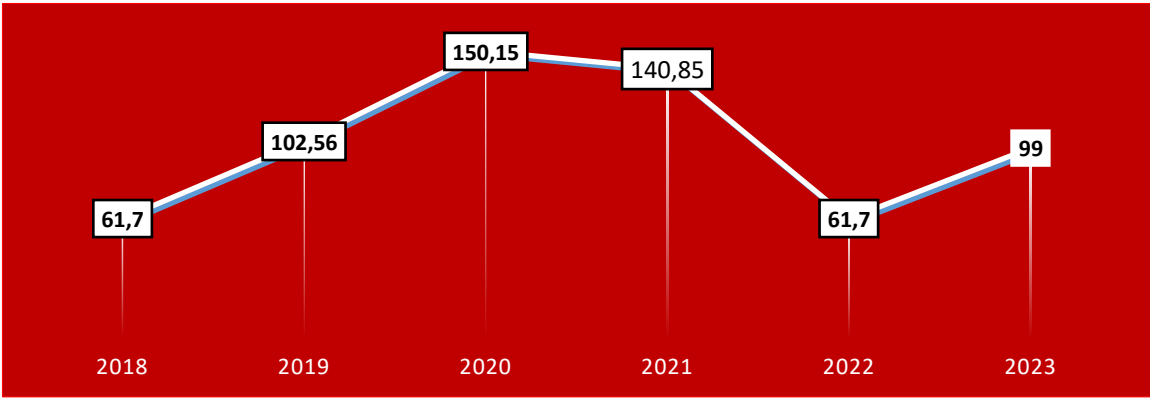
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2024

Terdapat penurunan pada kondisi gizi buruk balita di Kabupaten Minahasa. ini berarti kepedulian terhadap konsumsi makanan pada balita semakin meningkat. Dilihat dari penggolongannya menunjukkan bahwa gizi buruk di Kabupaten Minahasa masuk pada kelompok rendah.

d. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (*Mother Mortality Rate*) tahun 2018 sebesar 61,7/100.000 KH, pada tahun 2019 adalah 102,56/100.000 KH dan naik pada tahun 2020 mencapai angka 150,15/100.000 KH. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 140,85/100.000 dan pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu melahirkan mengalami penurunan drastis menjadi 61,7/100.000 KH. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai angka 99/100.000 KH. Seperti tampak pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.11 Angka Kematian Ibu / 100.000 KH Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

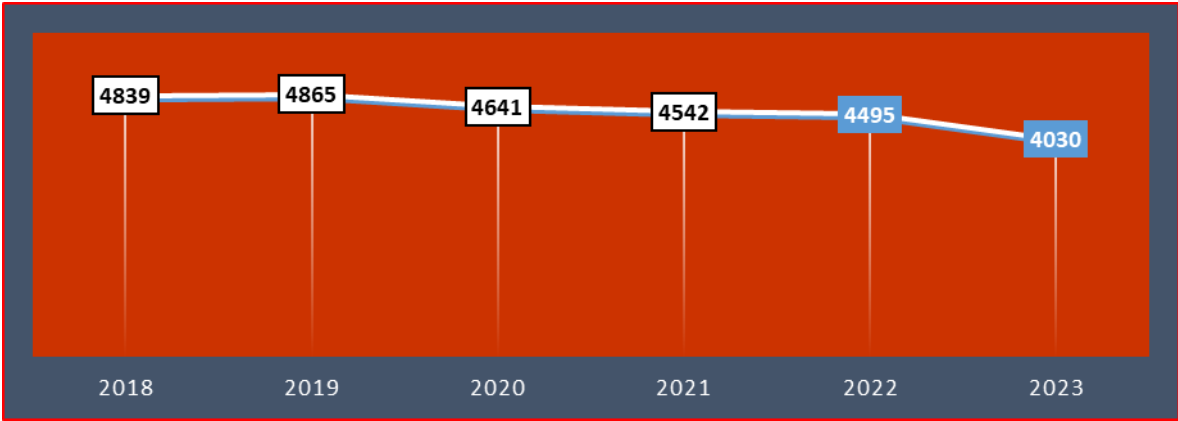


Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa 2024

e. Persalinan Ibu Hamil

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2018 sebanyak 94,79% (4.839 ibu hamil dari 5.105 target sasaran). Dan tahun 2019 terjadi peningkatan 1.57% yaitu sebesar 96.36%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 92,89%. Tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 92,6% (4.542 dari 4.923 ibu). Sedangkan data tahun 2022 menunjukkan bahwa 96% pertolongan persalinan oleh nakes. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, walaupun masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun beranak atau mama biang (biang kampung). Mengalami penurunan di tahun 2023, tercatat dari 4.477 target sasaran ibu bersalin, yang mendapatkan pelayanan nakes sebesar 4.030 (90,02%). Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.12 Cakupan Persalinan di Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

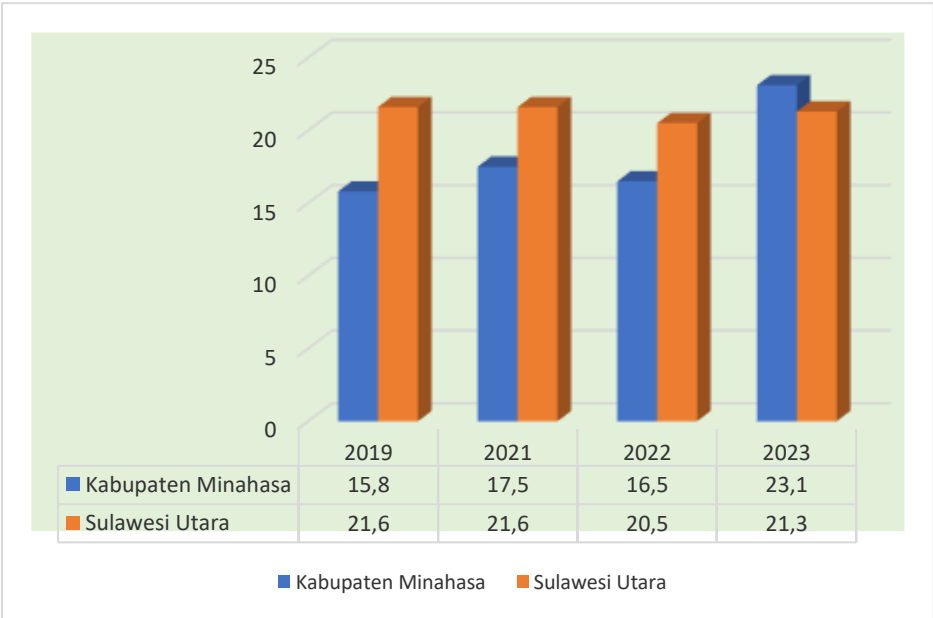


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2024

f. Prevalensi Stunting

Berdasarkan data SSGI Pada Tahun 2019 Prevalensi Stunting di Kabupaten Minahasa sebesar 15,8 %, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 17,5% dan di tahun 2022 turun menjadi 16,5 % , tahun 2023 naik menjadi 23,1 seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.13 Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Tahun 2019 - 2023 Data SSGI/SKI (%)



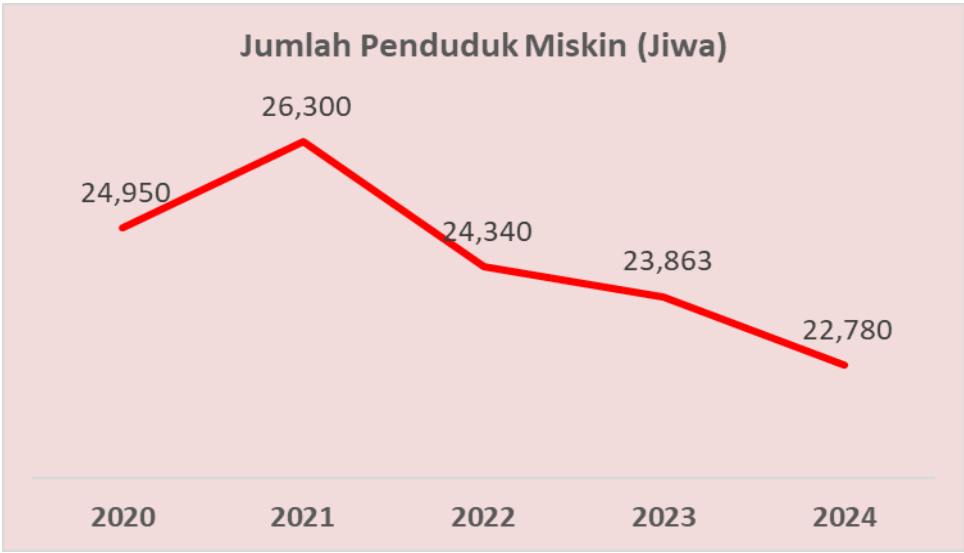
Sumber : Survei Status Gizi Indonesia/Survei Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan R.I)

7. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Negara,

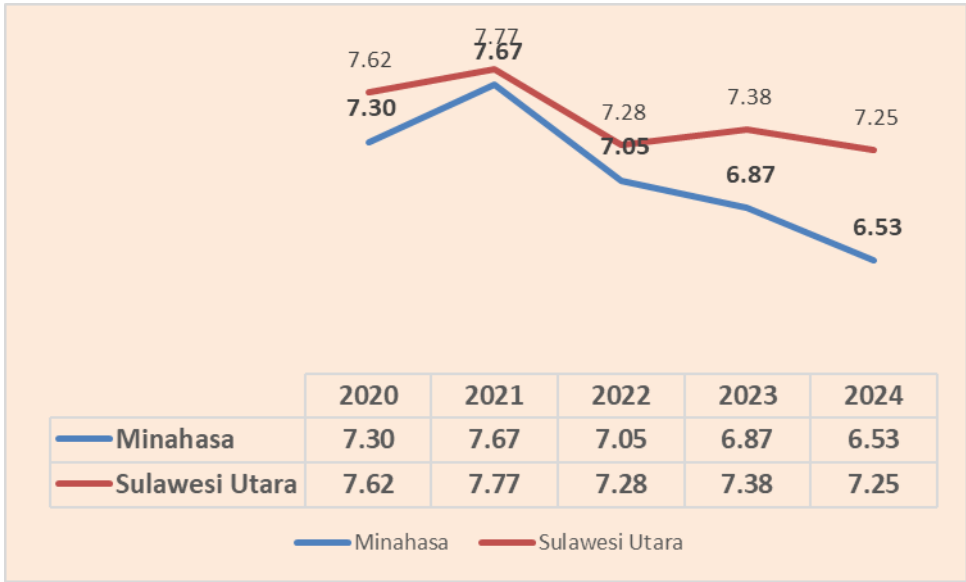
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren penurunan, , dimana pada Tahun 2020 sebanyak 24,950 jiwa, tahun 2021 naik menjadi 26,300 jiwa, tahun 2022 turun menjakdi 24,340 jiwa, tahun 2023 turun lagi menajdi 23,863 jiwa, dan tahun 2024 turun lagi menjadi 22,780. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020-2024 nampak pada grafik dibawah ini,

Grafik 2,3 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) di Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025;Data Diolah

Grafik 2.4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024



Sumber : BPS Sulut Tahun 2024; BPS RI Tahun 2025; Data Diolah,

Pada gambar diatas nampak bahwa perkembangan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa lebih baik dari penurunan di Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020 sebesar 7.30 persen naik di tahun 2021 menjadi 7.67 persen dan mulai tahun 2022 terus menurun menjadi 6.53 persen ditahun 2024, ini menunjukkan hal positif bagi kabupaten Minahasa Angka kemiskinan Minahasa juga lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan provinsi sulawesi utara 6,70%.

**Tabel 2.14. Indikator Kemiskinan Kabupaten Minahasa
Tahun 2020-2024**

Kemiskinan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	24,950	26,300	24,340	23,863	22,780
Garis Kemiskinan (Rupiah)	285,596	299,072	308,634	338,802	352,693
Penduduk Miskin (%)	7.30	7.67	7.05	6.87	6.53
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.82	1.31	0.91	1.51	1.38
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.17	0.32	0.22	0.48	0.41

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Tabel 2,28 menunjukkan perkembangan berbagai indikator kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Minahasa menunjukkan tren yang fluktuatif, Tahun 2020 pada angka 0,17 dan pada tahun 2024 capaiannya sebesar 0,41.

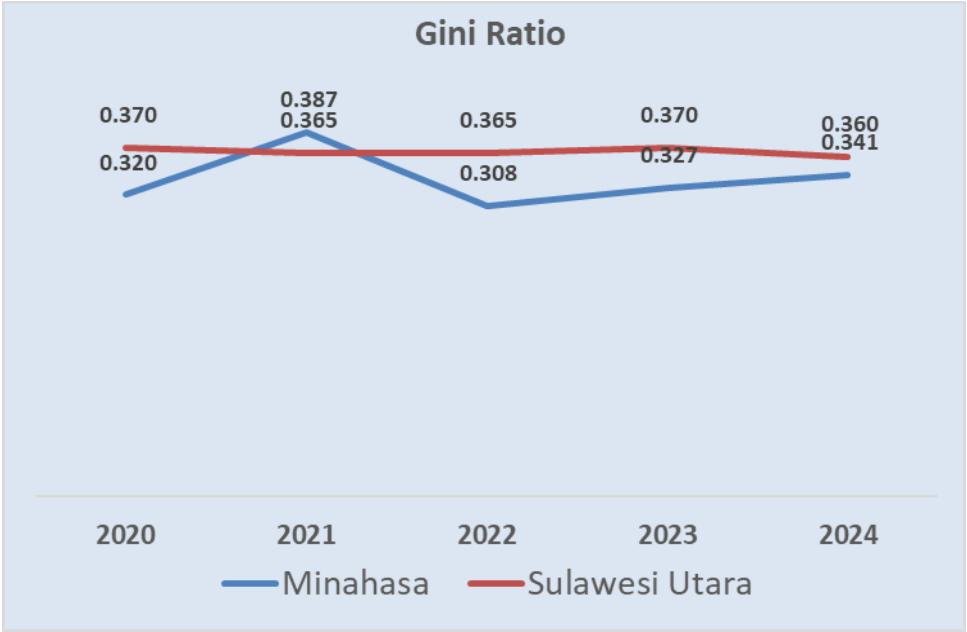
Begitu juga dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Minahasa kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 pada angka 0,82 dan tahun 2021 naik menjadi sebesar 1,31 lalu turun pada tahun 2022 menjadi 0,91, dan tahun 2023 naik menjadi 1,51 dan tahun 2024 turun menjadi 1,38. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kecenderungan rata-rata pengeluaran penduduk miskin perlu diwaspadai agar semakin dapat diatur mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil, Kondisi ini menggambarkan tentu masih perlunya penanganan melalui program pembangunan yang terintegrasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

8. Rasio Gini

Gini Ratio menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi, Rentang skor 0 - 1, Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidakmerataan atau sangat timpang, Rasio Gini di Kabupaten Minahasa sejak Tahun 2020-2024 terus berfluktuasi pada Tahun 2020 dari angka 0.320 naik di tahun 2021 menjadi 0.387, tahun 2022 turun menjadi 0.308 dan Kembali naik hingga ditahun 2024 menjadi 0.341. namun angka Gini

Ratio Kabupaten Minahasa berada dibawah Provinsi Sulawesi Utara, atau lebih kecil dari angka Gini Rasio Provinsi Sulawesi Utara, Perbandingan Angka Gini Ratio Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi utara dan Nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini,

Grafik 2.5 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

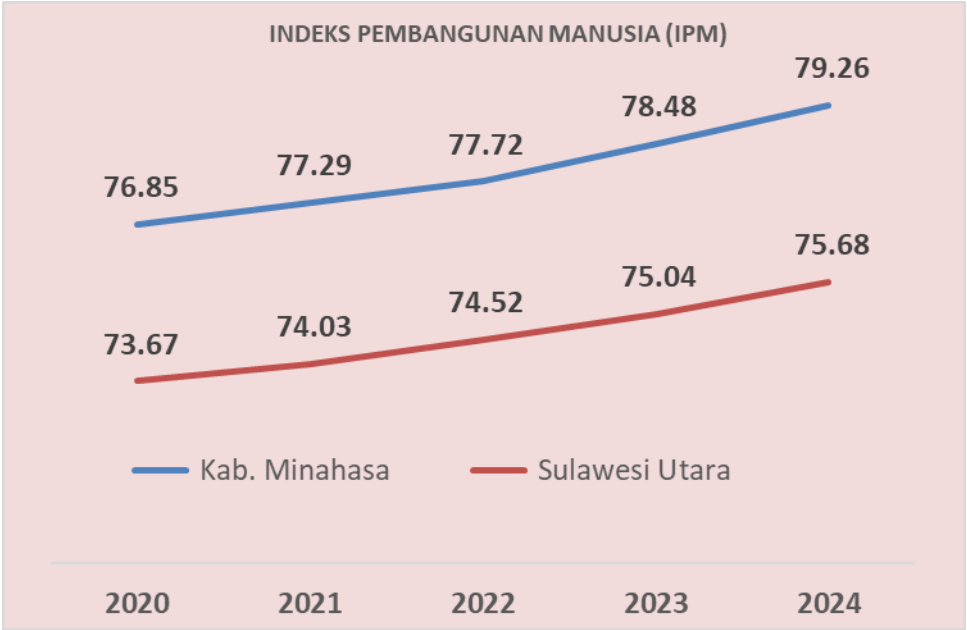


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;

9. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap tahunnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak,Pembangunan Manusia,

Grafik 2,6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024



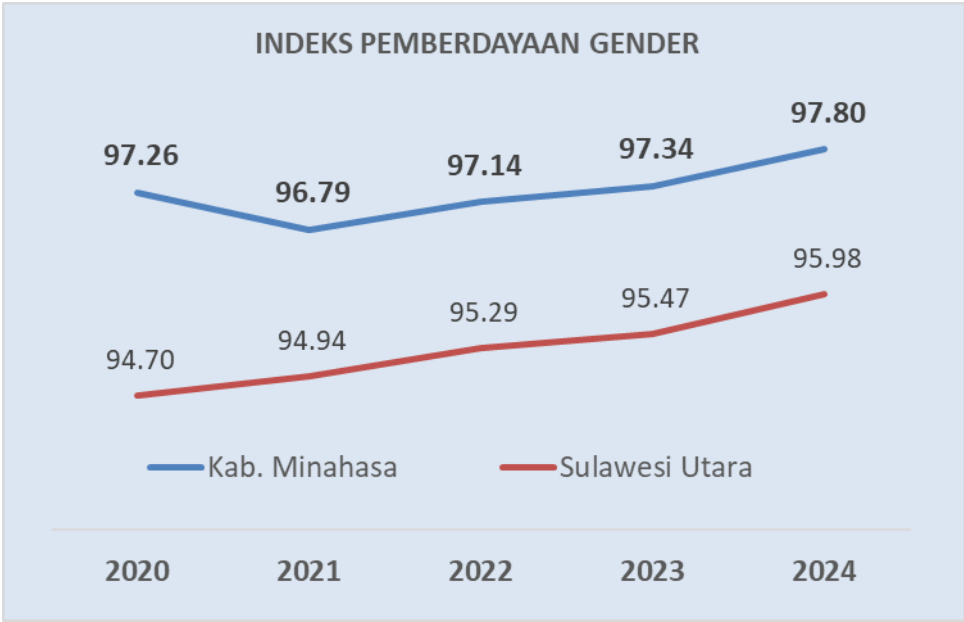
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025; Data diolah

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Minahasa mulai tahun 2020 76.85% terus mengalami kenaikan hingga 2024 menjadi 79.26%. Angka IPM Minahasa berada pada kategori Tinggi dibanding kabupaten lainnya dan berada pada Tingkat ke 3 (Tiga di Provinsi Sulut), juga melampaui Realisasi Angka IPM Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

10. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) Laki-laki dan IPM Perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,

**Grafik 2,7 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
(Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) Tahun 2020-2024
Kabupaten Minahasa dengan Provinsi Sulawesi Utara**



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan perkembangan IPG Kabupaten Minahasa Tahun 2020 sebesar 97.26 dan tahun 2021 turun menjadi 96.79, tahun 2022 naik menjadi 97.14, naik lagi ditahun 2023 menjadi 97.34 dan tahun 2024 menjadi 97.80. Dibandingkan Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa nilai IPG selallu berada di atas nilai IPG Provinsi Sulawesi Utara. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki.

11. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Di Kabupaten Minahasa Angka kriminalitas sempat menurun ditahun 2020 yaitu hanya 0,09 dan terus naik sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 menjadi 0,17, pada tahun 2023 turun menjadi 0,06

Tabel 2.15 Angka Kriminalitas Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2024

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	0	N/A	14
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	3	10	3	6	5	3
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	30	52	25	43	N/A	2
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	165	290	162	270	193	217

5.	Jumlah kasus Pencurian	74	92	40	68	15	42
6.	Jumlah kasus Penipuan	30	52	18	32	13	7
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	302	496	248	583	226	285
9.	Jumlah Penduduk	341.176	343.564	343.800	350.317	351.920	353,6
	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0	0,09	0,14	0,17	0,06	0,81

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja. Tahun 2023

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Di tanah Minahasa terdapat 5 (lima) Suku Besar yang dikenal dengan Pakasan yaitu Toulour, Tountemboan, Tonsea, Tombulu dan Tonsawang dengan karateristik seni dan budaya yang beraneka ragam. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dapat dilaksanakan terhadap indikator-indikator diantaranya jumlah grup kesenian. Jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga masih sangat minim, dengan koefisien 0,0122 untuk klub olahraga dan 0,0308 untuk gedung olahraga, maka pada tahun mendatang perlu dibangun fasilitas gedung olahraga (dapat dilihat pada Tabel 2.16).

Tabel 2.16 Fasilitas Gedung dan Lapangan Olahraga 2018-2024
Kabupaten Minahasa

N o	Cakupan Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah klub olahraga / 10.000 pddk.	0,0097	0,0115	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122
2	Jumlah gedung olahraga/ 10.000 pddk.	0,0073	0,0079	0,0028	0,0308	0,0308	0,0308	0,0308

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Kabupaten Minahasa yang dikenal dengan sebutan daerah atlit. memiliki banyak klub di tahun 2022 yang diantaranya klub bola volly (16), bulutangkis (9), olahraga catur (8), dan sepak bola (35) yang merupakan olahraga yang paling banyak diminati masyarakat. Namun fasilitas gedung dan lapangan olahraga sangat minim dan wadah olahraga KONI belum berjalan sebagaimana mestinya.

Jumlah lapangan olahraga untuk berbagai cabang olahraga ditunjukkan pada Tabel 2.17. Dari tahun 2018-2024 terjadi peningkatan yang cukup tinggi jumlah lapangan olahraga tersebut.

Tabel 2.17 Jumlah Lapangan Olahraga 2018- 2024 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sepak bola	19	20	22	20	20	20	20
2	Bulu tangkis	56	60	62	68	67	69	69
3	Tenis lapangan	8	8	8	8	7	6	6
4	Tenis meja	15	15	15	23	23	53	53
5	Renang	2	2	2	2	2	3	3
6	Atletik	3	3	4	2	2	2	2
7	Tinju	3	3	5	5	5	9	9
8	menembak	1	1	1	1	1	1	1
9	Bola Volly	8	10	12	24	24	29	29
	Jumlah	115	122	131	153	151	192	192

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Jumlah klub olahraga untuk berbagai cabang olahraga ditunjukkan pada Tabel 2.18. Dari tahun 2018-2024 terjadi peningkatan yang cukup tinggi jumlah klub olahraga tersebut.

Tabel 2.18 Jumlah Klub Olahraga 2018 - 2024 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sepak bola	32	32	35	35	35	32	32
2	Bulu tangkis	7	8	8	9	9	15	15
3	Tenis lapangan	4	4	4	4	4	12	12
4	Tenis meja	5	5	8	9	9	24	24
5	Catur	3	3	7	8	8	12	12
6	Renang	1	1	3	2	2	2	2
7	Drum Band	20	27	29	29	29	30	30
8	Atletik	4	4	6	5	6	9	9
9	Tinju	4	4	4	4	4	7	7
10	Menembak	1	1	3	3	3	3	3
11	Bola Volly	8	10	15	16	16	4	4
	Jumlah	89	99	122	124	125	140	140

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Jumlah Gedung kesenian dan grup kesenian tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.19. Grup kesenian paling banyak yaitu grup musik kulintang dari 13 cabang kesenian di Kabupaten Minahasa.

**Tabel 2.19 Jumlah Gedung Kesenian dan Grup Kesenian 2018-2024
Kabupaten Minahasa**

No	Cakupan Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian	56	56	153	182	182	168	48
2	Jumlah gedung Kesenian	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Tabel 2.20 Seni Budaya 2020-2024 Kabupaten Minahasa

No	Nama Cabang Kesenian	REALISASI									
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Grup	Jlh. Gedung Kesenian	Jumlah Grup	Jlh. Gedung Kesenian	Jumlah Grup	Jlh. Gedung Kesenian	Jumlah Grup	Jlh. Gedung Kesenian	Jumlah Grup	Jlh. Gedung
1	Musik Bambu/Klarinet	29		30		30		21		8	
2	Musik Kolintang	30		37		37		40		9	
3	Keroncong Tradisional	0		0		0		0		0	
4	Orkes/Orkest ra	8		10		10		8		1	
5	Group Seruling	0		0		0		0		0	
6	Cakalele/Ka basaran	23		31		31		24		12	
7	Maengket	27		27		27		29		11	
8	Katrili dan Tari Jajar	15		15		15		13		1	
9	Masamper	4		4		4		4		1	
10	Koor/Vocal Group	8		15		15		13		1	
11	Gerak dan Lagu	4		5		5		6		1	
12	Seni Rupa	3		4		4		8		2	
13	Opera/Teate r	2		2		2		2		1	
14	Sholawatan			2		2		0		0	
	Jumlah	153	4	182	4	182	4	168	4	48	4

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan

dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut Aspek Pelayanan Umum ini menjelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek Pelayanan umum difokuskan pada layanan urusan wajib dan urusan pilihan.

a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan

Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Dimana pengetahuan dan pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pengembangan dan meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. yaitu dengan mencanangkan berbagai program seperti program wajib belajar. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Berikut tabel APS di Kabupaten Minahasa (Tabel 2.21).

Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Minahasa

TAHUN	APS-SD/Mi	APS-SMP/MTs
2018	99,47	95,57
2019	99,52	95,67
2020	99,95	95,89
2021	99,66	96,08
2022	99,66	96,08
2023	99,98	96,07

2024	99.99	98,06

Sumber :BPS Kab. Minahasa, Tahun 2024

Pada tahun 2021 APS SD/MI mencapai 99,66 meningkat di tahun 2023 sebesar 99,98 sedangkan APS SMP/MTs sebesar 96,07 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2024 APS SD/MI mencapai 99,99 APS SMP/MTs sebesar 98,06. Tingkat SMA saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi.

2) **Rasio Ketersediaan Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah untuk level SD/MI sejak tahun 2019 sampai 2021 terus meningkat. Namun, pada tahun 2022 dan tahun 2023 menurun, terjadi penurunan dari 342 gedung sekolah menjadi 340.

Untuk SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun. Kemudian di tahun 2021 sampai tahun 2023 terus meningkat. Begitupun dengan jumlah siswa baik SD/MI maupun SMP/MTs mengalami peningkatan di tahun 2023. Rata-rata gedung sekolah SD/MI di Kabupaten Minahasa menampung 79 orang, jika dilihat dari efektifitas proses belajar berdasarkan jumlah siswa per kelas, maka dapat dikatakan memenuhi standar nasional dengan jumlah siswa 20-30 per ruangan

Tabel 2.22 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2018 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI						
	Jumlah Gedung Sekolah	344	344	347	346	342	340
	Jumlah Siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jejang pendidikan SD/MI	27442	27069	27206	27243	26094	27.108
	Rasio	146,88	125,36	127,08	127,55	127,00	126,78
2	SMP/MTs						
	Jumlah Gedung Sekolah	102	102	102	108	108	103

Jumlah Siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jejang pendidikan SMP/MTs	8848	13769	13805	13238	12900	13.755
Rasio	115,28	74,08	73,89	81,59	83,72	91,83

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2024

3) Rasio Ketersediaan Guru

Rasio Ketersediaan guru di Kabupaten Minahasa sebagaimana yang tersaji pada tabel dibawah ini, dimana pada tahun 2019 jumlah guru SD/MI 2.492 guru dengan jumlah siswa 28.112 siswa, yang artinya pada tahun 2019 1 guru SD menangani 11 orang siswa, kemudian pada tahun 2020 jumlah guru SD/MI 2.549 guru dengan jumlah siswa 27.206 siswa, yang artinya 1 orang guru menangani 10-11 siswa. Di tahun 2021 jumlah guru SD/MI menurun menjadi 2.140 dengan jumlah siswa SD/MI yang meningkat menjadi 27.243 siswa, dimana 1 guru menangani 12 siswa. Pada tahun 2022, jumlah guru SD/MI terus menurun menjadi 2.140 guru dengan jumlah siswa menurun juga sebannyak 26.094 siswa; yang artinya 1 guru melayani 12 siswa. Demikian juga pada tahun 2023 ada ketambahan guru dengan SD/MI menjadi 2.613 guru dan jumlah siswa juga bertambah menjadi 27.108 siswa, berarti setiap guru menangani 10 orang siswa.

Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Minahasa

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI						
	Jumlah Guru	2.162	2.492	2.549	2.190	2.140	2.613
	Jumlah Siswa kelompok yang bersekolah di jejang pendidikan SD/MI	30.428	28.112	27.206	27.243	26.094	27.108
	Rasio	710,53	886.45	936,93	803,88	820,11	10,37
2	SMP/MTs						
	Jumlah Guru	1038	1151	1177	1049	1020	1.162
	Jumlah Siswa kelompok yang bersekolah di jejang pendidikan SMP/MI	14582	13925	13238	12900	11580	12.755

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rasio	711.84	826.57	889.11	813,17	880,82	0,09

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Sementara itu, untuk ketersediaan guru SMP/MI pada tahun 2019 jumlah guru sebanyak 1.151 dan jumlah siswa 13.925 siswa, yang artinya pada tahun 2019 1 guru SMP/MTs menangani 12 orang siswa, kemudian pada tahun 2020 jumlah guru SMP/MTs 1.177 guru dengan jumlah siswa 13.238 siswa, yang artinya 1 orang guru menangani 11 siswa. Di tahun 2021 jumlah guru SMP/MTs menurun menjadi 1.049 dengan jumlah siswa SMP/MTs menurun menjadi 12.900, dimana 1 guru menangani 12 siswa, pada tahun 2022, jumlah guru SMP/MTs terus menurun menjadi 1.020 guru dengan jumlah siswa 11.580 siswa; yang artinya 1 guru melayani 11 siswa dan pada tahun 2023 jumlah guru SMP/MTs bertambah menjadi 1.162 guru dengan jumlah siswa juga bertambah menjadi 12.755, berarti 1 orang guru menangani 9 orang siswa. Seperti tampak pada table 2.26.

b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan

Sarana dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Minahasa tersedia dalam mendukung jaringan pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, didukung oleh pelayanan dokter praktek dan pada tingkat terbawah terdapat posyandu yang dikelola berdasarkan peran serta masyarakat. Kabupaten Minahasa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. maka diupayakan pula peningkatan peran aktif masyarakat. diantaranya melalui pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskedes), serta berupaya menciptakan Desa Siaga Aktif.

1) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

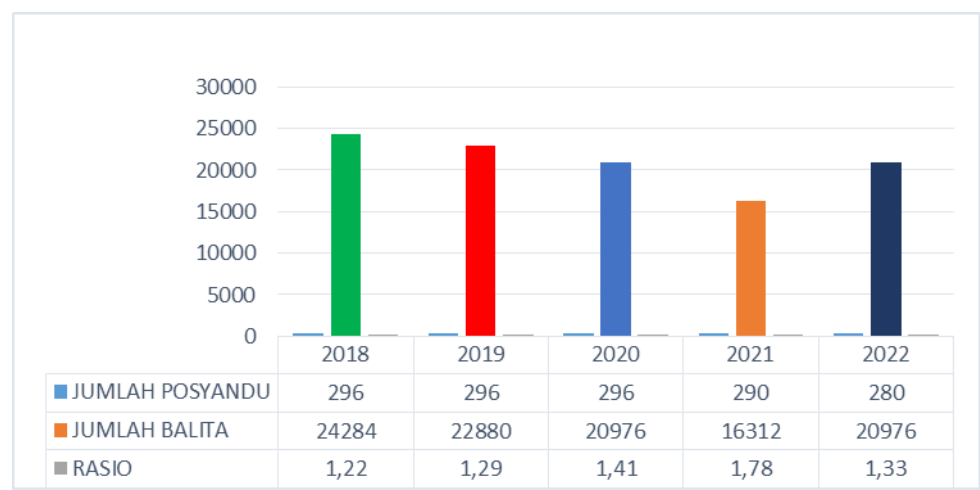
Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2018 Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar di tingkat desa/kelurahan dan Pelaksanaan Posyandu merupakan kegiatan UKBM yang dikelola oleh masyarakat dan dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah, dengan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dan anggaran lain yang tidak mengikat. Sasaran Posyandu berdasarkan layanannya sesuai Permendagri 19 Tahun 2011 adalah bayi,

anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, remaja, usia produktif dan lansia. Sejak dikeluarkannya Permenkes 13 Tahun 2022 pada bulan Mei 2022, Posyandu merupakan indikator Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Adapun definisi operasional Posyandu aktif adalah jika memenuhi kriteria: 1) Melakukan kegiatan rutin Posyandu (pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/remaja/usia produktif/ lansia) 1 kali dalam satu sebulan minimal 8 kali/tahun; 2) Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau remaja; 3) Memiliki minimal 5 orang kader.

Data Kementerian Kesehatan tahun 2022, ada 300.000 lebih posyandu, tetapi masih ditemui kendala dalam mengoptimalkan operasionalnya, sehingga membuat masyarakat kurang tertarik untuk datang ke posyandu. Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi bila Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal) berjalan dengan efektif dan efisien. Peningkatan kualitas layanan di posyandu memerlukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi secara optimal yang dilakukan oleh Pokjanal agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terjamin. Semua ini dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Minahasa pada tahun 2018 sebanyak 296 Posyandu dan jumlah balita 24.284 dengan rasio 1,22, ditahun 2019 rasio posyandu berada pada angka 1,29 dengan jumlah posyandu 296 dan jumlah balita 22.880. Pada tahun 2020 jumlah posyandu di kabupaten minahasa masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 296 dengan jumlah balita 20.976 dan rasio 1,41. Tahun 2021 jumlah posyandu menurun menjadi 290 posyandu dengan jumlah balita 16.312 dan rasio 1,78. Pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah posyandu hanya 280 dan jumlah balita sebanyak 20.976 dengan rasio per satuan balita turun menjadi 1,33, mengalami peningkatan pada tahun 2023, dimana jumlah Posyandu sebanyak 287, Balita sasaran 20.978 dengan rasio posyandu per satuan balita 1.36.

Grafik 2.22 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

2) **Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori, yaitu Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap. Data Profil Kesehatan tahun 2023, jumlah Puskesmas di Indonesia tahun 2022 adalah 10.374 Puskesmas, yang terdiri dari 4.302 Puskesmas rawat inap dan 6.072 Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 10.292, dengan jumlah Puskesmas rawat inap sebanyak 4.201 Puskesmas dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 6.091 Puskesmas. Berdasarkan data Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka tahun 2023, di Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2022 sebanyak 198 Puskesmas, yang terdiri dari 100 Puskesmas rawat inap dan 98 Puskesmas non rawat inap. Jumlah Puskesmas meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 196 Puskesmas, yang terdiri dari 100 Puskesmas rawat inap dan 98 Puskesmas non rawat inap.

Di Kabupaten Minahasa jumlah puskesmas telah mengalami perubahan dimana sebelumnya pada tahun 2019 berjumlah 22 namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menjadi 23. Pada tahun 2023 sudah bertambah menjadi 25 Puskesmas. Dengan demikian seluruh kecamatan di Kabupaten Minahasa sudah memiliki Puskesmas. Sedangkan untuk klinik pada tahun 2019-2021

jumlahnya tetap, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan, tahun 2023 tetap berjumlah 8 unit. Demikian juga untuk jumlah Pustu sejak tahun 2018-2024, jumlahnya tetap sebanyak 38 unit. Jelas terlihat pada (Tabel 2.24)

**Tabel 2.24 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2018 – 2024
Kabupaten Minahasa**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas	22	22	23	23	23	23	25
2.	Jumlah Klinik	9	11	11	11	8	8	8
3.	Jumlah Pustu	42	38	38	38	38	38	40
4.	Jumlah Penduduk	338.368	341.176	343.954	343.800	350.317	350.317	331
5.	Rasio Puskesmas / 100.000 pdk	6,50	6,45	6,69	6.62	6,57	6,57	7,56
6.	Rasio Klinik / 100.000 pdk	2,66	3,22	3,20	3.17	2,28	2,28	2,41
7.	Rasio Pustu / 100.000 pdk	12,41	11,14	11,05	10.94	10,85	10,85	12,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk mengacu pada standar jumlah puskesmas yang ideal untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk di suatu wilayah. Menurut laporan Kementerian Kesehatan pada 2021, rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan adalah **sebesar 1,0**, yaitu minimal satu puskesmas di satu kecamatan. Kabupaten Minahasa terdiri dari 25 kecamatan dan 23 Puskesmas, berarti masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas, tetapi saat ini dalam persiapan untuk pembangunan 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Tondano Barat dan Puskesmas Kawangkoan Baru.

Berdasarkan data jumlah penduduk diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 6.50 persen rasio puskesmas dan pustu per 100.000 penduduk mengalami fluktuasi selang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Secara rinci tahun 2023 rasio puskesmas/100.000 penduduk turun menjadi 6,57 dan rasio klinik/100.000 penduduk turun menjadi 2,28. Sedangkan rasio putsu/100.000 penduduk menjadi 10,85. (Tabel 2.25).

Tabel 2.25 Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Minahasa

No .	Kecamatan	Jumlah Pendudu k	Puskesmas		Klinik		Pustu	
			Jumla h	Rasi o	Jumla h	Rasio	Jumla h	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 x 1000)	(6)	(7=6/ 3 x 1000)	-8	(9=8/ 3 x 1000)
1	Eris	11270	1	0,08 9	0	0	1	0,089
2	Kakas	12166	1	0	0	0	1	0,082
3	Kakas Barat	10847	1	0,09 2	0	0	3	0,277
4	Kawangkoa n	10112	1	0,09 9	0	0	1	0,099
5	Kawangkoa n Barat	8732	1	0,11 5	0	0	1	0,115
6	Kawangkoa n Utara	8658	1	0,11 6	0	0	1	0,116
7	Kombi	10493	1	0,09 5	0	0	5	0,477
8	Langowan Barat	16843	1	0,05 9	0	0	2	0,119
9	Langowan Selatan	7979	1	0,12 5	0	0	2	0,251
10	Langowan Timur	12874	1	0,07 8	1	0,078	0	0
11	Langowan Utara	8532	1	0,11 7	0	0	1	0,117
12	Lembean Timur	8183	1	0,12 2	0	0	1	0,122
13	Pineleng	27295	1	0,03 7	1	0,037	1	0,037
14	Mandolang	20148	1	0,04 9	0	0	1	0,049
15	Remboken	12355	1	0,08 1	0	0	2	0,162
16	Sonder	19077	1	0,05 2	0	0	2	0,105
17	Tombariri	17674	1	0,05 7	0	0	3	0,169
18	Tombariri Timur	10279	1	0,09 7	0	0	2	0,195
19	Tombulu	17151	1	0,05 8	0	0	4	0,233
20	Tompaso	7271	1	0,13 8	0	0	1	0,138
21	Tompaso Barat	9038	1	0,11 1	0	0	2	0,221
22	Tondano Barat	19542	1	0,05 1	3	0,154	2	0,102

23	Tondano Selatan	16544	1	0,06	0	0	1	0,06
24	Tondano Timur	15044	1	0,066	1	0,066	0	0
25	Tondano Utara	12709	1	0,079	2	0,157	0	0
	Jumlah	330.843	25	2,125	8	0,492	40	3,335

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2024

3).Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain menyediakan upaya kesehatan yang bersifat upaya kuratif dan rehabilitative, rumah sakit juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan Kesehatan rujukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitn, rumah sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diklasifikasikan atau dikelompokkan kelasnya berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas Kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.

Rumah sakit yang terintegrasi di Kementerian Kesehatan diselenggarakan oleh berbagai instansi atau Lembaga, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, BUMN, daan swasta. Tabel berikut menunjukkan pengelompokkan rumah sakit dan data rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit/100.000 penduduk. Berikut ini ditampilkan data sarana prasarana kesehatan di kabupaten Minahasa (Tabel 2.26).

Tabel 2.26 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Minahasa

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah RSU (Pemerintah)	1	1	1	1	1	2	1
2.	Jumlah RS Jiwa / Paru dan Penyakit Lainnya	0	0	0	0	0	1	1
3.	Jumlah RS AD / AD /	0	0	0	0	0	0	0

	AU / AL / POLRI							
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	4	4	5	3	3
6.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	4	4	3	3	6	6	6
7.	Jumlah Penduduk	338.368	341.176	343.564	343.800	350.317	350.317	330.843
	Rasio / 10.000 Penduduk	1,18	1,17	1,45	0.26	0,17	0,17	0,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Dalam 5 (lima) tahun memang tidak terdapat peningkatan jumlah RSU (pemerintah). RS Daerah. dan RS Swasta. akibatnya rasio RS per 10.000 penduduk mengalami kenaikan dari 1,00 pada tahun 2018 menjadi 1,45 di tahun 2020, namun turun menjadi 0,26 di tahun 2021 dan 0,17 di tahun 2022.

Total jumlah rumah sakit di Kabupaten Minahasa masih stagnan dan sudah memenuhi standard minimal, hanya memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Tabel 2.26).

Tipe rumah sakit yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas Kesehatan, sarana penunjang dan sumber daya manusia menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Kabupaten Minahasa tahun 2023 sebanyak 6 RS dengan tipe C sebanyak 4 RS, 1 RS Tipe D dan 1 RS tipe B.

Dalam RPJMD 2018-2023, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan Kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjut. Indikator yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi.

Berdasarkan Permenkes nomor 13 tahun 2022 peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan rujukan dilakukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan sistem jejaring rujukan serta kemitraan. Data pada table berikut menunjukkan bahwa semua RS di Kabupaten Minahasa sudah terakreditasi paripurna.

**Tabel 2.27. Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Minahasa
Tahun 2024**

NO	NAMA	TIPE	AKREDITASI
1	RS Umum Dr. Sam Ratulangi	C	PARIPURNA
2	RS Siloam GMIM Sonder	C	PARIPURNA
3	RS Budi Setia	C	PARIPURNA
4	RS Umum Noongan	C	PARIPURNA
5	RS Dr. J. H. Awaloei	B	PARIPURNA
6	RS Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang	B	PARIPURNA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi 6 rumah sakit di Kabupaten Minahasa mendapatkan akreditasi paripurna, yaitu lulus tingkat sempurna dari 15 standar akreditasi. Rumah Sakit Dengan TIPE B yaitu RS Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang dimana Rumah sakit ini merupakan Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medic spesialis, 8 spesialis lain selain spesialis dasar dan 2 sub spesialis dasar.

Rumah sakit Dengan TIPE C diantaranya RS Umum Dr. Sam Ratulangi, RS Siloam GMIM Sonder, RS Umum Noongan, RS Dr. J.H. Awaloei, dimana Rumah Sakit dengan TIPE C merupakan Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medic spesialis. Sementara untuk rumah sakit dengan Tipe D yaitu RS Budi Setia Langowan, dimana Rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 2 spesialis dasar. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi pasien dari pelayanan sub-standar melalui pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur, mulai dari sumber daya manusia, administrasi dan komunikasi, peralatan medis, hingga fasilitas penunjang lain serta upaya peningkatan mutunya. Dapat dilihat pada tabel diatas.

**Tabel 2.28 Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Minahasa
Tahun 2018-2024**

NAMA PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOMPASO	MADYA	-	-	-	-	PARIPURNA	-
SONDER	MADYA	-	-	-	0	PARIPURNA	-
TONSEA LAMA	MADYA	-	-	-	-	PARIPURNA	-
TATELI	MADYA	-	-	-	-	Utama	-
							-
							-
LOLAH	-	MADYA	-	-	-	PARIPURNA	-
PAPAKELAN	-	DASAR	-	-	-	MADYA	-
KOYA	-	MADYA	-	-	-	PARIPURNA	-
KAKAS	-	MADYA	-	-	-	PARIPURNA	-
TANDENGAN	-	DASAR	-	-	-	UTAMA	-
WOLAANG	-	UTAMA	-	-	-	PARIPURNA	-
SERETAN	-	DASAR	-	-	-	MADYA	-
WALANTAKAN	-	UTAMA	-	-	-	PARIPURNA	-
TUMARATAS	-	-	-	-	-	UTAMA	-
KOMBI	-	-	-	-	-	MADYA	-
MANEMBO	-	-	-	-	-	MADYA	-
KAWANGKOAN BARAT	-	-	-	-	-	MADYA	-
KAKAS BARAT	-	-	-	-	-	UTAMA	-
TANAWANGKO	-	-	-	-	-	UTAMA	-
TOMBULU	-	-	-	-	-	UTAMA	-
KAWANGKOAN	-	-	-	-	-	UTAMA	-
REMBOKEN	-	-	-	-	-	UTAMA	-
PINELENG	-	-	-	-	-	PARIPURNA	-
TOMPASO BARAT	-	-	-	0	-	-	UTAMA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2025

Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan. Pada tahun 2019, Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Minahasa memiliki 2 utama, 3 madya, dan 3 dasar. Dimana 2 unit Puskesmas berstatus Utama diantaranya; Puskesmas Wolaang dan Puskesmas Walantakan, 3 unit Puskesmas dengan status madya diantaranya : Puskesmas Lolah, Puskesmas Koya, dan Puskesmas Kakas, dan 3 unit

Puskesmas dengan status dasar adalah : Puskesmas Papakelan, Puskesmas Tandengan dan Puskesmas Seretan. Pada Tahun 2020 dan 2021, tidak ada pelaksanaan akreditasi terhadap puskesmas dikarenakan oleh adanya pandemic covid-19. Tahun 2023 terdapat 9 unit Puskesmas dengan status paripurna, utama 8 unit dan madya 5 unit Puskesmas, seperti tampak pada table 2.31 .

4). Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada selebihnya dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Minahasa Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jmlh Penduduk (Ribu Jiwa)	Jmlh Dokter*	Rasio
1	2	3	4	(5=4/3)
1	TONDANO BARAT	19542	3	15.351
2	TONDANO TIMUR	15044	4	26.588
3	ERIS	11270	3	26.624
4	KOMBI	10493	2	19.062
5	LEMBEAN TIMUR	8183	3	36,67
6	KAKAS	12166	3	24,66
7	TOMPASO	7271	3	41,271
8	REMBOKEN	12355	3	24.283
9	LANGOWAN TIMUR	12874	3	23.304
10	LANGOWAN BARAT	16843	1	5,937
11	SONDER	19077	3	15.725
12	KAWANGKOAN BARU	10112	2	19.778
13	PINELENG	27295	5	18.318
14	TOMBULU	17151	3	17.491
15	TOMBARIRI	17674	2	11.316
16	TONDANO UTARA	12709	3	23.607
17	LANGOWAN SELATAN	7979	2	25.068
18	TONDANO SELATAN	16544	4	24.177
19	LANGOWAN UTARA	8532	3	35.161
20	KAKAS BARAT	10874	3	27.593
21	KAWANGKOAN UTARA	8658	5	57.770
22	KAWANGKOAN BARAT	8732	2	22.904
23	MANDOLANG	20148	3	14.889
24	TOMBARIRI TIMUR	10279	2	19.459
25	TOMPASO BARAT	9038	3	33.200
	Jumlah	330843	73	22,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. 2025

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter di Kabupaten Minahasa belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan (dapat dilihat pada Tabel 2.30).

Tabel 2.30 Jumlah Dokter Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2024

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1.	Jumlah Dokter	78	79	79	77	77	112	112	73
2.	Jumlah Penduduk	338.368	341.176	343.564	343.800	350.317	345.973	345.973	330,843
3.	Rasio	0.230	0.231	0.229	0.223	0.223	<u>32.37</u> 100.000	<u>32.37</u> 100.000	<u>22,06</u> 100000

5). Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa terus bertambah dari tahun ke tahun walaupun terdapat beberapa unsur yang belum mencapai standar (Tabel 2.31).

Tabel 2.31 Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2024

No	Sarpras	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokter Spesialis	21	-	-	85	73	23	22
2.	Dokter Umum	10	67	129	168	191	112	80
3.	Dokter Gigi	7	12	15	18	16	12	16
4.	Perawat	306	177	537	660	567	358	302
5.	Bidan	122	134	202	234	222	178	172
6.	Tenaga Farmasi	42	17	20	35	59	22	20
7.	Apoteker	-	-	39	28	14	13	13
8.	Asisten Apoteker	-	-	-				
9.	Sarjana Kesmas	24	35	74	44	41	49	26
10.	Sanitarian	44	27	30	44	33	34	31
11	Tenaga Gizi	23	24	20	28	17	26	24
	Jumlah Tenaga Medis	556	691	493	1.066	1.233	827	706

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Minahasa tahun 2019 sebanyak 691 orang dan berkurang menjadi 493 tenaga medis dan pada tahun 2020 kemudian kembali meningkat menjadi 1066 tenaga medis pada tahun 2021, dan terus naik hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 1233 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang relative besar

sehingga menjadi 827 orang . Berdasarkan data yang ada dari 10 jenis tenaga medis dan paramedis terdapat 7 jenis tenaga yang berkurang. Dan pertambahan tenaga pada tenaga sarjana hanya 8 orang, tenaga sanitarian bertambah 1 orang dan tenaga gizi bertambah 9 orang. Seperti tampak pada Tabel 2.31 diatas

Data pada tabel 2.32 menunjukkan bahwa untuk bidang kesehatan , rasio RS per satuan penduduk tetap dibandingkan tahun sebelumnya (2022). sebaliknya terjadi peningkatan pada rasio dokter per satuan penduduk dan angka harapan hidup. Berikut ini ditampilkan tabel rasio sarana prasarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.32 Rasio Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan Tahun 2018 s.d 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Posyandu/Sat Balita	1,22	1,49	1,41	1.78	0,01		16,742
2	Rasio RS/Satuan Pddk	1,18	1,27	1,45	1.44	1,71	1,71	0,02
3	Rasio Dokter/Satuan pddk	1,27	1,26	4,18	0.78	0,22	<u>32.37</u> 100.000	<u>22,06</u> 100000
4	Rasio Tenaga Keperwtan/Sat pddk	3,1	3,1	15,6	1.9	1,0	<u>103.47</u> 100	<u>91.32</u> 100
5	Angka Harapan Hidup	70,67	70,98	71,08	71	71,49	71,82	75.22

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hal utama untuk kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, salah satu urusan yang melaksanakan penyediaan infrastruktur adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang didalamnya meliputi Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang.

1) Jalan

Pengukuran kinerja Jalan Kabupaten Minahasa didasarkan pada data jalan sesuai Surat Keputusan Bupati. Dalam Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas –Ruas jalan Kabupaten Minahasa yang diubah terakhir dengan Keputusan Bupati

Nomor 737 Tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat 133 Ruas jalan Kewenangan Kabupaten Minahasa dengan panjang 880,42 Km. Sebelumnya dalam Keputusan terdahulu, panjang jalan kabupaten adalah 681,15 Km. Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan pada beberapa indikator makro yaitu:

- a) Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan
- Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Berdasarkan hasil perhitungan oleh Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Minahasa terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2019 tingkat kemantapan jalan berada pada angka 65,16 % dan di tahun 2022 meningkat menjadi 78,17% dari total panjang jalan kabupaten yaitu 681,15 Km, yang merupakan hasil dari penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun Pada tahun 2023, dengan adanya perubahan panjang jalan Kabupaten, maka tingkat kemantapan jalan menjadi 64,51 %. Adapun perkembangan tingkat kemantapan jalan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2024

Tahun	Tingkat kemantapan jalan (%)
2018	61,35
2019	65,16
2020	69,42
2021	70,22
2022	78,17
2023	64,51*
2024	62.43

Sumber : Dinas PUPR Kab. Minahasa, 2025
*Panjang Jalan 880,42 Km, Sesuai SK Bupati No. 737/2023

- b) Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi
- Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Kondisi jalan sampai tahun 2023 adalah kondisi baik 528,22 km, sedang 39,75 km, rusak ringan 110,02 km dan rusak berat

202,44 km (Tabel 2.36).

Tabel 2.36 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Minahasa

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)						
	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024
Kondisi Baik	313,6	326,1	360,1	407.81	493.19	528,22	464,37
Kondisi Sedang	103,95	117,75	112,76	70.479	52.9	39,75	85,31
Kondisi Rusak	94,7	154,5	124,5	104.88	15.14	110,02	137,03
Kondisi Rusak Berat	168,90	82,80	83,79	97.973	119.92	202,44	193,71
Total Panjang Jalan	681,15	681,15	681,15	681.15	681.15	880,42	880,42

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, 2025

**Capaian sesuai SK 737/2023*

Indikator perubahan kondisi jalan per tahun disebabkan oleh kelebihan kapasitas muatan, cuaca, dan peningkatan arus lalu lintas yang diperkirakan sebesar 5% per tahun. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Dari Data tersebut, menunjukkan bahwa jaringan jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang adalah 64,51%.

1)Sumber Daya Air dan Irigasi

Sumberdaya air yang ada di Kabupaten Minahasa yaitu sungai, Danau, dan Irigasi. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan wilayah sungai, maka kewenangan pengelolaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Minahasa pada Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Mianga dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan pada Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo oleh Provinsi Sulawesi Utara. Kewenangan Kabupaten Minahasa hanya dilaksanakan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

Sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 luas daerah irigasi yang ada di Kabupaten Minahasa adalah 8.429 ha, terdiri

dari kewenangan Provinsi Sulawesi Utara 1.286 ha yaitu D.I. Noongan, kewenangan Kabupaten Minahasa 7.143 ha yang terdiri dari 26 Daerah Irigasi seluas 5.235 ha dan luas sisanya sebagai irigasi desa. Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Minahasa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Minahasa dan Potensi luas arel layanan.

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Potensi (Ha)
1	D.I Eris	103
2	D.I Kayuui	206
3	D.I Kembe	90
4	D.I Kulo	233
5	D.I Munte	280
6	D.I Niahwunan	210
7	D.I Nuay	169
8	D.I . Panasen Hilir	320
9	D.I Panasen Hulu	108
10	D.I Rambunan	220
11	D.I Ranointenga-Sowa Ampera	471
12	D.I Ranoweleng	42
13	D.I Saluasem	60
14	D.I Seda Mata	320
15	D.I Sendow	196
16	D.I Taler	936
17	D.I Tombakar	804
18	D.I Tompasso	80
19	D.I Kawe	40
20	D.I Kolongan Komb	80
21	D.I Makalonsow	60
22	D.I Naa	17
23	D.I Ranoilokon	47
24	D.I Sasanm Beringin	50
25	D.I Soklat	39
26	D.I Taraitak	54
	Jumlah Total	5.235

Sumber : Permen PUPR No. 14 Tahun 2015

Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya (Tabel 2.38) di Kabupaten Minahasa adalah 9,69. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan irigasi relatif cukup untuk melayani seluruh lahan budidaya, hanya saja layanannya sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringannya.

Tabel 2.38 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Minahasa

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan
1	Jaringan Primer	23.964 m
2	Jaringan Sekunder	42.459 m
3	Jaringan Tersier	6.929 m
4	Luas Lahan Budidaya	7.570 Ha
	Rasio	9.69

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, 2024

Dari total panjang jaringan irigasi, maka jaringan irigasi sekunder lebih panjang dari jaringan irigasi primer dan tersier. Kondisi jaringan Irigasi tersebut juga akan mempengaruhi layanan ketersediaan air pada areal pertanian yang dilayaninya. Sesuai data Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Kondisi fisik jaringan irigasi di Kabupaten Minahasa digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39 Persentase Kondisi Fisik Jaringan Irigasi di kabupaten Minahasa Tahun 2019-2024

No	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	70,00	59,37	47,96	50,00	19,89	22,66
2	Rusak Ringan	8,00	-	41,03	5,00	6,20	6,09
3	Rusak Sedang	5,00	-	6,29	14,00	22,83	22,4
4	Rusak Berat	17,00	40,63	4,72	31,00	51,08	48,85
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas PUPR Kab. Minahasa, 2025

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa kondisi jaringan di Daerah Irigasi yang ada cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 masih terdapat 70 % jaringan yang dalam kondisi baik, tetapi di akhir tahun 2023, hanya 19,89 % jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik. Hal ini terjadi karena perbedaan metode survey yang dilakukan, dimana pada tahun 2023 data sudah menggunakan hasil survey e-PAKSI dan sebelumnya masih menggunakan metode manual. Penurunan kondisi berdasarkan hasil survey e-PAKSI tidak hanya memetakan kondisi fisik bangunan irigasi tetapi juga kelengkapan bangunan irigasi yang tersedia. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya pemeliharaan dan adanya pengikisan oleh air atau terjadi bencana, untuk itu perlu perhatian agar kinerja layanan irigasi dapat terpenuhi. Permasalahan irigasi pada umumnya adalah belum

optimalnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi karena kondisi jaringan irigasi yang rusak dan menurunnya tingkat layanan serta belum efisiennya pengelolaan irigasi.

2) Air Minum dan Air Limbah Domestik

Layanan air minum dan air limbah merupakan salah satu layanan urusan wajib di Dinas PUPR dan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya Penerapan SPM di bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.40 SPM Kabupaten Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis SPM	Indikator Pengukuran
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Penerima Pelayanan Dasar adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum, juga yang berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

a. Air minum

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa

menunjukkan kinerja cukup baik dalam penyediaan air minum, meskipun berfluktuatif dimana sebagian besar penduduk sudah mendapatkan air minum yang layak.. Tabel 2.41 berikut menjelaskan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Minahasa selang tahun 2018-2023. Pada tahun 2019 Rumah tangga yang berakses air minum layak sebesar 90,96%, dan Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 88,01% dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 91,68% dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 91,12%.

Tabel 2.41 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan sumber Air Minum Layak di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 –2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	72,62	90,96	90,33	88,01	91,68	91,12

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2024, BPS 2024

Kemudian dilihat dari sumber air yang digunakan, sesuai data BPS maka tidak semua rumah tangga yang berakses air minum memiliki akses yang berkelanjutan untuk mendapatkan air minum layak. BPS mendefinisikan sumber air minum layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Pada tabel 2.42 sebaran rumah tangga dengan jenis sumber air minum yang digunakan menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang sumber air minumnya termasuk kategori tidak layak/tidak berkelanjutan dimana masih ada yang memanfaatkan air dari sumur dan mata air yang tak terlindungi.

Tabel 2.42 Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Utama Untuk Minum di Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No.	Sumber Air Minum	Persentase
1	Leding(Perpipaan)	11,58

2	Pompa	10,18
3	Air Dalam Kemasan	31,16
4	Sumur Terlindung dan tak terlindung	28,62
6	Mata Air terlindung dan tidak terlindung	17,03
8	Lainnya	1,43
	Jumlah	100

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2024, BPS (diolah)

Hal ini berarti walaupun persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum terus mengalami peningkatan, namun masih terdapat masyarakat yang sumber air minumnya tidak layak yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Selain pengukuran akses air minum layak yang dilakukan oleh BPS, Dinas PUPR Kabupaten Minahasa juga melakukan pengukuran indikator SPM sebagai salah satu indikator kinerjanya. Indikator yang digunakan adalah Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Capaian Kinerja SPM tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja SPM Air Minum Kabupaten Minahasa

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,05%	82,48%	83,66%	84,25%	85,50%	85,75%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, 2023.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terus meningkat, hingga pada tahun 2023 berada pada angka 85,50% yang berarti terjadi peningkatan sebesar 4,45 % dari tahun 2019 yang masih pada angka 81,05 %.

Capaian angka akses air minum layak versi BPS dan Dinas PUPR

Kabupaten memang sedikit berbeda yang mungkin disebabkan perbedaan dalam data rumah tangga namun pada dasarnya akses terhadap air minum layak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penyediaan air minum di Kabupaten Minahasa dilaksanakan oleh PDAM, SPAM desa, kelompok masyarakat, ataupun secara mandiri oleh masyarakat. Layanan PDAM dilaksanakan melalui 20 SPAM yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 124.492 jiwa, pada 8.858 Sambungan Rumah (SR).

Untuk capaian akses air minum aman, di Kabupaten Minahasa belum terdapat data yang valid karena sejauh ini belum dilakukan lagi pengujian mutu air pada sumber-sumber air minum yang ada, dan belum tersedia layanan air siap minum kecuali air dalam kemasan. Adapun RPJMN Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa di tahun 2024 Indonesia akan mencapai target akses air minum 100%, dan target sanitasi 90% akses layak dan 15% akses aman, serta BABs 0%.

a. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestic. Pelayanan pengolahan air limbah domestic adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestic yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik SPALD dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dimana fasilitas tersebut di gunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau tersambung dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Utara (2024) Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak di Kabupaten Minahasa tahun 2019 ada;ah 79,21%, meningkat pada tahun 2020 menjadi 88,03%. Tahun 2021 angka

ini kembali menurun menjadi 81,09% dan akhirnya kembali naik di tahun 2022 menjadi 90,18 % dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi 90,24. Secara lengkap perkembangan akses sanitasi layak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak
Tahun 2018-2023**

Indikator		Capaian Per Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah berakses layak	Tangga sanitasi	83,34	79,21	88,03	81,09	90,18	90,24

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2024, BPS 2023

Selanjutnya terdapat pula Kinerja SPM layanan air limbah domestic kabupaten Minahasa menurut Dinas PUPR yang diukur dengan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic (Tabel 2.45). Dari tabel ini memberikan informasi bahwa pada tahun 2018 rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik sebesar 68,3% terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi 70,79%.

Tabel 2.45 Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 s.d Tahun 2023.

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	69,1%	69,78%	70,06%	70,79%	70.80%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Kualitas pelayanan dengan akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Di Kabupaten Minahasa sebenarnya sudah terbangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLT), yang merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya

mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sayangnya IPLT ini belum beroperasi dan status keberadaannya sedang dalam proses untuk serah terima pengelolaan. Karena IPLT belum beroperasi, maka kinerja air limbah akses aman belum terlaksana.

Pada dasarnya capaian kinerja sanitasi/air limbah domestik ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

4). Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi aspek-aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan penataan ruang. Saat ini arahan resmi pemanfaatan ruang Kabupaten Minahasa sesuai Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2034 yang sedang dalam proses revisi. Revisi RTRW ini sesuai amanat peraturan perundang-undangan dapat dilakukan lima tahun sekali. Adapun Revisi RTRW Kabupaten Minahasa saat ini berada pada tahapan persiapan pembahasan Lintas Sektor dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka penetapan Revisi RTRW tersebut.

Dalam Perda RTRW 1 Tahun 2014 memuat Rencana struktur, Pola ruang, Kawasan Strategis serta arahan pemanfaatan dan pengendaliannya. Rencana struktur ruang sesuai Perda RTRW Kab. Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 mengatur hal-hal berikut :

- 1. Rencana sistem Perkotaaan , terdiri dari
 - a. Kota dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kota Tondano
 - b. Kota dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawangkoan (Kecamatan Kawangkoan), Kota Langowan (Kecamatan Langowan Timur, Langowan Barat, Langowan Selatan, Langowan Utara), Eris, Kakas (Kecamatan Kakas dan Kakas Barat), Remboken, Kombi, Pineleng, Mandolang, Tanawangko, Sonder dan Tompaso (Kecamatan Tompaso dan Tompaso Barat).

- c. Kota dengan fungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu ibu kota kecamatan yang melayani wilayah hinterlandnya yaitu Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Tombulu, Kecamatan Tombariri Timur, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kawangkoan Utara
- d. Kota dengan fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu desa-desa pertumbuhan yang melayani wilayah/desa di sekitarnya terdiri atas desa-desa pusat pertumbuhan Walantakan Kecamatan Langowan Utara, Manembo dan Atep Kecamatan Langowan Selatan, Noongan dan Tumaratas Kecamatan Langowan Barat, Leilem Kecamatan Sonder, Lemoh Kecamatan Tombariri Timur, dan Mokupa Kecamatan Tombariri, Sea Kecamatan Pineleng, Koha Kecamatan Mandolang, Rumengkor Kecamatan Tombulu, Kasuratan dan Pulutan Kecamatan Remboken, Kayuwatu Kecamatan Kakas, Passo Kecamatan Kakas Barat, Rerer dan Kolongan Kecamatan Kombi, Seretan Kecamatan Lembean Timur, Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat, Tondegesan Kecamatan Kawangkoan, dan Pinabetengan Kecamatan Tompaso

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama, meliputi :

- Rencana Jaringan Transportasi Darat :
 - Penetapan Fungsi Jaringan Jalan
 - Rencana Pengembangan Prasarana Lalu Lintas
 - Jaringan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- Rencana Pengembangan Perkeretaapian
- Rencana Pengembangan Transportasi Laut
- Rencana Pengembangan Transportasi Udara

3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi :

- Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Listrik
- Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
- Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
- Rencana Pengembangan Jaringan Pengelolaan Lingkungan

4. Rencana Pengembangan Sarana Sosial Ekonomi, meliputi :

- Rencana Pengembangan Sarana Perumahan
- Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan
- Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan
- Rencana Pengembangan Sarana Peribadatan
- Rencana Pengembangan Sarana Perdagangan dan Niaga

- Rencana Pengembangan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Rencana Pengembangan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi
- Rencana Pengembangan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Selanjutnya, Rencana Pola Ruang memuat Rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Selain itu ditetapkan pula Kawasan Strategis di Kabupaten Minahasa.

Tingkat ketaatan terhadap RTRW merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang tata ruang. Sesuai data dari Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, capaian indikator ini menunjukkan tren positif atau meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46 Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Indikator	Capaian Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	71,05%	73%	74%	77%	75%	74%
Prosentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	n.a	n.a	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, 2023

Hasil yang terlihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, Kabupaten Minahasa sudah berpedoman pada RTRW, namun masih terdapat pelanggaran, tingkat ketaatan dari tahun 2019 hingga 2022 bergerak naik, sayangnya di tahun 2023 dan 2024 justru mengalami penurunan. Hal ini berarti terdapat kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukkan dalam RTRW. Sementara untuk indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang terhadap dokumen ijin lokasi/KKPR yang mencapai 100%. Dilihat dari kedua indikator tersebut, terindikasi ada kegiatan yang tidak memiliki ijin dan tidak sesuai dengan tata ruang.

Hal penting lainnya di bidang penataan ruang yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur secara

detail arahan pemanfaatan ruang di suatu kawasan. Hingga tahun 2022 sudah terdaapat dua RDTR yang ditetapkan di Kabupaten Minahasa yaitu RDTR Kawasan Pariwisata Tombariri dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 dan RDTR Kawasan Sekitar Danau Tondano dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023. Ketersediaan RDTR ini merupakan salah satu dukungan untuk menunjang peningkatan investasi di Kabupaten Minahasa.

Dukungan penyelenggaraan penataan ruang yang baik juga dapat dilihat dari bangunan yang ber-IMB. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur perijinan yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Minahasa sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	2.628	3.232	4.010	5.840	5.959	6.397	7194
2	Jumlah Bangunan	92.645	93.249	94.043	94.687	95.334	100.057	119367
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,028	0.035	0.043	0,0617	0.063	0.064	0,060

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar dan dalam perizinan bangunan gedung dimana rasionya meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,035 menjadi 0,064 di tahun 2023. Peningkatan ini memang relatif kecil, namun bergerak positif setiap tahun., yang berarti terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB.

Data Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan menurut Kecamatan

dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut nampak bahwa di tahun 2021 rasio tertinggi ada di Kecamatan Tombulu diikuti oleh Kecamatan Pineleng. Sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Langowan Selatan. Dapat dipahami karena Kecamatan Pineleng dan Tombulu berbatasan dengan wilayah Kota Manado yang merupakan kawasan yang pertumbuhannya cepat. Adapun IMB sat ini sudah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Migrasi IMB menjadi PBG yang ditetapkan per 2 November 2021 dilakukan untuk menindaklanjuti UU Cipta Kerja yang merangkum semua peraturan agar lebih ringkas dan tidak tumpang tindih.

Tabel 2.48 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan Ber-IMB	Rasio Bangunan ber-IMB	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan Ber-IMB	Rasio Bangunan ber-IMB	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan Ber-IMB	Rasio Bangunan ber-IMB	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan Ber-IMB	Rasio Bangunan ber-IMB	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan Ber-IMB	Rasio Bangunan ber-IMB
		2020			2021			2022			2023			2024		
1	2	3	4	$(5=4/3)$	6	7	$8=7/6$	9	10	$11=10/9$	12	13	$14=13/12$	15	16	$17=16/15$
1	Eris	2651	16	0,006	2652	17	0,006	2652	17	0,006	2652	18	0,007	4183	18	0,004
2	Kakas	3452	23	0,007	3453	24	0,007	3453	24	0,007	3453	24	0,007	4490	24	0,005
3	Kakas Barat	2663	7	0,003	2663	7	0,003	2663	7	0,003	2663	7	0,003	3815	8	0,002
4	Kawangkoan	2857	192	0,067	2859	194	0,068	2859	195	0,068	2859	197	0,069	3597	197	0,055
5	Kawangkoan Barat	2433	42	0,017	2433	42	0,017	2433	42	0,017	2433	43	0,018	3143	43	0,014
6	Kawangkoan Utara	2331	16	0,007	2332	17	0,007	2332	18	0,008	2332	19	0,008	3107	19	0,006
7	Kombi	3013	12	0,004	3013	12	0,004	3013	13	0,004	3013	13	0,004	4121	13	0,003
8	Langowan Barat	4711	64	0,014	4712	65	0,014	4712	65	0,014	4712	65	0,014	6215	65	0,010
9	Langowan Selatan	2295	3	0,001	2295	3	0,001	2295	3	0,001	2295	3	0,001	2985	3	0,001
10	Langowan Timur	3318	38	0,011	3321	41	0,012	3321	41	0,012	3321	43	0,013	4761	44	0,009
11	Langowan Utara	2293	12	0,005	2294	13	0,006	2294	13	0,006	2294	13	0,006	3175	13	0,004
12	Lembean Timur	2734	7	0,003	2734	7	0,003	2734	7	0,003	2734	7	0,003	3122	7	0,002
13	Pineleng	12105	809	0,067	12254	2144	0,175	12254	2145	0,175	12264	2353	0,192	9668	2699	0,279

14	Mandolan g	4697	340	0,072	4725	368	0,078	4725	368	0,078	4725	395	0,084	6941	413	0,060
15	Remboken	2476	21	0,008	2476	21	0,008	2476	21	0,008	2476	21	0,008	4465	21	0,005
16	Sonder	4585	50	0,011	4633	98	0,021	4633	100	0,022	4633	102	0,022	7194	102	0,014
17	Tombariri	7513	104	0,014	7516	107	0,014	7516	107	0,014	7516	108	0,014	6210	108	0,017
18	Tombariri Timur	5312	5	0,001	5312	9	0,002	5312	9	0,002	5312	9	0,002	3693	10	0,003
19	Tombulu	4679	1491	0,319	5041	1853	0,368	5085	1965	0,386	5098	2148	0,421	6317	2544	0,403
20	Tompaso	4606	23	0,005	4607	24	0,005	4607	24	0,005	4607	24	0,005	2654	24	0,009
21	Tompaso Barat	2344	3	0,001	2350	9	0,004	2350	9	0,004	2350	10	0,004	3115	10	0,003
22	Tondano Barat	5079	186	0,037	5105	212	0,042	5105	213	0,042	5105	220	0,043	6844	251	0,037
23	Tondano Selatan	4228	317	0,075	4232	321	0,076	4232	322	0,076	4232	322	0,076	5823	324	0,056
24	Tondano Timur	3722	51	0,014	3723	52	0,014	3723	52	0,014	3723	52	0,014	5401	52	0,010
25	Tondano Utara	3253	178	0,055	3255	180	0,055	3255	180	0,055	3255	181	0,056	4328	182	0,042
	Jumlah	99350	4010	0,040	99990	5840	0,058	100034	5960	0,060	1E+05	6397	0,064	119367	7194	0,060

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, 2025

Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua pemilik IMB patuh terhadap ijin yang diberikan. Data dari dinas PUPR menunjukkan bahwa capaian Rasio kepatuhan IMB Kabupaten Minahasa di tahun 2023 adalah 0,850 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,882, yang berarti penambahan jumlah bangunan tidak disertai dengan peningkatan kepatuhan.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, harus tersedia Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik yang disediakan oleh pemerintah dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat yang disediakan oleh pihak swasta. Yang termasuk jenis RTH Publik adalah, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam binaan dan lingkungan perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Dari segi fungsi, ruang terbuka hijau (RTH) memiliki fungsi krusial sebagai penyedia oksigen kota. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi tambahan yang penting bagi kesehatan masyarakat kota, yaitu sebagai sarana rekreasi, media belajar, dan peredam kebisingan kota. Wilayah perkotaan di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 seluas 4.388,789 ha. Dari luas tersebut seharusnya tersedia RTH publik seluas 877,7578 ha dan RTH privat seluas 438,879 ha. Beberapa lokasi RTH tersebut antara lain Lapangan Dr. Sam Ratulangi Tondano, Kompleks stadion Maesa Tondano, Taman Cita Waya Langowan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu bidang urusan yang termasuk dalam urusan wajib. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan rumah dan permukiman layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya Penerapan SPM di bidang Perumahan Rakyat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13

Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan jenis layanan terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Minahasa dapat dilihat dari :

• **Rasio rumah layak huni**

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Jumlah rumah layak huni tahun 2022 sebesar 72.237 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 69.830. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (Tabel 2.49). Dari tabel tersebut terlihat bahwa Rasio Rumah layak huni Kabupaten Minahasa masih berkisar pada angka 0,20-0,21 selang tahun 2019 hingga tahun 2023. Semakin tinggi rasio rumah layak huni menunjukkan semakin berhasil pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,2 artinya untuk setiap 5 (lima) orang penduduk, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,25 artinya untuk setiap 4 (empat) orang penduduk, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni.

Meskipun rasio rumah layak huni relatif baik, namun perlu tetap dilakukan penyediaan rumah yang layak karena masih terdapat 15.081 rumah yang tidak layak huni.

Tabel 2.49 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018 s.d 2023 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah	86.545	87.082	82.862	87.652	87.965	88.804
2.	Jumlah Rumah Layak Huni	67.686	68.223	68.793	69.830	72.237	73.723
3.	Jumlah Penduduk	338.364	342.110	343.564	348.673	351.126	351.920
4.	Rasio Rumah Layak Huni thd Jumlah penduduk	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,2095

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa, 2024

- **Rasio Permukiman layak huni**

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas pemukiman yang layak huni. Makin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah tersebut menyediakan permukiman yang layak huni. Gambaran Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Minahasa dapat di lihat pada tabel berikut ini. Dari data tersebut nampak bahwa rasio permukiman layak huni berada pada angka 0,55, yang berarti masih relatif sedang atau belum terlalu baik yang mungkin disebabkan karena masih belum terpenuhinya PSU di kawasan Permukiman serta masih adanya rumah yang tidak layak huni.

Tabel. 2.50 Rasio Permukiman Layak Huni Kab. Minahasa Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023
Luas Permukiman (ha)	13.282,44
Luas Permukiman Layak Huni	7.260
Rasio	0,54658632

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa, 2024

- **Penanganan Kumuh**

Kawasan kumuh di Kabupaten Minahasa ditetapkan sesuai Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 436 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Minahasa. Sesuai SK tersebut luas Kawasan Kumuh adalah 375,97 Hektar.

Penanganan kawasan kumuh dilakukan pada kawasan kumuh dengan luasan kurang dari sepuluh hektar dalam satu hamparan. Di Kabupaten Minahasa, untuk penanganan ini sudah dilakukan melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang berlangsung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Hasil intervensi Kotaku di 19 Kelurahan di Kabupaten Minahasa pada 99,24 hektar kawasan kumuh telah menurunkan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Minahasa sebesar 99,24 ha. Artinya dari luasan kawasan kumuh yang ditetapkan untuk ditangani oleh KOTAKU, telah dilakukan penanganan seluruhnya (100%).

Pengurangan kumuh juga dilakukan oleh desa-desa melalui Dana Desa, namun belum terdapat data yang mengukur capaian penanganan

kumuh yang dilakukan oleh Desa. Jika dihitung luasan kumuh yang berkurang dengan adanya penanganan program Kotaku maka luasan kumuh di Kabupaten Minahasa sudah berkurang menjadi 276,73 Ha atau sebesar 26,39 persen. Namun jika melihat pesatnya perkembangan di masa ini, tidak tertutup kemungkinan terjadinya kumuh baru, untuk itu perlu dilakukan penetapan SK Kumuh yang sesuai kondisi terkini.

e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1). Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2). Rasio Pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.

Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Adapun Tabel 2.51 rasio jumlah pos Siskamling per kecamatan tahun 2018 - 2024 Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.51 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2018 s.d 2023 Kabupaten Minahasa

N O	Kecamat an	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		Jmlh siskaml ing	Jmlh siskaml ing	Jml h Des a	Rasio	Jml h Des a	Rasio	Jmlh siskaml ing	Jml h Des a	Rasio	Jmlh siskaml ing	Jml h Des a	Rasio	Jmlh siskaml ing	Jml h Des a	Rasio	Jmlh siskaml ing	Jml h Des a	Rasio
-1	-2	-9	-15	-16	(17=15/ 16)	-13	(14=12/ 13)	-15	-16	(17=15/ 16)	-18	-19	(20=18/ 19)	-21	-22	(21=18/ 19)	-22	-23	(24=22/ 23)
1	Eris	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
2	Kakas	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2
3	Kakas Barat	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
4	Kawang k oan	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
5	Kawang k oan Barat	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
6	Kawang k oan Utara	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
7	Kombi	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2	26	13	2
8	Langowa n Barat	32	16	2	32	16	2	32	16	2	32	16	2	32	16	2	32	16	2
9	Langowa n Selatan	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
1 0	Langowa n Timur	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
1 1	Langowa n Utara	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
1 2	Lembean Timur	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
1 3	Pineleng	28	14	2	28	14	2	28	14	2	28	14	2	28	14	2	28	14	2
1 4	Mandola ng	24	12	2	24	12	2	24	12	2	24	12	2	24	12	2	24	12	2
1 5	Remboke n	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
1 6	Sonder	38	19	2	38	19	2	38	19	2	38	19	2	38	19	2	38	19	2

17	Tombariri	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
18	Tombariri Timur	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
19	Tombulu	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
20	Tompaso	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
21	Tompaso Barat	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2	20	10	2
22	Tondano Barat	18	9	2	18	9	2	18	9	2	18	9	2	18	9	2	18	9	2
23	Tondano Selatan	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
24	Tondano Timur	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2	22	11	2
25	Tondano Utara	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2	16	8	2
	Jumlah	540	270	2	540	270	2	540	270	2	540	270	2	540	270	2	540	270	2

Sumber: Badan Kesbangpol. Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

e. Urusan pemerintahan bidang sosial

Panti sosial masyarakat terbentuk atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial yang dilakukan secara sukarela. Panti asuhan anak merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar. Jumlah LKS-A dan LKS-LU dapat di lihat pada tabel Tabel 2.52.

Tabel 2.52 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa

No	LKS-A dan LKS-LU	Jumlah Penghuni			Lokasi	Ket
		Dalam Panti	Luar Panti	Total		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A)					
1	Lksa Dorkas	32	24	56	Kelurahan Liningaan Tondano Timur	
2	Lksa Mamre	29	25	44	Kelurahan Kiniar Tondano Timur	
3	Lksa Etty	35	0	35	Kelurahan Wawalintouan Tondano Barat	
4	Lksa Febe	44	0	44	Kelurahan Tatataran Patar Tondano Selatan	
5	Lksa Kasih	15	7	22	Kelurahan Tonsaru Tondano Selatan	
6	Lksa Kabar Baik	20	19	39	Kelurahan Tounkuramber Tondano Barat	
7	Lksa Yakobus Peduli	20	0	20	Kelurahan Rinegetan Tondano Barat	
8	Lksa Rumah Iman Anak- Anak	49	24	73	Kelurahan Rerewokan Tondano Barat	

9	Lksa Kasih Sayang	30	30	60	Desa Talikuran Remboken	
10	Lksa Cinta Kasih	45	65	130	Desa Talikuran Remboken	
11	Lksa Maupusan	10	20	30	Desa Sendangan Remboken	
12	Lksa Yapi	43	0	43	Desa Tompasso 2 Tompasso Barat	
13	Lksa Melania	71	0	71	Desa Koyawas Langowan Barat	
14	Lksa Harapan Bangsa		34	34	Touliang Oki Eris	Tidak Aktif
15	Lksa Nurul Hidayah	45	0	45	Desa Sea 1 Pineleng	
16	Lksa Asuh Bina Didik Mercyville	9	2	11	Desa Sinuian Remboken	
17	Lksa Eliana	30	7	37	Desa Tountimomor Kakas Barat	
18	Lksa ash iksan	0	65	65	Kelurahan Kampung Jawa Tondano Utara	
19	Panti Sosial Abika	8	0	8	Desa Kolongan Atas 1 Sonder	
20	Panti Sosial Disabilitas Victoria	20	0	20	Desa Kalasey 2 Mandolang	
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU)					
1	Lks-Lu Debora	15	30	95	Ling 2 Kelurahan Taler Tondano Timur	
2	Lks-Lu Ina I	27	60	87	Kelurahan Tounkuramber	
3	Lks-Lu Agape	18	20	38	Jln Bakti ABRI	
		8	55	63	Ling 5	

4	Lks-Lu Yakobus Peduli				Kelurahan Rinegetan Tondano Barat	
5	Lks-Lu Pelita Hati	0	38	38	Desa Touliang Oki Eris	
6	Lks-Lu Pengasih	27	48	75	Jaga 1 Desa Leleko Remboken	
7	Lks-Lu Elshaday	15	204	219	Jaga 3 Desa Talikuran	
8	Lks-Lu Masawangan	10	142	152	Jln Raya Sendangan	
9	Lks-Lu Hana		55	55	Jaga 3 Kayuuwi Kawangkoan Barat	
10	Lks-Lu Tabita		50	50	Jaga 2 Desa Tombasian	
11	Lks-Lu Maitrili	6	45	51	Jln Kuala Salusem	
12	Orsos Torang Samua Basudara	0	55	55	Ling 5 Rinegetan	
					Tondano Barat	
13	Orsos “BUKIT KASIH”	0	50	50	Desa Kanonang Satu Kec. Kawangkoan Barat	
14	LKS-LU ASH IKHLAS	0	65	50	Lingk. II Kel. Kampung Jawa Kec. Tondano Utara	
15	LKS-LU PELITA HATI		55	55	Desa Touliang Oki Kec. Eris	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

PMKS adalah seseorang, keluarga atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, Rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Jenis PMKS di Kabupaten Minahasa sebanyak 26 dengan sumbangsi PMKS terbesar

yaitu penyandang disabilitas 1978 orang dan Lanjut usia terlantar sebanyak 1923 orang

Tabel 2.53 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2023

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	240
3	Anak Yang berhadapan dengan Hukum	7
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	3
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	77
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	1923
9	Penyandang Disabilitas	1978
10	Tuna Susila	110
11	Gelandangan	2
12	Pengemis	4
13	Pemulung	9
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	171
16	Orang Dengan HIV/Aids (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	65
18	Korban Trafiking	0
19	Korban Tindak kekerasan	15
20	Pekerja Migran bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	-
22	Korban Bencana Sosial	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin	-
25	Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	-
26	Komunitas Adat terpencil	-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Pelaksanaan Program PKH sebagai upaya memberi perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin. Pada Jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perilaku peserta dalam perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Kemudian dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat menuntaskan rantai kemiskinan antar Generasi. Adapun Jumlah penerima PKH Kabupaten Minahasa pada Tahun 2019 sebanyak 13.096 Keluarga terus menurun sejak tahun 2020 pada angka 11.979 Keluarga, tahun 2021 sebanyak 11.797 Keluarga tahun 2022 sebanyak 9.498 Keluarga dan tahun 2023 lebih menurun lagi menjadi 8.062 keluarga. Terlihat pada Tabel 2.54

Tabel 2.54 Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan Kab Minahasa Tahun 2018-2023

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eris	595	558	511	426	458	393
2	Kakas	762	716	732	575	567	463
3	Kakas Barat	927	863	826	570	560	460
4	Kawangkoan	253	222	210	213	213	190
5	Kawangkoan Barat	279	259	263	194	192	163
6	Kawangkoan Utara	219	193	186	226	219	192
7	Kombi	428	413	379	383	375	316
8	Langowan Barat	841	803	780	690	670	602
9	Langowan Selatan	468	420	385	265	264	225
10	Langowan Timur	275	261	252	260	239	214
11	Langowan Utara	399	376	354	309	289	216
12	Lembean Timur	452	444	461	446	443	370
13	Mandolang	875	798	813	522	522	429
14	Pineleng	415	365	426	313	312	261
15	Remboken	776	649	754	481	472	395
16	Sonder	579	555	573	539	514	442
17	Tombariri	849	704	696	593	582	504
18	Tombariri	725	684	657	494	472	406

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Timur						
19	Tombulu	433	362	371	354	371	325
20	Tompaso	283	248	217	203	195	166
21	Tompaso Barat	407	377	356	298	295	249
22	Tondano Barat	472	427	402	272	271	222
23	Tondano Selatan	416	402	375	271	278	242
24	Tondano Timur	633	559	533	470	460	394
25	Tondano Utara	335	321	285	266	265	223
TOTAL		7596	13096	11979	11797	9498	8062

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

Korban bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.55 dibawah ini.

Tabel 2.55 Realisasi Bantuan Bencana Alam Dan Sosial Tahun 2018-2023

NO	TAHUN	BENCANA SOSIAL	BENCANA ALAM
1	2018	45 KK	150 KK
2	2019	75 KK	150 KK
3	2020	25 KK	75 KK
4	2021	20 Orang	1464 Orang
5	2022	46 KK	338 KK
6	2023	48 KK	641 KK

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Tabel 2.34. Jumlah Penyaluran Bantuan Bencana Alam (Keluarga) Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Minahasa Tahun 2021- 2024

Jenis Bencana	2021	2022	2023	2024

Kebakaran	6	43	48	106
Tanah Longsor	9	52	16	127
Banjir	1.428	422	173	299
Angin Kencang	43	23	452	40
Minahasa	1.486	543	689	572

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15- 64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

1) Angkatan Kerja (*labor force*)

Tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Pada periode tahun 2018-2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja (Dapat dilihat pada Tabel 2.56).

Tabel 2.56 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci menurut Angkatan Kerja Dan bukan Angkatan Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2024

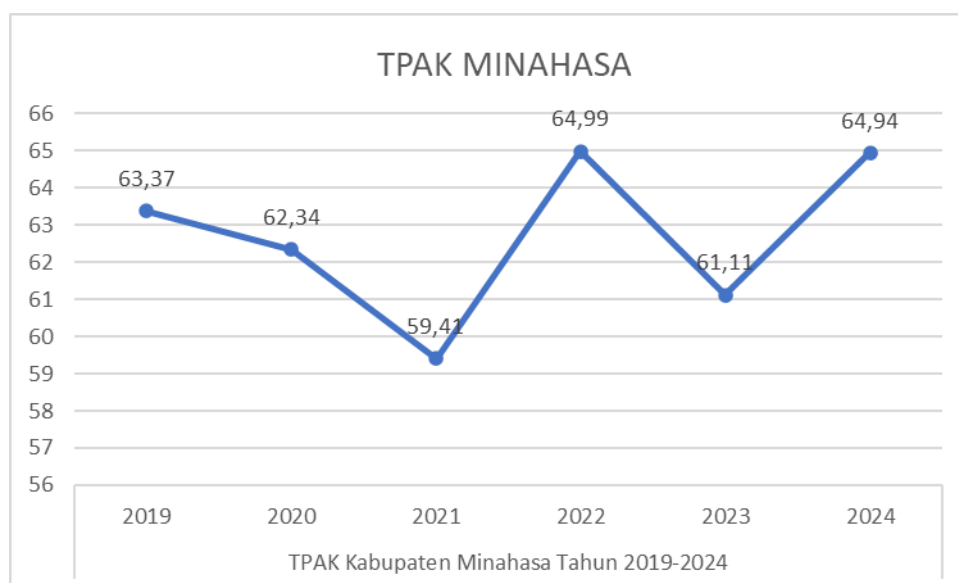
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	ANGKATAN KERJA							

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bekerja	161.225	158.917	158.771	152.966	167288	157.976	169550
	Pangangguran	12.799	9.937	10.671	10.006	12593	13.084	13.189
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (i)	174.024	168.854	169.442	162.972	179881	171060	182.739
2	BUKAN ANGKATAN KERJA							
	Sekolah	17.107	23.119	22.359	19.342	18554	17.548	24.273
	Mengurus RT	55.544	60.687	66.893	75.858	62739	74.010	58.762
	Lainnya	16.565	13.792	13.119	16.161	15604	17.286	15.630
	Jumlah Penduduk bukan angkatan kerja (ii)	89.216	97.598	102.371	111.361	96897	108.844	98.665
	Jumlah Penduduk usia kerja (i) +(ii)	263.240	266.452	271.813	274.333	276778	279.904	281.404

Sumber : BPS. Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2024

Pada grafik dibawah ini dapat dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Minahasa ditahun 2019 sebesar 63,37 persen. Pada tahun 2022 TPAK Kabupaten Minahasa mengalami penurunan menjadi 62,34 persen dan terus menurun hingga 59,41 persen di tahun 2021 lalu kembali naik menjadi 64,99 persen ditahun 2022 dan di tahun 2023 turun sampai di angka 61,11 tapi mengalami kenaikan kembali di tahun 2024 menjadi 64.94 dapat dilihat pada grafik di.bawah ini.

Grafik 2.21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Sumber: BPS. Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2025

Sementara itu Data jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana yang terbesar adalah SLTA sebanyak 424 orang dan

diikuti oleh tingkat SMK sebanyak 289 orang dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Menurut Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	≤ SD	14	1	15
2	SLTP	78	3	81
3	SLTA	706	148	854
4	SMK	464	131	595
5	DIPLOMA	27	26	53
6	S1	281	306	587
7	S2	4	7	11
	JUMLAH	1.574	622	2.196

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2024

2) Produktivitas Kerja

Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

3) Kesempatan kerja

Perkembangan pembangunan telah memberikan banyak kesempatan kerja pada masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Data ini bisa didapat dari BPS Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam Tabel 2.58.

Tabel 2.58 Penduduk Berkerja Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Minahasa Tahun 2023

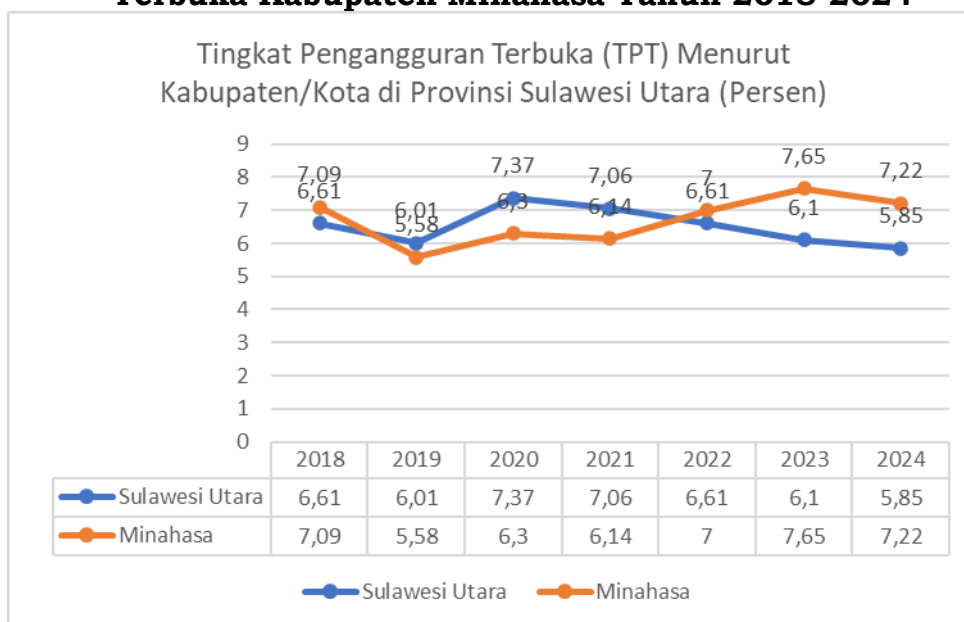
NO	LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain	39353	14612	53965	34,16
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	8362	4021	12383	7,84
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2286	1089	3375	2,14
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	33488	23161	56649	35,86
5	Pekerja Bebas di Pertanian	14173	2604	16777	10,62
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	0	0	0	0,00
7	Pekerja Tidak Dibayar	5359	9468	14827	9,39
		103021	54955	157976	

Sumber: Kabupaten Minahasa Tahun 2024

4) Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan. Untuk mengukur pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Grafik 2.23 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulut Tahun 2025; Data diolah.

Sementara itu, berdasarkan data yang tersaji pada grafik diatas, dapat dilihat Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa terus berfluktuasi dari tahun 2020 sebesar 6,3 persen, lalu menurun ditahun 2021 menjadi 6,14 persen namun kembali mengalami kenaikan ditahun 2023 menjadi 7,65 persen dan menurun ditahun 2024 menjadi 7.22 persen.

b. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

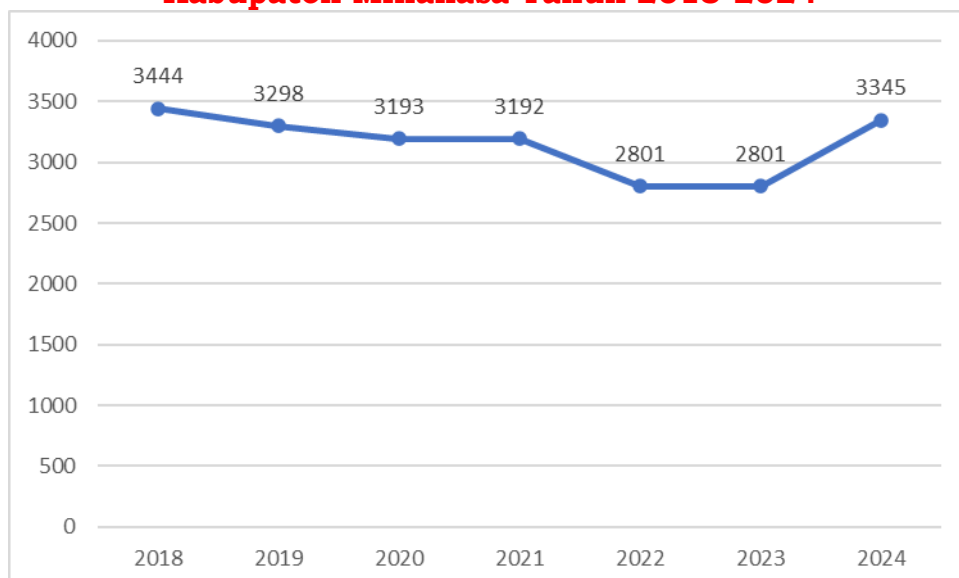
Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta. besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1). Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dari grafik dibawah ini dapat dilihat jumlah perempuan yang mengisi jabatan dilembaga pemerintahan sejak tahun 2018 sebanyak 3444 terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 menjadi 2801 orang. Apabila dilihat dari jumlah seluruh pekerja perempuan sebanyak 57.375 orang maka persentasi partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan belum memenuhi kuota 30%.

Grafik 2.19. Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah di

Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2024



Sumber : Minahasa Dalam Angka. Tahun 2024

2). Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan meningkat tajam di tahun 2022 mencapai 47,38%. Dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 s.d 2024

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	1.033	1.187	1.362	48.126	53.135	23.161	54931
2	Jumlah pekerja perempuan	5.134	4.578	4.492	53.325	57.375	54.955	59751
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga Swasta	20.12	25,00	30.32	41.38	47.38	42.14	35,06

Sumber : Dinas Tenaga Kerja . Tahun 2024

3). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada tabel 2.60 dapat dilihat rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa dengan jumlah tertinggi ditahun 2020 dimana sebanyak 15 kasus KDRT dengan rasio 4,6 pada perempuan dan 0,5 untuk laki-laki. Kasus KDRT di Kabupaten Minahasa terus membaik

ditahun selanjutnya dimana tahun 2021 dengan jumlah rasio 0,44 dan menurun ditahun 2022 dengan jumlah rasio 0,13 sampai tahun 2023 terus menurun pada angka 0,07, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Rasio KDRT Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2024

N O	Uraian	Kasus 2019			Kasus 2020			Kasus 2021			Kasus 2022			Kasus 2023			Kasus 2024		
		L	P	J ml	L	P	J ml	L	P	J ml	L	P	J ml	L	P	J ml	L	P	J ml
1	Jumlah KDR T	0	4	4	1	1 4	15	0	15	15	0	13	13	0	7	7	0	10	10
2	Jumlah Kasu s	0	6	6	2	3	5	1	33	34	0	44	44	0	23	23	0	17	17
3	Rasio KDR T	0	0, 6	0, 6	0, 5	4, 6	3	0	0,4 5	0,4 4	0	0,1 3	0,1 3	0	0,0 7	0,0 7	0	0,5 7	0,5 7

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2024

4). Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Berdasarkan Tabel 2.61 dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja dibawah umur terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 0,036 menjadi 0,053 ditahun 2022, namun di tahun 2023 tidak dilaksanakan pendataan

Tabel 2.61 Persentase Tenaga Kerja di bawah umur Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja anak usia 5- 14 Tahun	120	120	120	120	135	0
2	Jumlah pekerja usai 5 tahun keatas	3.149	3.326	3.326	3.326	3.527	157.979

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,038	0,036	0,036	0.036	0.053	0

Sumber : Dinas Tanaga Kerja Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

c. Urusan pemerintahan bidang pangan

Ketersediaan pangan beberapa tahun sudah mencapai surplus, namun untuk dapat dijadikan sebagai lumbung pangan masih sangat jauh, sehingga diperlukan intensifikasi produk pangan termasuk beras. Surplus dan deficit menggambarkan situasi ketersediaan beras suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Secara keseluruhan beras yang tersedia di Kabupaten Minahasa masih memenuhi kebutuhan bagi penduduk Minahasa yaitu surplus 1.826 (tahun 2022). Walaupun ada beberapa kecamatan yang deficit atau belum bisa memenuhi kebutuhan karena di kecamatan tersebut bukan daerah sentra produksi padi dan karena produksi kurang disebabkan luas lahan pertanian (sawah) yang mengalami penurunan, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.62.

Tabel 2.62 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Ketersedian	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/	Ketersedian	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/	Ketersedian	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/	Ketersedian	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/	Ketersedian	Jlh.Kbth (Ton)	Surpl/
		(Ton)		Def (Ton)	(Ton)		Def (Ton)	(Ton)		Def (Ton)	(Ton)		Def (Ton)	(*) (Ton)		Def (Ton)
1	Eris	1.469	1.149	320	1.115	1.149	-34	1.319	1.301.41	18	1.362	1.155.90	206	1.041	1.246.77	205.77
2	Kakas	3.244	1.212	2.032	3.959	1.212	2.747	2.327	1.378.35	948	3.571	1.227.83	2.343	2.365	1.330.88	-1.034.12
3	Kakas Barat	4.068	1.046	3.022	4.441	1.046	3.395	3.769	1200.88	2.568	3.970	1.090.49	2.879	9.558	1.189.86	-8.368.14
4	Kawangkoan	746	1.004	-258	228	1.004	-775	329	1.115.45	-787	186	1.015.64	-829	193	1.107.75	914.75
5	Kawangkoan Barat	1.060	858	202	1.002	858	145	1.031	951.91	79	677	875.38	-199	867	954.45	87.45
6	Kawangkoan Utara	377	854	-477	236	854	-618	213	957.96	-745	212	875.77	-663	361	952.88	591.88
7	Kombi	489	1.102	-613	45	1.102	-1.057	131	1.209.71	-1.078	17	1.104.19	-1.087	0	1.183.77	1.183.77
8	Langowan Barat	1.844	1.621	223	1.875	1.621	253	2.419	1.846.96	572	2.375	1.693.71	681	3.531	1.851.57	-1.679.43
9	Langowan Selatan	739	793	-54	680	793	-114	575	884.76	-309	1.116	802	314	1.007	872.13	-134.87
10	Langowan Timur	2.868	1.299	1.569	3.269	1.299	1.970	2.769	1.486.65	1.283	3.964	1.307.44	2.656	7.450	935.97	-6.514.03
11	Langowan Utara	1.376	844	532	1.549	844	704	1.596	952.09	644	1.795	856.72	939	1.639	935.97	-703.03
12	Lembean Timur	278	816	-538		816	-816		888.62	-889	0	839.03	-839	0	903.00	903.00
13	Pineleng	354	2.668	-2.314		2.668	-2.668		3.016.35	-3.016	0	2.756.20	-2.756	0	2.996.28	2.996.28
14	Mandolanga	473	1.986	-1.513	14	1.986	-1.972		2.253.51	-2.254	0	2.017.97	-2.018	0	2.209.52	2.209.52
15	Remboken	1.876	1.209	667	1.405	1.209	196	1.311	1.360.71	-50	1.357	1.244.26	112	1.876	1.354.71	-521.29
16	Sonder	2.235	1.902	333	1.861	1.902	-40	1.659	2.143.20	-484	1.864	1.930.88	-66	1.976	2.100.32	124.32
17	Tombariri	777	1.762	-985	76	1.762	-1.685		1.963.71	-1.964	0	1.784.79	-1.785	0	1.945.23	1.945.23
18	Tombariri Timur	1.069	1.006	63	372	1.006	-634	595	1.136.88	-542	528	1.050.15	-522	263	1.142.09	879.09
19	Tombulu	462	1.704	-1.242	27	1.704	-1.677		1.928.84	-1.929	0	1.752.13	-1.752	0	1.902.60	1.902.60
20	Tompaso	3.709	721	2.988	2.692	721	1.972	3.327	812.23	2.515	4.392	733.76	3.658	3.538	793.91	-2.744.09
21	Tompaso Barat	577	870	-293	592	870	-278	917	994.23	-77	803	903.67	-101	1.168	989.31	-178.69
22	Tondano Barat	3.733	1.999	1.734	3.649	1.999	1.649	3.280	2.266.96	1.013	2.438	2.003.79	434	2.831	2.132.03	-698.97
23	Tondano Selatan	2.041	1.664	377	2.657	1.664	994	1.877	1.877.37	-1	1.173	1.677.48	-504	2.173	1.795.82	-377.18
24	Tondano Timur	6.174	1.499	4.675	5.520	1.499	4.022	3.749	1.670.40	2.078	2.711	1.516.42	1.194	4.367	1.642.94	-2.724.06
25	Tondano Utara	1.277	1.235	42	944	1.235	-291	955	1.388.52	-434	795	1.263.99	-469	1044	1.377.81	333.81
	JUMLAH	43.315	32.823	10.492	38.208	32.823	5.385	34.148	37.012.51	-2.865	35.306	33.479.57	1.826	47.248	35.847.57	-11.400

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

d. Urusan pemerintahan bidang pertanahan

1) Persentase luas lahan bersertifikat

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Kabupaten Minahasa terus berupaya dalam pemenuhan lahan bersertifikat sampai di Tahun 2022.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak- hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

e. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

Perkembangan penyelenggaraan lingkungan hidup dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang terdiri dari indeks Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi

awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Capaian IKLH Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.63 Capaian IKLH Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Kualitas Air	45,48	45,48	55,58	50,71	48,00	47,27	57,06
Indeks Kualitas Udara	90,20	90,20	90,08	89,38	90,82	93,48	91,03
Indeks Tutupan Lahan	30,21	30,21	30,21	34,83	34,83	35,43	59,81
IKLH	55,29	55,29	58,70	62,89	62,46	63,39	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, 2025

Berdasarkan data tersebut capaian IKLH Kabupaten Minahasa di tahun 2023 meningkat 0,93 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan kualitas hanya pada parameter kualitas air. Pengukuran kualitas air terutama dilakukan pada sungai atau danau yang ada di Kabupaten. Penurunan kualitas air ini mengindikasikan bahwa tingkat pencemaran air semakin tinggi terutama di lokasi sampel, yaitu Danau dan Sungai Tondano. Capaian indeks kualitas air menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Sesuai klasifikasi indeks kualitas air capaian ini berada berada pada kualifikasi marginal atau sedikit memenuhi yang artinya kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar, hanya satu level di atas kualifikasi buruk, ini merupakan tanda awas dan perlu diupayakan agar pencemaran air tidak semakin parah. Pencemaran air tersebut terutama disebabkan karena aktivitas masyarakat sekitar, alih fungsi lahan terutama di daerah tangkapan air. Capaian Indeks kualitas Udara di tahun 2023,

sebaliknya menjadi lebih baik dari tahun 2021 dan 2022, demikian juga untuk indeks tutupan lahan. Penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan pengendalian ekosistem keanekaragaman hayati merupakan hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas udara dan tutupan lahan. Pengelolaan yang tepat sangat penting dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Danau Tondano yang merupakan salah satu dari lima belas Danau Prioritas yang perlu dijaga keberlanjutannya berada di Kabupaten Minahasa. Dari berbagai laporan yang ada kondisi Danau Tondano terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik dari permasalahan ledakan pertumbuhan eceng gondok, pendangkalan dan eutrofikasi serta masalah kualitas air. Itulah sebabnya penanganan Danau Tondano merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa.

Salah satu prestasi Kabupaten Minahasa di Bidang lingkungan hidup adalah diperolehnya Penghargaan Ardipura Kategori Kota Kecil untuk kota Tondano pada tahun 2022. Respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh stakeholder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten, kasus lingkungan dapat ditangani. Dalam hal penanganan B3 dan LB3 dilihat dari persentasi pengendalian penerbitan ijin B3 dn LB3 sudah tertangani 100 persen.

Hal utama yang perlu diperhatikan untuk pengelolaan Lingkungan hidup adalah ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) ataupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan lingkungan hidup terutama dalam pencapaian target SDGs.

2). Penanganan Sampah

Dalam upaya untuk mengatasi masalah persampahan, Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah menyusun beberapa kebijakan di bidang

ini, diantaranya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua aturan tersebut mengatur operasional pengelolaan sampah melalui penerapan Retribusi Sampah. Terakhir telah dikeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang salah satu isinya adalah tentang Retribusi persampahan. Selain itu terdapat pula Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Minahasa atau JAKSTRADA Sampah.

Sesuai Perbup Nomor 11 Tahun 2020, yang mengacu pada kebijakan nasional yaitu Jakstranas Sampah, ditentukan target pengurangan dan penanganan sampah selang tahun 2018 sampai tahun 2025, yaitu pada tahun 2025 akan terjadi 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah dari potensi timbunan sebanyak 99,188 ton di Kabupaten Minahasa.

Kinerja pengelolaan sampah sesuai data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa persentase pengelolaan sampah sampai tahun 2023 adalah 92,86 % (Tabel 2.64) dari timbunan sampah sebesar 63.922,63 ton, turun dari capaian tahun 2022 yang mengelola sebanyak 99,82% dari 63.632,82 ton sampah.

Tabel 2.64 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2018-2024 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sampah yang dikelola (pengurangan dan Penanganan)	n.a	27.791,10	38.368,80	61.805,45	63.520,95	59.360,18	57.526,91
2	Jumlah volume produksi sampah	n.a	62.435,08	62.700,43	62.700,43	63.632,82	63.922,63	64.432,36

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase	n.a	44,51%	61,19%	98,57%	99,82%	92,86 %	89,28%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Dari Persentase 92,86 % pengelolaan sampah di tahun 2023, persentase sampah yang ditangani yaitu 65,33 % atau 41.763,30 ton dan persentase pengurangan sampah adalah 27,53% atau 17.596,88 ton sampah. Berkurangnya persentase pengelolaan sampah ini kemungkinan disebabkan oleh semakin banyaknya sarana persampahan yang rusak serta jumlah timbulan sampah yang semakin banyak.

Ketersediaan sarana/prasarana persampahan sangat menentukan capaian kinerja pengelolaan sampah. Fasilitas sarana dan prasarana persampahan yang tersedia diantaranya TPA, TPS3R, Bank sampah, kendaraan pengangkut maupun kendaraan pengumpul serta peralatan pendukung lainnya. Adapun TPA yang beroperasi di Kabupaten Minahasa adalah TPA Kulo di Kecamatan Tondano Utara dengan luas 7,3 Ha dan sudah beroperasi sejak tahun 2018 dengan sistem “Controlled Landfill”. Terdapat pula TPA Kawangkoan namun belum beroperasi. Selain TPA terdapat TPS3R yang dibangun dan beroperasi sekalipun belum maksimal yaitu TPS3R di Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan dan di Desa Leilem Dua Kecamatan Sonder. Terdapat pula TPS3R di Desa Kanonang Satu yang belum beroperasi

Untuk mendukung operasional pengelolaan sampah sudah tersedia kendaraan pengangkut sampah baik dump truck, juga terdapat kendaraan Arm Roll, motor sampah dan lainnya. Kondisi sarana persampahan tersebut sekarang sudah banyak yang rusak dan perlu perbaikan serta penambahan armada. Adapun cakupan layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Minahasa hingga tahun 2023 masih pada 19 Kecamatan dari 25 Kecamatan yang ada, dan dari 19 Kecamatan tersebut belum semua Desa/Kelurahan-nya terlayani.

Hal lainnya yang mendukung kinerja persampahan adalah ketersediaan Bank sampah. Sebenarnya sudah ada 23 struktur bank sampah yang terbentuk diantaranya Bank sampah Induk di TPA Kulo,

Bank sampah di Kecamatan Tompaso dan Bank sampah di Werot Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur, tetapi tidak semuanya aktif. Bank sampah yang aktif beroperasi saat ini adalah Bank sampah Werot dan Bank sampah Tompaso.

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah terbatasnya sarana dan parasarana persampahan yang tersedia dan tidak sepadan dengan luasnya wilayah Kabupaten Minahasa, sehingga belum menjangkau semua masyarakat yang ada. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sangat mempengaruhi target pengurangan sampah. Sebagian besar sampah langsung diangkut dan dibawa ke TPA tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau Bank Sampah. Hal ini menyebabkan TPA akan cepat penuh dan berumur lebih pendek dari yang direncanakan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akte serta Wajib KTP merupakan cerminan dari peningkatan pelayanan yang tepat dan lancar, sehingga pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong masyarakat dan mengupayakan pelayanan maksimal terhadap administrasi masyarakat. Hal itu dapat dilihat melalui data penerbitan akte dan KTP yang telah dilayani seperti yang ada pada Tabel 2.65

Tabel 2.65 Kependudukan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2024

NO	Jenis & Jumlah Produk Kependudukan	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akte Kelahiran	5,331	7,26	4,154	5,393	5,513	5,172	5148
2	Akte Kematian	2,501	4,165	4,208	4,924	3,381	3,339	3350
3	Akte Perkawinan	2,41	2,394	2,214	2,416	1,203	1,838	1734

4	Akte Perceraian	219	236	242	286	100	236	278
5	Wajib KTP	263,66	266,38	253,71	255,56	248,72	262,43	257857

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

g. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Indeks Desa Membangun adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Di Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 sampai tahun 2023 tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Untuk desa dengan status tertinggal ditahun 2019, berjumlah 31 desa dan tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak terdapat lagi desa tertinggal. Dengan adanya perhatian dari pemerintah melalui alokasi dana desa mendorong status desa menjadi desa berkembang dengan pencapaian sejak ditahun 2019 naik dengan jumlah 161 desa. Di tahun 2020 desa berkembang mengalami penurunan menjadi 119 dan terus menurun ditahun 2021 jumlah 67 desa, tahun 2022 berjumlah 29 desa dan tahun 2023 sejumlah 10 desa, hal ini dikarenakan adanya peningkatan status desa menuju desa maju dan mandiri. Dimana pada tahun 2019 desa maju di Kabupaten Minahasa sebanyak 35 desa dan terus meningkat di tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan peningkatan yang signifikan yaitu masing – masing 77 desa di tahun 2020, tahun 2021 sebanyak 97 desa, tahun 2022 sebanyak 93 desa dan ditahun 2023 turun dengan jumlah 53 desa . Seiring dengan perkembangan status desa dan pengelolaan anggaran desa yang baik, memungkinkan adanya peningkatan status menjadi desa mandiri dengan jumlah 31 desa di tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 63 desa di tahun 2021 dan

105 desa di tahun 2022 , tahun 2023 sebanyak 164 desa. Seperti tersaji pada Tabel 2.66.

**Tabel 2.66 Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa
Tahun 2018 - 2023**

No	Status Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	76	31	0	0	0	0
3	Berkembang	138	161	119	67	29	10
4	Maju	12	35	77	97	93	53
5	Mandiri	0	0	31	63	105	164

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
Tahun 2024*

1) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam Tabel 2.67.

Tabel 2.67 Kelompok Binaan PKK Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Minahasa

NO	KECAMATAN	2020			2021			2022			2023			Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata
		Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata	Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata	Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata	Jmlh PKK	Jml Kel Binaan	Rata- rata			
1	Eris	8	9	1,13	8	9	1,13	8	0	1,13	8	0	1,13	8	0	1,13
2	Kakas	13	27	2,08	13	27	2,08	13	8	2,08	13	8	2,08	13	8	2,08
3	Kakas Barat	10	3	0,30	10	3	0,30	10	0	0,3	10	0	0,3	10	0	0,3
4	Kawangkoan	10	69	6,90	10	69	6,90	10	0	6,9	10	0	6,9	10	0	6,9
5	Kawangkoan Barat	10	0	0,00	10	0	0,00	10	13	0	10	13	0	10	13	0
6	Kawangkoan Utara	10	1	0,10	10	1	0,10	10	0	0,1	10	0	0,1	10	0	0,1
7	Kombi	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38
8	Langowan Barat	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0	16	0	0	16	0	0
9	Langowan Selatan	10	12	1,20	10	12	1,20	10	0	1,2	10	0	1,2	10	0	1,2
10	Langowan Timur	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0	8	0	0	8	0	0
11	Langowan Utara	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0	8	0	0	8	0	0
12	Lembean Timur	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0	11	0	0	11	0	0
13	Pineleng	14	18	1,29	14	18	1,29	14	0	1,29	14	0	1,29	14	0	1,29
14	Mandolang	12	36	3,00	12	36	3,00	14	10	3	14	10	3	14	10	3
15	Remboken	11	5	0,45	11	5	0,45	11	0	0,45	11	0	0,45	11	0	0,45
16	Sonder	19	3	0,16	19	3	0,16	19	0	0,16	19	0	0,16	19	0	0,16
17	Tombariri	10	1	0,10	10	1	0,10	10	7	0,1	10	7	0,1	10	7	0,1
18	Tombariri Timur	10	56	5,60	10	56	5,60	10	15	5,6	10	15	5,6	10	15	5,6
19	Tombulu	11	7	0,64	11	7	0,64	11	0	0,64	11	0	0,64	11	0	0,64

20	Tompaso	10	0	0,00	10	0	0,00	10	1	0	10	1	0	10	1	0
21	Tompaso Barat	10	19	1,90	10	19	1,90	10	15	1,9	10	15	1,9	10	15	1,9
22	Tondano Barat	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0	9	0	0	9	0	0
23	Tondano Selatan	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0	8	0	0	8	0	0
24	Tondano Timur	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0	11	0	0	11	0	0
25	Tondano Utara	8	20	2,50	8	20	2,50	8	3	2,5	8	3	2,5	8	3	2,5
	JUMLAH	270	291	1,08	270	291	1,08	270	77	1,08	270	77	1,08	270	77	1,08

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun kelompok binaan LPM tahun 2020 s.d. 2023 ditunjukkan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68 Kelompok Binaan LPM Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Minahasa

NO	KECAMATAN	2020			2021			2022			2023			2024		
		Jmlh Kel Binaan	Rata-rata	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata	Jmlh LPM	Jmlh Kel Binaan	Rata-rata
1	Eris	0	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0	8	0	0
2	Kakas	8	0,62	0,62	13	8	0,62	13	8	0,62	13	8	0,62	13	8	0,62
3	Kakas Barat	0	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0	10	0	0
4	Kawangkoan	0	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0	10	0	0
5	Kawangkoan Barat	13	1,3	1,30	10	13	1,30	10	13	1,30	10	13	1,3	10	13	1,3
6	Kawangkoan Utara	0	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0	10	0	0
7	Kombi	5	0,38	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38	13	5	0,38

8	Langowan Barat	0	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0,00	16	0	0	16	0	0
9	Langowan Selatan	0	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0,00	10	0	0	10	0	0
10	Langowan Timur	0	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0	8	0	0
11	Langowan Utara	0	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0	8	0	0
12	Lembehan Timur	0	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0	11	0	0
13	Pineleng	0	0	0,00	14	0	0,00	14	0	0,00	14	0	0	14	0	0
14	Mandolang	10	0,83	0,83	12	10	0,83	12	10	0,83	12	10	0,83	12	10	0,83
15	Remboken	0	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0	11	0	0
16	Sonder	0	0	0,00	19	0	0,00	19	0	0,00	19	0	0	19	0	0
17	Tombariri	7	0,7	0,70	10	7	0,70	10	7	0,70	10	7	0,7	10	7	0,7
18	Tombariri Timur	15	1,5	1,50	10	15	1,50	10	15	1,50	10	15	1,5	10	15	1,5
19	Tombulu	0	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0	11	0	0
20	Tompaso	1	0,1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,10	10	1	0,1	10	1	0,1
21	Tompaso Barat	15	1,5	1,50	10	15	1,50	10	15	1,50	10	15	1,5	10	15	1,5
22	Tondano Barat	0	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0	9	0	0
23	Tondano Selatan	0	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0	8	0	0
24	Tondano Timur	0	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0,00	11	0	0	11	0	0
25	Tondano Utara	3	0,38	0,38	8	3	0,38	8	3	0,38	8	3	0,38	8	3	0,38
	JUMLAH	77	0,29	0,29	270	77	0,29	270	77	0,29	270	77	0,29	270	77	0,29

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Tahun 2023.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

2) Informasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penggunaan teknologi tepat guna (TTG) di Kabupaten Minahasa telah dilakukan di 11 kecamatan dan pada 31 desa. Adapun jenis kegiatannya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
1.	Pompa Air	Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan	Paslaten	Kakas
2.	Mesin Cacah	Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik		
3.	Mesin Cacah	Mencacah tanah pertanian	Kaweng	
4.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Tountimomor	Kakas Barat
5.	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras		
6.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Kalawiran	
7.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Touliang	
8.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Passo	
9.	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Panasen	
10.	Alat Peras	Mempermudah dan Efektif Memeras Santan		
11.	Alat destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Karor	Lembean Timur
12.	Meja putar	Membentuk Gerabah/Keramik	Pulutan	Remboken

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
13.	Mesin aduk	Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik		
14.	Irigasi pipa PVC	Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi	Tember	Tompaso
15.	Mesin Cacah	Mencacah Sampah	Tonsealama	Tondano Utara
16.	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Noongan	Langowan Barat
17.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Kamangta	Tombulu
18.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
19.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Timur	
20.	Alat Pengolahan Bio Gas	Biogas Utk Listrik (Kompas Gas & Listrik)		
21.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Ranotongkor Timur	
22.	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh	
23.	Mesin Pengolahan VCO	Pengolahan VCO		
24.	Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Pengolahan Pupuk Organik		
25.	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh Uner	
26.	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lemoh Satu	
27.	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lemoh Tiga	
28.	Mesin Giling Jagung	Menghancurkan Jagung/Memecah Biji Jagung	Lemoh Dua	
29.	Crown Cms-036 Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Timbukar	Sonder
30.	Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Kauneran Satu	
31.	Alat Parut Kelapa	Parut Kelapa	Talikuran Satu	
32.	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah		
33.	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas		

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
34.	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Talikuran	
35.	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Sendangan	
36.	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Tincep	
37.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya		
38.	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah		
39.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tounelet	
40.	Alat Penanam Padi	Mempermudah Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat		
41.	Alat Giling Daging	Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan		
42.	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas		
43.	Mesin Penanam Jagung	Mempermudah dalam Menanam Jagung/ Lebih Cepat		
44.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Kiawa Satu	Kawangkoan Utara
45.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Kiawa Satu Barat	
46.	Alat Penyulingan Asap Cair	Membuat Asap Cair	Kembuan	Tondano Utara
47.	Mesin Cukur & Peras Kelapa	Mencukur dan memeras kelapa	Tandengan Satu	Eris

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
Tahun 2024

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1). Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga, seperti pada tabel 270 dibawah ini bahwa di tahun 2019 rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 1,11 dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 2,3 dan menurun

di tahun 2022 menjadi 1,97 kemudian di tahun 2023 naik sedikit menjadi 1,98.

Tabel 2.70 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Minahasa

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak	141.312	126.290	83.457	39.207	n/a	86.856	86.677
2	Jumlah Keluarga	109.851	113.339	118.543	90.714	90.714 (P21)	91.769	91.877
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,29	1,11	1,4	2,3	1.97 (TFR)	1,98(TFR)	1,98(TFR)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Minahasa.
Tahun 2025

2). Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Di tahun 2022 Rasio akseptor menurun pada angka 60,01 kemudian naik menjadi 62,80 di tahun 2023 seperti yang ada pada tabel 2.71.

Tabel 2.71 Rasio Akseptor KB Tahun 2018- 2024 Kabupaten Minahasa

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB	54.484	59.955	49.169	49.279	23.357	23.969	25,830
2	Jumlah pasangan usia subur	68.496	75.457	62.269	61.900	38.918	38.750	38,713
3	Rasio akseptor KB	79,54	7,946	7,896	79,61	60,01	62,80	66,72

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Minahasa.
Tahun 2025

Pada tahun 2019 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 75.457 Orang pada dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 38.750 Orang.

a). Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Pada grafik dibawah ini dapat dilihat data yang tersaji dimana pada tahun 2019 pertumbuhan penduduk sebesar 1,11% mengalami penurunan sebesar 0,2 persen di tahun 2020 menjadi 1,09 persen dan kembali naik menjadi 1,8 persen di tahun 2022. Pemerintah sudah melakukan program penyuluhan dengan mengoptimalkan pentingnya program Keluarga Berencana, dan perumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa sejalan dengan program pemerintah.

Grafik 2.25 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Minahasa (%) Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2024

b). Pengelompokan Penduduk

i). Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan umur.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2022 Kabupaten Minahasa dituangkan dalam Tabel 2.72. Jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Pineleng sedangkan paling sedikit di Kecamatan Tompaso.

**Tabel 2.72 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023
Kabupaten Minahasa**

NO	NAMA KECAMATAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	LANGOWAN TIMUR	102,61
2	LANGOWAN BARAT	106,27
3	LANGOWAN SELATAN	109,48
4	LANGOWAN UTARA	107,35
5	TOMPASO	104,08

6	TOMPASO BARAT	105,18
7	KAWANGKOAN	102,11
8	KAWANGKOAN BARAT	103,77
9	KAWANGKOAN UTARA	106,81
10	SONDER	103,51
11	TOMBARIRI	103,76
12	TOMBARIRI TIMUR	105,96
13	PINELENG	102,71
14	MANDOLANG	102,68
15	TOMBULU	102,49
16	TONDANO BARAT	103,48
17	TONDANO SELATAN	104,12
18	REMBOKEN	107,63
19	KAKAS	107,96
20	KAKAS BARAT	108,31
21	LEMBEAN TIMUR	104,81
22	ERIS	103,29
23	KOMBI	104,72
24	TONDANO TIMUR	103,58
25	TONDANO UTARA	101,75
	Minahasa	104,37

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2023

Rasio jumlah laki-laki lebih banyak di dibandingkan dengan perempuan di Kabupaten Minahasa (104,16) Rasio tertinggi terdapat di Langowan Selatan (110,09) dan Langowan Utara mencapai (108,38). Rasio terendah antara laki-laki dan perempuan terdapat di Kecamatan Langowan Timur Sebesar (100,16). Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/ Sex		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12,41	11,81	24,23
5-9	12,33	11,84	24,16
10-14	12,32	11,74	24,06
15-19	12,57	11,80	24,37
20-24	13,71	12,93	26,64
25-29	13,67	12,74	26,41
30-34	12,64	11,87	24,51

35-39	12,28	11,39	23,67
40-44	12,50	11,71	24,21
45-49	12,78	11,89	24,67
50-54	12,20	11,55	23,75
55-59	11,01	10,71	21,72
60-64	9,38	9,36	18,74
65-69	7,52	7,77	15,29
70-74	5,56	5,80	11,36
75+	6,38	7,77	14,15
Minahasa	179,24	172,68	351,92

Sumber
BPS

Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

ii). **Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk /geografis.**

Tabel 2.74 Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2023 Kabupaten Minahasa

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km2 Population Density per sq.km
Langowan Timur	3,90	1.862,15
Langowan Barat	5,10	413,07
Langowan Selatan	2,40	119,25
Langowan Utara	2,58	1.077,87
Tompaso	2,19	436,55
Tompaso Barat	2,72	644,90
Kawangkoan	3,05	293,14
Kawangkoan Barat	2,63	471,72
Kawangkoan Utara	2,62	693,28
Sonder	5,78	380,86
Tombariri	5,35	328,30
Tombariri Timur	3,14	107,09
Pineleng	8,25	578,82
Tombulu	5,24	246,77
Mandolang	6,08	447,25
Tondano Barat	5,87	896,07
Tondano Selatan	4,94	674,94
Remboken	3,73	536,02
Kakas	3,66	142,66
Kakas Barat	3,28	250,93
Lembean Timur	2,49	111,78
Eris	3,43	357,11
Kombi	3,26	94,15
Tondano Timur	4,52	464,16

Tondano Utara	3,79	206,68
Minahasa	100,00	303,05

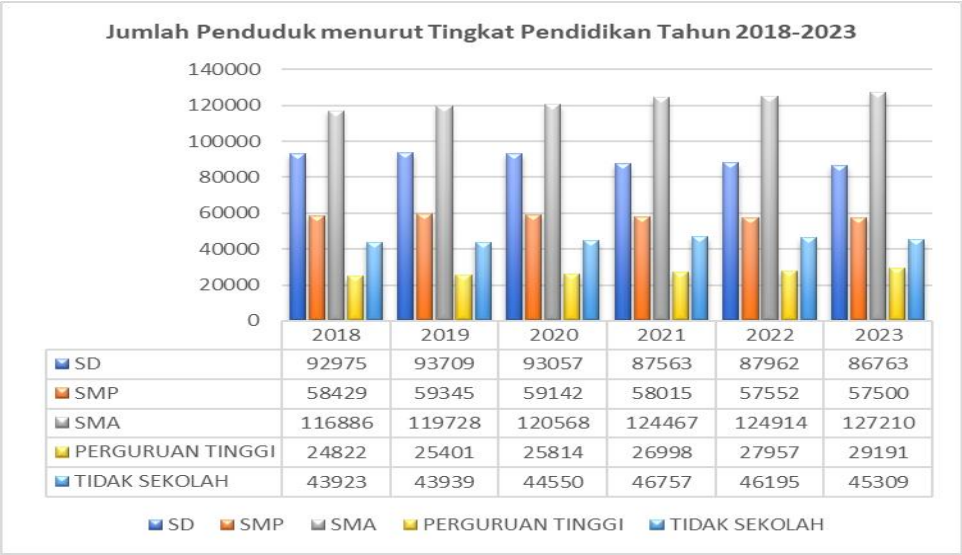
Sumber : Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.74 menunjukkan luas dan kepadatan penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan Kecamatan. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Langowan Timur 1.865,15 Jiwa/Km2 dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kombi dengan kepadatan 94.15 jiwa/Km2, dengan rata-rata kepadatan di Kabupaten Minahasa sebesar 304 jiwa/km2.

iii). Pengelompokan Penduduk Berdasar tingkat pendidikan

Selain berdasarkan jenis kelamin, penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Pengelompokan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan ditunjukkan pada grafik berikut..

Grafik 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa



Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan KTP dan KK dituangkan dalam Tabel 2.75 dan Jumlah Penduduk menurut kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Nikah dalam Tabel 2.75

Tabel 2.75 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP. KK Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Minahasa

No	Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan			
		KTP		KK	
		Sdh	Blm	Sdh	Blm
1	2018	258.434	52.28	105.677	4.174
2	2019	263.424	2.956	107.785	5.554
3	2020	243.653	10.054	114.275	4.268
4	2021	243.653	10.054	114.275	4.268
5	2022	245.754	2.964	124,701	1,711
6	2023	251.176	11.557	125.796	464

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Minahasa. Tahun 2024

Tabel 2.76 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akte Lahir. Akte Nikah Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Minahasa

No	Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan			
		Akte Lahir		Akte Nikah	
		Sdh	Blm	Sdh	Blm
1	2018	324.116	15.273	164.23	7.739
2	2019	327.741	14.369	165.541	7.258

3	2020	329.743	13.382	165.575	6.270
4	2021	46.757	13.382	165.575	6.27
5	2022	128,941	215,639	92,395	77,183
6	2023	136.619	208.773	102.505	66819

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Minahasa. Tahun 2024

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB, Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk, dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumla h	Jml Peserta KB Aktif	Metode Kotrasepsi						
		PUS		IUD	MOP	MOW	Kondom	Implan	Sunti k	Pil
1	Eris	1.255	740	51	1	14	4	103	493	71
2	Kakas	1.636	1.050	54	0	13	4	188	690	97
3	Kakas Barat	1.437	855	46	0	21	1	102	598	84
4	Kawangkoan	1.264	806	67	0	27	17	219	366	98
5	Kawangkoa n Barat	1.071	726	28	0	25	10	72	431	149
6	Kawangkoa n Utara	1.066	667	61	2	31	7	111	306	146
7	Kombi	1.207	751	26	3	27	7	121	488	74
8	Langowan Barat	2.310	1.721	71	0	24	5	233	1.201	182
9	Langowan Selatan	844	543	37	0	2	1	70	350	81
10	Langowan Timur	1.401	808	128	0	19	2	151	458	46
11	Langowan Utara	1.022	648	27	0	14	1	84	442	67
12	Lembean Timur	1.082	753	29	1	10	4	198	477	30
13	Pineleng	2.817	1.572	147	6	67	7	141	1.015	172
14	Mandolang	2.212	1.252	86	5	26	13	121	775	213
15	Remboken	1.320	831	39	2	29	0	58	602	98
16	Sonder	2.222	1.396	100	1	69	15	142	774	276
17	Tombariri	2.143	1.301	64	3	30	2	274	765	155
18	Tombarir i Timur	1.153	645	44	2	26	1	90	424	57
19	Tombulu	2.102	1.220	49	4	25	0	172	754	205
20	Tompaso	764	501	59	0	10	1	60	294	75

No.	Kecamatan	Jumla h	Jml Peserta KB Aktif	Metode Kotrasepsi						
		PUS		IUD	MOP	MOW	Kondom	Implan	Sunti k	Pil
21	Tompaso Barat	1.208	869	69	1	25	6	90	520	151
22	Tondano Barat	2.144	1.182	64	1	43	7	112	848	103
23	Tondano Selatan	1.624	1.002	106	1	36	8	90	704	54
24	Tondano Timur	1.782	1.152	87	0	20	11	90	881	60
25	Tondano Utara	1.664	978	85	8	63	1	96	567	155
	Jumlah	38.750	23.969	1.624	41	696	135	3.188	15.223	2.899

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

i. Urusan pemerintahan bidang perhubungan

Bidang Perhubungan merupakan salah satu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mendasari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa selaku pemangku kepentingan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan konektivitas, dan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas, sesuai rencana struktur ruang yang ada.

1) Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah penumpang angkutan umum menunjukkan kebutuhan sarana transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah penumpang angkutan umum sampai tahun 2019 terdata mencapai 12.553.590 orang, yang kemudian menurun drastis pada tahun 2020 menjadi 224.620 orang tetapi bergerak naik lagi pada tahun 2021 dan terus meningkat di tahun 2023. Kedaan ini mungkin disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi orang untuk melakukan perjalanan. Di tahun 2023 jumlah penumpang kembali meningkat menjadi 857.090 orang.

**Tabel 2.78 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2018 s.d 2024
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah penumpang	12.187.952	12.553.590	224.620	249.576	N/a	857.090	788.460

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

2) Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara; jaringan trayek antar kota antar provinsi; jaringan trayek antar kota dalam provinsi; jaringan trayek perkotaan; dan jaringan trayek perdesaan. Izin trayek dikeluarkan untuk melayani jaringan trayek yang sudah ditentukan. Jaringan trayek dibuat untuk pelayanan angkutan orang.

Tabel 2.79 Rasio Ijin Trayek Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin Trayek Perkotaan	526	524	519	519	101	4	n/a
2	Izin Trayek Perdesaan	338	316	313	313	121	7	n/a
3	Jumlah Izin Trayek	914	840	832	832	222	11	n/a
4	Jumlah Penduduk	338,37	342,11	342,11	344.440	346.670	345.513	329.391
5	Rasio Trayek	0,270	0,247	0,220	0,220	0,0006	0,00003	n/a

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Tahun 2024

Rasio ijin trayek terhadap jumlah penumpang di Kabupaten Minahasa seperti pada tabel di atas menunjukkan penurunan yang sangat signifikan hingga tahun 2023. hal ini dipengaruhi oleh makin berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi karena semakin banyaknya angkutan online yang beroperasi di masyarakat, waktu tunggu keberangkatan yang terlalu lama, serta rendahnya kualitas layanan angkutan umum.

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pada Tabel 2.80 pengujian Kendaraan bermotor atau yang disebut

dengan Uji KIR menunjukkan bahwa jumlah KIR Angkutan Umum khusus mobil bus umum Tahun 2023 berjumlah 74, dan untuk Mobil barang berjumlah 931. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan kendaraan untuk membawa penumpang/barang di jalan. Dari jumlah kendaraan yang ada persentase yang melakukan uji KIR untuk kendaraan angkutan umum hanya 4,57% dan 27,02 % untuk mobil barang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pemilik kendaraan akan keselamatan berkendara masih rendah.

Tabel 2.80 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No	Angkutan Umum	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%
		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
1	Mobil bus Umum	1.345	180	0,13	1.138	180	0,13	1.138	11	0,96	1138	112	9,8	1138	70	0,062	1621	74	4,57
2	Mobil barang	3095	653	0,21	3095	653	0,21	3095	62	2	3195	452	14	3315	693	0,21	3446	931	27,02

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal & memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, Ketersediaan sarana transportasi ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Gambaran ketersediaan fasilitas sarana perhubungan tersesebut dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2.81). Jumlah terminal di Kabupaten Minahasa 3 buah yakni terminal Tondano dengan luas 4.510 m2, terminal Langowan 7.700 m2 dan terminal Kawangkoan 2.400 m2 yang merupakan terminal Tipe B kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di Minahasa tidak terdapat pelabuhan laut ataupun pelabuhan udara.

**Tabel 2.81 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2018-2024 Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan laut	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah pelabuhan Udara	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

5) Jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan

Aspek pemanfaatan diukur dengan besaran V/C ratio yang memberi gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani arus lalu lintas, dimana semakin besar nilai V/C ratio berarti semakin rendahnya tingkat pelayanan jalan ditunjukkan dengan adanya kemacetan. Batasan nilai V/C ratio yang menunjukkan ke arah kemacetan diambil >0,65. VC Rasio jalan di Kabupaten Minahasa selang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sesuai data dari Dinas Perhubungan (Tabel 2.82) mengalami peningkatan. Tahun 2018 VC rasio berada pada angka 0,23 terus meningkat hingga menjadi 0,26 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan jalan di Kabupaten Minahasa cenderung meningkat seiring dengan semakin tingginya mobilitas penduduk. Namun peningkatan ini masih berada di bawah angka 0,65 sehingga belum mengakibatkan kemacetan parah.

Dari aspek keterhubungan, indeks konektivitas angkutan jalan (Tabel 2.82) di Kabupaten Minahasa berada pada angka relatif tetap. Hal ini berarti belum terjadi perubahan yang signifikan antara simpul-simpul transpotasi yang ada pada tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2.82 Capaian Kinerja transportasi Tahun 2019-2024

No	Uraian	Data Per Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota (VC Ratio Jalan Kabupaten)	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28

No	Uraian	Data Per Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Indeks konektivitas angkutan jalan	85.0	85.0	65,0	65,0	65,0	65

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Minahasa. Tahun 2023

Dukungan ketersediaan sarana perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan tentunya akan mempengaruhi tingkat keselamatan dalam berkendara. Berdasarkan data jumlah kejadian seperti pada Tabel 2.83 kecelakaan transportasi di Kabupaten Minahasa cukup tinggi dan cenderung meningkat di tahun 2023.

Tabel. 2.83 Perkembangan Jumlah Kecelakaan transportasi di Kabupaten Minahasa

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kecelakaan lalu lintas	N/A	N/A	128	111	167	207
Jumlah kecelakaan angkutan ASDP	-	-	-	-	-	

j. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

1). Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Jaringan Komunikasi Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Minahasa menunjukkan jumlah yang signifikan yang terus naik sejak tahun 2019 sebanyak 202 jaringan menjadi 250 jaringan seperti yang ada pada tabel 2.84.

Tabel 2.84 Jaringan Komunikasi di Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jaringan Telepon genggam	231	231	235	250	250

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa. Tahun 2025

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.85

Tabel 2.85 Jumlah dan Persentase Penduduk yang Menggunakan dan Memiliki HP/Telepon Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang menggunakan HP (orang)	102.086	114.112	115.063	120.063	120.075	125.070	
2	Penduduk yang memiliki telepon PSTN (orang)	33.769	33.980	34.200	34.200	34.200	34.300	
3	Total jumlah Penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2) (orang)	135.855	148.092	149.236	154.236	154.275	159.370	
4	Jumlah Penduduk (orang)	355.322	385.350	343.564	343.800	350.317	354.317	
5	Prosentase Penduduk yang memiliki telepon PSTN (2) / (4) (%)	0,095	0,0881	0,0836	0.08	0.083	0.096	
6	Prosentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	38	38	0,365	40	44.04	44.97	44.97

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(3)/(4) (%)							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Minahasa Tahun 2023

2). Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Tabel 2.86 menunjukan jumlah jenis surat kabar/ media local di Kabupaten Minahasa setiap tahunnya terus bertambah sejak tahun 2018 sebanyak 16 jenis menjadi 25 jenis media di tahun 2023. Artinya, semakin banyak media semakin banyak pula publikasi terkait pembangunan dan pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.86 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2018 s.d 2023 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Jenis surat kabar terbitan nasional	3	3	3	5	5	5
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan local	16	18	20	25	25	25
3	Total jenis surat kabar (1+2)	19	21	23	30	30	30

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa. Tahun 2024

3). Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Tahun 2020-2024 Jumlah penyiaran radio/TV lokal tidak mengalami perubahan, seperti tampak pada Tabel 2.87

**Tabel 2.87 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2020-2024
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyiaran radio lokal	7	7	7	7	7	0	7
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	1	1	1	1	1	1	1
5	Total Penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	10	3	10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa.Tahun 2024

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

k. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

Koperasi merupakan salah satu institusi perekonomian Kabupaten Minahasa. Sampai tahun 2023 jumlah koperasi di Kabupaten Minahasa sebanyak 1.071 koperasi, yang terdiri dari 408 koperasi aktif dan 663 koperasi yang tidak aktif.

Keberhasilan pembinaan koperasi dan UKM antara lain dengan adanya beberapa aktivitas produksi seperti Kerajinan tangan kayu kelapa di desa kayuuwi Kecamatan Kawangkoan, kerajinan tangan sabut kelapa di Kelurahan Rinegetan, Kerajinan tangan (rajutan) eceng gondok di Desa Eris, Kerajinan batok kelapa di Desa Maumbi, Kelurahan Sasaran, keramik di Desa Pulutan Kecamatan Remboken, akar bambu di Desa Kembes Kecamatan Tombulu, industri rumah panggung di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan, dan pengolahan VCO di Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat dan

Kecamatan Lembean Timur serta Kacang Tore di Kecamatan Kawangkoan. Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap:

1) **Persentase Koperasi Aktif**

Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Minahasa selama 5 Tahun terakhir Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Menurut Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tahun 2024 angka pertumbuhan jumlah koperasi aktif mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,8% dan Kabupaten minahasa memiliki 1.071 Unit Koperasi pada periode 2019 hingga 2023 sesuai dengan yang digambarkan pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018-2023 di Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	928	928	410	410	398	408
2	Jumlah Koperasi	1.143	1.143	1.143	1.071	1.071	1.071
3	Persentase Koperasi Aktif	81.19%	81.19%	35.87%	38.28 %	37.15 %	38.10 %

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Semakin besar Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Tabel 2.89 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 - 2023

No	Kecamatan	KUD	KPRI	KOPKAR	Lainnya	KUD	KPRI	KOPKAR	Lainnya	Jumlah	KUD	KPRI	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
		2021				2022					2023				
1	Langowan Timur				62				62	62				62	62
2	Langowan Barat	5	1		49	5	1		49	55	5	1		49	55
3	Langowan Selatan				2				2	2				2	2
4	Langowan Utara				1				1	1				1	1
5	Kakas	4	3		53	4	3		53	60	4	3		53	60
6	Kakas Barat				24				24	24				24	24
7	Tompaso	1			27	1			27	28	1			27	28
8	Tompaso Barat				2				2	2				2	2
9	Remboken	3	1		48	3	1		48	52	3	1		48	52
10	Kawangkoan	4	4		85	4	4		85	93	4	4		85	93
11	Kawangkoan Utara				14				14	14				14	14
12	Kawangkoan Barat				1				1	1				1	1
13	Tombariri	3	1		49	3	1		49	53	3	1		49	53
14	Tombariri Timur	1			1	1			1	2	1			1	2
15	Sonder	6	1		59	6	1		59	66	6	1		59	66
16	Tondano Barat	3	2		84	3	2		84	89	3	2		84	89
17	Tondano Timur	1	1	1	64	1	1	1	64	67	1	1	1	64	67
18	Tondano Utara	1	8		35	1	8		35	44	1	8		35	44
19	Tondano Selatan	1			65	1			65	66	1			65	66

20	Eris	4	1		75	4	1		75	80	4	1		75	80
21	Lembean Timur	4			87	4			87	91	4			87	91
22	Kombi	6			69	6			69	75	6			69	75
23	Pineleng	2	3		27	2	3		27	32	2	3		27	32
24	Mandolang				4				4	4				4	4
25	Tombulu	1			7	1			7	8	1			7	8
	JUMLAH	79	41	6		50	26	1	994	1.071	50	26	1	994	1071

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

1. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal

Berdasarkan data yang ada jumlah investasi swasta yang masuk masih sangat rendah, sehingga masih memerlukan kerja keras dalam Kabupaten Minahasa. Adapun jumlah investor yang masuk adalah sebagai berikut:

1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode 2019-2020 mengalami penurunan yang signifikan dan meningkat kembali pada tahun 2021-2023. Adapun penanaman modal Asing tidak ada untuk periode tersebut.

Tabel 2.90 Jumlah Investasi skala Nasional Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

Tahun	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	19	-	19
2019	13	-	13
2020	11	-	11
2021	26	-	26
2022	UMK:1.793		UMK:1.793
	Non UMK:9		Non UMK:9
	Total:1.802		Total:1.802
2023	UMK:2.642		UMK:2.642
	Non UMK:5		Non UMK:5
	Investor:2.647		Investor:2.647

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Minahasa 2022

Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Realisasi jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2020 mengalami penurunan, selanjutnya meningkat tahun 2021. Namun pada periode Tahun 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan jumlah proyek sebanyak 1.009 tetapi nilai investasi menurun sebesar

4.635.528.997 rupiah dikarenakan banyak usaha micro yang nilai modalnya kecil.(Tabel 2.91).

**Tabel 2.91 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Minahasa
Tahun 2018-2024**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah proyek	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.000)
2018	19	3.850.500.000	19	3.850.500.000
2019	13	1.710.545.982.000	13	1.710.545.982.000
2020	11	862.100.000.000	11	862.100.000.000
2021	22	528.825.244.901	22	528.825.244.901
2022	1.802	6.139.449.056.111	1.802	6.139.449.056.111
2023	2.647	1.457.156.011.532	2.647	1.457.156.011.532
2024		4.792.663.087.692		4.792.663.087.692

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Minahasa 2025

Berdasarkan data yang ada, tingkat investasi di Kabupaten Minahasa perlu ditingkatkan dengan berbagai terobosan sehingga dapat membantu menggairahkan perekonomian di daerah. Persaingan yang sangat ketat antar daerah dalam mempromosikan potensi daerah khususnya di sektor industri pariwisata menjadi perhatian khusus dalam perencanaan daerah.

3)Rasio daya Serap tenaga kerja

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Minahasa. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, di mana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel 2.92.

**Tabel 2.92 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten
Tahun 2018 s.d 2023**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	285	260	n/a	33.153	11.363	12.428
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	19	13	11	103	1.802	4.240
3	Rasio daya serap tenaga kerja	70.24	61.5	61.78	61.5	70,6	n/a

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Minahasa 2024

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Peluang investasi lain yang sangat menarik untuk dikembangkan adalah jasa transportasi, pengembangan industri pariwisata dan kerajinan, serta investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun Sektor-sektor peluang investasi yang dominan adalah :

- a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor pengadaan listrik dan gas;
- d. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang;
- e. Sektor konstruksi;
- f. Sektor real estate;
- g. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial;
- h. Sektor jasa Pendidikan;

m. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Minahasa yang terus bertambah setiap tahunnya menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana jumlah organisasi pemuda sejak tahun 2018 berjumlah 302 terus bertambah secara signifikan di tahun 2022 menjadi 479 organisasi pemuda.

**Tabel 2.93 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2018 s.d 2024
Kabupaten Minahasa**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Eris	10	12	15	17	17	17	17
2	Kakas	12	14	16	18	18	18	18
3	Kakas Barat	11	13	15	18	18	18	18
4	Kawangkoan	14	15	17	19	19	19	19
5	Kawangkoan	9	11	14	18	18	18	18

	Barat							
6	Kawangkoan Utara	9	12	13	15	15	15	15
7	Kombi	13	14	16	18	18	18	18
8	Langowan Barat	14	15	17	20	20	20	20
9	Langowan Selatan	9	10	13	16	26	26	26
10	Langowan Timur	14	15	19	22	22	22	22
11	Langowan Utara	12	14	17	20	20	20	20
12	Lembehan Timur	10	12	15	18	18	18	18
13	Pineleng	16	18	20	22	22	22	22
14	Mandolang	13	15	17	20	20	20	20
15	Remboken	13	14	16	19	19	19	19
16	Sonder	15	17	19	21	21	21	21
17	Tombariri	12	15	17	19	19	19	19
18	Tombariri Timur	9	11	14	17	17	17	17
19	Tombulu	10	13	16	18	18	18	18
20	Tompaso	8	11	14	17	17	17	17
21	Tompaso Barat	7	9	12	15	15	15	15
22	Tondano Barat	16	19	22	25	25	25	25
23	Tondano Selatan	17	20	21	23	23	23	23
24	Tondano Timur	15	17	19	21	21	21	21
25	Tondano Utara	14	17	20	23	23	23	23
	Jumlah	302	353	414	479	479	479	479

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa 2023

2) Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2018 jumlah kegiatan olahraga sebanyak 202 kali dan menurun ditahun 2020 96 Kali dan naik menjadi 298 di Tahun 2022, sehingga diperlukan peningkatan frekwensi kegiatan olahraga dimasa akan datang .

Tabel 2.94 Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 s.d 2024

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Eris	8	12	5	8	15	14	14
2	Kakas	9	14	4	11	12	19	19
3	Kakas Barat	6	10	3	6	8	10	10
4	Kawangkoan	9	11	4	6	8	14	14
5	Kawangkoan Barat	7	9	3	7	9	10	10
6	Kawangkoan Utara	7	8	3	5	8	12	12

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kombi	7	9	3	6	8	11	11
8	Langowan Barat	8	10	4	8	12	10	10
9	Langowan Selatan	9	11	4	7	9	11	11
10	Langowan Timur	8	12	3	9	11	10	10
11	Langowan Utara	7	9	5	7	9	15	15
12	Lembehan Timur	6	7	2	5	8	7	7
13	Pineleng	10	12	5	10	14	16	16
14	Mandolang	8	9	5	9	13	14	14
15	Remboken	9	14	4	10	14	11	11
16	Sonder	8	11	4	11	15	18	18
17	Tombariri	8	12	5	12	16	17	17
18	Tombariri Timur	6	8	3	15	17	18	18
19	Tombulu	8	12	4	12	15	17	17
20	Tompaso	8	11	4	9	12	15	15
21	Tompaso Barat	9	14	3	11	15	14	14
22	Tondano Barat	11	14	4	8	12	15	15
23	Tondano Selatan	8	12	3	7	10	13	13
24	Tondano Timur	9	12	5	9	13	16	16
25	Tondano Utara	9	11	4	12	15	17	17
	Jumlah	202	274	96	220	298	342	342

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa 2025

n. Urusan pemerintahan bidang statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku Minahasa Dalam Angka tersedia setiap tahun. Kendala Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi serta belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial. Diupayakan kedepan ada peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya Peningkatan pengelolaan Data Pembangunan terutama pengelolaan data di perangkat daerah.

o. Urusan pemerintahan bidang persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur adanya kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah untuk mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu koridor yang memagari agar pemerintah daerah tidak menyalahgunakan urusan persandian sebagai upaya untuk menutup-nutupi tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada skala nasional, keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu di dukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman. Untuk itu sistem pengamanan dimaksud perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai. Hal ini menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan.

Diupayakan kedepan ada peningkatan pengelolaan sistem pengamanan informasi melalui sistem Persandian daerah.

p. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Kabupaten Minahasa merupakan daerah yang kaya akan nilai budaya daerah. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan jati diri daerahnya. Budaya Minahasa sangat beragam dimana terdapat beberapa anak suku yang memiliki karakter dan kearifan lokalnya masing-masing.

Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Minahasa telah lama dilakukan dengan pelestarian budaya. Pemajuan kebudayaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah. Upaya ini telah dilakukan melalui pelaksanaan berbagai festival atau even lokal maupun regional serta pembinaan kesenian, melalui sanggar ataupun grup seni di masyarakat, meskipun masih terbatas karena belum menjangkau semua wilayah di Kabupaten Minahasa. Namun pembinaan bagi siswa-siswa tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa. Adapun capaian kinerja bidang kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 95 Capaian kinerja Bidang Kebudayaan Tahun 2018-2024

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>persentase pelestarian warisan budaya</i>	n/a	76,14	83,10	84.14	83,89	84,87	83.55
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	n/a	77,22	84,21	82.35	85,61	85,92	85.11

Sumber : Disbudpar Kab. Minahasa, 2023

Capaian Persentase pelestarian warisan budaya maupun cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan peningkatan sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 meskipun sedikit menurun di tahun 2022, namun naik lagi capaiannya di tahun 2023.

Berdasarkan hasil pendataan Disbudpar Kabupaten Minahasa terdapat 128 cagar budaya di Kabupaten Minahasa. Dari 128 cagar budaya yang terdata itu terdapat 25 yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh BPCB dengan surat keputusan. Lokasinya tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa. Selain itu terdapat pula 168 grup kesenian di Kabupaten Minahasa yang mengembangkan 13 jenis

kesenian. Sayangnya dukungan pada ketersediaan sarana/prasarana kesenian masih sangat rendah terlihat dari jumlah gedung kesenian yang masih sangat minim.

Dalam upaya memajukan kebudayaan perlu disusun kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pengembangan kebudayaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa setiap daerah wajib menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Pikiran kebudayaan (PPKD) yang selanjutnya perlu direview setiap tahun.

q. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan

1). Jumlah perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Jumlah perpustakaan sejak tahun 2018 masih sama hingga tahun 2023 yaitu sebanyak 522 perpustakaan.

**Tabel 2.96 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Minahasa
Tahun 2018 s.d 2023**

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pmda	197	197	197	197	197	197
3.	Jumlah Perpustakaan milik Sekolah	324	324	324	324	324	324
4.	Total Perpustakaan (1+2+3)	522	522	522	522	522	522

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang pelayanan pendidikan.

**Tabel 2.97 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten
Minahasa Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Pengunjung	Pespu stakaan	Jumla h Pengu njung	Pespu stakaan	Pengunj ung	Pespus takaan	Pengunj ung	Pespusta kaan
1	Perpustakaa n Daerah	238	1	372	1	324	1	672	1

Sumber : Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

r. Urusan pemerintahan bidang kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengertian kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan.

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan Pemerintahan pilihan dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah. yaitu:

a. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan

Usaha perikanan yang potensial di kabupaten Minahasa adalah perikanan laut dan darat, namun potensi perikanan ini belum di lakukan secara intensif dan maksimal yang sebagian besar berada di pesisir pantai Kalasey, Tately, Tanawangko serta pantai Kombi, Kakas

Barat dan Langowan Selatan.

Khusus olahan perikanan darat yang terdapat di danau Tondano telah dikembangkan budidaya ikan Nila, Koi dan Betutu, disamping ikan Payangka yang merupakan satwa endemik di Danau Tondano. Adapun perkembangan hasil produksi perikanan ditunjukkan pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98 Hasil Produksi Perikanan 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No	Jenis Usaha Perikanan	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)
1	Perikanan tangkap						
	a. Perairan Laut	45.564	38.441	45.379	43.111	48105,5	47.968,69
	b. Perairan umum						
	- Waduk	2,3	2,4	2,1	1,9	1,9	1,50
	- Sungai	42	44,3	47,9	45,6	49,6	2,76
	- Danau	6.720	5.434,3	5.070	8.326	9343	27,05
2	Perikanan Budidaya						
	a. Kolam	6.721	4.234	22.409	22.424	16.587,25	1568,73
	b. Minapadi	4324	3,760	6,675	6,701	48,6	23,67
	c. Karamba Jaring Tancap (KJT)	44.655	43.652	27.769	28.875	32.986,43	48.528,00
	d. KJA Air Laut	1,4				0,43	0,43
	e. Rumpun laut					1,468	1,17

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024.

Jumlah kelompok nelayan binaan sebanyak 115 kelompok untuk perikanan budidaya dan khususnya untuk perikanan tangkap sebanyak 120 kelompok, dengan jumlah nelayan dan keluarga nelayan yang ditunjukkan pada Tabel 2.97.

**Tabel 2.99 Jumlah Nelayan/Petani Ikan dan Rumah Tangga Perikanan Tahun 2018 – 2023
Kabupaten Minahasa**

No	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan						Jumlah Rumah Tangga Perikanan						Jumlah Kelompok Nelayan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nelayan Perairan Umum	1.581	2.567	2.753	2.753	2.753	2.753	527	855	2.705	2.705	2.705	2.806	83	78	62	69	69	74
2	Nelayan di laut	4.712	5.091	4.957	4.957	4.957	4.957	1.570	1.697	5.091	2.705	2.705	2.701	229	224	214	223	223	226
3	Pembudidaya Ikan Kolam	1.802	1.782	1.764	1.764	1.764	1.594	601	594	588	2.705	2.705	3.092	91	87	93	95	95	96
4	Pembudidaya ikan Ikan Sawah (Minapadi)	963	976	1.112	1.112	1.112	1.841	321	325	370	2.705	2.705	2.725	51	53	49	53	53	53
5	Pembudidaya ikan di danau	3.421	3.436	3.524	3.524	3.524	3.597	1.140	1.145	1.174	2.705	2.705	2.712	223	231	242	251	251	257
	Jumlah	12.479	13.852	14.110	14.110	14.110	16.765	4.159	4.616	9.928	2.705	2.705	2.807	677	673	660	691	691	706

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Jumlah produk unggulan perikanan 2023 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.100.

**Tabel 2.100 Jumlah Produk Unggulan Perikanan 2020-2023
Kabupaten Minahasa**

No	Jenis Nelayan	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
		2020	2021	2022	2023
1	Ikan Mas	23.998	21092.46	21092.46	21.092,46
2	Ikan Nila	32.848	35104.22	35104.22	36.079,01
3	Ikan Lainnya	7	11	11	12,50
	Jumlah	56.853	56.207.68	56.207.68	57.183,97

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

b. pemerintahan bidang pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata yang dimiliki berdasarkan pada sumberdaya alam yang indah merupakan potensi objek wisata yang terus dikembangkan untuk menarik wisatawan mancanegara maupun domestik juga dapat menjadi pendorong bagi pengembangan kawasan-kawasan sekitarnya. Potensi wisata di Kabupaten Minahasa antara lain terdiri dari :

- 1) Wisata Alam: Wisata air terjun di Kecamatan Pineleng, Danau Tondano dan Pulau Likri, Wisata Pantai di Kecamatan Tombariri, Pineleng, Lembean Timur, Air terjun dan arung jeram di Sonder, Pendakian Gunung Souptan, Pemandian air panas di Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Kawangkoan, Wisata Religius Bukit Kasih di Kecamatan Kawangkoan, Pacuan Kuda di Kecamatan Tompaso,
- 2) Wisata Budaya/Sejarah: Watu Pinabetengan di Kecamatan Tompaso, Makam DR SAM Ratulangi dan Benteng Moraya di Kecamatan Tondano Barat, Goa Jepang Di Kecamatan Kawangkoan, Makam Imam Bonjol di Kecamatan Pineleng, Makam Kiay Modjo di Kecamatan Tondano Utara, Kuburan Reidel dan Swarz di Kecamatan Tondano Timur dan Langowan, serta bekas pangkalan lapangan

terbang amfibi di Kakas.

- 3) Wisata Industri/Minat khusus: Kerajinan tangan dari tanah liat di Kecamatan Remboken, produksi olahan kayu di Kecamatan Sonder dan Eris, Souvenir kayu kelapa, sulaman kain. dan wisata agro industri (PAKAKAAN).
- 4) Wisata Seni dan Budaya: antara lain tari lenso, maengket, katrili, cakalele, musik kolintang, musik bambu dan musik bambu klarinet.

Secara ringkas jumlah potensi objek wisata di Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.101 Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Minahasa Tahun 2023

NO.	Jenis Obyek Wisata	Jumlah
1	Obyek wisata alam	69
2	Obyek wisata buatan	44
3	Obyek wisata budaya	41
	Jumlah	154

Sumber : Disbudpar Kab. Minahasa, 2023

Potensi wisata Danau Tondano di Kabupaten Minahasa diharapkan akan menjadi ikon identitas Kabupaten Minahasa yang memiliki ciri khas Minahasa. Hal ini sangat didukung oleh beberapa kebijakan di bidang pariwisata yang menetapkan Danau Tondano sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

Dalam hal ketersediaan kebijakan Pariwisata di Kabupaten Minahasa, telah disusun materi teknis Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (RIPARKAB) yang saat ini sedang dalam proses penetapan. Selain dokumen tersebut pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa juga sudah terintegrasi dengan Rencana Induk Pengembangan Destinasi Wisata Nasional (RIDPN-ITMP Manado Likupang) yang menetapkan dua Daerah Tujuan Wisata (DTW) prioritas di Kabupaten Minahasa yaitu DTW Kawasan Danau Tondano dan sekitarnya, dan DTW Pantai Timur Minahasa. Dengan adanya

beragam potensi wisata, diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

Perkembangan sektor Pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.102 Capaian indikator sektor Pariwisata di Kabupaten Minahasa

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku/ Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata	6,53%	-20,04%	13,63%	9,86%	11,26%	11,26%	7,16%
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	80.96%	-97,41%	32.26%	0,43%	23,39%	179,49%	-13,04%
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	52,89%	-86,49%	37.86%	10,22%	-2,31%	30,86%	- 10,428%
4	Tingkat Hunian Akomodasi	65.39%	38.66%	50.17%	55.12%	52.50%	52,50%	31,99%

Sumber: Dinas Disbudpar Kabupaten Minahasa, 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan pariwisata pada semua jenis indikator menurun drastis pada tahun 2020. Tahun 2021 kembali meningkat perlahan demikian juga pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini dapat dipahami karena Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang membatasi pergerakan orang sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang berakibat menurunnya kontribusi sektor pariwisata serta tingkat hunian di Kabupaten Minahasa. Di tahun 2021, kebijakan pembatasan mulai longgar sehingga mulai meningkatkan geliat sektor pariwisata dan hal ini terus berlangsung hingga tahun 2023. Penurunan

hanya terjadi pada indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang ternyata bertumbuh negatif. Artinya jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Minahasa di tahun 2023 lebih sedikit dari tahun 2022 yang berbanding terbalik dengan kunjungan wisatawan mancanegara.

c. Urusan pemerintahan bidang pertanian

1) Pertanian

Kabupaten Minahasa merupakan kawasan yang terkenal dengan kawasan agraris dengan areal lahan pertanian yang cukup luas dan menghasilkan bermacam ragam produk pertanian. Namun kondisi yang terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan, banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian/perkebunan untuk dipakai menjadi kawasan permukiman dan perdagangan. Walaupun kondisi luasan di daerah yang sangat besar, ternyata masih banyak lahan yang produktif belum dikelola secara maksimal.

Perkembangan yang terjadi saat ini, dimana telah muncul anomali iklim yang sangat mempengaruhi pola tanam serta produktivitas pertanian, sehingga diperlukan analisis yang lebih akurat untuk meningkatkan produktivitas.

Daya dukung pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten Minahasa selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan, antara lain dalam pembentukan PDRB, penyerapan dan penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha serta penyediaan produksi pangan regional/daerah.

Terdapat sekitar 5 jenis komoditas tanaman pangan yang diusahakan masyarakat kabupaten Minahasa yaitu Komoditi padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, dan kedele.

Komoditas padi sebesar dengan total produksi sebesar 64.704 ton menempati urutan tertinggi capaian produksi. Potensi dan komoditas pertanian di Kabupaten Minahasa digambarkan melalui Tabel 2.103.

Tabel 2.103 Perkembangan Komoditi Tanaman pangan Tahun 2018-2023
Kabupaten Minahasa

No.	Komoditi	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	8.000	10.598	10.172	14.754,1	12.309	11.764
		Produktivitas(Ku/Ha)	40,00	45,00	52,50	5,5	57	5,6
		Produksi (Ton)	32.000	47.691	53.403	81.148	70.161,30	64.704,9
2	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	5.082	6.132	129	415,3	0	0
		Produktivitas(Ku/Ha)	21,76	22,88	20,00	2	0	0
		Produksi (Ton)	11.058	14.030	259	831	0	0
3	Jagung	Luas Panen (Ha)	30.000	30.677	31.485	22.575	26.360	9.292
		Produktivitas(Ku/Ha)	40,00	44,00	57,50	6	60,1	5,8
		Produksi (Ton)	120.000	134.981	181.037	135.450	158.424	54.588
4	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	292.00	300	384	520	469	445
		Produktivitas(Ku/Ha)	14,36	14,37	20,00	2	20	1,7
		Produksi (Ton)	419	431	768	1040	989,8	869,8
5	Kedele	Luas Panen (Ha)	10.632.00	1.332	639	678	0	0
		Produktivitas(Ku/Ha)	14,40	14,22	12,00	1,2	0	0
		Produksi (Ton)	15.310	1.894	767	814	0	0

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Minahasa. Tahun 2024

2) Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan yang diusahakan penduduk setempat mencakup : kelapa, cengkih, pala, kopi, vanili, aren dan tanaman lainnya seperti tanaman cassiavera (kayu manis) dan tanaman kemiri. Pola penanamannya masih secara sederhana pada lahan perkebunan rakyat yang dikelola langsung oleh rakyat secara turun temurun. Tanaman cengkih dan kelapa merupakan dua komoditas yang banyak dikelola oleh masyarakat dan sampai saat ini merupakan andalan produksi perkebunan di Kabupaten Minahasa. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada jenis komoditas ini.

Sebagian tanaman cengkih sudah perlu direhabilitasi dan tanaman kelapa sudah perlu diremajakan disamping perlunya pembinaan dan sentuhan teknologi dalam meningkatkan hasil

turunan komoditas ini, disamping produksi Virgin Coconut Oil (VCO) yang sudah banyak di produksi oleh kelompok usaha masyarakat setempat. Pada tahun 2023 tanaman kelapa yang merupakan salah satu tanaman andalan yang mayoritas terdapat di Kecamatan Lembean Timur, Kombi, Tombariri, Tombariri Timur dan diikuti Kecamatan Mandolang dan Tombulu seluas 13.650,38 ha dengan produksi 15.211 ton. Demikian juga dengan cengkeh yang mayoritas terdapat di Kecamatan Sonder, Kombi, Tombulu yang diikuti Kecamatan Lembean Timur, Kakas dan Tombariri Timur dengan total luas 18.662,77 ha dengan produksi sebesar 198,50 ton. Sedangkan tanaman pala yang pada beberapa tahun terakhir ini sementara dikembangkan mayoritas terdapat di Kecamatan Kombi, Sonder, Lembean Timur, Tombariri Timur dan Kecamatan Tombulu dengan luas total 1.171 Ha dengan produksi 66,51 ton.

Tabel 2.104 Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No.	Komoditi	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	13.617	21.347	15.117	22.530	14.007	13.650,38	15.211,00	15.407,70	13.665	16.108,05	13.650,38	15.211,00
2	Cengkih	14.571	14.571	17.296	2.314	17.296	18.662,77	198,50	30,25	15029,63	961,12	18.662,77	198,50
3	Pala	617.50	35.77	617.50	35.77	717,50	1.296,00	108,70	35,77	231,5	45	1.296,00	108,70
4	Kopi	305.25	31.71	305.25	31.71	365,25	306,00	34,00	24,96	33	35,5	306,00	34,00
5	Vanili	237.25	46.45	196.00	0.00	206,00	116,00	37,00	50,40	0,0	0,0	116,00	37,00
6	Kakao	46.50	11.20	46.50	11.00	46,50	0,00	0,00	3,60	3	3,50	0,00	0,00
7	Jambu Mete	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Casiavera	18.00	0.00	18.00	0.00	18,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Lada	0.50	0.50	0.00	0.00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Kemiri	21.50	5.80	21.00	5.85	21,00	6,15	15,50	3,50	0	0	0,00	0,00
11	Aren	439.00	16.78	439.00	16.78	439,00	17,00	196,25	10.292,25	194	3,50	15,00	2,50
12	Jarak Pagar	68.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Minahasa. Tahun 2024

3) **Peternakan**

Usaha di bidang peternakan cukup memadai terutama jenis ternak ayam, itik, kambing serta babi. Produksi daging relatif sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. bahkan sebagiannya dipasok ke daerah lain.

Pada tahun 2019-2023 usaha peternakan ayam buras, ayam ras (pedaging dan petelur) mengalami peningkatan . Penurunan yang sangat drastis dialami oleh populasi babi pada tahun 2023 dikarenakan pandemi Virus ASF (African Swine Fever) yang menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi. Areal peternakan rakyat banyak terdapat di Kecamatan Pineleng, Tombulu, Sonder, Kawangkoan, Tompaso. Langowan (Kawasan Agropolitan Pakakaan) dan Kota Tondano.

Tabel 2.105 Data Jumlah Ternak di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023

No.	Populasi	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	25.400	25.906	25.972	26.761	26.761	10.107
2	Babi	127.400	129.944	129.721	130.968	130.969	23.863
3	Kuda	3.150	3.150	3.056	2.511	2.511	1.400
4	Anjing	-	-	-	-	-	-
5	Kambing	2.007	2.007	2.007	1.987	1.987	1.089
6	Itik	67.100	68.443	68.443	69.127	69.127	43.864
7	Ayam Buras	735.500	750.209	750.208	725.084	725.084	785.102
8	Ayam Ras Petelur	278.200	292.110	306.750	439.610	439.610	557.020
9	Ayam Ras Pedaging	1.937.700	1.976.454	1.983.954	1.978.337	1.978.337	1.445.020
10	Puyuh	1.937.700	80.975	80.975	81.735	81.735	68.018
11	Kelinci	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Minahasa. Tahun 2024

d. Urusan pemerintahan bidang kehutanan

Kawasan hutan lindung sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Minahasa meliputi hutan lindung Gunung Mahawu, Gunung Tampusu, Gunung Lembean, Gunung Kawatak, Gunung Soputan, Gunung Masarang, Gunung Lengkoan, Gunung Kaweng,

dan hutan lindung/Hutan Bakau Tanjung Kelapa.

Rencana pengembangan hutan lindung meliputi hutan lindung Sungai Laundano-Paso di kecamatan Kawangkoan Utara, hutan lindung Gunung Tatawiran di Kecamatan Pineleng, dan hutan lindung Gunung Kamintong di Kecamatan Eris.

e. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral

Hasil produksi pertambangan di Kabupaten Minahasa di dominasi oleh 5 (lima) jenis bahan tambang dalam bentuk galian yaitu pasir, kerikil, tanah urug, koalin dan batuan.

Disamping pengelolaannya dilakukan oleh pengusaha, namun masih ada pengelolaan galian c pada khususnya dikelola oleh kelompok masyarakat.

Saat ini proses perijinan untuk usaha galian C sudah sangat selektif untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Berikut ini tabel produksi galian C (Tabel 2.106).

Tabel 2.106 Potensi dan Energi Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No	Komoditas	Tahun 2023			
		Lokasi	Desa/Kel	Potensi	Lokasi
A	MINERAL LOGAM		A	MINERAL LOGAM	
1	Pasir Besi	Kec.Langowan Selatan	1	Pasir Besi	Kec.Langowan Selatan
		Kec.Kakas Barat			Kec.Kakas Barat
		Kec.Tombariri	Bukit Tinggi	4.000.000 Ton	Kec.Tombariri
			Poopo	1.000.000 Ton	
			Tanawangko	4.131.374 Ton	
			Teling		
2	Emas	Kec. Pineleng	2	Emas	Kec. Pineleng
		Kec. Tondano Timur	Makalonso w		Kec. Tondano Timur
		Kec. Kombi	Kombi		Kec. Kombi
B	MINERAL NON LOGAM DAN BANTUAN		B	MINERAL NON LOGAM DAN BANTUAN	

1	Belerang	Kec. Sonder	1	Belerang	Kec. Sonder
		Kec. Langowan Barat	Toraget	81.000 Ton	Kec. Langowan Barat
		Kec. Kawangkoan	Kanonang		Kec. Kawangkoan
2	Kaolin	Kec.Langowan Utara	2	Kaolin	Kec.Langowan Utara
			Tempang		
		Kec.Kawangkoan Barat	Kanonang	500.000 Ton	Kec.Kawangkoan Barat
3	Tras	Kec. Kawangkoan Barat	3	Tras	Kec. Kawangkoan Barat
			Talikuran	600.000 m3	
		Kec,Tombulu	Tomasian Atas	10.000 M3	Kec,Tombulu
		Kec. Tondano Utara	Sawangan	10.00 M3	Kec. Tondano Utara
			Tonsea Lama	7.500 M3	
		Kec.Tondano Timur'	Makalonso w	7.500 M3	Kec.Tondano Timur'
		Kec. Pineleng	Papakelan	10.000 M3	Kec. Pineleng
			Pineleng	106.500.000 M3	
4	Obsidian	Kec.Tondano Selatan	4	Obsidian	Kec.Tondano Selatan
			Kasuang	600.000 M3	
		Kec. Tondano Barat	Watulambot	5.000 M3	Kec. Tondano Barat
			Wewelen	7.500 M3	
5	Batu	Kec.Pineleng	5	Batu	Kec.Pineleng
			Tateli	79.743.700 M3	
			Sea	10.000.000 M3	
		Kec. Tombulu	Sawangan	5.000.000 M3	Kec. Tombulu
		Kec.Tondano Barat	Wewelen	3.000.000 M3	Kec.Tondano Barat
			Watulambot	2.500.000 M3	

		Kec. Langowan	Noongan I,II	133.750.000 M3	Kec. Langowan
6	Pasir Vulkanis	Kec.Langowan Selatan	6	Pasir Vulkanis	Kec.Langowan Selatan
7	Lempung	Kec.Remboken	7	Lempung	Kec.Remboken
			Parepey		
		Kec. Tombariri	Lemoh	9.000 M3	Kec. Tombariri
			Lolah		
		Kec. Eris	Touliang Oki	3.000 M3	Kec. Eris
		Kec. Langowan selatan	Noongan	4.000 M3	Kec. Langowan selatan
8	Batu lapis	Kec.Sonder	8	Batu lapis	Kec.Sonder
9	Pasir	Kec.Tombariri	9	Pasir	Kec.Tombariri
		Kec.Langowan Barat		2.000 M3	Kec.Langowan Barat
		Kec. Tompaso		3.000 M3	Kec. Tompaso
10	Basah	Kec.Langowan	10	Basah	Kec.Langowan
11	Batu Apung	Kec. Tombariri	11	Batu Apung	Kec. Tombariri
			Ranotongko r		
			Lolah		
		Kec.Eris	Touliang Oki	100.-000 M3	Kec.Eris
		Kec.Tompaso	Tompaso	4.000 M3	Kec.Tompaso
12	Energi Listrik Tenaga Panas Bumi	Kec.Tompaso	12	Energi Listrik Tenaga Panas Bumi	Kec.Tompaso
		Kec.Remboken	Kasuratan	40 M	Kec.Remboken
		Kec. Kawangkoan	Kanonang	20 x 2 M	Kec. Kawangkoan
		Kec. Sonder	Leilem	40 M	Kec. Sonder
13	Energi Listrik Tenaga Mikro	Kec.Kawangkoan Barat	13	Energi Listrik Tenaga Mikro	Kec.Kawangkoan Barat
			Ranowangk o		

	Kec.kawangkoa n Utara	Sungai Tincep	4,5 M w	Kec.kawangkoa n Utara
	Kec. Sonder	Sungai maasim	2 mw	Kec. Sonder
	Kec. Tompaso	Sungai Ranowangk o	2x2 mw	Kec. Tompaso
	Kec. Tombariri	Sungai Kolongan	12 Kw	Kec. Tombariri
	Kec.Kombi (PNPM)	Sungai Lalumpe	14 Kw	Kec.Kombi (PNPM)
		Sungai Bulo	2 Mw	
		Sungai Kombi'	2 Mw	
		Sungai Ranowangk o	2 Mw	
	Kec. Tombulu	Sungai Tombulu	2 Mw	Kec. Tombulu
	Kec. Langowan	Sungai Tombingon	2 Mw	Kec. Langowan

Sumber : Dinas Perdagangan Kab.Minahasa. Tahun 2024

Seluruh desa dan kecamatan di kabupaten Minahasa telah mendapat sambungan listrik. Ketersediaan dan kebutuhan energi listrik di kabupaten Minahasa cenderung meningkat. Hal ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kemampuan rumah tangga dan industri mengkonsumsi listrik.

Ketersediaan di Kabupaten Minahasa energi listrik sangat besar baik yang sudah berproduksi maupun dalam tahapan eksplorasi yang terdapat di:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tonsea Lama Tondano Utara;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong V dan VI di Sonder (2x20 MW) dan Tompaso (2x20 MW);
3. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Tincep I. II. III. IV dengan kapasitas kurang lebih 3.6 MW. PLTM Kiawa. Kayuwi. Sungai Sawangan. dan Sungai Tuloun; dan
4. Pengembangan potensi PLTP di Remboken, Kawangkoan Barat dan

Tompaso.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Perdagangan memegang peran penting dalam perekonomian Kabupaten Minahasa. Terdapat tiga lokasi yang menjadi pusat perdagangan, yaitu: Tondano Barat untuk Kec. Tondano Barat, Tondano Timur, Tondano Utara, Tondano Selatan, Eris, Kombi, Lembean Timur dan Remboken; Kawangkoan untuk Kec. Kawangkoan, Tompaso, Sonder, dan Leilem; Langowan Timur untuk Kec. Langowan Barat, Langowan Timur, Langowan Selatan, Langowan Utara. Kakas, serta Kecamatan Ratahan dan Kec. Belang yang merupakan bagian dari Kab. Minahasa Tenggara. Adapun pasar yang dikelola Pemerintah di Kabupaten Minahasa tahun 2020 sebanyak 9 pasar (Tabel 2.107).

Tabel 2.107 Pasar yang dikelola Pemerintah di Kabupaten Minahasa Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pasar
1	Tondano Utara	
2	Tondano Timur	
3	Kombi	
4	Eris	
5	Lembean Timur	
6	Kakas Barat	
7	Kakas	1
8	Remboken	1
9	Tondano Selatan	
10	Tondano Barat	2
11	Mandolang	
12	Tombulu	
13	Pineleng	
14	Tombariri Timur	
15	Tombariri	1
16	Sonder	1
17	Kawangkoan Utara	
18	Kawangkoan Barat	
19	Kawangkoan	1
20	Tompaso Barat	1
21	Tompaso	
22	Langowan Utara	
23	Langowan Selatan	
24	Langowan Barat	
25	Langowan Timur	1
	Jumlah Pasar	9

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Tabel 2.108 menunjukkan potensi perizinan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan wajib tera/tera ulang yang ada di pasar daerah di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.108 Potensi UTTP dan Wajib Tera/Tera Ulang yang ada di Pasar Daerah Di Kabupaten Minahasa

No	Jenis UTTP	Tondano	Tompaso	Kawangkoan	Langowan Timur	Remboken	Sonder	Kakas	Tombariri
1	Meteran	4	1	2	2	1	2		1
	Meteran Kayu	4	1	2	2	1	2		1
2	Takaran								
	Takaran Basah	71	8	9	52	50	5	2	5
	Takaran Kering	191	42	126	190	70	77	24	75
3	Timbangan	-				-			
	Timbangan Elektronik	9	5	7	15	-	3		2
	Timbangan Pegas	201	45	130	223	48	52	6	38
	Timbangan Cepat	-	-	-	-	-	-		
	Neraca	4	-	-	-	-	-		
	Dacin	9	1	21	4	1	-	2	2
	Timbangan Milisimal					-	-		
	Timbangan Santisimal	11	-	8	33	1	1	1	3
	Timbangan Desimal	-	-	-	-	-	-		
	Timbangan Bobot Ingsut	-	-	-	-	-	-		
	Timbangan Meja Beraner	-	-	-	-	-	-		

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024

g. Urusan pemerintahan bidang perindustrian

Kondisi perindustrian di Kabupaten Minahasa tercermin dari data industri yang terdiri dari industri pengolahan ikan beku oleh PT Mikaindo di Tombariri dan industri kecil menengah (IKM) yang terdiri dari IKM pangan (73 unit), sandang (22 unit), kimia dan bahan bangunan (92 unit), logam dan elektronika (214 unit) dan kerajinan (19 unit). Tenaga kerja yang diserap oleh IKM logam dan elektronika adalah yang terbesar sebanyak 1.235 orang atau 50,83% dari tenaga kerja keseluruhan yang berjumlah 2.424 orang.

Namun dari nilai investasi (NI), yang paling tinggi adalah IKM pangan. Tumbuh dan berkembangnya IKM baru terpusat pada satu tempat sesuai dengan ketersediaan bahan baku maupun oleh faktor lainnya.

Usaha industri yang tersebut kemudian membentuk sentra-sentra produksi, seperti: pengolahan VCO di Desa Lemoh Kecamatan Tombariri, pengolahan kacang goreng di Kecamatan Kawangkoan, usaha meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder, usaha keramik di Desa Pulutan Kecamatan Remboken dan usaha pandai besi di Tondano Utara.

2.1.3.4. Unsur Pendukung urusan pemerintahan

Unsur-unsur pendukung pemerintahan terbagi dua yaitu unsur Sekretariat Daerah dan Unsur Sekretariat DPRD

a. Unsur Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan unsur pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Minahasa yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Minahasa. Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan Administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa terdiri atas 3 (tiga) Asisten; 12 (dua belas) Bagian dan 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian.

b. Unsur Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pemerintahan yang memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD membawahi 3 (tiga) Bagian dan 8 (delapan) Sub Bagian.

Hubungan bupati dengan DPRD diupayakan membina hubungan yang serasi, seimbang dan dinamis antara pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga legislatif, melalui rapat koordinasi, rapat dengar pendapat, dan peninjauan lapangan.

2.1.3.5. Unsur penunjang urusan pemerintahan

a. Unsur Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan acuan utama dalam menyusun dokumen perencanaan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan diperlukan perencanaan partisipatif “Participatory Planning” yang menjadi tuntutan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan Kabupaten Minahasa harus mengantisipasi pertumbuhan daerah yang dinamis dan pesat, dengan memperhatikan kabupaten/kota tetangga yang saling mempengaruhi dan saling bersinergis. Perencanaan yang dilakukan memadukan kebijakan secara nasional “top down” dan usulan aspirasi masyarakat yang dimulai dari bawah “bottom up planning” disamping mendapat masukan teknokrat dan politis yaitu melalui musrenbang desa/kelurahan kemudian musrenbang kecamatan, dan kabupaten secara berjenjang. Dokumen perencanaan yang dijadikan acuan adalah RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RAPBD, dan dokumen pendukung lainnya antara RTRW dan RDTR. Kabupaten Minahasa telah memiliki dokumen RPJPD Tahun 2008-2028 dan penyelesaian Perda dokumen RTRW Tahun 2013-2033. Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang Sistem pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga capaian kinerja sulit diukur. Mutu sumberdaya manusia, khususnya kemampuan di bidang perencanaan dan organisasi masih rendah.

b. Unsur Keuangan

Menurut PP Nomor 12 tahun 2019 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan

kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah haruslah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

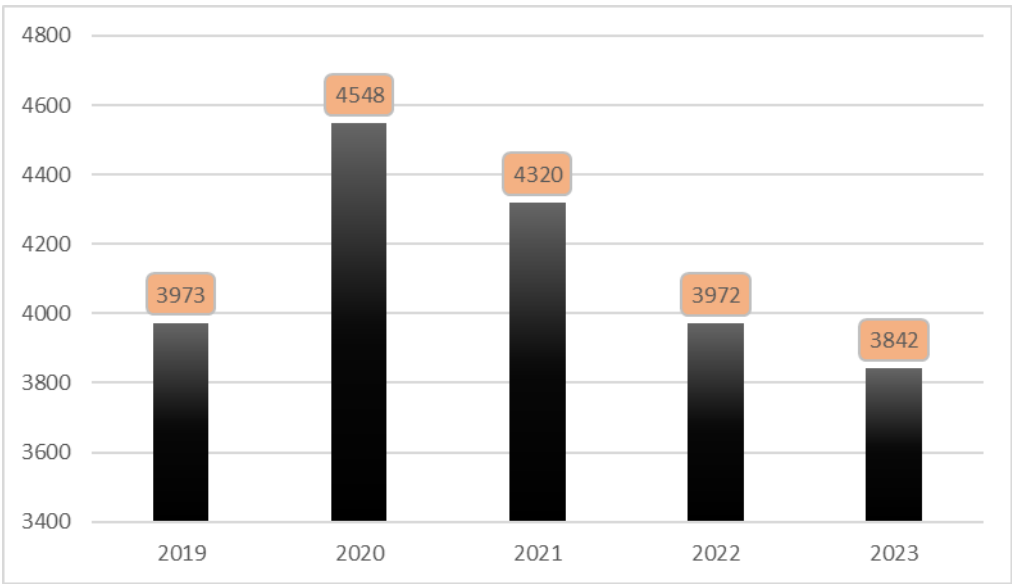
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan daerah di Indonesia yang ditetapkan dengan Perda.

Pengelolaan kekayaan daerah, diarahkan pada penginventarisasian dan penggunaan aset-aset milik daerah yang efektif dan efisien serta ekonomis, dan telah dilakukan penelitian barang melalui sensus barang dan penertiban penggunaan barang aset daerah, terutama di tingkat dinas daerah dan kecamatan

c. Unsur Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Minahasa terus menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada jumlah PNS di tahun 2019 sebanyak 4636 orang, menurun di tahun 2020 menjadi 4548 orang dan di tahun 2021 terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 masing-masing sebanyak 4321 orang dan 3973 orang.

**Grafik 2.27 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Minahasa
Tahun 2019-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.Tahun 2023

Sementara itu, Jumlah PNS menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin di Kabupaten Minahasa sebagaiana yang tersaji pada tabel dibawah ini, dimana pada tahun 2020 Jumlah PNS golongan I sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 375 orang, golongan III sebanyak 2577 orang dan golongan IV sebanyak 4548 orang. Sementara itu, di tahun 2021 mengalami penurunan dimana untuk PNS golongan I menjadi 4 orang, golongan II sebanyak 333 orang, golongan III sebanyak 2444 orang, dan golongan IV sebanyak 1521 orang. Di tahun 2023 jumlah PNS terus mengalami penurunan dikarenakan kuota yang semakin sedikit, hal ini terlihat dari jumlah PNS golongan I yang turun menjadi 3 orang, golongan II sebanyak 282 orang, golongan III sebanyak 2288 orang, golongan IV sebanyak 1420 orang.

Tabel 2.109 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Minahasa Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2023

Golongan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin											
	Kelamin											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
I	4	4	3	3	1	0	0	0	5	4	3	3
II	166	148	117	102	209	185	163	102	375	333	280	204
III	811	761	702	690	176	168	157	690	257	244	228	138
					6	3	8		7	4	0	0
IV	390	387	361	359	120	113	104	359	159	152	141	718
					1	4	9		1	1	0	
Minahasa	137	130	118	115	317	300	279	268	454	430	397	384
a	1	0	3	4	7	2	0	8	8	2	2	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.Tahun 2023

d. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.

Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Minahasa masih belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Kendala terkait dengan hal tersebut antara lain :

- 1) Lemahnya peran kelembagaan riset dan hasil IPTEK yang diterapkan belum optimal ;
- 2) Lemahnya pengembangan daya inovasi;
- 3) Kurangnya kemitraan dengan lembaga-lembaga yang terkait serta kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 4) Belum adanya kelembagaan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dan jasa;

5) Belum optimalnya pengembangan sumberdaya manusia berkeahlian tinggi.

2.1.3.6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan

Penyelenggaraan fungsi pengawasan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan pola tindak dan mental aparatur yang berdasarkan etika serta moral menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta terciptanya penegakan supremasi hukum.

2.1.3.7. Unsur kewilayahan

Unsur kewilayahan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai sebuah perangkat daerah organisasi ini memiliki kewenangan berkenaan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya. selain itu Camat sebagai pemimpin kecamatan mendapatkan kewenangan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.

Selain kedua organisasi sebagaimana PP Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, unsur kewilayahan lain yang setipe tapi memiliki status yang berbeda adalah Desa atau Pemerintah Desa. Keberadaan desa dibedakan dengan kelurahan mengingat statusnya sebagai daerah otonom asli.

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota. Pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'. Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan, ujung tombak Pelayanan, ujung tombak Pemberdayaan dan ujung tombak pembangunan.

Meskipun pemberdayaan unsur kewilayahan belum dilaksanakan secara optimal, akan tetapi hal tersebut tidak berarti belum ada upaya

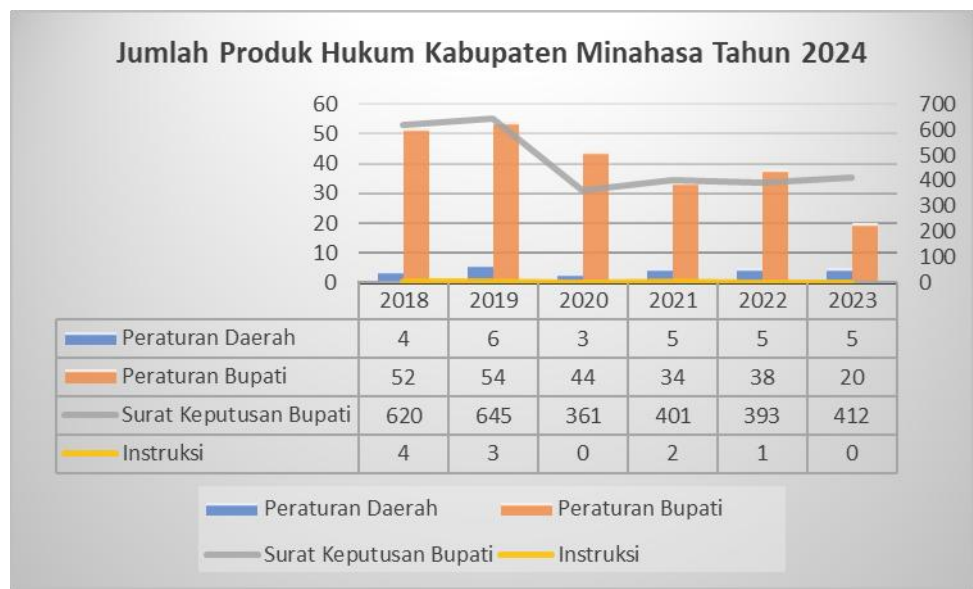
dari pemerintah untuk melaksanakannya.

Di Kabupaten Minahasa terdapat 25 wilayah Kecamatan

a. Urusan pemerintahan umum

Aspek Ketatalaksanaan. yaitu melakukan inventarisasi dan penajaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yakni hukum dan keamanan. Pada Tahun 2018 Jumlah Perda sebanyak 4 buah, Perbup 52 buah, SK Bupati 620 buah dan instruksi bupati 4 buah. Di tahun 2022 terdapat produk hukum daerah yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5 buah peraturan daerah (Perda), , 38 buah Peraturan Bupati, 393 surat keputusan Bupati, dan 1 buah instruksi Bupati.

Grafik 2.28 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023



Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa.Tahun 2024

Birokrasi sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran, program, dan kegiatan di daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dalam rangka tugas pokok birokrat tersebut, dibutuhkan perwujudan nyata tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Untuk pemberdayaan aparatur daerah, maka citra dan peran pemerintah daerah harus dibenahi berdasarkan tata pemerintahan yang lebih efisien dan efektif agar kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

Pemekaran wilayah Minahasa yang merupakan aspirasi masyarakat yang saat diwacanakan untuk daerah Kabupaten Minahasa Barat dan Kota Langowan.

Bidang politik merupakan bagian dari pemerintahan umum karena terkait dengan stabilisasi. Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2018 merupakan contoh sukses pelaksanaan politik daerah. Data pemilihan tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berhak memilih 265.835 orang dan yang menggunakan hak pilih 231.714 orang, ini berarti kesadaran masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebesar 80,40%. Sebanyak 14 partai politik di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2014-2019 dan bertambah menjadi 16 Partai Politik pada Tahun 2019-2023

Tabel 2.110 Partai Politik Di Kabupaten Minahasa

PARTAI POLITIK TAHUN 2014-2019	PARTAI POLITIK TAHUN 2019-2023

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun seperti yang tertuang pada Tabel 2.111.

**Tabel 2.111 Jumlah LSM aktif Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LSM Terdaftar	52	45	45	62	64
2	Jumlah LSM tidak Aktif	9	-	-	7	7
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	43	45	45	55	57

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah dan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Kabupaten Minahasa terkenal dengan besarnya toleransi kehidupan antar umat beragama, hal ini terjadi berkat dukungan organisasi yang sangat aktif berperan didalamnya yaitu BKSAU, FKUB, dan BAMAG yang didukung dengan pola kehidupan masyarakat yang religius sehingga seperti yang ada pada Tabel 2.112 dapat dilihat banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Minahasa serta rasio yang terus meningkat.

Tabel 2.112 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Minahasa Tahun 2020 – 2025

No	Bangunan	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
		Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio	Jmlh	Pemeluk	Rasio
1	Mesjid	33	16.943	513,4	34	17.020	500,5	40	22.580		40	23.709	341	37	24.698		124	24.698	
2	Gereja	962	309.225	321,4	1038	310.822	299,4	1.058	324.983	307,167	1.078	341.232	226	1.067	327.279		1.142	327.279	
3	Pura	4	128	32	4	128	4	4	210	52,5	4	230	53	4	200		3	216	
4	Vihara	1	29	29	1	29	1	3	75	25	1	98	26	1	73		2	73	
5	Kelenteng		7			7			7						27		1	27	
6	Jumlah	1000	326.332	326,3	1.077	328.006	304,5	1.105	347.855	3,4	1.123	365.276	646		448			448	

Sumber : Bagian Setda Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Pada Tahun 2023, beras yang dikonsumsi masyarakat Minahasa sebanyak 104,20 Kg per kapita per tahun. Dibagi 365 hari dalam satu tahun, maka rata-rata setiap orang di Minahasa mengkonsumsi 0,285 Kg beras dalam sehari. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.

Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Menurut laporan Dinas Pangan, periode 2018-2023 konsumsi beras per kapita pertahun bervariasi. Jumlahnya 94,9 Kg pada tahun 2018-2020, lantas naik menjadi 107,7 Kg pada tahun 2021. Pada tahun 2022 turun menjadi 105,7 Kg dan kembali turun pada tahun

2023 menjadi 104,20 Kg.

Tabel 2.113 Angka Konsumsi Beras Per Kapita Pertahun Kabupaten Minahasa

NO	KECAMATAN	KONSUMSI KB/KAPITA/TAHUN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tondano Utara	132,4	94,1	94,1	94,1	106,9	106,4	104,20
2	Tondano Barat	132,0	93,9	93,9	93,9	106,5	105,5	104,6
3	Tondano Timur	133,7	95,1	95,1	95,1	107,9	106,5	105,50
4	Tondano Selatan	134,6	95,7	95,7	95,7	108,6	104,4	107,30
5	Remboken	133,3	94,8	94,8	94,8	107,6	105,7	106,60
6	Eris	132,7	94,3	94,3	94,3	107,2	105,6	106,30
7	Kombi	129,9	92,4	92,4	92,4	104,8	104,2	104,70
8	Lembean Timur	129,2	91,8	91,8	91,8	104,2	105,7	109,10
9	Kakas Barat	135,4	96,3	96,3	96,3	109,3	107,3	107,20
10	Kakas	134,5	95,6	95,6	95,6	108,6	107,5	107,10
11	Langowan Barat	134,5	95,6	95,6	95,6	108,6	105,7	106,50
12	Langowan Timur	135,3	96,2	96,2	96,2	109,2	106,5	107,20
13	Langowan Selatan	134,6	95,7	95,7	95,7	108,6	105,7	107,30
14	Langowan Utara	134,4	95,6	95,6	95,6	108,5	105,7	105,60
15	Tompaso	134,4	95,6	95,6	95,6	108,5	105,7	106,90
16	Kawangkoan	133,4	94,8	94,8	94,8	107,7	105,6	106,50
17	Kawangkoan Barat	133,8	95,1	95,1	95,1	108	106,2	104,30
18	Kawangkoan Utara	133,5	95,1	95,1	95,1	108	106,5	104,90
19	Sonder	134,4	95,6	95,6	95,6	108,5	105,7	107,10
20	Tombariri	132,2	94,0	94,0	94,0	106,7	104,4	106,70
21	Pineleng	132,1	93,9	93,9	93,9	106,6	105,7	105,80
22	Tombulu	133,3	94,8	94,8	94,8	107,6	105,7	105,90
23	Tombariri Timur	132,3	94,8	94,8	94,8	107,7	104,6	106,60
24	Mandolang	133,4	94,8	94,8	94,8	107,7	105,4	106,10
25	Tompaso Barat	134,6	95,7	95,7	95,7	108,6	105,2	106,40
Jml	Rata-rata	133,4	94,9	94,9	94,9	107,7	105,7	104,20

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.114 dapat disimpulkan bahwa angka konsumsi beras rumah tangga per kapita menurun dari tahun 2018 s.d Tahun 2023. Adapun konsumsi beras rumah tangga paling banyak di Kecamatan Kakas Barat sebesar 96,3 Kg. Kemudian, Kecamatan Langowan Timur dan Kecamatan Tondano Selatan menyusul masing-masing sebanyak 96,2 Kg dan 95,7 Kg.

**Tabel 2.114 Angka Konsumsi Beras Rumah Tangga Per-Kapita Tahun
2018-2023 Kabupaten Minahasa**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eris	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
2	Kakas	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
3	Kakas Barat	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3
4	Kawangkoan	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
5	Kawangkoan Barat	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
6	Kawangkoan Utara	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
7	Kombi	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4
8	Langowan Barat	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
9	Langowan Selatan	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
10	Langowan Timur	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
11	Langowan Utara	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
12	Lembean Timur	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
13	Pineleng	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
14	Mandolang	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
15	Remboken	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
16	Sonder	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
17	Tombariri	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94
18	Tombariri Timur	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
19	Tombulu	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
20	Tompaso	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
21	Tompaso Barat	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
22	Tondano Barat	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
23	Tondano Selatan	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
24	Tondano Timur	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
25	Tondano Utara	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
	Rata-Rata / Kapita	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan). Kemajuan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator yang diantaranya adalah dari sisi belanja atau pengeluaran. Adapun pengeluaran/belanja makanan dan non makanan tahun 2023 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115 Pengeluaran/Belanja Makanan dan Non Makanan Tahun 2023 Kabupaten Minahasa

Komodity	2020	2021	2022	2023
Makanan/Food				
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	72.299	80.392	78.815	95160
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	4.542	7.593	9.619	10564
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	56.661	68.650	74.267	74910
Daging/ <i>Meat</i>	24.432	34.296	43.512	37052
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	28.312	29.999	31.311	36961
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	39.209	55.141	66.185	60318
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	7.028	7.554	9.507	11332
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	36.013	29.696	31.549	32266
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	12.867	15.616	24.617	22201
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	16.542	17.003	18.654	19716
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	7.420	10.894	13.075	13236
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	5.625	6.361	7.724	9200
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	194.215	174.528	240.147	230768
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	63.664	61.482	72.322	70100
Jumlah makanan/ Total food	568.829	599.205	721.323	723783
Bukan makanan/ Non-food				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household Facilities</i>	267.015	315.903	289.802	327.522
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	127.390	218.678	139.103	157.390
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and Headgear</i>	40.844	31.843	39.278	42.395
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	68.993	64.370	32.366	52.715
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	41.096	51.099	56.261	59.778
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	17.709	23.597	18.226	19.751
Jumlah bukan makanan/ Total non-food	563.047	705.490	575.039	659.550
Jumlah/ Total	11.318.761	304.695	1.296.359	1.383.333

Sumber : Kabupaten Minahasa dalam Angka Tahun 2023

Kemampuan pemenuhan kalori masyarakat pada umumnya mengalami peningkatan diatas 2 juta kalori / hari. Pada golongan pengeluaran kedua nilai konsumsi rata-rata hanya 1.285 kilo kalori dan yang terbesar adalah 3.748 kilo kalori.

Sedangkan untuk Pengeluaran Perkapita Kabupaten Minahasa naik dari Tahun 2018 sebesar Rp.12.319.000 naik hingga Tahun 2019 Sebesar Rp. 12.720.000 Turun kembali di Tahun 2020 menjadi Rp.12.395.000,00 kemudian naik menjadi Rp.12.481.000 di tahun 2021 dan terus naik sampai di Tahun 2023 Sebesar Rp. 13.027.000 Dapat dilihat seperti pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Kabupaten /Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Minahasa	12.319.000	12.720.000	12.395.000	12.481.000	12.690.000	13.027.000

Sumber: BPS Provinsi Sulut, Tahun 2024

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2017 s.d 2023 Kabupaten Minahasa menunjukkan peningkatan (Tabel 2.117).

Tabel 2.117 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	NTP	95.38	94.33	98.79	106,79	108,93	112,84

Sumber : BPS Sulawesi Utara. Tahun 2024

c. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Adanya fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungan dengan ketersediaannya (*availability*) untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Menurut data Pada tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.118, nampak bahwa pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Minahasa relatif terpenuhi dimana untuk kabupaten Minahasa sudah berada pada angka 94,9, sekalipun belum merata pada semua wilayah kecamatan. Adapun data di tahun 2023 belum tersedia.

Tabel 2.118 Indeks Dimensi Infrastruktur per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Indeks
1	Eris	53
2	Kakas	58
3	Kakas Barat	56
4	Kawangkoan	45
5	Kawangkoan Barat	54
6	Kawangkoan Utara	47
7	Kombi	55
8	Langowan Barat	50
9	Langowan Selatan	54
10	Langowan Timur	44
11	Langowan Utara	56

12	Lembean Timur	59
13	Pineleng	50
14	Mandolang	51
15	Remboken	50
16	Sonder	49
17	Tombariri	44
18	Tombariri Timur	52
19	Tombulu	53
20	Tompaso	52
21	Tompaso Barat	54
22	Tondano Barat	40
23	Tondano Selatan	41
24	Tondano Timur	49
25	Tondano Utara	49
	Kabupaten Minahasa	50.6

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa 2023

Ketersediaan fasilitas wilayah dapat dilihat dari aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas lainnya.

a). Aksesibilitas daerah

Gambaran tingkat aksesiblitas di Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan. Panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119 Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2018 s.d Tahun 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan (km)	681.15	681.15	681.15	681.15	681.15	880,42
2	Jumlah Kendaraan	57.240	59.244	62.250	95.691	107.409	114.488
3	Rasio (km/unit kendaraan)	84,0	87,0	91,39	140,48	157,69	133,06

Sumber : Bappelitbangda Kab. Minahasa (diolah dari Dinas PUPR dan Dishub), 2024

Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan meningkat dari tahun 2019 sebesar 86,98 hingga pada tahun 2023 menjadi 157,69. Hal ini berarti peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding panjang jalan yang tersedia, sehingga dapat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan ketersediaan jalan di Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya dapat dilihat informasi tentang jarak dan waktu tempuh kendaraan dari Kota Tondano ibu kota Kabupaten Minahasa ke kota besar atau layanan di sekitarnya (Tabel 2.120). Waktu tempuh yang semakin singkat menandakan adanya peningkatan dalam layanan transportasi.

Tabel 2.120 Jarak dan Waktu Tempuh

No	Aksesibilitas	Jarak	Waktu
1	Tondano–Bandara Sam	45 Km	1 Jam 30 Menit
2	Ratulangi	30 Km	1 Jam
3	Tondano – Manado	62 Km	1 Jam 30 Menit
	Tondano – Pelabuhan Bitung		

Sumber : Bappelitbangda Minahasa (diolah), 2023.

2) *Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum*

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.121 Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Di tahun 2018 sampai tahun 2019 jumlah orang yang terangkut menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun drastis yang mungkin dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang membatasi

pergerakan masyarakat. Angka tersebut kembali bergerak naik di tahun 2021 namun untuk tahun 2022 sampai 2024 belum tersedia data.

Tabel 2.121 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Minahasa

N O	Uraian	Satu an	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang	Oran g	12.817.952	12.553.590	224.620	249,576	n.a	857.090	788.460
2	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Tingkat kemudahan dalam melakukan perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi layanan yang dibutuhkan di Kabupaten Minahasa relatif baik, dapat dilihat pada Tabel Indeks dimensi aksesibilitas berikut ini.

Tabel 2.122 Indeks Dimensi Aksesibilitas per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Indeks
1	Eris	1
2	Kakas	19
3	Kakas Barat	17
4	Kawangkoan	13
5	Kawangkoan Barat	13
6	Kawangkoan Utara	1
7	Kombi	4,0
8	Langowan Barat	4,0
9	Langowan Selatan	23
10	Langowan Timur	15
11	Langowan Utara	15
12	Lembean Timur	11
13	Pineleng	10
14	Mandolang	6
15	Remboken	8
16	Sonder	7
17	Tombariri	15
18	Tombariri Timur	2

19	Tombulu	9
20	Tompaso	7
21	Tompaso Barat	14
22	Tondano Barat	21
23	Tondano Selatan	5
24	Tondano Timur	20
25	Tondano Utara	9
	Kabupaten Minahasa	10.76

Sumber : Data p3ke kemenkopmk Tahun 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indeks Aksesibilitas Kabupaten Minahasa adalah 10.76 dimana wilayah kecamatan Tombulu merupakan kecamatan dengan aksesibilitas tertinggi. Hal ini bisa dipahami karena letak Kecamatan ini berbatasan dengan Kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan pusat berbagai jenis layanan.

b). Penataan wilayah

1) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018 s.d 2023 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.123.

**Tabel 2.123 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018 s.d 2024
Kabupaten Minahasa**

N O	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi RTRW (Ha)	100,6	101,52	102.000 .13	103.000 .15	104.000 ,17	82.644	82.311
2	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	112.929 .13	112.929 .13	112.929 .13	112.929 .13	112.929 ,13	102.660 ,00	102.660 ,00
3	Rasio (1/2)	0,890	0,898	0,903	0,912	0,921	0,81	0,8

Sumber : PUPR Minahasa. Tahun 2025

Dari tabel tersebut nampak bahwa tingkat ketaatan terhadap

RTRW hingga tahun 2022 terus meningkat yang mengindikasikan bahwa masyarakat semakin memahami tata ruang termasuk dalam proses perijinan sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan tata ruang, demikian juga dengan program pembangunan yang dilakukan selalu merujuk pada rencana tata ruang yang ada. Sayangnya di tahun 2023, tingkat ketaatan terhadap RTRW nampak menurun seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang tertentu sehingga mendorong terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW.

2) Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Minahasa Sesuai RTRW Kabupaten Minahasa (Perda Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014) sifatnya tentatif, karena tidak terdapat kawasan industri besar. Kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Minahasa terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan industri sedang meliputi Kecamatan Mandolang, Tombariri, Kombi, Lembean Timur, Kakas Barat dan Langowan Selatan. Sedangkan Kawasan industri rumah tangga meliputi: 1. Pengembangan kegiatan industri kecil menengah (IKM) pangan di Kecamatan Pineleng, Tombariri, Tondano Utara, Tondano Timur, Kombi, Sonder, Kawangkoan, Kakas dan Langowan selatan; 2. Industri kecil menengah (IKM) sandang di Kecamatan Sonder, Kawangkoan, Langowan Selatan, Kakas, tondano barat dan tondano utara; 3. Industri kecil menengah (IKM) kimia dan bahan bangunan di Kecamatan Sonder, Pineleng, Tondano utara, eris, Kakas dan Langowan selatan; 4. Industri kecil menengah (IKM) logam dan elektronika di Kecamatan Sonder, Kawangkoan, Remboken, Tondano Barat, Tondano Utara, Tondano Timur dan Langowan Selatan; dan 5. Industri kecil menengah (IKM) kerajinan di Kecamatan Pineleng, Tombulu, Sonder, Tompaso, Remboken, Tondano Timur, Eris dan Kombi.

3) Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah rawan banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan

RTRW. Rasio luas wilayah banjir di Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.124. Hasil analisis di tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio wilayah banjir adalah 0,084. Dari nilai rasio ini, terlihat bahwa luas wilayah banjir di Kabupaten Minahasa sangat kecil.

Tabel 2.124 Rasio Luas Wilayah Banjir Di Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Banjir	3250	4785	9460	N/A	9460	9460
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	112929,13	112929,13	112929,13	N/A	112.929.13	112.929.13
3	Rasio (1./2.)	0,029	0,043	0,084	N/A	0,084	0,084

Sumber: PUPR Minahasa. Tahun 2025

4) Luas Wilayah Kekeringan

Kabupaten Minahasa pada dasarnya tidak terdapat wilayah kekeringan karena termasuk daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Kekeringan hanya akan terjadi jika terjadi musim panas yang panjang di Kabupaten

5) Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah perkotaan dianalisis berdasarkan kondisi tahun 2023 di Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.125. Luas wilayah perkotaan masih tergolong rendah dengan rasio 0,0463. Hal ini berarti di kabupaten Minahasa masih lebih banyak terdiri dari permukiman perdesaan. Sayangnya belum tersedia data di tahun sebelumnya sehingga belum dapat diketahui bagaimana perkembangannya. Diperkirakan dengan adanya aktivitas pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat serta peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan luas wilayah perkotaan di Kabupaten Minahasa

Tabel 2.125 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2022
1.	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	4.388,789
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	94.857,69
3.	Rasio (1./2.)	0,0463

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Minahasa, 2024

c). Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang- cabangnya.

1) Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d). Ketersediaan air bersih

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 mencapai angka 91,12%. Hal ini berarti masih masih terdapat

masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak.

Beberapa sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Minahasa antara lain melalui jaringan perpipaan/leding, pompa, air minum kemasan, sumur terlindung, sumur tak terlindung, Mata Air terlindung, Mata air tidak terlindung serta sumber lainnya. Persentasi distribusinya dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.126 Distribusi Persentase Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Minahasa dengan sumber air utama yang digunakan untuk minum Tahun 2022-2023

No.	Sumber Air Minum	Persentase	
		2022	2023
1	Leding(Perpipaan)	10,26	11,58
2	Pompa	12,33	10,18
3	Air Dalam Kemasan	38,58	31,16
4	Sumur Terlindung	20,89	28,62
5	Sumur tak terlindung	1,61	17,03
6	Mata Air terlindung	12,72	1,43
7	Mata air tidak terlindung	3,43	100
8	Lainnya	0,17	11,58
	Jumlah	100	10,18

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka, 2024

Dari data tersebut nampak bahwa pemanfaatan air kemasan termasuk air minum isi ulang sebagai sumber air minum utama semakin tinggi seiring dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat. Selanjutnya diikuti oleh sumur terlindungi/tak terlindung, mata air terlindungi/tak terlindung, leding (perpipaan) dan pompa.

Pemerintah berupaya menyelenggarakan layanan SPAM di seluruh wilayah baik yang dikelola oleh desa maupun BUMD yaitu PDAM. Layanan tersebut melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Untuk layanan PDAM terdapat 20 SPAM yang berfungsi dan melayani 124.492 penduduk di Kabupaten Minahasa.

e). Fasilitas listrik dan telepon

1) Jumlah Pelanggan yang menggunakan listrik PLN

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan listrik pada masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127 Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan	70.317	72.054	93.626	97.526	100.830	80.245

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka. Tahun 2024

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Minahasa tercatat pada dua rayon, yaitu Rayon Tondano dan Rayon Kawangkoan, yang melayani seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik tercatat sebanyak 97.526 rumah tangga, meningkat dari tahun sebelumnya hingga di tahun 2022 100.830 namun terjadi penurunan di Tahun 2023 80.245.

f). Ketersediaan restoran Jenis. kelas. dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Adapun jenis, kelas dan jumlah restoran Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.128.

**Tabel 2.128 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Minahasa
Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Usaha Restoran Golongan Tertinggi	7	208	3	250	1	100	1	100	1	100
2	Usaha Restoran Golongan Menengah	6	80	2	132	6	540	5	450	6	526
3	Usaha Restoran Golongan Terendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Usaha Rumah Makan Kelas A	5	50	14	484	0	0	5	300	6	348
5	Usaha Rumah Makan Kelas B	8	30-60	14	368	9	350	14	420	15	452
6	Usaha Rumah Makan Kelas C	79	377	59	236	2	81	51	765	50	685
7	Usaha Rumah Makan Kelas D	0	0	2	8	2	50	18	180	18	180

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut, dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Adapun jumlah restoran/rumah makan aktif menurut kecamatan tahun 2020-2023 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.129

Tabel 2.129 Jumlah Restoran/Rumah Makan Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023 Kabupaten Minahasa

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023		
		Restoran / RM	Tempat Duduk	Klasifikasi	Restoran / RM	Tempat Duduk	Klasifikasi	Restoran / RM	Tempat Duduk	Klasifikasi	Restoran / RM	Tempat Duduk	Klasifikasi
1	Langowan Timur	17	50	C3	7	20	C3	7	20	C3	7	20	C3
2	Langowan Selatan	3	10	C3	0	0	C3	0	0	C3	0	0	C3
3	Langowan Utara	2	10	C3	2	10	C3	2	10	C3	2	10	C3
4	Langowan Barat	2	15	C2	1	10	C2	1	10	C2	1	10	C2
5	Kakas	2	15	C2	1	8	C2	1	8	C2	1	8	C2
6	Remboken	2	20	C1	1	10	C1	1	10	C1	1	10	C1
7	Kawangkoan	20	250	C1,C2,C3	15	200	C1,C2,C3	15	200	C1,C2,C3	14	168	C1,C2,C3
8	Sonder	3	115	B1,C2	5	150	B1,C2	5	150	B1,C2	3	102	B1,C2
9	Tombariri	3	25	C2,C3	1	15	C2,C3	1	15	C2,C3			
10	Mandolang	15	580	A1. A2. B1. B2. C1. C3	4	120	A1. A2. B1. B2. C1. C3	4	120	A1. A2. B1. B2. C1. C3	4	120	A1,A2,B1, B2,C1,C3
11	Tondano Utara	3	15	C2	1	6	C2	1	6	C2	1	6	C2
12	Tondano Barat	39	850	C1,C2,C3	28	660	C1,C2,C3	28	660	C1,C2	27	636	C1,C2
13	Tondano Selatan	8	320	A1,B1,C1,C3	13	520	A1,B1,C1,C3	13	520	A1,B1,C1,C3	14	596	A1,B1,C1,C2
TOTAL		119			79			79				75	

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Tahun 2023

g). Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut.

Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Adapun jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.130

**Tabel 2.130 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel
Kabupaten Minahasa**

No	Jenis Penginapan/ Hotel	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jml Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jml Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	Hotel Bintang 4	1	249	498	2	339	658	2	339	658	1	242	376	1	242	376	1	242	376	2	331	505
2	Hotel Bintang 3	1	32	40	1	32	40	1	32	40	2	145	236	2	145	236	2	145	236	1	32	40
3	Hotel Bintang 2	2	54	64	2	70	86	2	70	86	1	36	40	1	36	40	1	36	40	2	34	56
4	Hotel Non Bintang (Hotel Melati dan Penginapan Lainnya)	36	316	424	36	406	500	36	406	500	7	85	130	7	85	130	7	85	130	7	85	130
	TOTAL	40	651	1026	41	847	1284	41	847	1284	11	508	782	11	508	782	11	508	782	12	482	731

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Ketersediaan hotel dan penginapan berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah hotel bintang satu dan tiga namun hotel bintang dua bertambah yang tentunya mempengaruhi jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang tersedia. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan melemahnya

perkembangan sektor pariwisata akibat turunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Minahasa. Ketersediaan hotel dan penginapan di tahun 2022 dan 2023 belum mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Situasi yang tidak jauh berbeda ditunjukkan pada perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang juga mengalami penurunan yang sangat signifikan disaat terjadinya pandemi Covid 19 di tahun 2020. Namun di tahun berikutnya hingga tahun 2023 jumlah kunjungan mulai meningkat sekalipun belum seperti di masa sebelum covid-19, seperti yang terlihat pada tabel 2.131.

**Tabel 2.131 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Minahasa
Tahun 2018-2024**

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah
1	2018	85.100	1.151.150	1.236.250
2	2019	154.400	1.760.000	1.914.400
3	2020	3.992	237.726	241.718
4	2021	13.338	332.407	345.745
5	2022	13.395	366.323	379.718
6	2023	37.438	479.359	516.797
7	2024	32.555	429.370	461.925

Sumber : Disbudpar Kabupaten Minahasa. Tahun 2025

Potensi wisata di Kabupaten Minahasa terdiri dari wisata alam, wisata budaya/sejarah dan wisaya buatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado Likupang, ditetapkan dua Kawasan yang menjadi daerah tujuan wisata utama yaitu Kawasan Pantai Timur Minahasa, dan Kawasan Sekitar Danau Tondano. Jumlah potensi wisata tersebut dan sarana penunjang wisata disajikan pada tabel 2.132 .

Tabel 2.132 Potensi Wisata di Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

No	Jenis	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Objek Wisata					
1	Objek Wisata Alam	72	68	69	69	72
2	Objek Wisata Buatan	36	44	44	44	41
3	Objek Wisata Budaya	41	41	41	41	46
B	Penunjang Pariwisata					
1	Hotel	41	15	15	15	15
2	Restauran	32	94	94	94	96
3	Rumah Makan (termasuk Rumah Kopi)	103	90	90	90	92
4	Jasa Travel	11	11	11	11	11
5	Panti Pijat	1	1	1	1	1
6	Art Shop	5	5	5	5	3
7	Pengrajin	18	18	18	18	18
8	Billyard	1	1	1	1	17
9	Café	3	3	3	3	4
10	Salon	12	12	12	12	12
11	Diskotik	1	1	1	1	1

Sumber : Disbudpar Kabupaten Minahasa.Tahun 2025

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a). Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

b). Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Adapun jumlah demonstrasi Tahun 2017-2022 di Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.133.

**Tabel 2.133 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Minahasa
Tahun 2018-2023**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bidang Politik	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	n/a
2	Ekonomi	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a
3	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	10	7	n/a	n/a	N/A	n/a

Sumber: Polres Minahasa. Tahun 2024

c). Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daeketergantunganrah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Proses perijinan sudah dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (KPTSA), dimana sudah ada prosedur tetap (protap) yang pada prinsipnya transaksi pembayaran harus dilakukan di bank terdekat (Bank Sulut). Pada Tabel 2.134 dapat dilihat jumlah, jenis, dan lamanya pelaksanaan pengurusan perijinan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Minahasa, serta jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan produksinya. Dari data tersebut diatas lama rata-rata pengurusan perijian adalah 3 hari per surat

Tabel 2.134 Jumlah, Jenis, dan Lamanya Pelaksanaan Pengurusan Perijinan Tahun 2023 Kabupaten Minahasa

NO	JENIS PERIZINAN	Waktu	JUMLAH PERSYARATAN
1.	Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	1 (satu) Hari	4 (empat) persyaratan
2.	Persetujuan Bangunan Gedung	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pad a DPMPSTSP Kab. Minahasa	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pad a DPMPSTSP Kab. Minahasa
5.	Izin Praktek Dokter Umum	3 hari	8 Syarat
6.	Izin Praktek Dokter Gigi	3 hari	8 Syarat
7.	Izin Praktek Dokter Spesialis	3 hari	8 Syarat
8.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 hari	8 Syarat
9.	Izin Praktek Dokter Intersip	3 hari	8 Syarat
10.	Izin Praktek Psikologi Klinis	3 hari	8 Syarat
11.	Izin Praktek Perawat	3 hari	8 Syarat
12.	Izin Praktek Bidan	3 hari	8 Syarat
13.	Izin Praktek Apoteker	3 hari	8 Syarat
14.	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 Hari	8 Syarat
15.	Izin Kerja Tenaga Epidomologi Kesehatan	3 hari	8 Syarat
16.	Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan	3 hari	8 Syarat

NO	JENIS PERIZINAN	Waktu	JUMLAH PERSYARATAN
	Ilmu Prilaku		
17.	Izin Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	3 hari	8 Syarat
18.	Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	3 hari	8 Syarat
19.	Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	3 hari	8 Syarat
20.	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	3 hari	8 Syarat
21.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian Lingkungan	3 hari	8 Syarat
22.	Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan	3 hari	8 Syarat
23.	Izin Kerja Tenaga Mikrobiolog Kesehatan	3 hari	8 Syarat
24.	Izin Kerja Tenaga Gisi	3 hari	8 Syarat
25.	Izin Kerja Tenaga Fisioterapis	3 hari	8 Syarat
26.	Izin Kerja Tenaga Okupasi	3 hari	8 Syarat
27.	Izin Kerja Terapis Wicara	3 hari	8 Syarat
28.	Izin Praktek Akupuntur	3 hari	8 Syarat
29.	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	3 hari	8 Syarat
30.	Izin Praktek Teknik Kardiovaskuler	3 hari	8 Syarat
31.	Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah	3 hari	8 Syarat
32.	Izin Kerja Refraksionis optisien / Optometris	3 hari	8 Syarat
33.	Izin Praktek Tekhnisi Gigi dan Mulut	3 hari	8 Syarat
34.	Izin Kerja Audiologis	3 hari	8 Syarat
35.	Izin Kerja Radiografer	3 hari	8 Syarat
36.	Izin Praktek Elektromedis	3 hari	8 Syarat
37.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	3 hari	8 Syarat
38.	Izin Praktek Fisikawan Medik	3 hari	8 Syarat
39.	Izin Kerja Radioteraphis	3 hari	8 Syarat
40.	Izin Praktek Ortotik Prostetik	3 hari	8 Syarat
41.	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	3 hari	8 Syarat
42.	Izin Trayek	3 hari	6 Syarat
43.	Izin Menampung dan Mengirim Cap Tikus	3 hari	10 Syarat

NO	JENIS PERIZINAN	Waktu	JUMLAH PERSYARATAN
44.	Fiskal Daerah	3 hari	4 Syarat
45.	Rekomendasi Pemasangan Papan Reklame	3 hari	8 Syarat
46.	Izin Operasional Sekolah SD dan SMP	3 hari	10 Syarat
47.	Izin Operasional PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak)	3 hari	10 Syarat
48.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	3 hari	10 Syarat
49.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3 hari	10 Syarat
50.	Izin Usaha Toko Modern	3 hari	
51.	Izin Operasional Lembaga Latihan Kerja	3 hari	5 Syarat
52.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	3 hari	5 Syarat
53.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	3 hari	5 Syarat
54.	Izin Operasional Organisasi Sosial/Yayasan	3 hari	5 Syarat
1.	Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	1 (satu) Hari	4 (empat) persyaratan
2.	Persetujuan Bangunan Gedung	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pad a DPMPTSP Kab. Minahasa	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pad a DPMPTSP Kab. Minahasa
5.	Izin Praktek Dokter Umum	3 hari	8 Syarat
6.	Izin Praktek Dokter Gigi	3 hari	8 Syarat

NO	JENIS PERIZINAN	Waktu	JUMLAH PERSYARATAN
7.	Izin Praktek Dokter Spesialis	3 hari	8 Syarat
8.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 hari	8 Syarat
9.	Izin Praktek Dokter Intersip	3 hari	8 Syarat
10.	Izin Praktek Psikologi Klinis	3 hari	8 Syarat
11.	Izin Praktek Perawat	3 hari	8 Syarat
12.	Izin Praktek Bidan	3 hari	8 Syarat
13.	Izin Praktek Apoteker	3 hari	8 Syarat
14.	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 Hari	8 Syarat
15.	Izin Kerja Tenaga Epidomologi Kesehatan	3 hari	8 Syarat
16.	Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	3 hari	8 Syarat
17.	Izin Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	3 hari	8 Syarat
18.	Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	3 hari	8 Syarat
19.	Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	3 hari	8 Syarat
20.	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	3 hari	8 Syarat
21.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian Lingkungan	3 hari	8 Syarat
22.	Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan	3 hari	8 Syarat
23.	Izin Kerja Tenaga Mikrobiolog Kesehatan	3 hari	8 Syarat
24.	Izin Kerja Tenaga Gisi	3 hari	8 Syarat
25.	Izin Kerja Tenaga Fisioterapis	3 hari	8 Syarat
26.	Izin Kerja Tenaga Okupasi	3 hari	8 Syarat
27.	Izin Kerja Terapis Wicara	3 hari	8 Syarat
28.	Izin Praktek Akupuntur	3 hari	8 Syarat

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Jumlah ijin yang terbit selang 2018-2023 Kabupaten Minahasa terlihat adanya peningkatan (Tabel 2.135).

Tabel 2.135 Jumlah Ijin Yang Terbit Selang 2018-2023
Kabupaten Minahasa

No	Tahun	Jumlah Ijin
1	2018	2.131
2	2019	1.844
3	2020	2.742
4	2021	2.432
5	2022	2.984
6.	2023	3.609
	Jumlah	15.742

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Minahasa.

Tahun 2024

d). Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. Adapun jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi Tahun 2017-2022 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah Insentif pajak yang mendukung iklim investasi	10	1	1	1	1	1
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	3	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PTSP & Penanaman Modal Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

e). Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Adapun jumlah Perda yang mendukung iklim usaha tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.137.

Tabel 2.137 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda terkait perijinan	0	0	0	0	N/A	0
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	0	0	0	0	N/A	0
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0	N/A	0

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan. perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Selang 5 tahun terakhir telah terbit 1 (satu) buah Perda tentang perijinan. Adapun jumlah produk hukum tahun 2018-2022 Kabupaten Minahasa ditunjukkan

pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138 Jumlah Produk Hukum Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No	Produk	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peraturan Daerah	4	6	3	5	6
2	Peraturan Bupati	52	54	44	34	50
3	Surat Keputusan Bupati	620	645	361	401	605
4	Instruksi Bupati	4	3	0	2	4

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa Tahun 2024

f). Desa Membangun

Klasifikasi status Desa berdasar indeks membangun, diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dokumen pemajuan desa menuju desa mandiri. Dapat dilihat dari grafik dibawah ini desa mandiri di Kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan mulai tahun 2020 terdapat 31 desa, tahun 2021 bertambah menjadi 63 desa, terus bertambah menjadi 105 desa di tahun 2022 dan 164 desa dan tahun 2023.

Grafik 2.23. Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

1) Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1 S2 dan S3. Adapun rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa mengalami penurunan sejak tahun 2019 pada angka 99,54 hingga tahun 2021 sebesar 90,74. Pada Tahun 2020 rasio lulusan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu pada angka rasio 60,53 diakibatkan oleh dampak pandemic yag melanda dunia, dan kembali naik ditahun 2021 setelah keadaan berangsur pulih.

Tabel 2.139 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Lulusan S1	3837	3242	1979	2985	2476	2736
2	Jumlah Lulusan S2	145	144	108	173	164	315
3	Jumlah Lulusan S3	5	10	15	6	10	15
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	3987	3396	2102	3164	2650	3066
5	Jumlah Penduduk	338364	341176	343.564	343.800	350.317	351.920
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5 x 10.000)	117,83	99,54	60,53	90,74	75.65	87,12

Sumber: Universitas Negeri Manado. Tahun 2024

2) Tingkat ketergantungan

Dari data terlihat bahwa penduduk non produktif (berusia 0-14 tahun dan 65 +) mencapai angka 31,97 % dan penduduk usia produktif berada pada angka 68,03 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa kelompok usia produktif lebih banyak jumlahnya dari pada kelompok usia non produktif, dengan rasio ketergantungan sebesar 47,00 pada tahun 2022.

Angka beban ketergantungan Kabupaten Minahasa selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Ini berarti jumlah penduduk non produktif semakin kecil atau jumlah penduduk produktif semakin besar.

Jika dilihat komposisi penduduk Kabupaten Minahasa seperti Tabel 2.140, usia kelompok umur 15 – 64 tahun terus mengalami peningkatan lebih cepat dibanding kelompok umur non produktif.

Tabel 2.140 Rasio Ketergantungan Tahun Kabupaten Minahasa 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	75.626	75.673	72.337	71.694	71.153	19,68
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	31.253	32.343	37.940	39.354	40.854	12,51
3	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	231.485	233.160	237.013	237.625	238.310	67,81
4	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,17	46,33	46,53	46,03	47,00	20,93

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa. Tahun 2024

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penduduk usia}<15\text{ th}+\text{usia}>64}{\text{Penduduk usia } 15\text{-}64} \times 100$$

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD.

2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pada Dokumen RPD sampai dengan Tahun 2024. Penilaian Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RKPD sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 2.141 berikut :

Tabel 2.141 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023-2024 Terhadap Target RPD Tahun 2024-2026

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	5.47	5,55	5,49	6,1-6,2	6,2-6,3	6,3-6,4	6,3-6,4
2	Laju inflasi	4		2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
3	PDRB per kapita (Juta Rp)	58.14		68.79	68.79	74.76	81.21	81.21
4	Indeks Gini	0.308	0,327	0,341	0.306	0.304	0.302	0.302
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92.95	93,13	93,47	94-94,2	94,2-94,6	94,6-94,9	94,6-94,9
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.18	76,96	77.74	77.16	77.53	77.91	77.91
7	Harapan Lama Sekolah	14.17	14,18	14,19	14.41	14.58	14.75	14.75
8	Angka rata-rata lama sekolah	9.82	10,11	9.99	9.99	10.08	10.16	10.16
9	Angka usia harapan hidup	71.49	71,82	71.5	71.5	71.56	71.2	71.2
10	Persentase balita gizi	0.01%		0	0	0	0	0

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	buruk							
11	Prevalensi balita gizi kurang	0.95%		15	15	14	13	13
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	83%		73%	73%	74%	75%	75%
13	tingkat partisipasi angkatan kerja	64.99	61,11	64,94	65-67	67-69	69-71	69-71
14	Tingkat pengangguran terbuka	7	7,65	7,22	6,0-5,6	5,6-5,0	5,0-4,8	5,0-4,8
15	Rasio penduduk yang bekerja	51.34	95,26	95.4	95.4	95.45	95.5	95.5
16	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	7.32	7,32	7.95	7.95	7.96	7.98	7.98
17	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	60,45	60,72	60.77	60.77	60.79	70.05	70.05
18	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri	78,75	80,15	80.55	80.55	80.65	80.65	80.65

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja							
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/a	N/a	B	B	B	A	A
20	Persentase PAD terhadap pendapatan	7.55%	7.55%	7.56%	7.56%	7.57%	7.58%	7.58%
21	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82.20%	82.20%	83.00%	83.00%	84.00%	85.00%	85.00%
23	Penguatan cadangan pangan	50 Ton	50 Ton	50 Ton	50 Ton	50 Ton	50 Ton	50 Ton
24	Penanganan daerah rawan pangan	0	0	18%	18%	15%	12%	12%
25	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan							
	1. Padi Sawah (ton)	70,161.30	64.704,90	64,935	64,935	69,483	74,342	74,342
	2. Jagung (ton)	158,424	54.588	220,966	220,966	236,43	252,979	252,979
	3. Kacang Tanah (ton)	989.8	869,8	926	926	990	1,059	1,059

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
26	Hortikultura							
	1. Bawang Merah (ton)	866	802	2,091	2,091	2,239	2,399	2,399
	2. Cabe Rawit (ton)	2,743	3.028	3,292	3,292	3,526	3,773	3,773
	3. Cabe Keriting (ton)	3,457	2.747	3,601	3,601	3,856	4,133	4,133
	4. Tomat (ton)	24,901	18.092	12,286	12,286	13,154	14,084	14,084
27	Produksi sektor perkebunan							
	1. Kelapa (Ton)	16,108	15.211	23,036	23,036	23,795	24,58	24,58
	2. Cengkih (Ton)	961.12	198,5	7,802	7,802	7,949	8,212	8,212
	3. Kopi (Ton)	35.5	306	67	67	69	71	71
28	Produksi Sektor Peternakan							
	Sapi (kg)	26,761	74.225	74,225	74,225	75,128	75,821	75,821
	Babi (kg)	130,971	5.052.633	9,336,611	9,336,611	9,621,018	9,789,220	9,789,220
	Ayam Pedaging (kg)	1,978,337		3,236,466	3,236,466	4,530,219	4,896,203	4,896,203
29	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Juta)	823.13 (M Rupiah)	823.13 (M Rupiah)	1150253	1150253	1150253	1150253	1150253

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
30	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta)	1564.74 (M Rupiah)		2224932	2224932	2224932	2224932	2224932
31	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Juta)	7.51%	1564.74 (M Rupiah)	1443364	1443364	1443364	1443364	1443364
32	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industry	N/a		21.00%	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%
33	PDRB (ADHK) (Juta)	12.812.868		14.384.245	14.384.245	15.281.897	16.251.361	16.251.361
34	PDRB (ADHB) (Juta)	20.369.103		22.330.724	22.330.724	23.451.806	24.788.573	24.788.573
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	12,690,000		12,829,590	12,829,590	12,970,715	13,113,394	13,113,394
2	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	75.63%		78.99%	78.99%	82.35%	85.71%	85.71%
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	108.9		108,95	108,95	108,97	108,99	108,99

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
I	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
	<i>Angka Rata-rata Lama Sekolah</i>	9.82	9,86	10.23	9.84	9.85	10.04	10.04
	<i>Angka Partisipasi Sekolah</i>	75		91.82	90	92	95	95
	<i>Angka Partisipasi Kasar SD</i>	102.77	98%	109.77	82.2	83.24	84.28	84.28
	<i>Angka Partisipasi Kasar SMP</i>	89.22	95%	82.07	90.2	92.21	95.2	95.2
	<i>Angka Partisipasi Murni SD</i>	93.25	95%	75.2	75.2	78.05	80.2	80.2
	<i>Angka Partisipasi Murni SMP</i>	71.26	65%	81.2	81.2	82.21	85.25	85.25
	<i>APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	75		86.2	86.2	88.21	90.41	90.41

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Penduduk Usia 5-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD	75	86,70%	75%	75%	80%	85%	85%
	Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan SD	75	97%	75%	75%	80%	85%	85%
	Persentase Penduduk Usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan SMP	61.1	95%	75%	75%	80%	85%	85%
	Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesenjangan	75	92,70%	75%	75%	80%	85%	85%
	Persentase Siswa dengan Nilai	N/a		51.25%	51.25%	52.43%	56%	56%
	Kompetensi Literasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	28,50%		28,50%	28,50%	30,60%	35,20%	35,20%
	Persentase Pengelolaan Pengembangan Kurikulum yang baik.	76.55%		76.55%	76.55%	78.63%	35%	35%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang baik.	83%		83%	83%	86%	90.00%	90.00%
	Persentase penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memiliki Ijin.	90%		90%	90%	100%	100%	100%
2	Kesehatan							
	ANGKA HARAPAN HIDUP	71,49	71,82	70.49	70.49	70.52	70.55	70.55
	Menurunkan Angka Kematian Ibu	61.7		41/100000 KH	41/100000 KH	20,56/100000 KH	17/100000 KH	17/100000 KH
	Menurunkan Angka Kematian Bayi	5.35		4,9/100000 KH	4,9/100000 KH	4,7/100000 KH	4,5/100000 KH	4,5/100000 KH
	Menurunkan prevalensi stunting balita	18,50%		14,50%	14,50%	14%	13.50%	13.50%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	113.16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99.49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	93.60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	109.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97.35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109.23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166.31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	153.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0.21	0,001	0,001	0,001	0.001	0,001	0,001

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,7/1000KH (33 kasus)		4.5/1.000 KH	4.5/1.000 KH	2.19 /1.000KH	4.3/1.000 KH	4.3/1.000 KH
	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	93,4/100.000KH (4 kasus)	99/100.000 KH	107/100.000 KH	107/100.000 KH	131.52/100.000 KH	100/100.000 KH	100/100.000 KH
	Prevalensi Stunting	0.83%		12%	12%	11,5%	11%	11%
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90.37%	95%	95%	95%	95.00%	96%	96%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Tidak ada survei akreditasi	23 kec	6 akre	6 akre	6 RE akre	6 RE akre	6 RE akre
	Cakupan Uiversal Health Coverage	98%		100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Rasio posyandu per satuan balita	1.35	100%	1,46	1,46	1.78	1,82	1,82
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	20.55	1,33	27,11	27,11	29.73	33,2	33,2
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	33,2	96%	96%	97%	98%	98%
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	99.10%	97%	95%	95%	97.19%	98%	98%
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	≥2 (5)	≥2	≥2	≥2	>2	≥2	≥2
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka kejadian Malaria	<1‰	100%	<1‰	<1‰	0,7‰	<1‰	<1‰
	Tingkat kematian akibat Malaria	0	0	0	0	0	0	0

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	13%	100%		100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	138%	100%	100%	100%	64%	100%	100%
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.21		1.86	1.86	1.89	1.92	1.92
	Nilai IKM Dinas Kesehatan	B	B	B	B	B	B	B
	Nilai IKM RSUD Tondano	B		B	B	B	B	B
	Cakupan Puskesmas dan jaringannya yang memiliki sumberdaya kesehatan yang berkompeten sesuai standard	100%		100%	100%	59%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase ketersediaan obat esensial dan obat kebutuhan lainnya	90%	100%	92%	92%	94%	96%	96%
	Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	89%	92%	89%	89%	90%	92%	92%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Indeks Infrastruktur	50,362		53,445	53,445	53,805	53,09	53,09
3.2	Rasio kesesuaian program pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten	1	1	1	1	1	1	1
3.3	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB	A	A
	<i>Sasaran</i>							

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
3.4	<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</i>	0,0525	2%	0,042	0,042	0,082	0,095	0,219
3.5	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi darat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman	43.81	43.81	45.53	45.53	46.04	46.42	46.42
3.7	<i>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i>	1	1	1	1	1	1	1

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
3.8	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	77%	77%	90%	90,25%	90,34%	90,38%	90,38%
	<i>Program</i>							
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	92	92	92	92	92	92	92
	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten</i>	84,25%	84,25%	84.83	84.83	84.95	84.99	84.99

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Prosentase luas wilayah yang terlayani oleh sistim dan pengelolaan persampahan	10,57	10,57	10,66%	10,66%	10,72%	10,95%	10,95%
	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</i>	70,79%	70,79%	71,19	71,19	73,19	75,13	75,13
	Prosentase Panjang Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi baik	53,3	53,3	56,6	56,6	56,66	56,72	56,72
	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	20,83	20,83	25,95	25,95	25,97	25,99	25,99

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Bangunan ber IMB	1,91	1,91	4,1	4,1	4,25	4,3	4,3
	<i>Rasio Kepatuhan IMB</i>	0,882	0,882	0,889	0,889	0,9	0,91	0,91
	Persentase Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani Bangunan dan Lingkungannya	65	65	65%	65%	66%	66,25%	66,25%
	<i>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten</i>	67,11%	6451,00%	67.15%	67.15%	67.20%	67.40%	67.40%
	<i>Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	0,3786	0,3786	0,4657	0,4657	0,4657	0,4657	0,4657
	Prosentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A
4	Perumahan Rakyat							
	Tujuan :							
	Persentase Rumah Tangga yang menempati tempat tinggal yang layak	26		57	57	59	61	61
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC		B	B	B	BB	BB
	Sasaran :							
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni yang dilengkapi dengan PSU	52%		53%	53%	54%	55%	55%
	Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten yang ditangani	26,39%		26,39%	26,39%	27,19%	27,99	27,99

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Program							
	<i>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten</i>	59%		60%	60%	61%	62%	62%
	<i>Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten</i>	0%		0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase Pengembangan Perumahan	0		0	0	0	0	0

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani</i>	26,39%		26,39%	26,39%	27,19%	27,99	27,99
	Persentase pemukiman yang tertata	0%		0%	0%	0%	0%	0%
	<i>Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</i>	0,00%		30%	30%	31%	32%	32%
	<i>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</i>	69%		70%	70%	71%	72%	72%
	<i>Nilai IKM Perangkat Daerah</i>	C		B	B	B	B	B
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	CC		B	B	BB	BB	BB

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	<i>Indeks Resiko Bencana</i>				<i>188.5</i>	<i>186.5</i>	<i>184.5</i>	<i>184.5</i>
	<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	4024 jiwa	4054 jiwa	4500 Jiwa	4500 Jiwa	4500 Jiwa	4500 Jiwa	4500 Jiwa
	<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	3044 jiwa	3000 jiwa	336 Jiwa	336 Jiwa	336 Jiwa	336 Jiwa	336 Jiwa
	<i>Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencarian dan evakuasi korban bencana</i>	775 jiwa	775 jiwa	700 Jiwa	700 Jiwa	700 Jiwa	700 Jiwa	700 Jiwa
	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4	4

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentasi Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang mempreoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP
	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	N/a	N/a	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</i>	86%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten</i>	73,33%	73,33%	77.78	77.78	81.48	85.19	85.19
	<i>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK</i>	72,73%	72,73%	87.47	87.47	92.12	93.33	93.33
6	Sosial							
	<i>Angka Kemiskinan</i>	7.05	6,87	6,53	6,0-5,7	5,7-5,4	5.4-5.1	5.4-5.1
	<i>Persentase penduduk miskin yang mendapatkan penanganan</i>	N/a	N/a	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan</i>	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Cakupan PMKS mendapat pembinaan	N/a	N/a	80%	80%	85%	90%	90%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase PKMS yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PMKS yangmendapat perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Taman MakamPahlawan yang di tangani	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
7	Tenaga Kerja							
	<i>Indeks Profesionalitas Tenaga Kerja</i>	94	94	94	94	94	94	94

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase Perusahaan yang mengikuti Peraturan Ketenagakerjaan</i>	53	53	53	53	53	53	53
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	N/a	N/a					
	<i>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja</i>	N/a	N/a	94	94	94	94	94
	<i>Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja</i>	82	82	82	82	82	82	82
	<i>Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja</i>	53	53	53	53	53	53	53
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	81.50%	81.50%	81.50%	81.50%	81.50%	81.50%	81.50%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%	82%	82%	82%	82%	82%
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	8.00%	8.00%	53%	53%	53%	53%	53%
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
	<i>Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender</i>	N/a		96.12	96.12	96.15	96.2	96.2

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</i>	100%		100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan termasuk TPPO</i>	100%		100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Meningkatnya kualitas calon tenaga kerja perempuan Indonesia.</i>	N/a						
	<i>Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan Gender</i>	N/a		96.12	96.12	96.15	96.2	96.2
	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	92.13	97,34	97,8	96.12	96.15	96.2	96.2
	<i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i>	81.75%	87,8	87.37	87.37	87.4	87.46	87.46
	<i>Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</i>	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>meningkatnya implementasi kabupaten layak anak (KLA)</i>	N/a	N/a	800-900	800-900		550-600	550-600
	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja APBD	28%	28%	25%	25%	25%	35%	40%
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0.07	0.07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	4	4	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga
	jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	8	8	14 Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait tingkat kabupaten kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pangan							

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Indeks Ketahanan Pangan			79.05	79.05	79.06	79.07	79.07
	Persentase cadangan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase daerah rentan rawan pangan	20%	18%	18%	18%	15%	12%	12%
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	0	0	10%	10%	20%	30%	30%
	Persentase Ketersediaan pangan utama	1.17%	1.17%	1.18%	1.18%	1.19%	1.20%	1.20%
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2400 kilokalori/kapi ta/hari dan 63 gram/ kapita /hari	2400 kilokalori/kapi ta/hari dan 63 gram/ kapita /hari	2400 kilokalori/kapi ta/hari dan 63 gram/ kapita /hari	2400 kilokalori/kapi ta/hari dan 63 gram/ kapita /hari	2400 kilokalori/kapi ta/hari dan 63 gram/ kapita /hari	2400 kilokalori/kapi ta/hari dan 63 gram/ kapita /hari	2400 kilokalori/kapi ta/hari dan 63 gram/ kapita /hari
	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	0	10%	10%	20%	30%	30%
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pangan	50	50	75	75	75	75	75

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
10	Lingkungan Hidup							
	Tujuan							
	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten</i>	62,46	63,39	65,51	62,89	63,35	63,84	63,84
	Indeks Reformasi Birokrasi	B	C	B	B	BB	BB	BB
	<i>Sasaran</i>							
	Indeks Kualitas Air	48		57,06	48,17	48,29	48,41	48,41
	Kualitas Tutupan lahan	34,83		35,78	34,97	35,11	35,25	35,25
	Indeks Kualitas Udara	90,82		91,03	90,99	91,13	91,21	91,21
	<i>Program</i>							
	Persentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0,43	0,43	0,46	0,46	0,49	0,52	0,52
	Persentasi keanekaragaman hayati yang dikelola	NA	NA	50%	50%	51%	51%	51%
	Presentasi Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki ijin melakukan penyimpanan sementara dan pengumpulan LB3	52%	52%	52%	52%	53%	54%	54%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Presentasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PPU lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.</i>	70%	70%	70%	70%	71%	72%	72%
	Persentasi jumlah MHA dan/atau kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	NA	NA	58%	58%	59%	60%	60

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	3 Peng-hargaan	3 Peng-hargaan	3 Peng-hargaan	3 Peng-hargaan	3 Peng-hargaan	3 Peng-hargaan	9 Penghargaan
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	59%	59%	59%	59%	60%	61%	61%
	<i>Persentasi Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten</i>	99,82%	99,82%	99,86%	99,86%	99,88%	99,90%	99,90%
	Nilai AKIP PD	BB	BB	BB	BB	A	A	A
	Nilai IKM PD	B	B	B	B	A	A	A
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Persentase Pemanfaatan dan Penyajian data	N/a		100%	100%	100%	100%	

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Presentase Penertbitan KTP, KIA dan Kartu keluarga	N/a		98%	98%	99%	100%	100%
	Presetase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	N/a		98%	98%	99%	100%	100%
	jumlah Penyajian data	N/a		95%	95%	97%	100%	100%
	Presentase OPD perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	50 OPD		50 OPD	50 OPD	50 OPD	50 OPD	50 OPD
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	<i>Persentase Desa Mandiri</i>	N/a	N/a	50.66	50.66	52.86	55	55

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i>	N/a	N/a	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa</i>	0	0	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>Persentase Pengentasan desa tertinggal</i>	100%	100%	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>Persentase desa yang melakukan kerjasama</i>	100%	100%	<i>26.43</i>	<i>26.43</i>	<i>27.31</i>	<i>28.19</i>	<i>28.19</i>
	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase desa yang melakukan kerjasama	24.60%	24.60%	26,43%	26,43%	27,31%	28,19%	28,19%
	Persentase Pengentasan desa tertinggal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan status desa mandiri	75.63%	75.63%	78.99%	78.99%	82.35%	85.71%	85.71%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	19.38	19.38	28.19%	28.19%	32.59%	37%	37%
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	0.33	0.33	0,5	0,5	0,57	0,66	0,66
	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase LPM Berprestasi	2.96%	2.96%	4.81%	4.81%	5.92%	7.04%	7.04%
	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG	13.65%	13.65%	14.97%	14.97%	15.41%	15.85%	15.85%
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	<i>Laju pertumbuhan penduduk (LPP)</i>	0.47	0.47	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>			N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2.02	2.02	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	<i>Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</i>	59.18%	59.18%	81.20	81.20	81.24	81.31	81.31
	<i>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</i>	N/a	N/a	63.46	63.46	66.26	69.06	69.06

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	N/a	N/a	61	61	63	65	65
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	30.45%	30.45%	15%	15%	14.93%	14.88%	14.88%
	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	65	65	100	100	100	100	100
14	Perhubungan							
	<i>Tujuan</i>							
	<i>Rasio Konektivitas Kabupaten</i>	0.64	0.64	0.66	0.66	0.67	0.68	0.68
	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	B	B	B	A	A
	<i>Sasaran</i>							
	<i>Angka Kecelakaan Lalu Lintas (persen)</i>	0,14%	0,14%	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11
	<i>Program</i>							

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,64	0,64	0,66	0,66	0,67	0,68	0,68
	<i>V/C Rasio di Jalan Kabupaten</i>	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	NA	NA	0	0	0	0,25	0,25
	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	111	111	99	99	80	72	72
	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	0,19	0,19	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35
	Nilai IKM PD	B	B	B	B	A	A	A
	Nilai AKIP PD	C	C	CC	CC	B	B	B
15	Komunikasi dan Informatika							

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik</i>	N/a	N/a	87%	87%	93%	97%	97%
	<i>Jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik</i>	100%	100%	83%	83%	89%	94%	94%
	<i>Presentase sarana dan prasarana informasi dan komunikasi</i>	100%	100%	70%	70%	80%	90%	90%
	<i>Presentase tata kelola persandian dan statistik</i>	50% (100%)	50% (100%)	83%	83%	89%	94%	94%
	Persentase layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	70%	70%	80%	90%	90%
	Presentase Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain yang di lingkup pemerintah daerah	N/a	N/a	50%	50%	60%	70%	100%
	Presentase Pengelolaan e goverment Pemerintah Daerah	100%	100%	75%	75%	80%	85%	85%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh kominfo	N/a	N/a	15%	15%	15%	15%	15%
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	16%	16%	16%	16%	16%
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	20%	20%	20%	20%	20%
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	<i>Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya</i>	N/a	N/a	4.67%	4.67%	5.14%	5.60%	5.60%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</i>	N/a	N/a	0.30%	0.30%	0.33%	0.36%	0.36%
	Persentase Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin	9%	9%	11%	11%	13%	20%	44%
	Persentase Koperasi yang terawasi dalam hal kepatuhan dan pelaporan	2.18%	2.18%	2.80%	2.80%	2.99%	3.55%	9.34%
	Persentase Jumlah KSP/USP yang sehat dan mandiri dalam usaha dan permodalan	20.00%	20.00%	12.00%	12.00%	16.00%	20.00%	48.00%
	Persentase Koperasi binaan Kabupaten yang mengikuti diklat	3.73%	3.73%	5.60%	5.60%	7.47%	8.40%	21.48%
	Persentase Koperasi yang Terfasilitasi administrasi dan legalitas Koperasi	1.87%	1.87%	2.05%	2.05%	2.24%	2.33%	6.63%
	Prosentase UMKM yang diberdayakan	0.254%	0.254%	0.375%	0.375%	0.400%	0.424%	1199%
	Prosentase UMKM yang terfasilitasi	0.063%	0.063%	0.042%	0.042%	0.048%	0.054%	0.144%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
17	Penanaman Modal dan PTSP							
	<i>Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	-	-	2%	2%	2%	2%	2%
	<i>Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</i>	Investor : 28 Non UMK : 9 UMK : 1.793	Investor : 28 Non UMK : 9 UMK : 1.793	2000 Investor	2000 Investor	2000 Investor	2000 Investor	2000 Investor
	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa</i>	N/a	N/a	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	15 Laporan	15 Laporan
	<i>Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi</i>	N/a	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	<i>Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan</i>	N/a	N/a	1 T	1 T	1 T	1 T	1 T
	1. Nilai SAKIP	N/a	N/a	A	A	A	A	A

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N/a	N/a	87.5	87.5	88	90	90
	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25%	25%	2%	2%	2%	2%	2%
	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	25%	25%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah laporan peta potensi investasi	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dok	0 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	9 Dok	9 Dok	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	17%	17%	20 Investor	20 Investor	22 Investor	24 Investor	24 Investor
	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	3 kegiatan	3 kegiatan	50 Pengunjung	50 Pengunjung	60 Pengunjung	70 Pengunjung	70 Pengunjung
	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	17%	17%	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	15 Laporan	15 Laporan
	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Kali	4 Kali	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	4 Kali	4 Kali	25	25	30	35	35

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Terselesaikannya permasalahan yang dialami pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya	0	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	4 Kali	4 Kali	24 Kegiatan	24 Kegiatan	30 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan
	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha	0	0	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	25%	25%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Sinkron	1 Sistem	1 Sistem	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Sistem	1 Sistem	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	900 M	900 M	1 T	1 T	1 T	1 T	1 T
	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	85 Izin/ Non Izin	85 Izin/ Non Izin	12 perizinan sektor (OSS)	12 perizinan sektor (OSS)	12 perizinan sektor (OSS)	12 perizinan sektor (OSS)	12 perizinan sektor (OSS)
				2 PBG	2 PBG	2 PBG	2 PBG	2 PBG
				32 Izin/ Non Izin Manual	32 Izin/ Non Izin Manual	32 Izin/ Non Izin Manual	32 Izin/ Non Izin Manual	32 Izin/ Non Izin Manual

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.000 Pelaku usaha	1.000 Pelaku usaha	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Tersedianya dasar-dasar peraturan terkait teknis perizinan (dokumen)	0	0	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Tersedianya layanan informasi perizinan dan non perizinan	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0	0	120	120	120	120	120

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0	0	10	10	8	6	6
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	1. Nilai SAKIP	-2%	-2%					
	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	81	81	82	83	84
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	3 Dok	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	25 ASN	25 ASN	25 ASN	25 ASN	25 ASN	25 ASN
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 ASN	25 ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	94%	94%	95%	95%	95%	95%	95%
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			10 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	20 Unit
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 psg	34 psg	96 Paket	96 Paket	96 Paket	96 Paket	96 Paket
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sertifikasi ISO Pelayanan public	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org	2 org	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kali	2 Kali	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 ASN	2 ASN	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	90%	90%	92%	92%	94%	95%	95%
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	Unit	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20 Paket	20 Paket	25 Paket	30 Paket	30 Paket
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	92 liter	92 liter	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 meter ²	100 meter ²	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		20.000 lembar	20.000 lembar					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	768 exemplar	768 exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Dus	50 Dus	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Orang	12 Orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		230 Orang	230 Orang					
		250 Dus	250 Dus					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	90%	90%	93%	93%	94%	95%	95%
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Unit	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Unit	Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Buah	18 Buah	20 Unit	20 Unit	20 Paket	20 Paket	20 Paket
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	1 Unit	1 Unit	Unit	Unit	Unit
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	1 Unit	1 Unit	Unit	Unit	Unit
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	Unit	Unit
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Unit/Kali	20 Unit/Kali	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	91%	91%	92%	92%	93%	93%	93%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	Unit	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	225 meter ²	225 meter ²	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
18	Kepemudaan dan Olahraga							
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>			<i>N/a</i>	<i>N/a</i>	<i>N/a</i>	<i>N/a</i>	<i>N/a</i>
	<i>Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri</i>	20%	20%	20	20	25	30	30

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Peningkatan Prestasi Olahraga</i>			50	50	55	35	35
	<i>Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial kemasyarakatan</i>	26%	26%	26	26	30	35	35
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	4	4	4	4	4	4	4
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri	5%	5%	20%	20%	25%	30%	30%
	Peningkatan Prestasi Olahraga	42%	42%	50%	50%	55%	35%	35%
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	26%	26%	26%	26%	30%	35%	35%
19	Statistik							
	Presentase penyelenggaraan statistik sektoral	100%	100%	75%	75%	80%	85%	85%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang memadai	100%	100%	75%	75%	80%	85%	85%
20	Persandian							
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65%	65%	50%	50%	75%	80%	85%
	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang memadai	N/a	N/a	50%	50%	60%	70%	100%
	Persentase Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	N/a	N/a	50%	50%	60%	70%	100%
21	Kebudayaan							
	Tujuan							
	Persentase Objek Pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dan direvitalisasi	40%	40%	40,00%	40,00%	50,00%	50%	50%
	Indeks Reformasi Birokrasi PD	B	B	B	B	B	B	B

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Sasaran</i>							
	Persentase pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan cagar Budaya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Program							
	Persentase pelestarian warisan budaya	84,78%	84,78%	84,78	84,78	86,23	87,77	87,77
	Persentase SDM yang terlibat dalam pengembangan kebudayaan	0,00417	0,00417	0,005	0,005	0,0056	0,0062	0,0062
	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	70	70	70	70	81,82	90,91	90,91
	<i>Persentase Pestaarian Cagar Budaya</i>	85.94	85.94	86.72	86.72	87,5	88,28	88,28

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	NA	NA	50%	50%	50%	100	100
22	Perpustakaan							
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/a	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Pengunjung/ Pemustaka Perpustakaan	N/a	N/a	823 orang	823 orang	833 orang	842 orang	842 orang
	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	4.12%	4.12%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	4.15%	4.15%					

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Jumlah Naskah Kuno Yang diakuisisi dialihmediakan (Digitalisasi)/ Terdaftar Yang Ada di Wilayahnya	0	0	1	1	1	1	1
	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggung	20%	20%	20	20	20	20	20
	Tingkat Keberadaan Arsip dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggung Jawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Public dan Kesejahteraan	25%	25%	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	3	3	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
23	Kearsipan							
	Tingkat keberadaan arsip dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan public, dan kesejahteraan rakyat	0.90%	0.90%	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	5%	5%	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
III	Urusan Pemerintahan Pilihan							
24	Kelautan dan Perikanan							
	<i>Pertumbuhan PDRB sektor perikanan</i>	8%	8%	10%	10%	12.50%	15%	15%
	Volume produksi perikanan budidaya (ton)	N/a	N/a	50	50	50,5	51,5	51,5
	Volume produksi perikanan tangkap (ton)	N/a	N/a	20	20	22	22,5	22,5
	Volume produksi pengolahan dan pemasaran (ton)			85	85	90	95	95
	Rata-rata pendapatan/tahun (Rp)	97.000.000	97.000.000	100	100	110	120	120

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Produksi perikanan	87,14	87,14	100%	100%	100%	100%	100%
	Konsumsi ikan	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan bina kelompok nelayan	0.2	0.2	60%	60%	60%	60%	60%
	Produksi perikanan kelompok nelayan	0.6	0.6	13%	13%	15%	20%	20%
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	0.2025	0.2025	20.00%	20.00%	20.25%	20.26%	20.26%
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial	0,17	0,17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	Nilai tukar nelayan	107	107	107	107	107	107	107
25	Pariwisata							
	Tujuan							
	<i>Persentase Kontribusi sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB Kabupaten (harga berlaku)</i>	0,92%	0,92%	0,96%	0,96%	1,02%	1,06%	1,06%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Harga Konstan)</i>	12,86%	12,86%	14,86%	14,86%	16,86%	18,86%	18,86%
	Sasaran							
	<i>Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD</i>	10,16	10,16	12,86	12,86	13,86	14,86	14,86
	Program							
	<i>Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan</i>	6	6	6	6	7	9	9
	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	20	20	20	20	25	30	30
	Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)	63,39	63,39	63,39	63,39	63,39	63,39	63,39

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata	9,43	9,43	12,5	12,5	15,52	18,51	18,51
	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	0	0	30	30	30	40	100
	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	28%	28%	30%	30%	30%	40%	100%
	Nilai IKM PD	NA	NA	C	C	B	A	A
	Nilai AKIP PD	B	B	B	B	BB	BB	BB
26	Pertanian							

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Nilai IKM			4	4	4	4	4
	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun	5.85	5.85	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93
	Persentase Prasarana yang digunakan	N/a	N/a	100	100	100	100	100
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	N/a	N/a	1.48	1.48	1.49	1.50	1.50
	Persentase peningkatan teknologi yang diterapkan oleh petani	N/a	N/a	87	87	88	90	90
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.75	5.75	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2	2	1.48	1.48	1.49	1.5	1.5
	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	27.08	27.08	27.62	27.62	27.90	28.18	28.18
	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	-	-	-	-	-	-	-

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Produksi Hortikultura (Ton)	0	0	-	-	-	-	-
	Produksi Perkebunan (Ton)	-	-	-	-	-	-	-
	Produksi Peternakan (Kg)	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase fasilitasi penanggulangan kasus penyakit hewan menular (%)	73.46	73.46	79	79	81.7	83.9	83.9
	Persentase Peningkatan teknologi yang diterapkan oleh petani	80	80	87	87	88	90	90
28	Energi Sumber Daya Mineral							
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dalam Kabupaten yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha pertambangan yang di bina			500	500	500	500	500

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase perolehan Bonus Produksi Panas Bumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Perdagangan							
	<i>Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan</i>	N/a	N/a	1%	1%	1.10%	1.20%	1.20%
	<i>Pertumbuhan PDRB Sektor Industri</i>	N/a	N/a	7.50%	7.50%	7.56%	7.64%	7.64%
	<i>Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan</i>	N/a	N/a	6.80%	6.80%	6.86%	6.92%	6.92%
	<i>Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dalam Kabupaten yang dikelola</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distri busi perdagangan di Kabupaten</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP Toko swalayan</i>	N/a	N/a	20%	20%	20%	20%	20%
	<i>Tingkat Inflasi</i>	N/a	N/a	2.75	2.75	2.78	2.8	2.8
	<i>Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</i>	N/a	N/a	5%	5%	5%	5%	5%
	<i>Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)</i>	N/a	N/a	4%	4%	5%	6%	6%
	<i>Nilai IKM Perangkat Daerah</i>	N/a	N/a	4	4	4	4	4
	Persentase kinerja realisasi pupuk	N/a	N/a	40%	40%	40%	40%	40%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0.17%	0.17%	4%	4%	5%	6%	6%
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang di tata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pasar yang di bangun dan direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Temuan peredaran barang kadaluarsa dan Bahan pangan yang mengandung zat berbahaya serta UTTP			20	20	20	20	20
	Pengawasan Barang Beredar	18 keg	18 keg	18 keg	18 keg	18 keg	18 keg	18 keg
	Nilai IKM Dinas Perindustian dan Perdagangan			BB	BB	BB	BB	BB

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Perindustrian							
	Persentase industri kecil dan menengah yang bertambah	20.48%	20.48%	21%	21%	21%	21%	21%
	Cakupan bina kelompok pengrajin			20%	20%	20%	20%	20%
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
32	Sekretariat Daerah							
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	70.14	70.14	70.14	70.14	71.25	72.5	72.5
	<i>Nilai evaluasi SAKIP</i>	B	B	B	B	B	B	B

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nilai LPPD),</i>	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	<i>Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ),</i>	DITERIMA	DITERIMA	DITERIMA	DITERIMA	DITERIMA	DITERIMA	DITERIMA
	<i>Produk hukum yang ditetapkan,</i>	6 Perda, 50 Pebup, 605 SK, 4 Instruksi	6 Perda, 50 Pebup, 605 SK, 4 Instruksi	6 Perda, 50 Pebup, 605 SK, 4 Instruksi	6 Perda, 50 Pebup, 605 SK, 4 Instruksi	6 Perda, 55 Pebup, 610 SK, 4 Instruksi	8 Perda, 60 Pebup, 615 SK, 4 Instruksi	8 Perda, 60 Pebup, 615 SK, 4 Instruksi
	<i>Persentase capaian realisasi fisik/keuangan Perangkat Daerah,</i>	N/a	N/a	97%	97%	98%	99%	99%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan perekonomian dan pembangunan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Sekretariat DPRD							
	<i>Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	<i>Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD selesai tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
34	Perencanaan							
	Indeks Perencanaan	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Bappelitbangda	N/a	N/a	60%	60%	70%	75%	75%
35	Keuangan							
	<i>Opini BPK</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>
	<i>Prosentase Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah</i>			<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD</i>	N/a	N/a	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
36	Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	N/a	N/a					
	<i>Indeks Profesionalitas ASN</i>	N/a	N/a	51.5	51.5	52	52.5	52.5
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	N/a	N/a	B	B	B	A	A
	<i>Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan</i>	74.74	74.74	75.25	75.25	75.5	75.75	75.75
	<i>Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan</i>	29.55	29.55	30	30	30.25	30.5	30.5
	<i>Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	29.19	29.19	33%	33%	36%	39%	39%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan formal (latsar)	99.61	99.61	100	100	100	100	100
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	11.68	11.68	17	17	20	23	23
37	Penelitian dan Pengembangan							
	Indeks Inovasi Daerah	N/a	N/a	4	4	4	4	4
	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan daerah	N/a	N/a	60%	60%	65%	70%	70%
VI	Unsur Pengawasan							
38	Inspektorat							
	<i>Indeks Integritas</i>	72.25	72.25	80	80	82	85	85
	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	0	0	C	C	B	B	B
	<i>Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)</i>	0	0	1	1	1	1	1

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	<i>Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)</i>	0	0	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi</i>	1.588	1.588	3	3	3	4	4
	<i>Indeks Manajemen Risiko</i>	3	3	3	3	3	4	4
	<i>Indeks MCP Korsupgah</i>	81 indeks	81 indeks	80	80	85	90	90
	<i>Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</i>	2,710 indeks	2,710 indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	<i>Maturitas Implementasi SPIP</i>	2.945	2.945	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	<i>Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	<i>Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*</i>	65%	65%	75	75	80	90	90
	<i>SKM Pengawasan Inspektorat</i>	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	83.61%	83.61%	85%	85%	87%	90%	90%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase aktivitas pengawasan yang didukung NSPK yang baku	50%	50%	75%	75%	75%	80%	80%
	Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti	36%	36%	50%	50%	75%	80%	80%
	persentase pemenuhan dokumen MCP-korsupgah korupsi	71%	71%	80%	80%	90%	90%	90%
	Persentase perangkat daerah yang dievaluasi akuntabilitas kerjanya	62.01%	62.01%	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase urusan perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase perangkat daerah yang menyusun dan menetapkan risk register	36%	36%	75%	75%	90%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
VII	Unsur Pemerintahan Umum							
39	Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/a	N/a	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih	N/a	N/a	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	
	Persentase Penangan Konflik Sosial	N/a	N/a	100%	100%	100%	100%	
	Kualitas Generasi Muda yang mendapatkan pembinaan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	N/a	N/a	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	
	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	N/a	N/a	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	
	Tingkat Rasa Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	N/a	N/a	98.00%	98.00%	99.00%	99.00%	

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Persentase Pengawasan dan Penanganan Konflik	N/a	N/a	97.00%	97.00%	98.00%	99.00%	
	Indeks Reformasi Birokrasi			C	C	B	B	B
	Persentase Pemuda Mendapatkan Pembinaan Karakter, Tumbuhnya Jiwa Patriotisme, Budaya Prestasi dan Profesionalisme	N/a	N/a	98%	98%	98%	98%	99%
	Persentase Pembentukan Karakter Generasi Muda akan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	N/a	N/a	97%	97%	97%	97%	98%
	Persentase Partisipasi Pemilih	N/a	N/a	98%	98%			98%
	Persentase Fasilitas Kerkunan Umat Beragama	N/a	N/a	98%	98%	98%	98%	99%
	Tingkat Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	N/a	N/a	95%	95%	95%	95%	95%
	Tingkat Pengawasan Orang dan Lembaga Asing	N/a	N/a	98%	98%	98%	98%	98%

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Realisasi		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	
	Tingkat Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah	N/a	N/a	98%	98%	98%	98%	98%

2.2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025. Hasil Evaluasi RKPD sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di Bawah ini.

Tabel 2,142 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	Target Rastera Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Rastera PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rastera Perangkat Daerah Sampai Dengan Rastera PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rastera PD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Trimalan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rastera Perangkat Daerah yang di Realisasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rastera PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rastera Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rastera Kabupaten s/d Tahun 2025 (%)						
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																									
					Urusan Wajib Bukan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup																				
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	2.11.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	85 %	11.258.000.000	100 %	6.006.260.932	83 %	2.972.974.173	17	502.749.984					17	502.749.984	200 %	8.781.785.769	235	78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01			Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	12.000.000	100 %	6.998.369	3 dok	2.984.026	-	-					-	-	200 %	10.997.595	200	92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01.01			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	4 dok	4.000.000	2 dok	1.999.613	1 dok	994.338	-	-					-	-	4 dok	3.999.226	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01.02			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01.03			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	--	-	--	-	- dok	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01.04			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01.05			Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	2 dok	2.000.000	1 dok	999.477	1	997.502	-	-					-	-	2 dok	1.998.954	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01.06			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja PD	5 lap	10.000.000	3 lap	3.999.279	1 lap	992.186	-	-					-	-	5 lap	5.998.892	100	60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.01.07			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi PD	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi pengelolaan keuangan daerah	95 %	13.905.000.000	93 %	5.013.851.044	94 %	2.622.509.019	18 ASN	479.069.066					18 ASN	479.069.066	178 %	7.376.057.532	187	53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN DH	115 ASN	13.882.000.000	44 ASN	5.008.857.266	23 ASN	2.619.561.956	3 ASN	479.069.066					3 ASN	479.069.066	65 ASN	7.371.063.754	57	53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.03			Pelaksanaan penatuaahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.04			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.05			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5 lap	5.000.000	1 lap	998.610	1 lap	992.186	-	-					-	-	1 lap	998.610	20	20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.06			Pengelolaan dan penyiapan tanggapan bahan pemeriksaan	Jumlah rancangan laporan tanggapan pemeriksaan	5 dok	5.000.000	1 dok	997.867	0 dok	-	-	-					-	-	1 dok	997.867	20	20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.07			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran	85 lap	10.000.000	17 lap	1.997.811	17 lap	990.786	-	-					-	-	17 lap	1.997.811	20	20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.02.08			Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah rancangan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	3 lap	3.000.000	1 lap	999.490	1 lap	964.091	-	-					-	-	1 lap	999.490	33	33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah	Persentasi penyediaan barang milik daerah	85 %	4.000.000	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.03.01			Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersusunnya rencana kebutuhan barang SKPD	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.03.02			Pengamanan barang milik daerah SKPD	Persentasi pengamanan barang milik daerah	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.03.03			Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan kordinasi dan penilaian barang milik daerah	2 lap	2.000.000	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.03.04			Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.03.05			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		2.11.01.2.03.06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan enatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 lap	2.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.03.07		Pemanfaatan barang milik daerah	Persentasi pemanfaatan barang milik daerah	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	80 %	4.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04.01		Perencanaan pengelolaan retribusi darah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	2 dok	2.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	2	2.000.000	100	100	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04.02		Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah dokumen	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04.03		Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Jumlah kegiatan	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04.04		Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	2 dok	2.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	2	2.000.000	100	100	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04.05		Pengelolaan data retribusi daerah	terlaksananya pengelolaan data retribusi daerah	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04.06		Penetapan wajib retribusi daerah	terlaksananya penetapan	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.04.07		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi disiplin ASN DLH meningkat	99 %	550.000.000	100 %	21.600.000	0 0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	100 %	21.600.000	101	4	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.05.01		Penigkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Persentasi disiplin ASN DLH	99 %	5000000	29 stel	21.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29	21.600.000	29	432	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan (pakaian olah raga dan PDH)	139 stel	160.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.03		Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pendataan	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.04		Koordinasi dan pelaknsaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah koordinasi	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.05		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Jumlah laporan	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.06		Pemulangan pegawai yang pensiun	jumlah pegawai	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.07		Pemulangan pegawai yang meninggal berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.08.08		Pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.09		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	15 ASN	100.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi	4 kali	285.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05.11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum PD	95 %	903.000.000	95 %	232.825.666	94 %	76.613.313	31	23.680.918	-	-	-	-	31	23.680.918	172 %	364.404.751	181	40	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.01		Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan	2 paket	61.000.000	--	-	0 paket	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0 paket	-	0	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	101.000.000	2 paket	79.995.908	1 paket	14.983.313	0	-	-	-	-	-	0	-	3 paket	129.992.220	150	129	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	--	-	--	-	0 -	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0 paket	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya bahan logistik	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan da penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 paket	186.000.000	2 paket	74.212.312	1 paket	9.990.000	0	-	-	-	-	-	0	-	3 paket	114.065.862	60	61	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.06.07		Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan/material	2 paket	20.000.000	--	-	--	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP

		2.11.01.2.06.08			Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	270 orang	33.000.000	54 Orang	6.534.223	1 lap	3.996.000	0	-					0	-	54 orang	6.534.223	20	20	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.09			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi	20 lap	502.000.000	10 lap	72.083.223	10 lap	47.644.000	5	23.680.918					5	23.680.918	22 lap	113.812.446	110	23	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.10			Penatausahaan arsip dinas pada SKPD	Jumlah arsip	--	-	--	-		-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.11			Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan	--	-	--	-		-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	98 %	333.000.000	99 %	110.300.000	97 %	-	0	-					0	-	198 %	116.235.000	202	35	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.01			Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan (mobnas kadis)	--	0	--	-		-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.02			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional (truck sampah)	--	0	--	-		-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.03			Pengadaan alat besar	jumlah alat besar (excavator TPA)	--	0	--	-		-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.04			Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor (container sampah), perahu	jumlah alat angkutan (container sampah), perahu	--	0	--	-		-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.05			Pengadaan mebel	Jumlah mebel	--	0	--	-		-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.06			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin	39 unit	225.000.000	14 unit	110.300.000	--	-	-	-					-	-	15 unit	116.235.000	38	52	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.07			Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah pengadaan aset	27 unit	108.000.000	--	-	--	0	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.08			Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud	--	0	--	-	--	0	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.09			Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor	--	0	--	-	--	0	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.10			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarpras	--	0	--	-	--	0	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.07.11			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarpras	--	0	--	-	--	0	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 bulan	1.353.000.000	12 bulan	464.428.678	12 bulan	187.594.815	0	-					0	-	24 bln	682.262.541	40	50	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	3000 lembar	30.000.000	2 lembar	20.000.000	540 lembar	5.400.000	0	-					0	-	3	30.000.000	0	100	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan operasional komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	176.000.000	24 bulan	58.028.678	12 bulan	34.994.815	0	-					0	-	36 bln	81.062.541	300	46	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08.03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08.04			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.147.000.000	24 bulan	386.400.000	12 bulan	147.200.000	0	-					0	-	36 bln	571.200.000	300	50	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27 unit	677.000.000	30 unit	156.257.175	27 unit	83.273.000	0	-					0	-	33 unit	210.228.350	122	31	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.01			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 unit	187.000.000	2 unit	76.459.875	1 unit	38.480.000	0	-					0	-	3 unit	114.439.750	60	61	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.02			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas operasional dan lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan pembayaran pajak	7 unit	239.000.000	4 unit	49.921.300	2 unit	33.930.000	0	-					0	-	6 unit	65.912.600	86	28	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.03			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah pemeliharaan alat berat	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.04			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah pemeliharaan alat angkutan tak bermotor	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.05			Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	0	-	-	-	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.06			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihra	120 unit	151.000.000	24 unit	29.876.000	17 unit	10.863.000	0	-					0	-	0 unit	29.876.000	0	20	DINAS UNGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.07			Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset lainnya	--	-	--	-	--	-	-	-					-	-	0	-	-	0	DINAS UNGKUNGAN HIDUP

				2.11.01.2.09.08			Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud	--		-	--	-	--	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				2.11.01.2.09.09			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	--		-	1 unit	97.744.000	--	-	-	-	-	-	1 unit	97.744.000	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				2.11.01.2.09.10			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor	1 unit		100.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	- unit	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				2.11.01.2.09.11			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor	--		-	--	-	--	-	-	-	-	-	- unit	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				2.11.01.2.09.12			Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	jumlah lokasi	--		-	--	-	--	-	-	-	-	-	- unit	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
															-					unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
							Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup								-					-				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	Menurunnya Beban Pencemaran Udara, Air dan Tutupan Lahan/Tanah	2.11.02					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentasi Dokumen lingkungan hidup yang disusun	100 %		2.473.000.000	100 %	224.993.880	2 dok	333.254.076	0	-	-	-	0	-	0	224.993.880	0	9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.2.01					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Terlaksananya penyusunan dokumen RPPLH	--		-	--	-		199.934.859	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.2.01.01					Penyusunan dan Penetapan RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	--		-	--	-	1	199.934.859	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.2.01.02					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH yang dikendalikan dan dilaksanakan	--		-	--	-		0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02.2.02					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terlaksananya penyusunan Dokumen Lingkungan hidup dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta review dokumen zonasi danau tondano	10 dok		2.473.000.000	3 dok	224.993.880	1 dok	133.319.217	0	-	-	-	0	-	3 dok	224.993.880	30	9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.2.02.01					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Umum Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang	--		-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02.2.02.02					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	8 dok		2.323.000.000	3 dok	224.993.880	1 dok	133.319.217	0	-	-	-	0	-	3 dok	224.993.880	38	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.2.02.03					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP	2 dok		150.000.000	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	74 %		19.723.000.000	100 %	7.415.959.226	73 %	2.508.013.000	8	198.872.000	-	-	8	198.872.000	200 %	10.089.555.882	270	51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.01					Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terukurnya kualitas air, udari dan tanah/ tutupan lahan	9 komponen		385.000.000	6 lok	102.787.156	1 kom	43.200.000	0	-	-	-	0	-	9 lok	145.574.312	100	38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.01.01					Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Pengukuran kualitas air, udara, tanah/ tutupan lahan dan Rehabilitasi terumbu karang serta rehabilitasi hutan mangrove	30 lokasi		385.000.000	15 titik	102.787.156	1 dok	43.200.000	0	-	-	-	0	-	21 lok	145.574.312	70	38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.01.02					Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah lokasi Emisi Gas Rumah Kaca yang dikendalikan	--		-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.01.03					Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laboratorium yang dikelola	--		-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.02					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencemar	Jumlah sumber pencemar yang tertangani	18 lok		19.258.000.000	4 lok	7.303.211.500	4 lok	2.464.813.000	1 lok	198.872.000	-	-	1 lok	198.872.000	5 lok	9.934.021.000	28	52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.02.01					Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah papan informasi, brosur, liflet dan papan informasi	2 paket		354.000.000	--	-	0 -	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.02.02					Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Pengisolasian Kerusakan Lingkungan Hidup	--		-	--	-		-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.02.03					Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	16 lokasi		18.904.000.000	147 ha	7.303.211.500	4 titik	2.464.813.000	1 ha	198.872.000	-	-	1 ha	198.872.000	294 ha	9.934.021.000	1838	53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Pengangkatan Eceng Gondok Padat Karya Tunai Di Danau Tondano Tahun (jasa tenaga kebersihan)							#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

[illegible]

			2.11.05.2.02.02			Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan B3 dengan Pemerintah Provinsi	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			2.11.06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentasi ketataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PPU lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	69 %	151.000.000	96,2 %	24.846.747	0,68	9.991.686	0	-	-	-	-	-	0	-	192,4 keg	29.646.747	279	20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.06.2.01			Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	116 keg	151.000.000	34 lap	24.846.747	7 keg	9.991.686	0	-	-	-	-	-	0	-	51 lap	29.646.747	44	20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.06.2.01.01			Facilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH	Jumlah izin lingkungan/PPLH yang memenuhi pemenuhan dan ketentuan	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.06.2.01.02			Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengawas LH	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.06.2.01.03			Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (Perjalanan dinas DD)	116 lap	151.000.000	34 lap	24.846.747	7 lap	9.991.686	0	-	-	-	-	-	0	-	51 lap	29.646.747	44	20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.06.2.01.04			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah pengawasan penerapan sanksi	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			2.11.-07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentasi keberadaan MHA, kearifan lokal dan haj MHA terkait PPLH	50 %	10.000.000	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.-07.2.01			Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya pendataan kelompok MHA, kearifan lokal,pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.-07.2.01.01			Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan pendataan informasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.-07.2.02			Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentasi kelompok MHA	50 %	10.000.000	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.07.2.02.01			Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	5 kmpk	10.000.000	0 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	47 %	30.000.000	100 %	5.044.950	--	-	0	-	-	-	-	-	0	-	100 %	5.044.950	213	17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.08.2.01			Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Diklat dan Sosialisasi serta pendampingan bagi kelompok masyarakat	4 kali	30.000.000	4 klpk	5.044.950	--	-	0	-	-	-	-	-	0	-	4 klpk	5.044.950	100	17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.08.2.01.01			Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 klpmk	30.000.000	4 klpmk	5.044.950	--	-	0	-	-	-	-	-	0	-	4 klpmk	5.044.950	100	17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.08.2.01.02			Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat (klmpk Bank Sampah)	--	-	0 -	-	0 -	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.08.2.01.03			Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	--	-	0 -	-	0 -	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tercapainya penghargaan lingkungan hidup	3 Pengh	151.000.000	--	-	--	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0 -	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.09.2.01			Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	3 keg	151.000.000	--	-	--	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0 -	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

			2.11.09.2.01.01			Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia usaha/ Dunia pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah laporan kegiatan penghargaan hari lingkungan hidup sedunia (ikut serta dalam kegiatan hari lingkungan hidup sesuai di Jakarta)	3 pengh	151.000.000	--	-	--	-	0	-						0	-	0 -	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat	58 %	60.000.000	100 %	9.998.259	0,57	4.995.310	0	-						0	-	100 %	9.998.259	172	17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.10.2.01			Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kaupaten/ Kota	Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	60.000.000	100 %	9.998.259	100 %	4.995.310	0	-						0	-	100 %	9.998.259	100	17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.10.2.01.01			Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Persentasi laporan pengaduan yang diselesaikan	100 %	30.000.000	26 lap	9.998.259	5 lap	4.995.310	0	-						0	-	26 lap	9.998.259	26	33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.10.2.01.02			Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan / atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Persentasi sengketa lingkungan yang diselesaikan	100 %	30.000.000	--	-	--	-	0	-						0	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota		2.11.11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentasi penanganan, pengurangan dan pengangkutan sampah	73 %	40.392.000.000	100 %	12.355.870.075	73 %	7.076.186.732	0,063 %	162.541.800						0,063 %	162.541.800	184 %	18.109.040.025	252	45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01			Pengelolaan sampah	Persentasi Pengelolaan dan penanganan sampah	73 %	40.362.000.000	100 %	12.346.080.664	73 %	7.071.194.996	0,063 %	162.541.800						0,063 %	162.541.800	184 %	18.094.450.614	252	45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01.01			Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten yang disusun	1 dok	200.000.000	--	-	--	-	0	-						0	-	0 %	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01.02			Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah bank sampah yang dibangun beserta fasilitasnya	2 unit	3.030.000.000	--	-	--	-	0	-						0	-	0 %	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01.03			Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	118 ton	35.585.000.000	64 ton	12.328.535.664	32 ton	7.071.194.996	0,063 %	162.541.800						0,063 %	162.541.800	26944 %	18.059.360.614	22834	51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01.04			Jasa Penyapu Jalan	4 dok	200.000.003	4 dok	200.000.003	4 dok	200.000.003		-							-	-	200.000.003			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.11.2.01.05			Jasa Petugas Kebersihan/Kenek Dump Truck	5 dok	200.000.004	5 dok	200.000.004	5 dok	200.000.004		-							-	-	200.000.004			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.11.2.01.06			Jasa Pengawas Kebersihan	6 dok	200.000.005	6 dok	200.000.005	6 dok	200.000.005		-							-	-	200.000.005			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.11.2.01.07			Jasa Penjaga TPA	7 dok	200.000.006	7 dok	200.000.006	7 dok	200.000.006		-							-	-	200.000.006			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Jasa Sopir Truck	8 dok	200.000.007	8 dok	200.000.007	8 dok	200.000.007		-							-	-	200.000.007			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Jasa Operator Alat Berat	9 dok	200.000.008	9 dok	200.000.008	9 dok	200.000.008		-							-	-	200.000.008			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan dan Mesin serta BBM	10 dok	200.000.009	10 dok	200.000.009	10 dok	200.000.009		-							-	-	200.000.009			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Pengadaan Peralatan Kebersihan	11 dok	200.000.010	11 dok	200.000.010	11 dok	200.000.010		-							-	-	200.000.010			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			2.11.11.2.01.04			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	persentasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	--	-	--	-	--	-	-	-						-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01.05			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ke Provinsi Perjalana dinas DD dalam provinsi	24 dok	30.000.000	--	-	--	-	0	-						0	-	0	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01.06			Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan yang disusun	--	-	--	-	--	-	-	-						-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.01.07			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten yang tersedia	6 paket	1.717.000.000	1 paket	17.545.000	--	-	0	-						0	-	2 paket	35.090.000	33	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.11.2.02			Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Jumlah izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	--	-	--	-	--	-	-	-						-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		2.11.11.2.02.01			Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	--	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11.2.03			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Jumlah pembinaan dan pengawasan	20 lokasi	30.000.000	26 lap	9.789.411	5 lok	4.991.736	0	-						0	-	36 lap	14.589.411	180	49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11.2.03.01			Facilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah izin usaha yang difasilitasi pemenuhan ketentuan terkait usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	--	-	--	-	--	-	-	-						-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.11.2.03.02			Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah yang disusun	--	-	--	-	--	-	-	-						-	-	-	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.11.2.03.03			Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Perjalanan dinas DD)	60 lap	30.000.000	26 lap	9.789.411	5 lap	4.991.736	0	-						0	-	36 lap	14.589.411	60	49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja - Ketersediaan anggaran sesuai dengan perencanaan																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja - Terjadi Refocusing anggaran dan tahun 2023, terjadi pengurangan pagu sehingga ada target yang tidak tercapai serta Aplikasi SIPD yang masih belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan target																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya - Ketersediaan dana sebaiknya berdasarkan RAK per triwulan																											
Tindak Lanjut yang diharapkan dalam RKPD Berikutnya - Rencana Kerja (RENIA) yang sudah disusun DAH Tahun 2023 agar terealisasi sesuai dengan yang diharapkan																											
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																											
		2			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TIDAK BERKAITAN																						
		2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																						
I	1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	98,00	15.426.248.155	97,80	12.316.655.376	98,00%	2.820.942.185	17,86%	521.748.741					17,86%	521.748.741	190,82	15.596.339.681	194,71	97,64	Dirabudpar	
1			2	22	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	30,00	14.881.889	12,00	14.881.889	4,00	4.155.899	1,00	2.171.271				1,00	2.171.271	8,00	19.828.828	26,67	127,87	Dirabudpar	
			2	22	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,00	26.000.000	9,00		3,00	460.800	1,00		0			1,00		6,88	460.800	40,00	1,77		
			2	22	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD	10,00	0	6,00	0	2,00	3.430.011	1,00	2.171.271				1,00	2.171.271	4,00	3.421.271	40,00	-		
			2	22	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	0	3,00	0	1,00	264.888	1,00	0				1,00	0	2,00	-	40,00	-		
2			2	22	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat Daerah	60	12.561.167.848	36	12.561.167.848	12	2.391.491.096	3	432.579.583					3	432.579.583	24,00	14.793.679.588	40,00	117,69	Dirabudpar
			2	22	1	2.02	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1250	12.561.167.848	720	12.561.167.848	225	2.395.153.957	54	432.570.583					54	432.570.583	444,00	14.780.342.429	35,34	117,87	
			2	22	1	2.02	3. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPD	300,00	-	180,00	0,00	60	0	19	0					19	0	125,00	-	41,67	-	
			2	22	1	2.02	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD	10,00	-	6,00	0,00	2	3.337.159	1	0,00				1	0,00	4,00	-	40,00	-		
			2	22	1	2.02	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semester SIPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD	10,00	-	6,00	0,00	2	0	1	0				1	0	4,00	-	40,00	-		
3			2	22	1	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	99,00	79.100.000	99,00	42.500.000	98,00	15.200.000	100,00	15.200.000					100,00	15.200.000	398,00	57.700.000	492,62	72,95	Dirabudpar
			2	22	1	2.03	2. Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akibat	42,00	79.100.000	21,00	79.100.000	-	15.200.000	18	15.200.000					18	15.200.000	18,00	94.300.000	42,86	119,22	
4			2	22	1	2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	396.178.439	93,00	66.433.510	94,00	120.277.326	40,67	48.919.245					40,67	48.919.245	185,75	186.606.008	195,52	47,10	Dirabudpar
			2	22	1	2.04	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	0	0,00		0,00	-	-						-	-	-	-	-	-	
			2	22	1	2.04	2. Penyediaan Pasokan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Pasokan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	20,00	0	12,00		4,00	19.873.318	1,00	595.508					1,00	595.508	7,00	19.824.483	35,00	-	
			2	22	1	2.04	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10,00	0	6,00		2,00	1.904.893		-					-	3,00	1.904.893	30,00	-		
			2	22	1	2.04	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1,00	0	0,00		1,00	-	-	0					-	0	1,00	-	100,00	-	
			2	22	1	2.04	8. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20,00	0	12,00		4,00	7.750.000	1,00	7.601.600					1,00	7.601.600	6,00	7.746.195	30,00	-	
			2	22	1	2.04	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	20,00	0	12,00		4,00	90.749.115	1,00	40.721.137					1,00	40.721.137	6,00	90.696.927	30,00	-	
5			2	22	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Keterersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sipil Negara (KASIP)	82,00	136.615.990	61,62	117.175.781	65,00	20.222.091	65,00	5.600.000					65,00	5.600.000	14.468.540	137.244.191	#####	100,46	Dirabudpar
			2	22	1	2.07	6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15		12		3	14.483.835	-						-	6,00	14.468.410	40,00	-		
			2	22	1	2.07	5. Pengadaan Mobil	Jumlah Unit Mobil yang Disediakan					3	5.738.256	3	5.600.000					3	5.600.000		5.600.000			
6			2	22	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,00	1.245.263.899	36	872.347.686	12	309.598.000	3	4.108.642					3	4.108.642	115.320.992	1.176.619.764	#####	94,00	Dirabudpar
			2	22	1	2.08	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,00		9,00		3,00	4.000.000	1,00	1.350.000					1,00	1.350.000	6,00	3.950.000	40,00	-	
			2	22	1	2.08	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00		36,00		12,00	17.598.000	3,00	2.758.642					3,00	2.758.642	21,00	16.322.098	35,00	-	
			2	22	1	2.08	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00		36,00		12,00	288.000.000	3,00	0					3,00	0	21,00	278.000.000	35,00	-	
7			2	22	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/layak fungsi	100,00	487.616.579	100,00	335.916.146	100,00	59.997.873	21,97	13.180.000					21,97	13.180.000	183,43	395.830.346	183,43	84,65	Dirabudpar
			2	22	1	2.09	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pagiannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagiannya	5,00	178.164.229	3,00	101.204.229	1,00	38.480.000	1,00	12.825.000					1,00	12.825.000	4,00	139.684.229	80,00	78,40	
			2	22	1	2.09	6. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					1,00	1.420.000	1,00	355.000					1,00	355.000	4,00				

		2	22	1	2.08	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,80	289.455.350	3,00	289.455.350	-	20.097.973,00	-	0								-	0	1,00	309.467.750	98,80	106,91	
II	2.1 Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian warisan budaya	83,55	700.949.430	81,38	700.949.430	83,89	202.737.700	83,89%	1.587.800								83,89%	1.587.800	86,41	903.048.730	103,42	128,92	Dibudpar
1		2	22	2	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7	700.949.430	1	-	2	202.737.700	1	1.587.800							1	1.587.800	5,90	202.699.300	71,43	28,92	Dibudpar	
		2	22	2	2.01	1. Pelatihan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelatihan, Pengembangan, Pemanfaatan			-	1.00%	202.737.700	9.00%	1.587.800							9.00%	1.587.800	1.00%	202.699.300	-	-			
		2	22	2	2.01	2. Pembiayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Laporan Pembiayaan SDM Lembaga dan Pranata Tradisional			-	1	-	-	-	-							-	1,00	-	-	-			
III	2.1 Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan/diinventarisasi	72,72	542.000.000	66,67	70.365.603	70,00	21.165.603	70,00	2.637.603							70,00	2.637.603	350,00	91.903.296	481,23	16,80	Dibudpar	
1		2	22	3	2.01	Pembiayaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pembiayaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		47.190.000	1 Lap	21.165.603	1 Lap		2.637.603							1 Lap	2.637.603	1 Lap	68.237.603	-	-	Dibudpar		
		2	22	3	2.01	1. Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Dilengkapi Kompetensi)		2.100.000	12 Orang	18.525.345	12 Orang		2.397.345							12 Orang	2.397.345	12 Orang	20.597.345	-	-			
		2	22	3	2.01	3. Peningkatan Kapasitas T.eks Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dilibatkan kajiannya			1	2.640.258	1		240.258							1	240.258							
IV	2.1 Terlestarikannya Cagar Budaya	2	22	4		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	72,72	70.365.603	66,67	-	70,00	5.825.108	70,00	-						70,00	-	2.725.178	5.825.108	#####	7,34	Dibudpar		
		2	22	4	2	Pemetaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan		1	3.000.000			-	-								-	-	-	-	-			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Objek diluar Cagar Budaya	Jumlah Objek diluar cagar budaya yang didaftarkan		1	3.000.000																			
		2	22	4	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dikelola		1	2.025.108			-	-								-	-	-	-	-			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2	1. Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		1	2.025.108																			
		2	22	4	2																								

[illegible]

		1	04	01	2.0	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 0	0	17 Laporan	2.249.690	0 0	0	0 0	0					0 0	0	8,5 %	2.249.690	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Rancangan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun SKPD Yang Tersusun	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		01	04	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah rancangan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	0 0	0	0 %	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	0 0	0	0 %	16.830.000	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	16.830.000	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Persentase pegawai yang memiliki tanda lulus/ sertifikat kepesertaan	0 0	0	0 %	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang tersedia	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang disediakan	0 0	0	34 Pasang	16.830.000	0 0	0	0 0	0					0 0	0	17 %	16.830.000	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah PSL yang disediakan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah PSR yang disediakan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu yang disediakan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Terlaksana	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	80 %	99.629.586	0 %	581.005.124	80 %	97.535.470	0 0	0					0 0	0	7,5 %	596.138.647	9,38	598	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Amplop))	12 Bulan	24.176.586	12 Bulan	51.219.967	12 Bulan	22.987.470	0 0	0					0 0	0	6 %	55.993.490	50,00	232	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Bolpoint)	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (BStaples)	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Cutter))	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Gunting)	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (HVS))	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Isi Cutter))	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Isi Hekter))	0						0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Isi Hekter))	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Lakban)	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Lem))	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Map Kertas Diamond))	0 0	0					0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

								Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Tinta)	0 0	0									0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1	04	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	0 0	0	12 Bulan	12.110.000	0 0	0	0 0	0				0 0	0	6 %	12.110.000	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi luar daerah	12 Bulan	75.453.000	12 Bulan	517.675.157	12 Bulan	74.548.000	0 0	0				0 0	0	6 %	#REF!	50,00	#REF!	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi dalam daerah			0 0	0			0 0	0				0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan			0 0	0			0 0	0				0 0	0	0 %	10.360.000	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD	75 %	19.785.750	75 %	60.445.000	75 %	20.071.920	0 0	0				0 0	0	37,5 %	60.445.000	50,00	305	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0 7		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0				0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0 7		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	0 0	0	6 Unit	5.115.000	0 0	0	0 0	0				0 0	0	3 %	5.115.000	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	19.785.750	4 Unit	55.330.000	5 Unit	20.071.920	0 0	0				0 0	0	2 %	55.330.000	40,00	280	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	80 %	110.795.275	80 %	254.582.461	80 %	114.340.000	0 0	0				0 0	0	58,5 %	296.495.987	73,13	268	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Fax tersedia	12 bulan	9.995.275	12 Bulan	23.282.461	12 Bulan	13.540.000	0 0	0				0 0	0	6 %	27.695.987	50,00	277	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Jasa sumberdaya air tersedia			0 0	0			0 0	0				0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah Jasa listrik tersedia			0 0	0			0 0	0				0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		1	04	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	3 orang/bulan	100.800.000	9 Orang	231.300.000	3 Orang	100.800.000	0 0	0					0 0	0	6 %	268.800.000	200,00	267	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	80 %	38.030.000	80 %	116.266.839	80 %	28.300.000	0 0	0					0 0	0	40 %	116.266.839	50,00	306	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	33.000.000	1 Unit	84.266.839	1 Unit	24.000.000	0 0	0					0 0	0	0,5 %	84.266.839	50,00	255	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	5.030.000	0 0	0	5 Unit	4.300.000	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	0 0	0	150 m2	32.000.000	0 0	0	0 0	0					0 0	0	75 %	32.000.000	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Peningkatan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban							Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten																		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
								Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten																		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		01	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Pengembangan Perumahan Tertangani	90 %	35.400.000	0 %	11.233.500	0 0	0	0 0	0					0 0	0					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Presentase Penyediaan dan Fasilitas Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	0 %	0	93 %	0	94 %	40.399.840	0 0	0					0 0	0	66,5 %	-	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	02	2.0	1	Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Rumah Korban Dampak Bencana	100 persen	35.400.000	90 %	11.233.500	90 %	40.399.840	0 0	0					0 0	0	65 %	19.633.500	65,00	55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	02	2.0	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236 orang/hari	35.400.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	8.400.000	0,00	24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

								Jumlah RT korban yang rumahnya terkena bencana alam	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah KK korban yang rumahnya terkena bencana alam	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah RT korban bencana yang terfasilitasi	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah KK korban bencana yang terfasilitasi	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	02	2.0	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah/Laporan Hasil Pendataan Dan Verifikasi Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	0 0	0	1 Dokumen	11.233.500	12 Bulan	40.399.840	0 0	0					0 0	0	0,5 %	11.233.500	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	02	2.0	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten / Kota	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	02	2.0	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Kegiatan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	02	2.0	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Kegiatan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	02	2.0	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Perumahan dan Korban Dampak Bencana /Relokasi Program Kabupaten/Kota Tertangani	0 0	0	0 %	0	0 %	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			1	04	02	2.0	02	3	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

			1	04	03	2.0	1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah ijin yang di terbitkan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1	04	03	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1	04	03	2.0	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rencana penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Tertangani	90 %	86.000.000	0 %	0	90 %	6.000.000	0 kali	0					0 kali	0	50 %	36.040.000	55,56	42	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1	04	03	2.0	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40 orang/kali	6.000.000	0 0	0	40 orang/hari	6.000.000	0 kali	0					0 kali	0	20 %	2.250.000	50,00	38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh <10 Ha	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Jumlah rumah di Kab/Kota	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Jumlah unit PK RTLH	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Jumlah rumah tidak layak huni	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1	04	03	2.0	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana	12 Bulan	80.000.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	33.790.000	0,00	42	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Jumlah rumah pembangunan baru	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1	04	03	2.0	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Yang dibagikan akibat terdampak pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas Kawasan Kumuh Kabupaten Tertangani	95 %	35.350.000	92 %	15.868.766.285	94 %	35.500.000	0 0	0					0 0	0	77 %	15.879.866.285	81,05	44922	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	03	2.03	01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	03	2.03	02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Unit Rumah yang Tertangani	0 0	0	363 Unit	6.449.466.981	0 0	0	0 0	0					0 0	0	181,5 %	6.449.466.981	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	03	2.03	03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Rumah Tertangani	0 0	0	154 Unit	2.500.000.000	0 0	0	0 0	0					0 0	0	77 %	2.511.100.000	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04	03	2.03	06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tertangani	0 0	0	166 Unit	6.919.299.304	200 orang/hari	35.500.000	0 0	0					0 0	0	83 %	6.919.299.304	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	177 orang/kali	35.350.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.2 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni							Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH																			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 0	0					0 0	0	0 %	-	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kawasan Permukiman Kabupaten Yang Tertangani untuk Mencegah Tumbuh Kembangnya Kawasan Kumuh	0 %	0	0 %	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tertangani	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	04			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tertangani	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0					0 0	0	0 %	0	0,00	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penduduk Yaitu Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan-Kawasan Strategis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																				0,00	-	0%	-		
																				0,00	-	0%	-		
																				0,00	-	0%	-		
																				0,00	-	0%	-		
																				0,00	-	0%	-		
																				0,00	-	0%	-		
																				0,00	-	0%	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
																				0,00	-	#DIV/0!	-		
				</																					

[illegible]

Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Dinas Perhubungan yang bersih, Akuntabel dan						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	95	5.567.685.691	78	5.508.519.582	95	5.478.178.316	26%	1.532.919.565				#DIV/0!	1.532.919.565	#DIV/0!	7.011.097.881	#DIV/0!	2.337.032.627	DINAS PERHUBUNGAN
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	95	2.145.000	0	0	95	-	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.072.500	0	0	3	-	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1.072.500	0	0	3	-	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100	4.068.515.556	100	3.949.559.929	100	4.030.324.310	0	1.213.269.565				0	1.213.269.565	100	5.243.593.875	33	1.747.864.625	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	4.068.515.556	100	3.949.559.929	44	4.030.324.310	13%	1.213.269.565				#DIV/0!	1.213.269.565	#DIV/0!	5.243.593.875	#DIV/0!	1.747.864.625	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN

						Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan <u>Retribusi Daerah</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pemanfaatan barang milik daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah perencanaan pengelolaan retribusi daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan <u>Retribusi Daerah</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan yang Terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana <u>Disiplin Pegawai</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan <u>Penilaian Kinerja Pegawai</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- <u>Undangan</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- <u>Undangan</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	91,5	115.006.920	90	74.193.852	91,5	101.306.120	0	150.000		0	150.000	90	101.456.120	30	33.818.707	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ <u>Penerangan Bangunan Kantor</u> yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	19.620.400	1	24.391.192	1	16.743.600	0	150.000		0	150.000	1	16.893.600	0	5.631.200	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN

							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		6.412.520	1	3.395.750	1	6.412.520	0%	-										#DIV/0!	-	#DIV/0!	6.412.520	#DIV/0!	2.137.507	DINAS PERHUBUNGAN
							penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	3	1.161.000	0	0	0	0	0									0	0	3	-	1		DINAS PERHUBUNGAN	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	88.974.000	0	45.245.910	30	78.150.000	0	0	0									0	0	0	78.150.000	-	26.050.000	DINAS PERHUBUNGAN	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBM	71	32.708.395	70	30.959.000	71	32.679.066	0	0	0									0	0	70	32.679.066	23	10.893.022	DINAS PERHUBUNGAN	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	32.708.395	2	30.959.000	2	32.679.066	0	0	0									0	0	2	32.679.066	1	10.893.022	DINAS PERHUBUNGAN	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	1.331.968.820	70	1.415.516.501	75	1.309.568.820	18%	319.500.000		#DIV/0!	319.500.000	#DIV/0!	1.629.068.820	#DIV/0!	543.022.940	DINAS PERHUBUNGAN									
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	420	4.500.000		3.750.000	420	4.500.000	0	0	0									0	0	0	4.500.000	-	1.500.000	DINAS PERHUBUNGAN	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	27.068.820	12	7.766.501	12	27.068.820	0	0	0									0	0	12	27.068.820	4	9.022.940	DINAS PERHUBUNGAN	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	101	1.300.400.000	101	1.404.000.000	101	1.278.000.000	25%	319.500.000		#DIV/0!	319.500.000	#DIV/0!	1.597.500.000	#DIV/0!	532.500.000	DINAS PERHUBUNGAN									
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	80	17.341.000	79	38.290.300	80	4.300.000	0	0	0									0	0	79	4.300.000	26	1.433.333	DINAS PERHUBUNGAN	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	13.041.000	11	18.240.000	0	0	0	0	0									0	0	11	-	4		DINAS PERHUBUNGAN	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	4.300.000	6	20.050.300	5	4.300.000	0	0	0									0	0	6	4.300.000	2	1.433.333	DINAS PERHUBUNGAN	
Peningkatan Konektivitas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,65	54.828.200	0,6	590.975.718	0,65	47.675.000	0	-									0	-	1	47.675.000	0	15.891.667	DINAS PERHUBUNGAN		
							Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	persentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	30	172.800	2	0	30	0	0	0	0									0	0	2	-	1		DINAS PERHUBUNGAN	
							Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan tatanan transportasi lokal kabupaten minahasa yang terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	1	172.800	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang dikendalikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	
							Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-		DINAS PERHUBUNGAN	

					Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang di terehabiliitasi dan terpelihara	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang di terehabilitasi dan terpelihara	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	persentase pengelolaan terminal penumpang terminal Tipe C	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah rencana pembangunan terminal penumpang tipe C yang tersusun	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah gedung terminal yang terbangun.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan pengembangan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75	11.155.400	70	148.977.350	75	10.925.000	0	0	0	0	0	0	0	70	10.925.000	23	3.641.667	DINAS PERHUBUNGAN	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	230.400	75	42.572.750	0	-	0	0	0	0	0	0	75	-	25	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	1	10.925.000	1700	106.404.600	1	10.925.000	0	0	0	0	0	0	1.700	10.925.000	567	3.641.667	DINAS PERHUBUNGAN		
					Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
					Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	

						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan forum lalu lintas dan angkutan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	45	43.500.000	0	0	45	36.750.000	0	-	0	0	-	0	36.750.000	-	12.250.000	DINAS - PERHUBUNGAN
						Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	45	43.500.000	0	0	45	36.750.000	0	0	0	0	-	0	36.750.000	-	12.250.000	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	DINAS - PERHUBUNGAN

						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	30	441.998.368	0	0	0	0				0	0	30	-	10	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	30	441.998.368	0	0	0	0				0	0	30	-	10	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terkendali	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PELAYARAN DENGAN BAIK DAN EFISIEN						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam system pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (KPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	37 Laporan	1.357.700.000	33,30%	184.147.975	10 Laporan	399.392.600	0%	0					0%	0				DPMPTSP
			18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	9 Laporan	1.357.700.000	33,30%	184.147.975	3 Laporan	399.392.600	0%	0					0%	0				DPMPTSP
			18	05	2	01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24 Kegiatan Usaha	250.425.000	0,00%	0	8 Kegiatan Usaha	82.424.750	0%	0					0%	0				DPMPTSP
			18	05	2	01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	615 Pelaku Usaha	649.920.550	83,30%	184.147.975	205 Pelaku Usaha	165.613.500	0%	0					0%	0				DPMPTSP
			18	05	2	01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	39 Kegiatan Usaha	457.354.450	0,00%	0	13 Kegiatan Usaha	151.354.350	0%	0					0%	0				DPMPTSP
			18	06				Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	3 Dokumen	300.000.000	100%	5.780.000	1 Dokumen	0	0%	0					0%	0				DPMPTSP
			18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Sinkron	3 Laporan	300.000.000	1	5.780.000	1 Laporan	-	0%	0					0%	0				DPMPTSP
			18	06	2	01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang didolah, dikaji dan dimanfaatkan	44 Dokumen	300.000.000	1	5.780.000	12 Dokumen	-	0%	0					0%	0				DPMPTSP
															3.137.099.877	14,91%	467.687.474					14,91%	467.687.474				
																			</								

		2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.500.000	4 Paket	1.922.328	4 Paket	800.000	4 Paket						4 Paket		4 Paket	1.922.328	4 Paket	4.000.000		
		2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	12 Paket	20.394.174	12 Paket	12.568.500	12 Paket						12 Paket		12 Paket	20.394.174	12 Paket	14.004.227		
		2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23.000.000	12 Paket	6.340.745	12 Paket	4.900.150	12 Paket						12 Paket		12 Paket	6.340.745	12 Paket	3.500.000		
		2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	100%	-	100%	-	100%	-	100%						100%		100%	-	100%	-		
		2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	4.142.500	12 Laporan	-	12 Laporan						12 Laporan		12 Laporan	4.142.500	12 Laporan	3.500.000		
		2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	278.000.000	12 Laporan	142.093.286	12 Laporan	95.548.000	12 Laporan	4.694.000					12 Laporan		12 Laporan	146.787.286	12 Laporan	70.916.000		
		2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan	1 Paket	226.800.000	2 Paket	12.608.640	2 Paket	17.758.890	2 Paket	-					2 Paket		2 Paket	12.608.640	2 Paket	26.000.000		
		2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	2 Paket	100.000.000	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket						2 Paket		2 Paket	-	2 Paket	-		
		2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	126.800.000	0	12.608.640	0	17.758.890	0						0		0	12.608.640	0	26.000.000		
		2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	89.750.000	90%	192.585.290	90%	84.193.200	90%	15.270.000					90%		15.270.000	90%	207.855.290	90%	102.200.000	
		2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	11.250.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	900.000					12 Laporan		900.000	12 Laporan	5.900.000	2 Laporan	2.500.000	
		2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.000.000	12 Bulan	14.785.290	12 Bulan	6.493.200	12 Bulan	1.370.000					12 Bulan		1.370.000	12 Bulan	16.155.290	12 Bulan	8.500.000	
		2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	34.500.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-					1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-		
		2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	12 Bulan	172.800.000	12 Bulan	73.200.000	12 Bulan	13.000.000					12 Bulan		13.000.000	12 Bulan	185.800.000	12 Bulan	91.200.000	
		2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara	1 Unit	279.600.000	1 Unit	67.843.000	1 Unit	38.480.000	1 Unit	10.700.000					1 Unit		10.700.000	1 Unit	78.543.000	1 Unit	43.930.000	
		2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Pakainya	1 Unit	136.350.000	1 Unit	67.843.000	1 Unit	38.480.000	1 Unit	10.700.000					1 Unit		10.700.000	1 Unit	78.543.000	1 Unit	33.930.000	
		2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan jumlah Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas	1 Unit Kendaraan roda empat	23.250.000	-	-	1 Unit Kendaraan roda empat	-	1 Unit Kendaraan roda empat	-					1 Unit Kendaraan roda empat		-	1 Unit Kendaraan roda empat	-	1 Unit Kendaraan roda empat	-	
		2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	120.000.000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-					1 Unit		-	1 Unit	-	1 Unit	10.000.000	
		2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan izin	44,0%	28.800.000		14.520.000		3.600.000		-							-		14.520.000		2.400.000	
		2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapatkan izin Usaha Simpan Pinjam	10 Kop	28.800.000	8 Kop	14.520.000	8 Kop	3.600.000	8 Kop	-					8 Kop		-	8 Kop	14.520.000	8 Kop	2.400.000	
		2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	28.800.000	9 Kop	14.520.000	9 Kop	3.600.000	9 Kop						9 Kop		9 Kop	14.520.000	9 Kop	2.400.000		
		2	17	02	2.02	0002	fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Cabar	-	0	-	0	-	0					0		0	-	0	-			
		2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi terawasi dalam hal kepatuhan dan pelaporan	9,34%	75.600.000	0,00%	3.550.000	7,67%	3.650.000	7,67%	-					7,67%		-	7,67%		7,67%	6.000.000	
		2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kertas kerja pemeriksaan	25 kertas kerja	75.600.000	0,0767	3.550.000	11 Kop	3.650.000	11 Kop	-					11 Kop		-	11 Kop	3.550.000	11 Kop	6.000.000	
		2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di wilayah keanggotaan Daerah Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	37.800.000	11 Kop	-	19 Kop	3.650.000	19 Kop						19 Kop		19 Kop	3.550.000	19 Kop	3.000.000		
		2	17	03	2.01	0005	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	37.800.000	19 Kop	3.550.000	0		0					0		0	-	0		3.000.000		
		2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang sehat dan mandiri dalam usaha dan permodalan	48,00%	28.600.000	0,00%	15.210.000	25 Koperasi	-	0,00%	-					0,00%		-	0,00%	3.550.000	0,00%	15.500.000	

			2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kertas kerja penilaian kesehatan KSP/USP	25 kertas kerja	28.600.000	0,00%	15.210.000	25 Koperasi	-	0	-							0	-	0	15.210.000	0	15.500.000		
			2	17	04	2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	28.600.000	0,00%	15.210.000	25 Koperasi		0								0	0		15.210.000	0	3.000.000		
			2	17	04	2.01.0002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	3 Koperasi	-	0	-	0	-	0	-							0	0		15.210.000	0	12.500.000		
			2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi binaan Kabupaten yang mengikuti diklat	21,48%	360.022.000	0,00%	121.861.860	1,70%	215.159.740	1,70%	-							1,70%	-	1,70%	-	1,70%	30.000.000		
			2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti diklat	20 Koperasi	360.022.000	1,70%	121.861.860	1,70%	215.159.740	0	-							0	-	0	121.861.860	0	30.000.000		
			2	17	05	2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 orang	360.022.000	0,00%	121.861.860	1,70%	215.159.740	0								0	0		121.861.860	0	30.000.000		
			2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatnya Koperasi yang berkualitas	100 Orang	0	0,00%	34.597.700	2,62%	-	2,62%	-							2,62%	-	2,62%	121.861.860	2,62%	0		
			2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	0,066293184	-	0,0262	34.597.700	0	-	0	-							0	-	0	34.597.700	0	-		
			2	17	06	2.01.0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota	25 Koperasi	-	0	34.597.700	0	-	0	-							0	0		34.597.700	0	-		
			2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase UMKM yang diberdayakan	3,930%	-	0,000%	195.789.110	0,336%	306.374.060	0,336%	-							0,336%	-	0,336%	34.597.700	0,336%	39.000.000		
			2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	0,254%	470.378.710	0,336%	195.789.110	0,336%	306.374.060	0,336%	-							0,336%	-	0,336%	195.789.110	0,336%	39.000.000		
			2	17	07	2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,199%	470.378.710	0,336%	15.260.000	0,168%	4.735.000	0,168%								0,168%	0,168%		195.789.110	0,168%	9.000.000		
			2	17	07	2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	60.000.000	0,168%	-	0,025%	-	0,025%	-							0,025%		0,025%	15.260.000	0,025%	-		
			2	17	07	2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	-	0,025%	-	0,076%	-	0,076%	-							0,076%		0,076%	-	0,076%	-		
			2	17	07	2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	210 Unit Usaha	-	0,076%	180.529.110	0,089%	301.639.060	0,089%								0,089%		0,089%	-	0,089%	30.000.000		
			2	17	07	2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	450 Unit Usaha	410.378.710	0,089%	-	0,222%	-	0,222%	-							0,222%		0,222%	180.529.110	0,222%	-		
			2	17	07	2.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	0,222%	-	-	-	-	-	-										-				
			2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM yang terfasilitasi	0,144%	239.741.420		146.760.188	0,102%	-	0,102%	-							0,102%	-	0,102%	-	0,102%	83.200.000		
			2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Jumlah UMKM yang terfasilitasi	150 Unit Usaha	239.741.420	0,001018	146.760.188	0	-	0	-							0	-	0	146.760.188	0	83.200.000		
			2	17	08	2.01.0001	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	239.741.420	0	146.760.188	0		0								0	0		146.760.188	0	83.200.000		
										8.777.483.420	0	5.529.717.775		3.058.897.886		398.437.663	-							398.437.663		545.197.851		2.967.869.227		
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							
							Predikat Kinerja																							
							Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
							Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							
							Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																							
							Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Besok Berikutnya																							
							DINAS PANGAN																							
							Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan Profesional																							
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Pangan	B	2.608.350.000	2	4.435.143.440	B	2.305.108.718		388.043.316										388.043.316		4.823.186.756	#####	DINAS PANGAN
								Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B				B														-	-		
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	3 Dokumen	15.000.000	2	5.259.710	3 Dokumen	3.892.550	1 Dokumen	800.000								1 Dokumen	800.000		6.059.710		2.019.903,33	
								Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan	1 Dokumen				1 Dokumen														-	-		

								Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	1 Dokumen					1 Dokumen											-		-	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	3.000.000	2	1.365.855	5 dokumen	778.510	1 Dokumen	400.000				1 Dokumen	400.000			1.765.855		588.618,33	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	2	1.365.855	1 Dokumen	778.510	1 Dokumen	400.000				1 Dokumen	400.000			1.765.855		588.618,33	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	2	1.264.000	1 Dokumen	778.510									1.264.000		421.333,33		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	3.000.000	2	1.264.000	1 laporan	778.510									1.264.000		421.333,33		
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.000.000		-	1 laporan	778.510									-		-		
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.233.000.000	18	3.981.184.185	100%	2.088.742.985	25%	343.408.866				25%	343.408.866			4.324.593.051		#####	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2.230.000.000	18	3.981.184.185	20 Orang	2.087.743.165	25%	343.408.866				25%	343.408.866			4.324.593.051		#####	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.000.000		-	1 laporan	999.820									-		-		
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	25.000.000		-	95%	-		-						-		-			
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	5.000.000		-	1 unit	-									-		-		
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 paket	20.000.000		-	20 paket	-									-		-		
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	90%	153.500.000	2	161.811.004	90%	65.913.483	23%	17.254.000				23%	17.254.000			179.065.004		#####	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	2	3.528.000	4 Paket	2.499.573									3.528.000		1.176.000,00		
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	2	28.276.054	12 Paket	11.290.126		1.500.000				1.500.000			29.776.054		9.925.351,33		
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	15.000.000	18	13.785.180	1 Paket	1.603.784									13.785.180		4.595.060,00		
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000	2	2.261.200	12 laporan	4.050.000		4.050.000					4.050.000			6.311.200		2.103.733,33	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	92.500.000	2	113.963.570	12 laporan	46.470.000		11.704.000				11.704.000			125.667.570		#####		
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100%	38.750.000		-	100%	16.850.000		-					-		-		-		
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	8.750.000		-	2 paket	2.000.000									-		-		
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	30.000.000		-	3 unit	14.850.000									-		-		
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	93.350.000	2	260.735.821	90%	101.709.700	23%	19.830.450				23%	19.830.450			280.566.271		#####	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	14.400.000	18	18.335.821	1 laporan	11.099.700	1 laporan	1.830.450				1 laporan	1.830.450			20.166.271		6.722.090,33	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	11.750.000		-	1 laporan	2.110.000									-		-		

						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	67.200.000	5	242.400.000	1 laporan	88.500.000	1 laporan	18.000.000						1 laporan	18.000.000		260.400.000		#####		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPMBD	1 Unit	49.750.000	2	26.152.720	1 Unit	28.000.000	1 unit	6.750.000						1 unit	6.750.000		32.902.720		#####		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Pakainya	1 Unit	38.000.000	2	26.152.720	1 Unit	28.000.000	1 unit	6.750.000						1 unit	6.750.000		32.902.720		#####		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.750.000	-	-	1 Unit	-										-		-			
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	100%	23.000.000	2	2.850.000	100%	5.099.705										2.850.000		950.000,00			
						Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten yang tersedia Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	1 laporan	23.000.000	2	2.850.000	1 laporan	2.899.705		-								-		2.850.000		950.000,00	
						Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	1 Unit		-	-	1 Unit	-										-		-			
						Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Infrastruktur Lantai Jemur yang tersedia	1 Unit		-	-	1 Unit	-										-		-			
						Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia	1 Unit	6.000.000	-	-	1 Unit	2.899.705										-		-			
						Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1.100.000										-		-			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah laporan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik yang diikuti	1 laporan	10.000.000	-	-	1 laporan	1.100.000										-		-			
						Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah Laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 dokumen	7.000.000	1	2.850.000	1 dokumen	-										2.850.000		950.000,00			
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	85,00%	492.500.000	2	659.288.028	84,00%	20.212.560											659.288.028		#####		
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah komoditas pangan pokok dan pangan lainnya yang tersedia dan tersalur	9 komoditas	192.500.000	-	-	9 komoditas	5.100.000										-		-			
						Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 laporan	2.500.000	-	-	1 laporan	2.000.000										-		-			
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan penyediaan Bahan Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	20.000.000	-	-	1 laporan	-										-		-			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 laporan	150.000.000	-	-	1 laporan	1.100.000										-		-			
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 dokumen	5.000.000	-	-	12 dokumen	2.000.000										-		-			
						Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	10.000.000	-	-	1 Unit	-										-		-			
						Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	5.000.000	-	-	1 Unit	-										-		-			
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras pemerintah yang tersedia	50 ton	110.000.000	2	145.250.658	50 ton	1.999.884											145.250.658		#####		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			3	30	1	02.04	5 Pengalahaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Kali								-	0.00														
			3	30	1	02.04	6 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Kegiatan									-	0.00													
			3	30	1	02.04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Kegiatan									-	0.00													
			3	30	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pencetakan Administrasi Kepegawaian yang Terakumulasi	100%	25.000.000	17.490.000	-					17.490.000	583000000.00														
			3	30	1	02.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Digital Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Digital Pegawai	1 Unit								-	0.00														
			3	30	1	02.05	2 Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta atribut kelengkapan	33 Stel	25.000.000	17.490.000						17.490.000	583000000.00														
								Jumlah Pakuan Khusus Hari Tertentu yang Diadakan	33 Stel								-	0.00														
						30	1	02.05	3 Pendaftaran dan Pengalahaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengalahaan Administrasi Kepegawaian	4 Laporan						-	0.00														
						30	1	02.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan						-	0.00														
			3	30	1	02.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan								-	0.00														
			3	30	1	02.05	6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 ASN								-	0.00														
			3	30	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pencetakan Administrasi Umum yang Terakumulasi	100%	208.420.000	153.823.024	134.085.107					133.823.024	4480767486.67														
			3	30	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadakan	10 Buah	4.000.000		1.485.347					-	0.00														
			3	30	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	1 Tahun	22.620.000	12.444.650	15.457.860					12.444.650	414821696.67														
			3	30	1	02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan	10 Buah	4.000.000							-	0.00														
			3	30	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadakan	30 Meter	9.000.000	4.260.000	4.499.900					4.260.000	142000000.00														
								Jumlah penggantian Fotocopy	20000 Lbr								-	0.00														
			3	30	1	02.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu									-	0.00														
			3	30	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		117.116.374	112.942.000					117.116.374	3903945800.00														
								Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.000.000							-	0.00														
								Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	28.800.000							-	0.00														
			3	30	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Pencetakan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKMD	100%	80.300.000	21.920.000	6.793.200					21.920.000	73066666.67														
			3	30	1	02.07	1 Pengadaan Mebel	Terdawanya Mebel	2 Unit	35.000.000		6.793.200					-	0.00														
			3	30	1	02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	2 Unit	35.000.000	21.920.000						21.920.000	73066666.67														
								Jumlah Printer yang Diadakan	2 Unit	5.000.000							-	0.00														
								Jumlah Scanner yang Diadakan	1 Unit	5.000.000							-	0.00														
			3	30	1	02.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Unit								-	0.00														
			3	30	1	02.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Paket								-	0.00														
			3	30	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Pencetakan Ketersediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100%	75.000.000	143.427.000	122.328.500	21.100.000	21.100.000	164.527.000	548423333.33																
			3	30	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540 Lembar	5.400.000	3.330.000						3.330.000	111000000.00														
			3	30	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Diadakan	50 Mbps	15.000.000	13.497.000	13.578.500					13.497.000	449900000.00														
								Jumlah jasa listrik tersedia	1300 Kwh								-	0.00														
			3	30	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan	12 Bulan	54.600.000	126.600.000	103.350.000	21.100.000	21.100.000	147.700.000	492333333.33																
								Jumlah bulan operasional jasa administrasi/duk	12 Bulan								-	0.00														
								Jumlah bulan operasional jasa administrasi keuangan	12 Bulan								-	0.00														
			3	30	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Pencetakan Barang Milik Daerah yang Terpebihara sesuai RKPMMD	100%	38.080.000	38.840.000	38.480.000					38.840.000	129466666.67														
			3	30	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	38.080.000	38.840.000	38.480.000					38.840.000	129466666.67														
						30	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	1 Kendis					-	0.00															
			3	30	1	02.09	6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit			-					-	0.00														
			3	30	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara									-	0.00														
						30	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan jumlah dokumen perizinan kendaraan dinas						-	0.00															
			3	30	1	02.09	6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi									-	0.00														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																
Dinilai Kinerja																																
Faktor Pendongkrak Keberhasilan Kinerja :																																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Berikutnya :																																
DINAS PERTANIAN																																
			27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												Dinas Pertanian												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			2	2.02	3		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	5	2.840.320.000,00	0,00	5	570.979.000,00	5						5								864.115.953,00		19,86098584		
			2	2.02	4		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yg dibangun	2	677.600.000,00		2	797.439.000	2							2								786.199.655,00		116,0271037	
			2	2.02	5		Pembangunan Perpuustakaan Sekolah	Jumlah perpuustakaan sekolah yg dibangun	2	260.395.520,00		2		2							2							-		0		
			2	2.02	6		Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium Sekolah yang dibangun			938.399.808,00	0	2.492.744.000,00	0							0							3.218.727.684,00				
			2	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang dibangun			-	0		0							0							1.885.271.539,00				
			2	2.02	30		Pembangunan Fasilitas Parkir		5 sek	550.000.000,00	313.838.000,00	5 sek		5 sek							5 sek							313.838.000,00		57,06154545		
			2	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	16	2.166.116.032,00	485.445.385,00	16	6.199.950.000,00	16							16							8.641.232.488,00		260,421144		
			2	2.02	15		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru, ruang kepala sekolah/TU yang direhabilitasi	6	683.375.616,00	0,00	6		6							6							-		0		
			2	2.02	17		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpuustakaan Sekolah	Jumlah ruang Perpuustakaan Sekolah yg di rehabilitasi				0	332.363.000,00	0							0							327.344.932,00				
			2	2.02	34		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0	332.363.000,00	0							0							148.887.227,00				
			2	2.02	45		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah				0		0								0							99.820.000,00				
			2	2.02	27		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang disediakan (unit)	102 sek	388.080.000,00		102 sek		102 sek							102 sek							249.000.000,00		64,16202845		
			2	2.02	28		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang disediakan (unit)	65 sek	636.000.000,00		65 sek		65 sek							65 sek							-		0		
			2	2.02	35		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik siswa yang disediakan	10 sek	38.400.000,00		10 sek	125.000.000,00	10 sek							10 sek							124.925.000,00		325,3255208		
			2	2.02	36		Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah personel Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang mendapat biaya				0	35.595.000,00	0							0							26.595.000,00				
			2	2.02	37		Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah personel Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang mendapat biaya				0	65.760.800,00	0							0							65.760.800,00				
			2	2.02	38		Pembinaan Moral, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mendapat pembinaan moral, bakat dan kreativitas (siswa, orang, 1/250)	45	12.150.000,00		45	28.172.500,00	45							45							28.172.500,00		231,872428		
			2	2.02	39		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan menengah pertama	5	18.000.000,00		5		5							5							-		0		
			2	2.02	40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	6	21.600.000,00		6		6							6							-		0		
			2	2.02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yg mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	102	15.300.000,00		102	9.318.000,00	102							102							9.318.000,00		60,90196078		
			2	2.02	42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah personel peserta didik sekolah dasar yang mendapat biaya	12.724	14.346.848.000,00		12.724	15.829.852.000,00	12.724							12.724							-		0		
			2	2.02	43		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi dana BOS	4 lap	36.960.000,00		4 lap	73.480.000,00	4 lap							4 lap							73.480.000,00		198,8095238		
1	01	02	2.03				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		5.225.940.000,00	4.163.346.000,00	0	1.15.120.2000,00	0							0							8.963.306.961,00		171,5156883		
			0.2	2	1		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun				0	319.724.000	0							0							318.990.000,00				
			0.2	2	2		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				0																					
			0.2	2	12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang disediakan (unit)	6 unit	723.901.000,00		6 unit	100.000.000	6 unit							6 unit							99.842.000,00		13,79221744		
			0.2	2	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD menerima bantuan BOP	6740	5.181.052.800,00		6740	3.538.830.000	6740							6740							-		0		
			0.2	2	19		Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				4.163.346.000	0		0							0							4.231.680.000,00				
			1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	87%	4.759.249.500,00	228.066.300,00	0,8	2.595.340.000,00	0,8							0,8							876.087.433,00		18,40810054		
			2	2.04	1		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	2 unit	303.367.680,00	128.516.300,00	2 unit	513.467.500,00	2 unit							2 unit							612.215.333,00		201,80636		
			2	2.04	3		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah Non formal/ Kesetaraan	3 Unit	376.091.654,00		3 Unit	99.132.500,00	3 Unit							3 Unit							164.322.100,00		43,69203577		
			2	2.04	4			Jumlah Ruang praktik yang dibangun	4 Ruang		99.550.000,00	4 Ruang		4 Ruang						4 Ruang								99.550.000,00		#VALUE!		
			2	2.04	5		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang kelas, ruang guru pendidikan non formal/Kesetaraan yang direhabilitasi	5 ruang	644.000.000,00		5 ruang		5 ruang							5 ruang							-		0		
			2	2.04	6		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah toilet (jamban) yang direhabilitasi	12 toilet	295.680.000,00		12 toilet		12 toilet							12 toilet							-		0		
			2	2.04	11		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2 sek	123.200.000,00		2 sek		2 sek							2 sek							-		0		
			2	2.04	13		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang disediakan	2 paket	123.200.000,00		2 paket		2 paket							2 paket							-		0		
			2	2.04	14			Jumlah peralatan keterampilan yang disediakan	Peralatan			Peralatan		Peralatan							Peralatan							-				
			2	2.04	19		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yg mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	6 Sekolah	35.761.638,00		6 Sekolah		6 Sekolah							6 Sekolah							-		0		
			2	2.04	20		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yg menyelenggarakan kesetaraan paket A,B dan C	6 sekolah	3.124.352.000,00		6 sekolah	1.982.740.000,00	6 sekolah							6 sekolah							-		0		
			1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengelbiban pengembangan kurikulum yang baik	75%	304.707.200,00		75%		0,75							0,75							-		0		
			1	01	03	2.01	Pengisian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum yang ditetapkan dan tersusun pendidik dasar	16	304.707.200,00		16		16							16							-		0		
			0.3	2	1		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	446	59.924.400,00		446		446						446								-		0		
			0.3	2	2		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	446	69.932.800,00		446		446						446								-		0		
			0.3	2	3		Pengadaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	446	79.923.200,00		446		446						446								-		0		
			0.3	2	4		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Tim menyusun kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	446	94.908.800,00		446		446						446								-		0		
			1	01	03	2.02	Pengisian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kurikulum yang ditetapkan dan tersusun Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		40.250.000,00		0		0							0							-		0		
			0.3	2	1		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi	22.000.000,00		Kompetensi		Kompetensi						Kompetensi								-		0		

01.2.02.08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi						2 Laporan	3.856.000		0						0		2.720.000				
01.2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada		-	-				1.622.000		0						0		966.000				
01.2.03.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada							966.000		0						0		966.000				
01.2.03.05				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik							656.000		0						0		0				
01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan	99 %	-	99 %		316.620.000	99 %	282.962.550	0 %	0				0 %	0	160 %	453.502.550	7.558.375.833			
01.2.05.01				Peningkatan Serani dan Penerimaan Depdik Peningkat		0 orang		0 orang			17 orang	27.362.550	17 orang	0				17 orang	0		27.362.550	456.042.500			
01.2.05.02				pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas	17 orang		17 orang	216.620.000	17 orang	155.600.000	17 orang	0					17 orang	0	21 orang	326.140.000	5.435.666.667			
01.2.05.11				Berbagai bentuk implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	17 orang		17 orang	100.000.000	17 orang	100.000.000	17 orang	0					17 orang	0	21 orang	100.000.000	1.666.666.667			
01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan	99 %	-	99 %		2.176.415.231	99 %	1.529.984.110	628142928883	315.607.309				20,628142928883	315.607.309	267 %	4.091.473.546	68.191.225.767			
01.2.06.01				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	50 set		50 set	43.515.099	50 set	2.400.000	0 set	0					0 set	0	set	47.071.899	784.531.650			
01.2.06.02				penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit		2 unit	367.388.662	2 unit	46.652.750	1 unit	8.421.655					1 unit	8.421.655	2 unit	449.360.757	7.489.346.617			
01.2.06.04				penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 buah, 180 liter		12 buah, 180 liter	2.553.000	12 buah, 180 liter	1.413.000	12 buah, 180 liter	0					0	12 buah, 180 liter	0	12 buah, 180 liter	4.280.500	71.341.667		
01.2.06.05				penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 meter, 12 dokumen		1134 meter, 12 dokumen	260.578.970	14 meter, 12 dokumen	172.089.360	14 meter, 12 dokumen	0					0	1134 meter, 12 dokumen	0	1134 meter, 12 dokumen	555.639.970	9.260.666.167		
01.2.06.06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 buku		35 buku	51.480.000	35 buku	51.480.000	0 buku	0					0 buku	0	35 buku	102.960.000	1.716.000.000			
01.2.06.07				penyediaan bahan/materi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 %		100 %	-		-	0 %	0					0 %	0	%	0	-	-		
01.2.06.08				fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	6800 orang		6800 orang	799.929.750	6800 orang	614.250.000	28 orang	175.750.000					28 orang	175.750.000	939 orang	1.518.184.750	25.303.079.167			
01.2.06.09				penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan, 13 laporan		12 bulan, 13 laporan	650.969.750	12 bulan, 13 laporan	641.699.000	2 bulan, 13 laporan	131.435.654					12 bulan, 13 laporan	131.435.654	13 bulan, 13 laporan	1.413.975.630	23.566.260.500			
01.2.07				pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan	98 %	-	98 %		497.158.001	98 %	1.036.990.000	0 %	0				0 %	0	%	3.051.844.879	50.864.081.317			
01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %		100 %	81.979.001	100 %	1.033.090.000	0 %	0					0 %	0	%	1.485.714.825	24.761.913.750			
01.2.07.10				pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4, 2 set, 14 unit, 13 set	1 unit, 2 set, 14 unit, 13 set	415.179.000	4, 2 set, 14 unit, 13 set	3.900.000	4, 2 set, 14 unit, 13 set	0	0					0	1 unit, 2 set, 14 unit, 13 set	0	1 unit, 2 set, 14 unit, 13 set	1.566.130.054	26.102.167.567		
01.2.07.11				pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	-	4 unit	0	0					4 unit	0	unit	0	-	-		
01.2.08				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	12 Bulan	-	12 Bulan	4.203.573.920	12 Bulan	3.939.747.500	2 Bulan	100.000.000					2 Bulan	100.000.000	12 Bulan	7.554.352.781	*****			
01.2.08.01				penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan		12 bulan	12.500.000	12 bulan	30.000.000	0 bulan	-					0 bulan	-	bulan	26.771.050	446.184.167			
01.2.08.02				penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	m3, bulan, kw	m3, bulan, kw	212.823.920	m3, bulan, kw	217.747.500	0 m3, bulan, kw	-	0					0 m3, bulan, kw	-	m3, bulan, kw	268.331.731	4.472.195.517			
01.2.08.03				penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kegiatan, 2 kegiatan	1 kegiatan, 2 kegiatan	47.050.000	kegiatan, 2 kegiatan	-	#DIV/0!	0	0					#DIV/0!	0	1 kegiatan, 2 kegiatan	47.050.000	784.166.667			
01.2.08.04				penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan, 12 bulan, 80 orang	12 bulan, 12 bulan, 12 bulan	3.931.200.000	12 bulan, 12 bulan	3.692.000.000	12 bulan, 12 bulan	100.000.000						2,70859904658722	12 bulan, 12 bulan	100.000.000	12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 80	7.212.300.000	120.203.333.333		
01.2.09				pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan	99 %	-	99 %	4.483.728.200	99 %	5.213.351.165	421277047236	59.543.128					1,1421277047236	59.543.128	162 %	8.450.540.947	*****			
01.2.09.01				penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 7 unit	100 7 unit	390.855.000	100 7 unit	190.231.800	462552528021	53.543.128						28,1462552528021	53.543.128	7 7 unit	722.302.035	12.038.367.290			
01.2.09.05				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	100 %	-	100 %	0	0 %	0	0					0 %	0	%	0	-	-		
01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	100 %	10.950.000	100 %	12.154.500	222112113446	6.000.000						0,12222112113446	6.000.000	0	24.736.000	412.266.667			
01.2.09.09				pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1.513.282.400	1 unit	4.909.135.135	0 unit	0	0					0 unit	0	1 unit	5.047.080.562	84.117.676.033			
01.2.09.10				pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	2.568.640.800	1 unit	101829730	0 unit	0	0					0 unit	0	1 unit	2.656.442.350	44.274.039.187			
01.2.15				layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terselesaikan	14 Bulan	-	14 Bulan	17.146.606.662	14 Bulan	17.888.606.662	14 Bulan	4.189.296.510					14 Bulan	4.189.296.510	14 Bulan	32.243.374.933	*****			
01.2.15.01				penyenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menstrim Hak Keuangan DPRD	35 orang	35 orang	16.989.106.662	35 orang	16.989.106.662	87215758102	4.189.296.510						24,6587215758102	4.189.296.510	35 orang	31.173.129.933	519.552.165.550			
01.2.15.02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 orang	35 orang	157.500.000	35 orang	742.000.000	0 0	0	0					0 0	0	0 0	796.120.000	12.602.000.000			
01.2.15.03				Relaksasi Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 orang	35 orang	157.500.000	35 orang	157.500.000	0 0	0	0					0 0	0	0 0	314.125.000	5.235.416.667			
01.2.16				Layanan Administrasi DPRD	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD yang terselesaikan	100 %	-	100 %	3.785.626.158	100 %	1.800.000.000	693055555555	534.475.000					29,6930555555555	534.475.000	290 %	5.228.924.658	87.148.744.300			
01.2.16.04				penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	3.785.626.158	12 bulan	1.800.000.000	930555555556	534.475.000						29,6930555555556	534.475.000	12 bulan	5.228.924.658	87.148.744.300			
02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat	100 %	-	100 %	13.555.529.239	100 %	9.994.611.088	838315313545	1.982.762.462					19,838315313545	1.982.762.462	261 %	26.084.871.902	*****			
02.2.01				Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %	-	100 %	147.731.750	100 %	160.795.545	0 %	0					0 %	0	119 %	191.431.750	3.190.529.167			
02.2.01.01				penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 perda, 14 perda, 100%	2 perda, 6 perda, 14 perda	137.556.750	6 perda, 14 perda	148.795.545	6 perda, 14 perda	0	0					0 2 perda, 6 perda, 14 perda	0	6 perda, 14 perda	181.256.750	3.020.945.833			
02.2.01.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100 %	100 %	10.175.000	100 %	12.000.000	0 %	0	0					0 %	0	%	10.175.000	169.583.333			

						02.2.02				Pembahasan Kajian Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	-	100 %	90.200.000	100 %	102.120.000	0 %	0							0 %	0	%	138.300.000	2.305.000.000	
						02.2.02.01				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100 %	-	100 %	22.000.000	100 %	22.200.000	0 %	0							0 %	0	%	49.500.000	675.000.000	
						02.2.02.02				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100 %	-	100 %	22.000.000	100 %	22.200.000	0 %	0							0 %	0	%	33.100.000	551.666.667	
						02.2.02.03				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100 %	-	100 %	15.125.000	100 %	17.760.000	0 %	0							0 %	0	%	22.525.000	375.416.667	
						02.2.02.04				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100 %	-	100 %	9.075.000	100 %	17.760.000	0 %	0							0 %	0	%	20.175.000	336.250.000	
						02.2.02.05				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD dan Semester	100 %	-	100 %	8.800.000	100 %	8.880.000	0 %	0							0 %	0	%	8.800.000	146.666.667	
						02.2.02.06				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100 %	-	100 %	13.200.000	100 %	13.320.000	0 %	0							0 %	0	%	13.200.000	220.000.000	
						02.2.03				pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	100 %	-	100 %	43.430.459	100 %	53.103.851	0 %	-							0 %	-	%	68.994.310	1.149.905.167	
						02.2.03.03				pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 laporan	-	10 laporan	43.430.459	10 laporan	45.103.851	0 laporan	0							0 laporan	0	laporan	60.994.310	1.016.571.833	
						02.2.03.08				Pembahasan Laporan Keberhasilan Pelaksanaan Kinerja Daerah			-				8.000.000		0							0		8.000.000	133.333.333		
						02.2.04				Peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	100 %	-	100 %	656.226.250	100 %	831.256.500	202873000090	143.000.000						17,202873000090	143.000.000	127 %		1.051.976.750	17.532.945.833	
						02.2.04.02				Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	35 orang	-	35 orang	350.000.000	35 orang	525.000.000	80952380952	143.000.000						27,2380952380952	143.000.000	53383458647		559.500.000	9.325.000.000	
						02.2.04.03				publikasi dan dokumentasi dewan/Advertoiral/Koran	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	2 dokumen	-	2 dokumen	6.226.250	2 dokumen	6.256.500	0 dokumen	0						0 dokumen	0	dokumen	12.476.750	207.945.833		
						02.2.04.05				penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	-	5 orang	300.000.000	5 orang	300.000.000	0 orang	0						0 orang	0	orang	480.000.000	8.000.000.000		
						02.2.05				Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	98 %	-	98 %	3.825.646.525	98 %	3.315.552.675	849117048034	148.699.610						4,4849117048034	148.699.610	238 %		7.887.440.435	*****	
						02.2.05.01				Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 laporan	-	12 laporan	310.800.000	12 laporan	333.000.000	45375375375375	148.699.610						44,6545375375375375	148.699.610	10 laporan	1.110.348.310	18.505.805.167		
						02.2.05.02				penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5 dokumen, 5 fraksi, 16 kegiatan	-	12 bulan, 35 dokumen, 5 fraksi	860.530.840	5 dokumen, 5 fraksi	923.042.375	dokumen, 5 fraksi	0						0 12 bulan, 35 dokumen, 5 fraksi	0 dokumen, 5 fraksi		1.625.488.340	27.091.472.333		
						02.2.05.03				pelaksanaan reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 laporan	-	105 laporan	2.654.315.685	105 laporan	2.059.510.300	0 laporan	0						0 laporan	0	85 laporan	5.151.603.785	85.860.063.083		
						02.2.06				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Bersangkutan	35 orang	-	35 orang	-	-	0 orang	-	-						0 orang	-	35 orang	64.594.330	1.079.242.167		
						02.2.06.01				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3.188.517	1 Dokumen	3.188.517	0 Dokumen	0						0 Dokumen	0	1 Dokumen	64.182.530	1.069.708.833		
						02.2.06.02				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	-	1 Laporan	13.320.000	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0						0 Laporan	0	1 Laporan	572.000	9.533.333		
						02.2.07				Pembahasan kerja sama daerah	Persentase Kegiatan pembahasan kerja sama daerah	100 %	-	100 %	270.001.255	100 %	205.300.000	0 %	-						0 %	-	223 %		457.821.255	7.630.354.258	
						02.2.07.02				penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi	12 bulan	-	12 bulan	270.001.255	12 bulan	205.300.000	0 bulan	0						0 bulan	0	12 bulan	457.821.255	7.630.354.258		
						02.2.08				Facilitasi tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	100 %	-	100 %	8.522.299.000	100 %	5.309.974.000	846913977356	1.691.062.852						31,846913977356	1.691.062.852	307 %		16.288.907.402	*****	
						02.2.08.01				koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	41 laporan	-	41 laporan	8.411.419.000	41 laporan	5.163.094.000	833365807416	1.663.462.852						32,21833365807416	1.663.462.852	369 laporan	16.069.677.402	267.827.956.700		
						02.2.08.03				Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			-				24.000.000		0						0		17.550.000	292.500.000			
						02.2.08.04				Facilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 bulan	-	12 bulan	110.880.000	12 bulan	110.880.000	17748917749	27.600.000					24,8917748917749	27.600.000	12 bulan	189.980.000	3.166.333.333			
						02.2.08.05				Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			-				12.000.000		-						-			11.700.000	195.000.000		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		
													-																		

					2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Bela Negara Bagi Generasi Muda	400 Orang	119.774.800	400 Orang	119.774.800	400 Orang									400 Orang	119.774.800	400 Orang	100%	KESBANGPOL	
							Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	400 Orang		400 Orang	119.274.800	400 Orang									400 Orang	119.274.800	400 Orang		KESBANGPOL	
							Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	400 Orang		400 Orang		400 Orang									400 Orang	-	400 Orang		KESBANGPOL	
							Jumlah peserta kegiatan sosialisasi penguatan ideologi Pancasila bagi generasi muda	200 Orang	149.988.918	200 Orang	74.998.738	200 Orang	74.990.180								200 Orang	149.880.238		100%	KESBANGPOL	
					2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Anggota FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	7 Orang		7 Orang		7 Orang									7 Orang	-	7 Orang		KESBANGPOL	
							Jumlah Bulan Kegiatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental)	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan									12 Bulan	-	12 Bulan		KESBANGPOL	
							Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pasikabraka	1 Tahun	528.593.325	1 Tahun		1 Tahun	528.593.325								1 Tahun	524.702.000	1 Tahun	99%	KESBANGPOL	
					2 01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah ASN pengelola serta pelaporan kegiatan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	5 ASN	2.228.325	5 ASN		5 ASN	2.228.325								5 ASN	1.931.403	5 ASN	87%	KESBANGPOL	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada	01 03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Kegiatan/Sosialisasi mengenai peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	98 %	3.564.023.514	98 %	2.160.375.594	98 %	8.901.900.325	7 %	663.509.000					7 %	663.509.000	114 %	3.562.238.594	116%	100%	KESBANGPOL
					2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Teknis dan Pemantapan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik Serta Partai Politik dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilu Kada	98 %	3.577.648.155	98 %	2.160.375.594	98 %	8.901.900.325	7 %	663.509.000					7 %	663.509.000	114 %	3.562.238.594	116%	100%	KESBANGPOL
					2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Minahasa	14 Parpol	13.380.441	14 Parpol		14 Parpol	318.125								14 Parpol	315.000	14 Parpol	2%	KESBANGPOL	
							Jumlah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Minahasa	7 Parpol		7 Parpol		7 Parpol									7 Parpol	-	7 Parpol		KESBANGPOL	
							Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Minahasa	35 Kursi		35 Kursi		35 Kursi									35 Kursi	-	35 Kursi		KESBANGPOL	
					2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda	400 Orang	198.910.514	400 Orang	197.910.514	400 Orang									400 Orang	197.910.514	400 Orang	99%	KESBANGPOL	
							Jumlah Kegiatan Diskusi Politik yang dilaksanakan	4 Kali Pertemuan	244.200	4 Kali Pertemuan		4 Kali Pertemuan	244.200								4 Kali Pertemuan	220.000	4 Kali Pertemuan		KESBANGPOL	
					2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partai Politik yang terfasilitasi	7 Parpol	3.326.171.000	7 Parpol	1.925.583.000	7 Parpol	1.400.588.000	47 %	663.509.000					47 %	663.509.000	7 Parpol	3.326.171.000	7 Parpol	100%	KESBANGPOL
							Jumlah Instansi Pemerintah yang terfasilitasi	1 Instansi		1 Instansi		1 Instansi	7.500.000.000												KESBANGPOL	
					2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah ASN pengelola, pelaporan serta verifikasi berkas laporan kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri	5 ASN	38.942.000	5 ASN	36.882.080	5 ASN	750.000									37.622.080	5 ASN	97%	KESBANGPOL	
4		01 04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	92 %	4.801.191.225	90 %	1.550.000.000	90 %	2.601.191.225	8 %	200.000.000					8 %	200.000.000	180 %	3.891.167.000	196%	81%	KESBANGPOL
					2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Peningkatan pelayanan pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	92 %	4.801.191.225	90 %	1.550.000.000	90 %	2.601.191.225	8 %	200.000.000					8 %	200.000.000	180 %	3.891.167.000	196%	81%	KESBANGPOL
					2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah LSM yang terdaftar	26 LSM		26 LSM		26 LSM									26 LSM	-	26 LSM		KESBANGPOL	
							Jumlah Ormas yang terdaftar	14 Ormas		14 Ormas		14 Ormas									14 Ormas	-	14 Ormas		KESBANGPOL	
							Jumlah Ormas keagamaan yang terdaftar	5 Ormas Keagamaan	319.125	5 Ormas Keagamaan		5 Ormas Keagamaan	319.125								5 Ormas Keagamaan	315.000	5 Ormas Keagamaan	99%	KESBANGPOL	

					2	01	03	Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Omas, Omas Kegamaan dan LSM yang terfasilitasi	6 Omas/LSM	4.800.000.000	6 Omas/LSM	1.550.000.000	6 Omas/LSM	2.600.000.000	8 %	200.000.000							8 %	200.000.000	6 Omas/LSM	3.890.000.000	6 Omas/LSM	81%	KESBANGPOL
					2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peningkatan dan Pemberdayaan Omas dan LSM	400 Orang		400 Orang	400 Orang	400 Orang											400 Orang	-	400 Orang		KESBANGPOL	
									Jumlah Kegiatan Konsultasi Pembinaan Omas dan LSM	4 Kegiatan	122.100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	122.100										4 Kegiatan	112.000	4 Kegiatan	92%	KESBANGPOL	
					2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah ASN pengelola, pelaporan serta verifikasi berkas laporan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	5 ASN	750.000	5 ASN	5 ASN	5 ASN	750.000										5 ASN	740.000	5 ASN	99%	KESBANGPOL	
5			01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Sosialisasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92 %	53.858.317.609	90 %	37.174.423.520	90 %	19.051.318.945	3 %	476.500.000							3 %	476.500.000	187 %	55.745.642.120	204%	104%	KESBANGPOL
					2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92 %	53.858.317.609	90 %	37.174.423.520	90 %	19.051.318.945	3 %	476.500.000							3 %	476.500.000	187 %	55.745.642.120	204%	104%	KESBANGPOL
					2	01	02	Pengusutan kasus Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rohaniawan yang terfasilitasi	400 Orang	29.250.000.000	400 Orang	21.282.496.250	400 Orang	9.750.000.000	3 %	326.500.000							3 %	326.500.000	400 Orang	31.032.496.250	400 Orang	106%	KESBANGPOL
									Jumlah Anggota Dewan Penasehat FKUB yang terfasilitasi	4 Orang	918.000.000	4 Orang	612.000.000	4 Orang	306.000.000	-	-								4 Orang	918.000.000	4 Orang	100%	KESBANGPOL	
									Jumlah Anggota FKUB	17 Orang	-	17 Orang	17 Orang	17 Orang	-	-									17 Orang	-	17 Orang		KESBANGPOL	
									Jumlah Jasa Pendeta Pelayanan Pemerintah Kabupaten/Melaka	3 Orang		3 Orang	3 Orang	3 Orang											3 Orang	-	3 Orang		KESBANGPOL	
					2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Anggota Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	7 Orang	319.125	7 Orang	7 Orang	7 Orang	319.125										7 Orang	315.000	7 Orang	99%	KESBANGPOL	
					2	01	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rumah Ibadah yang terfasilitasi	150 Rumah Ibadah	23.640.000.000	150 Rumah Ibadah	15.255.000.000	150 Rumah Ibadah	8.970.000.000	1,67224080 267559 %	150.000.000						1,67224080 267559 %	150.000.000	150 Rumah Ibadah	23.745.000.000	150 Rumah Ibadah	100%	KESBANGPOL	
									Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Toleransi dalam Kehidupan Beragama	400 Orang		400 Orang	400 Orang	400 Orang											400 Orang	-	400 Orang		KESBANGPOL	
									Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	400 Orang		400 Orang	400 Orang	400 Orang											400 Orang	-	400 Orang		KESBANGPOL	
					2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah ASN pengelola, pelaporan serta verifikasi berkas laporan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	5 ASN	49.998.484	5 ASN	24.927.270	5 ASN	24.999.820										5 ASN	49.830.870	5 ASN	100%	KESBANGPOL	
6			01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kegiatan /fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	98 %	9.732.813.375	98 %	6.621.448.250	98 %	2.363.819.125	8 %	183.750.000							8 %	183.750.000	191 %	8.820.710.050	195%	91%	KESBANGPOL
					2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase Pelaksanaan kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	98 %	9.732.813.375	98 %	6.621.448.250	98 %	2.363.819.125	8 %	183.750.000							8 %	183.750.000	191 %	8.820.710.050	195%	91%	KESBANGPOL
					2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik	Jumlah Lembaga Pemerintah yang terfasilitasi	6 Lembaga	4.000.000.000	6 Lembaga	2.548.704.000	6 Lembaga	1.100.000.000										6 Lembaga	3.648.210.800	6 Lembaga	91%	KESBANGPOL	
					2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	400 Orang	119.452.375	400 Orang	119.133.250	400 Orang	319.125										400 Orang	119.448.250	400 Orang	100%	KESBANGPOL	
					2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Anggota TKD (Tim Kewaspadaan Daerah) Kab. Mnahasa yang terfasilitasi	9 Orang	1.530.000.000	9 Orang	1.133.000.000	9 Orang	387.000.000	9 %	96.750.000							9 %	96.750.000	9 Orang	1.479.000.000	8 Orang	97%	KESBANGPOL

[illegible]

		6	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 unit	1.182.500.000	0 unit	1.182.500.000	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	1.182.500.000		100,00	BPBD
		6	01	2.07	04	Pengadaan Alat angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 unit	0	0 0	-	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-			BPBD
		6	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 paket	59.323.820	0 0	9.323.820	0 paket	0	0 paket	0					0 paket	0	0 paket	9.323.820	0,00	15,72	BPBD
		6	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	216.710.216	1 unit	166.664.456	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	1 unit	166.664.456	5,00	76,91	BPBD
		6	01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 0	0	0 0	0	0 unit	0	0 0	0					0 0	0	0 unit	-			BPBD
		6	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-			BPBD
		6	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-			BPBD
		6	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	100 persen	3.785.048.750	99,1 persen	2.941.579.341	100 persen	244.526.462	32 persen	70.000.000					32 persen	70.000.000	#VALUE!	3.183.730.925		84,11	BPBD
		6	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3700 laporan	33.086.500	788 lembar	13.080.000	555 lembar	5.550.000	0 laporan	0					0 laporan	0	1343 laporan	18.630.000	36,30	56,31	BPBD
		6	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	91.752.620	12 laporan	68.689.711	12 laporan	17.351.160	0 laporan	0					0 laporan	0	24 laporan	85.199.125	40,00	92,86	BPBD
		6	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lip	28.409.630	0 0	28.409.630	12 Laporan	11.625.302	0 0	0					0 0	0	12 0	38.501.800	100,00	135,52	BPBD
		6	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	3.631.800.000	12 laporan	2.831.400.000	12 bln	210.000.000	3 bln	70.000.000					3 bln	70.000.000	24 lap	3.041.400.000	40,00	83,74	BPBD
		6	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/layak fungsi	100 persen	718.134.036	89,9 persen	403.067.010	100 persen	131.083.064	25 persen	6.000.000					25 persen	6.000.000	#VALUE!	533.253.010		74,26	BPBD
		6	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	146.645.416	1 unit	86.634.300	1 unit	38.480.000	1 unit	6.000.000					1 unit	6.000.000	2 unit	125.114.300	200,00	85,32	BPBD
		6	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	328.353.000	7 unit	228.350.750	7 unit	42.999.762	0 unit	0					0 unit	0	14 unit	270.790.750	175,00	82,47	BPBD
		6	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 unit	138.135.620	1 unit	88.081.960	1 unit	49.269.636	0 unit	0					0 unit	0	2 unit	137.347.960	200,00	99,43	BPBD
		6	01	2.09	5	Pemeliharaan mebeleur	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	25.000.000	0 0	0	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-	0,00	0,00	BPBD
		6	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	1 unit	10.000.000	0 0	0	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-	0,00	0,00	BPBD
		6	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	10.000.000	0 0	0	0 unit	333.666	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-	0,00	0,00	BPBD
		6	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	0 0	0	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-	0,00	0,00	BPBD
		6	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	0 0	0	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0 unit	-	0,00	0,00	BPBD
	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	5	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah penduduk dikuasai rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 persen	6.465.457.418	97,6 persen	18.436.687.530	100 persen	1.960.032.736	25 persen	917.269.044					25 persen	917.269.044	#VALUE!	20.358.771.353		314,89	BPBD
		05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	343566 jiwa	1.568.520.068	4024 jiwa	889.830.009	1500 jiwa	1.028.689.908	1468 jiwa	678.287.434					1468 jiwa	678.287.434	8813 jiwa	1.889.481.110	2,57	120,46	BPBD
		05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Diegalisasi	1 dok	30.059.100	0 0	30.059.100	0 0	402.625	0 dok	0					0 dok	0	0 0	30.059.100	0,00	100,00	BPBD
		05	03	2.01	02	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tetap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	343566 jiwa/orang	1.538.460.968	4024 jiwa	859.770.909	1500 jiwa	1.028.287.283	1468 jiwa/orang	678.287.434					1468 jiwa/orang	678.287.434	8813 jiwa/orang	1.859.422.010	2,57	120,86	BPBD
		05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1610 jiwa	2.870.830.826	3044 jiwa	8.273.330.159	1740 jiwa	608.786.656	16 jiwa	164.000.000					16 jiwa	164.000.000	7400 jiwa	8.875.316.519	459,63	309,15	BPBD
		05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Diegalisasi	0 dok	0	0 0	-	1 dok	147.353	0 dok	0					0 dok	0	0 dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD
		05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300 orang	178.069.220	0 0	28.069.220	300 orang	46.682.525	0 orang	0					0 orang	0	3321 orang	71.496.777	1107,00	40,15	BPBD
		05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 dok	571.927.457	1 dok	521.317.720	12 dok	19.896.303	0 dok	0					0 dok	0	13 dok	54.1126.523	260,00	94,61	BPBD
		05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1500 unit/orang	300.000.000	0 0	-	1500 unit	205.239	0 unit/orang	0					0 unit/orang	0	0 unit/orang	-	0,00	0,00	BPBD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4	-	3		2									3		-	75,00			
		2.13.03.2.01.01						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	58	92.410	57	63.918	1	21.181								57	84.848	98,28	91,82			
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi	2.13.04						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	24,22	9.464.871	23,78	3.553.268	24,22	68.360								32,15	3.621.358	132,74	38,26			
								Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	90,85		90,63		90,85									90,85	-	100,00				
								Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100,00	563.332	100	211.330	100,00	24.064								100	235.044	100,00	41,72			
								Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100,00	248.500	100	40.820	100,00	28.476								100	69.290	100,00	27,88			
								Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	5,72	275.634	4,84	106.834	5,72	22.995								5,72	128.679	100,00	46,68			
								Persentase Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	0,34	344.250	0,26	84.599	0,34	34.490								0,43	117.794	126,47	34,22			
		2.13.04.2.01						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	227,00	9.464.871	227	3.553.268	227,00	68.360								227	3.621.358	100,00	38,26			
								Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	270,00	248.500	270	40.820	270,00	28.476								270	69.290	100,00	27,88			
								Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	227,00	563.332	227	211.330	227,00	24.064								227	235.044	100,00	41,72			
								Jumlah BUMDesa berprestasi tingkat Kabupaten	15,00	275.634	11	106.834	6,00	22.995								15	128.679	100,00	46,68			
								Jumlah aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat Kabupaten	14,00	344.250	9	84.599	6,00	34.490								15	84.632	107,14	24,58			
		2.13.04.2.01.01						Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	227,00	155.000	227	35.943	1,00									227	35.943	100,00	23,19			
		2.13.04.2.01.03						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5,00	248.500	4	40.820	1,00	28.476								5	69.290	100,00	27,88			
		2.13.04.2.01.04						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	227,00	563.332	227	211.330	227,00	24.064								227	235.044	100,00	41,72			
		2.13.04.2.01.05						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	88,00	344.250	44	84.599	22,00	34.490								66	84.632	75,00	24,58			
		2.13.04.2.01.08						Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	110,00	275.634	66	106.834	22,00	22.995								88	128.679	80,00	46,68			
		2.13.04.2.01.09						Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	227,00	7.207.500	98	3.070.897										98	3.070.897	43,17	42,61			
		2.13.04.2.01.14						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	957,00	187.765	800	47.765	77,00	24.801								877	72.566	91,64	38,65			
		2.13.04.2.01.18						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100,00	1.073.604	75	468.603	25,00	68.360								100	536.693	100,00	49,99			
4	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2.13.05						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100	354.970	100	105.628	100	24.050								100	1.609.580	100,00	453,44			
								Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0,29		0,29	-	0,29									0,29	-	100,00				
								Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1,08		1,08	-	1,08									1,08	-	100,00				
								Persentase LPM Berprestasi	3,70		2,59	-	3,70									5,18	-	140,00				
								Persentase PKK Aktif	100,00	5.299.997	100	3.799.996	100	1.499.997	100	18.900						100	18.900	100,00	72,05			
								Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan	100	323.100	100	-	100	20.627								100	18.173	100,00	5,62			
								Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG	14,09	378.100	13,65	196.000	14,09	22.771								14,09	216.096	100,00	57,15			
		2.13.05.2.01						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Ruang Kabupaten/Kota	15	5.299.997	15	3.799.996	15	1.499.997	15	18.900					15	18.900	15	3.818.896	100,00	72,05		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	440	354.970	390	105.628	295	24.050								390	1.609.580	88,64	453,44			

				1	###	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja												-			
				1	###		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Teradministrasi	100 %	10.870.392.118	100 %	2.104.082.245	100 %	2.073.210.441	-	397.736.757	-						36%
				1	###	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	17 Org	10.860.733.000	17 Org	2.102.234.816	17 Org	2.066.551.000	17 Org	397.736.757			17 Org	397.736.757		3.893.721.153	36%
				1	###	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersedia	4 Lap	9.659.118	4 Lap	1.847.429	4 Lap	6.659.441								1.847.429	19%
				1	###		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	12 Bln	167.000.000											-		0%
				1	###	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang diadakan	116 psg	116.000.000											-		0%
				1	###		Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	102 psg	51.000.000											-		0%
				1	###	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan													-		
				1	###		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	12 Bln	512.673.238	12 Bln	29.690.299	12 Bln	33.770.498		20.043.035				20.043.035		49.733.334	10%
				1	###	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Pkt	55.001.860	12 Pkt	6.406.365	12 Pkt	7.213.446	12 Pkt	3.681.000		12 Pkt	3.681.000		10.087.365		18%
				1	###	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Pkt	73.913.799	10 Pkt	19.573.934	10 Pkt	20.018.467	10 Pkt	9.823.450		10 Pkt	9.823.450		29.397.384		40%
				1	###	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Lap	43.037.539	4 Lap	3.710.000	4 Lap	6.538.585	4 Lap	6.538.585		4 Lap	6.538.585		10.248.585		24%
				1	###	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap	340.720.040											-		0%
				1	###		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD													-		
				1	###	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Jumlah kendaraan operasional/lapangan yang diadakan	2 unit	2.857.740.430											-		0%
				1	###	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler yang diadakan	12 bln	120.000.000											-		0%
				1	###		Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Jumlah paket rumah gedung kantor yang direhab	1 pkt	195.000.000											-		0%
				1	###		Penataan Halaman kantor	Jumlah paket halaman yang ditata	2 pkt	80.000.000											-		0%
				1	###		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bln	5.227.281.773		27.779.213		32.989.963		101.016.277			101.016.277		668.089.892		13%
				1	###	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Lap	33.700.973	12 Lap	9.970.514	12 Lap	9.706.363								19.638.464	58%
				1	###	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	103.623.300	12 Bln	17.808.699	12 Bln	23.283.600	3 Bln	5.033.867		3 Bln	5.033.867		30.805.058		30%
				1	###	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Operasional Jasa Tenaga Administrasi/THL, Sopir	13 Bln	5.089.957.500											-		0%
				1	###		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKBMD	12 Bln	2.062.100.850	12 Bln	470.226.310	12 Bln	767.327.000		95.982.410			95.982.410		1.087.872.680		52%
				1	###	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	115.440.000	1 Unit	34.764.315	1 Unit	38.480.000	1 Unit	9.617.430		1 Unit	9.617.430		63.610.095		55%
				2	###	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	12 Unit	1.966.660.850	12 Unit	435.461.995	12 Unit	728.847.000	12 Unit	86.364.980		12 Unit	86.364.980		1.024.262.585		52%
				1	###	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan													-		
				1	###	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan													-		

					4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100 %	2.568.830.787	100 %	5.059.932.000	100 %	2.568.830.787									5.059.932.000		197%	
					4	###	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Meningkatnya Kesiagaan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	75 Org	2.542.847.796	75 Org	2.520.000.000	75 Org	2.542.847.796		562.500.000				562.500.000		4.227.500.000		166%		
					4	###	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan an kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya													-				
					4	###	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75 Org	2.520.000.000	75 Org	2.520.000.000									2.520.000.000		100%		
					4	###	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran													-				
					4	###	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota													-				
					4	###	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kegiatan Standarisasi sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung diri secara berkala													-				
					4	###	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	75 Org	2.562.779.796	1 Pkt	19.932.000	75 Org	2.542.847.796		562.500.000			562.500.000		1.727.432.000		67%		
					4	###	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran													-				
					4	###	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIIP)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIIP) yang bisa di secara Perbaharu atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time													-				
					4	###	9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran												-					
					4	###		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terselenggaranya Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran pada Gedung, perusahaan, toko dan tempat usaha													-				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	0	21 Paket	0	21 Paket	0	21 Paket	0							21 Paket	0	21 Paket	0	21 Paket		
		2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 orang	0	21 orang	0	21 orang	0	21 orang	0							21 orang	0	21 orang	0	21 orang		
		2	16	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang- Undangan	21 orang	0	21 orang	0	21 orang	0	21 orang	0							21 orang	0	21 orang	0	21 orang		
		2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Layanan Umum Kantor yang Tersediaan																					
		2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0							1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket		
		2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.846.346	5 Paket	22.000.000	5 Paket	29.846.346	5 Paket	0							5 Paket	0	5 Paket	51.846.346	5 Paket		174
		2	16	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0							1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket		
		2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	4.000.000	1 Paket	0	1 Paket	0							1 Paket	0	1 Paket	4.000.000	1 Paket		
		2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.550.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	5.550.000	1 Paket	0							1 Paket	0	1 Paket	12.550.000	1 Paket		226
		2	16	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Sacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	150 dokumen	3.600.000	50 dokumen	5.000.000	150 dokumen	3.600.000	150 dokumen	600.000							150 dokumen	600.000	50 dokumen	8.600.000	0 dokumen		279
		2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	89.672.000	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	89.672.000	20 Laporan	46.012.668							20 Laporan	46.012.668	20 Laporan	239.672.000	0 Laporan		267
		2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Terpenuhiha Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah																					
		2	16	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0							1 unit	0	1 unit	0	1 unit		
		2	16	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	0	3 unit	0	3 unit	0	3 unit	0							3 unit	0	3 unit	0	3 unit		
		2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	0	10 unit	0	10 unit	0	10 unit	0							10 unit	0	10 unit	0	10 unit		
		2	16	01	2,07	06	Pengadaa Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	65.497.770	10 unit	50.000.000	10 unit	65.497.770	10 unit	0							10 unit	0	10 unit	115.497.770	10 unit		176
		2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Tercapaianya Persentase Tingkat Operasional Pemerintahan																					
		2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	1.500.000							1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan		180
		2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.902.150	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	22.902.150	1 Laporan	7.515.900							1 Laporan	7.515.900	1 Laporan	202.902.150	1 Laporan		886
		2	16	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0							1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan		
		2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	409.600.000	1 Laporan	646.800.000	1 Laporan	409.600.000	1 Laporan	232.000.000							1 Laporan	232.000.000	1 Laporan	1.056.400.000	1 Laporan		258
		2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Tercapainya Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik																					
		2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dikelola dengan Baik	4 unit	38.480.000	4 unit	50.000.000	4 unit	38.480.000	4 unit	9.000.000							4 unit	9.000.000	4 unit	88.480.000	4 unit		230
		2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	0	10 unit	0	10 unit	0	10 unit	0							10 unit	0	10 unit	0	10 unit		
		2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0							1 unit	0	1 unit	0	1 unit		
		2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0							1 unit	0	1 unit	0	1 unit		
		2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang di selenggarakan secara online dan integrasi																					
		2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi dan Komunikasi Publik yang akurat dan memadai																					
		2	16	02	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0							1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0							1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		2	16	02	2,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0							1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

						2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	0	3 Layanan	0	3 Layanan	0	3 Layanan	0					3 Layanan	0	3 Layanan	0	3 Layanan			
						2	16	02	2,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	02	2,01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	22 Orang	0	22 Orang	0	22 Orang	0	22 Orang	0					22 Orang	0	22 Orang	0	22 Orang			
						2	16	02	2,01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 dokumen	8.880.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.880.000	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	16.880.000	dokume	190		
						2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	100 dokumen	2.025.000.000	30 dokumen	1.800.000.000	100 dokumen	2.025.000.000	100 dokumen	672.000.000					100 dokumen	672.000.000	30 dokumen	3.825.000.000	0 dokum	189		
						2	16	02	2,01	13	Penyediaan/Pengadain Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0					1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit			
						2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APUKASI INFORMATIKA	Presentase Pelaksanaan EGovernment Pemerintah Daerah																				
						2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Presentase Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain yang di linkun pemerintah daerah																				
						2	16	03	2,01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	59 domain	0	59 domain	0	59 domain	0	59 domain	0					59 domain	0	59 domain	0	59 domain			
						2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 unit	0	2 unit	0	2 unit	0	2 unit	0					2 unit	0	2 unit	0	2 unit			
						2	16	03	2,02		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengelolaan e- government Pemerintah Daerah																				
						2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	03	2,02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			
						2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 unit	288.000.000	1 unit	324.000.000	1 unit	288.000.000	1 unit	23.200.000					1 unit	23.200.000	1 unit	612.000.000	1 unit	213		
						2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	0	2 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0					12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	2 Dokumen			
						2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen			
						2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	5 Perangkat Daerah	8.880.000	5 Perangkat Daerah	8.000.000	5 Perangkat Daerah	8.880.000	5 Perangkat Daerah	0				5 Perangkat Daerah	0	5 Perangkat Daerah	16.880.000	5 Perangkat Daerah	190			
						2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0					1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit			
						2	16	03	2,02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layanan	0	5 Layanan	0	5 Layanan	0	5 Layanan	0					5 Layanan	0	5 Layanan	0	5 Layanan			
						2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	47.690.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	47.690.000	1 Dokumen	0					1 Dokumen	0	1 Dokumen	72.690.000	Dokume	152		
						2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen			
						2	16	03	2,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	0	dokumen			

[illegible]

[illegible]

1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	54.688.180.788	Baik	59.679.347.836	Baik	59.134.589.259	9.613.562.506							9.613.562.506	114.085.823.683			2,09	Sekretariat Daerah
		01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	66.000.000	8 Dok	213.553.820	7 Dok	183.268.908	9.982.400							9.982.400	386.128.180			5,85	
		01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	11.000.000	4 Dok	10.000.000	4 Dok	9.996.990	9.982.400							9.982.400	19.982.400			1,82	
		01	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	6.600.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	5.998.773	-							-	11.996.380			1,82	
		01	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	15.400.000	1 Dok	14.000.000	1 Dok	13.994.880	-							-	27.990.500				
		01	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	5.500.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	4.986.078	-							-	9.952.300			1,81	
		01	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.500.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	19.967.380	-							-	24.752.200			4,50	
		01	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	8.800.000	1 Lap	8.000.000	1 Lap	22.734.630	-							-	30.527.000			3,47	
		01	01	2	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	13.200.000	1 Lap	105.553.820	1 Lap	105.590.172	-							-	260.978.400			16,77	
		01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Laporan	21.875.930.538	8 Laporan	29.378.571.831	8 Laporan	16.691.504.516	2.753.234.254							2.753.234.254	34.664.170.221			1,58	
		01	01	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	21.770.330.538	103 Orang/Bulan	59.282.580.308	103 Orang/Bulan	56.583.409.173	2.728.415.101							2.728.415.101	34.460.498.184			1,58	
		01	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	99.000.000	4 Dok	89.993.723	4 Dok	89.992.044	18.823.889							18.823.889	179.956.773			1,82	
		01	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	6.600.000	1 Lap	6.000.000	1 Lap	18.053.299	5.995.264							5.995.264	23.755.264			3,60	
		01	01	2	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-							-	-			-		
		01	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 Lap	63.800.000	11 Lap	175.800.000	11 Lap	203.353.000	-							-	368.132.000			5,77	
		01	01	2	09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	22.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	-	-							-	20.000.000			0,91	
		01	01	2	09	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	Paket	117.800.000	1 Paket	153.432.000	-							-	270.642.000			-	
		01	01	2	09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	09	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	09	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	09	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	-	Orang	-	Orang	-							-	-			-		
		01	01	2	09	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Lap	-	Lap	-	Lap	-							-	-			-		
		01	01	2	09	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahkan/tugaskan	Orang	-	Orang	-	Orang	-							-	-			-		
		01	01	2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	Orang	-	Orang	-							-	-			-		
		01	01	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	41.800.000	100 Orang	38.000.000	100 Orang	49.921.000	-							-	77.490.000			1,85	
		01	01	2	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	Orang	-	Orang	-							-	-			-		
		01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Lap	1.962.636.374	10 Lap	5.112.454.481	10 Lap	4.894.365.227,00	899.809.535							899.809.535	9.802.964.042			4,99	
		01	01	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25.300.000	Paket	167.996.512	1 Paket	124.838.703	-							-	292.626.312			11,57	
		01	01	2	06	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	123.200.000	Paket	337.000.383	1 Paket	623.259.964	163.765.408							-	952.355.296			7,73	
		01	01	2	06	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	79.200.000	Paket	1.256.277.803	1 Paket	399.754.206	-							-	1.599.366.402			20,19	
		01	01	2	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	Paket	-	Paket	-							-	-			-		
		01	01	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	115.500.000	Paket	179.999.885	1 Paket	182.234.789	-							-	363.794.585			3,13	
		01	01	2	06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	2.750.000	Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	-							-	2.500.000			0,91	
		01	01	2	06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	Paket	-	Paket	-							-	-			-		
		01	01	2	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	1.264.686.374	12 Lap	2.549.680.000	12 Lap	2.419.690.000	335.285.550							-	4.967.347.300			3,93	
		01	01	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap	352.000.000	500 Lap	620.000.000	500 Lap	1.182.093.582	400.258.585							-	1.626.974.146			4,62	
		01	01	2	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	06	Saluran Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Saluran Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	-	Dok	-	Dok	-							-	-			-		
		01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Lap	2.793.500.000	10 Lap	1.436.711.539	10 Lap	1.815.752.996,00	-							-	5.223.135.739			1,18	
		01	01	2	07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	2.200.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1.240.000.000	-						-	1.211.300.000			0,55	

		19	01	2	09	01	Penyediaan awal material	Jumlah laporan penyediaan jasa awal material	60 Laporan	10.000.000	40 Laporan	10.700.000	4 Laporan	0.000.000	1 Laporan	100.000					1 Laporan	100.000	2 Laporan	10.700.000	5.350.000.000	84
		19	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik yang direncanakan	60 Laporan	97.242.700	40 Laporan	42.431.200	4 Laporan	10.000.000	1 Laporan	1.000.000					1 Laporan	1.000.000	2 Laporan	42.431.200	5.350.000.000	86
		19	01	2	09	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum/Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum/kantor yang direncanakan	20 Laporan	619.306.000	10 Laporan	460.000.000	0 Laporan	100.000.000	0 Laporan	-					0 Laporan	-	0 Laporan	460.000.000	20	7.740
		19	01	2	09		Pembelian barang M&M Daerah Perangai Unsur Pemeliharaan Daerah	Pembelian barang M&M dalam kerangka kontrak lumpur	00 Person	660.200.000	00 Person	220.070.270	00 Person	17.700.000	20,25 Person	-					20,25 Person	-	40,0 Person	220.070.270	00	30
		19	01	2	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pipa Kandang Perangai Daerah dan Kandang Daerah	Jumlah Kandang Perangai dan Pipa Kandang Perangai Daerah dan Kandang Daerah	1 Unit	18.170.000	1 Unit	11.808.572	1 Unit	0.700.000	1 Unit	-				1 Unit	-	1 Unit	11.808.572	100	65	
		19	01	2	09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pipa, dan Perbaikan Kandang Daerah dan Kandang Daerah	Jumlah Kandang Perangai dan Pipa Kandang Perangai Daerah dan Kandang Daerah	5 Unit	100.322.000	4 Unit	110.702.500	1 Unit	0.000.000	0 Unit	-				0 Unit	-	1 Unit	110.702.500	20	70	
		19	01	2	09	06	Pembelian/Patubahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direncanakan	10 Unit	309.042.000	2 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0 Unit	100.000.000	0	20	
Batas total indikator kinerja (IK)																										
Indikator Kinerja																										
Faktor Pendukung pencapaian kinerja																										
Indikator Pendukung																										
Indikator Indikator pada Rencana Perangai Daerah dan Kandang Daerah																										
Indikator Indikator pada Rencana Perangai Daerah dan Kandang Daerah																										

Dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian indikator kinerja RKPD sampai dengan tahun 2024 dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 maka dapat digambarkan hasil analisis dengan matriks seperti

Uraian	Analisis	Keterangan
Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan	Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak mengikuti tahapan sebagaimana RAB Penetapan target capaian kurang tepat Pelaksana kegiatan yang kurang berkompeten	Terdapat beberapa perangkat daerah yang melaksanakan pekerjaan fisik dan non fisik
Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran	Kegiatan sudah direncanakan dengan baik Waktu pelaksanaan selalu terkontrol Kerjasama dengan banyak pihak dalam pelaksanaannya Komponen pendukung kegiatan mudah didapatkan	Semua Perangkat Daerah yang telah memenuhi capaian target program dan kegiatan
Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan	penentuan awal target yang terlalu rendah atau perhitungan berdasarkan data dasar melebihi target	Berlaku untuk perangkat daerah yang kurang memenuhi capaian target program dan kegiatan
Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan	Kurangnya pengawasan atas pencapaian target program dan kegiatan Keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan target waktu yang ditetapkan	
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPD dan kinerja pembangunan daerah	Capaian beberapa indikator makro meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023, seperti IPM terus ada peningkatan sehingga menjadi 77.16 pada tahun 2024 walaupun ada indikator Makro yang kurang dari target yang diharapkan.	perencanaan tahun 2026 telah mengacu pada perencanaan jangka menengah Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 Target kinerja untuk tahun 2026 mengacu pada Ranwal RPJMD
	Program dan kegiatan yang tidak mencapai target minimal akan mempengaruhi pencapaian target akhir RPD, sehingga tidak dapat memenuhi capaian target output atau outcome. Langkah selanjutnya menjadi fokus RKPD untuk tahun 2026, sebagaimana harapan yang tertuang pada dokumen jangka menengah daerah Rancangan Awal RPJMD.	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang disajikan dalam dokumen ini merupakan gap capaian yang dianalisis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sampai tahun 2024 berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan usaha strategis dan sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di tahun 2024 tergambar dari capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana digambarkan berikut.

A. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Minahasa mulai tahun 2020 76.85% terus mengalami kenaikan hingga 2024 menjadi 79.26%. Angka IPM Minahasa berada pada kategori Tinggi dibanding kabupaten lainnya dan berada pada Tingkat ke 3 (Tiga di Provinsi Sulut), juga melampaui Realisasi Angka IPM Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- Umur Harapan Hidup Tahun 2023 adalah 74,96. Di tahun 2024 angka ini naik menjadi 75,22 atau meningkat 0,22. Kenaikan tahun 2023 ke 2024 melampaui target tahun 2024 sebesar 71,83.
- Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Minahasa

mengalami peningkatan selang tahun 2020 hingga tahun 2024, dimana pada tahun 2020 berada pada angka 9,59 dan tahun 2024 menjadi 10,23. yang berarti rata-rata telah menyelesaikan Pendidikan lanjutan pertama dan sudah tepatnya mencapai kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)

- Meningkatnya nilai cluster terhadap implementasi kabupaten layak anak menjadi capaian positif Kabupaten Minahasa, yaitu mencapai KLA Pratama (550-600) yang dicapai di tahun 2019. Demikian, target tahun 2021 (KLA Pratama) tercapai. Tantangan serius adalah memperhatikan semua elemen/kriteria pembentuk KLA untuk meningkatkan peringkat menjadi KLA Nindya dan mencapai kondisi akhir RPJMD 2018-2023, yaitu KLA Madya. Tapi, di atas segala kriteria tersebut, tujuan utama tak lain adalah untuk meningkatkan kualitas serta mewujudkan keadilan terhadap anak dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi :

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 diangka 3,96 dan terus naik hingga ditahun 2023 diangka 5,55 Persen dan ditahun 2024 terjadi perlambatan menjadi 5,49 persen. Namun di bandingkan dengan realisasi Provinsi, angka pertumbuhan ekonomi minahasa masih dalam posisi di atas provinsi 5.39 persen.
- PDRB per kapita dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk sehingga hasilnya menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau per satu orang penduduk dengan pendekatan menggunakan data PDRB atas dasar harga berlaku. Data ini bermanfaat sebagai pendekatan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah tertentu, PDRB per kapita penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa mulai tahun 2020 Rp50.227.622 terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2024 dengan nilai Rp.68.016.377

C. Pemerataan pembangunan antar wilayah

- Capaian pembangunan infrastruktur salah satunya diukur dengan indeks infrastuktur. Indeks infrastruktur digunakan untuk

mengevaluasi keberhasilan pembangunan infrastruktur secara fisik dan ketersediaan fasilitas publik. Biasanya Menilai kinerja daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar seperti jalan/transportasi, air bersih, dan drainase dan juga ketersediaan infrastruktur sumber daya air/irigasi. Capaian indeks infrastruktur di kabupaten Minahasa hingga tahun 2024 khususnya infrastruktur pekerjaan Umum adalah 51,13 dan belum mencapai target yaitu 52,45. Pencapaian ini menunjukkan bahwa layanan infrastruktur masih belum optimal dan belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata.

- Realisasi persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2024 adalah sebesar 74% dengan target 90,25%. Capaian ini ternyata tidak mencapai target di tahun 2024 bahkan turun dari capaian tahun 2023 sebesar 75%. Besar harapan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tingkat Ketaatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dapat meningkat. Beberapa hal yang membuat angka persentase pemanfaatan Ruang Kabupaten Minahasa masih rendah, yaitu kurangnya pengendalian/pengawasan pemanfaatan ruang karena SDM masih terbatas, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, Belum ditetapkannya RTRW yang direvisi yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, masih rendahnya perijinan pemanfaatan ruang, IMB, dan banyaknya bangunan/fasilitas usaha yang tidak sesuai tata ruang. Hal ini juga diperparah dengan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Indeks risiko bencana tahun 2023 mencapai (193,85). Masalahnya adalah Penyusunan indeks resiko bencana kabupaten minahasa belum maksimal karena pengukuran indeks kapasitas/ketahanan daerah tidak dilakukan dan belum tertata dalam anggaran BPBD kabupaten minahasa. Daerah ini masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi risiko bencana.

D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

- Capaian Rasio Gini di Kabupaten Minahasa sejak Tahun 2020-2024 terus berfluktuasi pada Tahun 2020 dari angka 0.320

naik di tahun 2021 menjadi 0.387, tahun 2022 turun menjadi 0.308 dan Kembali naik hingga ditahun 2024 menjadi 0.341. namun angka Gini Ratio Kabupaten Minahasa berada dibawah Provinsi Sulawesi Utara, atau lebih kecil dari angka Gini Rasio Provinsi Sulawesi Utara maupun Nasional, atau lebih kecil dari angka Gini Rasio Provinsi Sulawesi Utara maupun Nasional.

- Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020 sebesar 7.30 persen naik di tahun 2021 menjadi 7.67 persen dan mulai tahun 2022 terus menurun menjadi 6.53 persen ditahun 2024, ini menunjukkan hal positif bagi kabupaten Minahasa Angka kemiskinan Minahasa juga lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan provinsi sulawesi utara 6,70%.
- Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa terus berfluktuasi dari tahun 2020 sebesar 6,3 persen, lalu menurun ditahun 2021 menjadi 6,14 persen namun kembali mengalami kenaikan ditahun 2023 menjadi 7,65 persen dan menurun ditahun 2024 menjadi 7.22 persen.

E. Meningkatkan pembangunan modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial

- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan mengalami penurunan serius. Capaian 100% di tahun 2019-2020 tidak diikuti capaian tahun 2021 sebesar 75%. Capaian yang sama terjadi pada tahun 2022, 75%. Padahal yang ditargetkan pada tahun 2022 dalam RPJMD 2018-2023 adalah 100%. Namun, di tahun 2023 sesuai yang di targetkan pada tahun dapat tercapai 100%.
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2022 juga tidak mencapai target 343.566 jiwa. Jumlah yang mendapatkan pelayanan yang dimaksud tahun 2022 hanya mencapai 4.024 jiwa. Ada 339.542 yang tidak mendapatkan pelayanan minimum. Pelayanan dasar ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan. Sedangkan di tahun 2023, yang terlayani sebanyak 1610 jiwa dari yang ditargetkan target 7400

jiwa.

- Keadaan yang sama juga dialami pada indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dari target 2022 sebesar 343.566 jiwa, yang dilayani hanya 775 jiwa. Itu berarti 342.791 tidak mendapatkan pelayanan dasar tersebut. Hal ini secara langsung mempengaruhi pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara khusus suburusan bencana daerah Kabupaten Minahasa. Capaian seharusnya adalah 100%, yaitu 343.566 jiwa tersebut perlu mendapatkan pelayanan dasar ini. Dan ditahun 2023 dari target sebanyak 2780 jiwa yang terlayani sebanyak 2500 jiwa.

F. Meningkatkan perwujudan konsolidasi demokrasi yang lebih efektif

- Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2022 (41%) masih di bawah target yang ditetapkan untuk capaian tahun 2022, yaitu (90%). Capaian ini tentunya menjadi permasalahan serius dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada menjadi perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan untuk perencanaan jangka menengah ke depan.

G. Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang

- Nilai pada Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) tahun 2022 belum diterbitkan. Capaian tahun 2021 adalah predikat B. Pencapaian tahun tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu BB. Pencapaian akuntabilitas kinerja ini dipengaruhi oleh belum optimalnya kinerja perencanaan daerah yang dilakukan pada awal waktu dan sasaran pembangunan yang berorientasi hasil (outcome), *refocusing* program/kegiatan yang sepenuhnya mendukung sasaran pembangunan, penetapan APBD awal waktu, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum andal, pengelolaan data kinerja yang membutuhkan peningkatan pengelolaan, serta

pelaporan kinerja yang belum tepat waktu dan kurang berkualitas. Demikian juga, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan manajemen pelayanannya dan perlu berorientasi pada penerapan *e-government* melalui sistem informasi manajemen (SIM).

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.

Adapun capaian program pendidikan di Kabupaten Minahasa antara lain angka melek huruf di kabupaten Minahasa yang hampir mencapai 100 %. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan terkait Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan tahun 2024 adalah:

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD tahun 2023 (97%) sedangkan di tahun 2024 partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sudah mencapai angka sebesar 98%.
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar kesetaraan tahun 2023 (99,98%) belum mencapai target yang ditetapkan dan tahun 2024 (99,99%). Capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024 sudah mencapai angka yang tinggi namun belum sesuai target SPM sebesar 100%
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama tahun 2023 sebesar (96,07%), tahun 2024 mencapai angka (98,06%). Hal ini berarti partisipasi warga negara usia 13-15 dalam pendidikan menengah belum maksimal.
- d. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 10,11%. Target yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026, untuk tahun 2024 sebesar 9,84% sedangkan di tahun 2024 realisasinya sebesar 10,23%. Harapan Lama

Sekolah tahun 2023 sebesar 14,18 mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 0,1 menjadi 14,19%.

- e. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2023 (93,71%), tahun 2024 mencapai 96,51% dari target sebesar 75,2% dalam RPD tahun 2024-2026. Sedangkan APM SMP/MTs di tahun 2023 sebesar 71,32 dan tahun 2024 ditargetkan 81,2 . dan realisasi 71,18. Demikian juga, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2023 (92,37%) dan tahun 2024 (82,07%) dari target tahun 2024 (90,2%).

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan.

- a. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, belum mencapai target sebesar 100% yang ditetapkan dalam RPD tahun 2024-2026 baik pada tahun 2023 juga tahun 2024.
- b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup tahun 2023 (6,69/1000KH) sedangkan yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 sebesar 4,5/1000KH.
- c. Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2023 (99/100.000KH) , mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi (44/100.000KH) .
- d. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) tahun 2023 mencapai (91,90 %) dari target (95%). Tahun 2024 ditargetkan sebesar (95%),
- e. Cakupan Balita Gizi Buruk tahun 2023 sebesar 0,68 berarti terdapat 12 Balita gizi buruk dari 17.397 sasaran Balita. Sedangkan target di tahun 2024 sebesar 100%.
- f. Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI/SKI, ditahun 2023 sebesar 23,1 sedangkan tahun 2024 mencapai angka 19,4.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan Di Bidang urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di tahun 2023 kurang maksimal karena terdapat beberapa kinerja yang tidak tercapai targetnya, yaitu Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani, Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan, Rasio Kepatuhan IMB, Persentase bangunan ber-IMB, Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten, Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Kedua indikator terakhir merupakan indikator layanan SPM. Tidak maksimalnya pencapaian indikator tersebut terkait permasalahan sebagai berikut :

- Kondisi infrastruktur masih banyak yang kurang baik terlihat dari tingkat kemantapan jalan 65,54 %, Kondisi jaringan irigasi baik hanya 55,45 % %, drainase dalam kondisi baik masih 55,45%,
- Sebagian besar jalan belum memenuhi standar kelayakan jalan baik dari segi lebar maupun strukturnya. Standar jalan kabupaten mempunyai lebar 5,5 meter;
- Kurangnya peralatan pemeliharaan jalan, kurangnya sarana mobilitas penanganan kegiatan seperti alat berat, perangkat laboratorium, perangkat survey terutama untuk perencanaan, juga ketersediaan SDM yang profesional;
- Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air dari hulu sampai ke hilir termasuk didalamnya pengelolaan irigasi karena tidak berfungsinya unit pengelola irigasi sehingga berpotensi terjadinya konflik antar petani;
- Standar Pelayanan Minimal air minum dan sanitasi belum

mencakup semua masyarakat (91,50 % dan 89,37%) dan belum ada layanan akses air minum dan sanitasi aman; Belum optimalnya pemantauan terhadap kualitas air bersih/ minum bagi masyarakat serta belum adanya instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi.

- Masih kurangnya drainase yang baik termasuk drainase jalan;
- Terbatasnya fasilitas persampahan, belum dapat menjangkau semua kecamatan/desa di Kabupaten Minahasa;
- Masih kurangnya bangunan yang ber-IMB/PBG dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap IMB/PBG.
- Tingkat ketaatan terhadap RTRW cenderung menurun yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan, pelanggaran sempadan, ataupun pembangunan yang tidak sesuai peruntukkan.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja tahun 2024 untuk di bidang urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman tidak optimal. Banyak indikator kinerja yang tidak terlayani/terpenuhi. Sementara permasalahan mendasar yang harus ditangani adalah :

- Belum optimalnya layanan SPM Perumahan Rakyat yaitu fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah. Dalam hal penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada setiap kejadian bencana sesuai tahapan SPM sehingga penanganannya dapat cepat terlaksana terutama untuk penetapan keputusan bupati, sehingga layanan ini dapat terlaksana.
- Masih banyak masyarakat yang belum menempati rumah yang layak huni (7.011 unit rumah) dan belum

didukung dengan ketersediaan PSU yang memadai, serta masih terdapat kawasan kumuh dengan luas total 96,13 Ha, yang menjadi kewenangan nasional (5552 Ha), Provinsi (10,9Ha) dan Kabupaten (29,71Ha) Sesuai SK Bupati Minahasa Nomor 579 Tahun 2024.

- Masih terbatasnya ketersediaan PSU Perumahan/Permukiman

5. Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

- a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2023 (100%). Demikian juga di tahun 2024 sesuai yang di targetkan dapat tercapai sebesar 100%.
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, tahun 2023 dan tahun 2024 belum mencapai target. Hal ini menunjukkan belum semua warga yang menjadi target layanan ini mendapat layanan maksimal.
- c. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di tahun 2023 sudah dapat dicapai 100% sesuai dengan target , namun Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota; Tingkat waktu tanggap (*respons time rate*), daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih dan sigap dalam upaya mitigasi bencana kebakaran dan Persentase Ketersediaan sarana pemadam kebakaran, belum sesuai dengan target.

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial.

- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tahun 2023 Layanan dasar ini sudah memenuhi

target (4,00) menjadi 4,20% .

- b. Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Cakupan penanganan pemulihan daerah bencana, Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tahun 2024 (100%) belum mencapai target.
- c. Persentase menurunnya resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi belum mencapai target, tahun 2023 masih diangka 193,85 berarti potensi resiko bencana kategori tinggi. Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah berada pada angka 0,37 di tahun 2024 dan berarti sangat rendah.

2.3.2.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2023 tidak mencapai target (42,80%). Masih banyak tenaga kerja yang belum bersertifikat kompetensi.
- Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, namun belum mencapai target dalam RPD tahun 2024-2026
- Pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 ditargetkan 93% namun yang dapat dicapai hanya 77%. Tahun 2024 ditargetkan juga 93% dan boleh mencapai 93% namun masih banyak buruh/pekerja yang belum mempunyai BPJS Ketenagakerjaan.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Persentase peran perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang; Persentase ARG pada belanja langsung

APBD, tidak tercapai sesuai dengan yang targetkan di tahun 2023 dan tahun 2024.

- b. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur dan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2023 sebesar 56 % melebihi yang di targetkan sebelumnya 50%.
- c. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga yang terlihat dari IPG. IPG diturunkan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan menggunakan data penduduk perempuan. Kenaikan ini disebabkan karena pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Berdasarkan komponen pembentuknya, komponen kesehatan stabil pada angka 0,83. Sedangkan, komponen pendidikan dan pendapatan mengalami kenaikan. Meskipun komponen pendapatan meningkat, jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaan utama, perempuan lebih mendominasi pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan, seperti tenaga usaha jasa, tenaga usaha penjualan dan tenaga usaha pertanian. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Minahasa masih rendah. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi. Sedangkan sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan. IPG menjadi indikator yang dipilih Provinsi untuk mengukur kinerja pemerintah menyangkut keterlibatan gender. Sedangkan, Minahasa memilih IDG. Ini menunjukkan belum ada keselarasan indikator untuk mengukur peran perempuan.
- d. Belum optimalnya kelembagaan PUG dikarenakan kurangnya komitmen masing-masing perangkat daerah.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah:

- Ketersediaan Pangan Utama 2023 (34.697 Ton), belum mencapai target 2023 (48.000 Ton). Hal ini dikarenakan Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketersediaan pangan utama karena menyebabkan terjadi pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan.
- Berkurangnya luas lahan pertanian yang berakibat pada ketersediaan pangan berkurang;
- Rendahnya konsumsi keberagaman pangan. Dari segi fisiologis, manusia untuk dapat hidup aktif dan sehat memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. hingga saat ini ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan sumber karbohidrat, khususnya beras masih tinggi;

4. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya upaya penanganan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik pada air, udara dan tutupan lahan;
- Indeks kualitas air cenderung turun dari tahun ke tahun;
- Penyelamatan Danau Tondano termasuk didalamnya pengendalian eceng gondok dan gulma air, pengendalian kualitas air Danau, kerusakan daerah tangkapan air, pencemaran akibat aktivitas masyarakat sekitar dan di DTA.
- Belum terkelolanya RTH dan pengendalian ekosistem keanekaragaman hayati; serta pengendalian Limbah;
- Terbatasnya layanan persampahan di masyarakat karena belum didukung ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai untuk melayani semua wilayah Kabupaten Minahasa
- Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup termasuk juga dalam pengelolaan sampah.

5. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2022 (93%) tidak mencapai target (96%). Demikian juga, Persentase pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan, namun di tahun 2023 masing-masing indikator tersebut bisa mencapai target 100%.
- Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, Persentase peningkatan disiplin aparatur, Persentase jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pelatihan/diklat, Rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cakupan penerbitan akta kelahiran, Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik tahun 2021 maupun 2022 tidak ada data. Namun di tahun 2023 dari data yang ada untuk persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan belum mencapai target 25% yang ditargetkan sebelumnya 50%

6. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

Desa mandiri sudah bergerak sejak tahun 2020 dengan angka 13,66 % dan naik menjadi 27,75 % pada tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan yang pesat pada tahun 2022 yaitu sebesar 46,26 %, dan terus naik menjadi 72,25% dimana hal ini menandakan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga pada tahun 2024 Kabupaten

Minahasa boleh berada di angka 82,3% melampaui target sebesar 78,99%.

Penanggulangan stunting masih perlu menjadi perhatian dalam pembiayaan dari dana desa

Masih terdapat masyarakat miskin ekstrim tersebar didesa dan kelurahan, sebanyak 1614 orang di tahun 2023.

7. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- Prevalensi kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) tahun 2023 (60,40%) tidak mencapai target (69,92%). Hal ini menunjukkan belum semua perempuan yang sudah menikah menggunakan kontrasepsi modern. Penggunaan kontrasepsi ditujukan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran. Hal itu dilakukan agar tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera.
- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) tahun 2023(11,50%) jauh lebih tinggi dari angka target penurunan (7,7%). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ber-KB belum merata di Minahasa.
- Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) tahun 2023 (81,34%) mencapai melebihi target (80%). Hal ini menunjukkan sudah banyak masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK.
- Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan belum disusun.
- Jumlah *Stakeholders*/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK tahun 2022 (5) tidak mencapai target (6). Hal ini menunjukkan program ini belum melibatkan mitra nonpemerintah. Belum ada data capaian tahun 2023 sehingga belum dapat

di evaluasi.

- Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2023 (32,80%) jauh dari target yang ditetapkan (45,97%). Hal ini menunjukkan masih banyak PUS yang merupakan PBI yang belum menggunakan KB.
- Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19 tahun 2023 (25,1) berada di atas angka target penurunan tahun 2023 (29).
- Cakupan Kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, tahun 2023 belum ada data capaian sehingga belum dapat dievaluasi.

8. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi di bidang Perhubungan yaitu :

- Belum ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Transportasi yang menjadi panduan dalam pengembangan transportasi di Kabupaten Minahasa;
- Tidak adanya terminal Tipe C di Kabupaten Minahasa dan terbatasnya halte, serta masih perlunya pengembangan angkutan massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah dalam kabupaten juga daerah di sekitar Minahasa;
- Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
- Menurunnya jumlah ijin trayek, yang berarti penurunan kapasitas dan jangkauan pelayanan angkutan umum;
- Kurangnya ketersediaan sarana/prasarana perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu, marka, guardrail, dan penerangan jalan umum (PJU);
- Kurangnya SDM bidang Perhubungan dan kualitasnya masih relatif rendah;
- Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan melakukan uji KIR yang mempengaruhi keselamatan berkendara;

- Angka Kecelakaan lalu lintas masih tinggi yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas dan kurangnya fasilitas keselamatan jalan/rambu-rambu lalu lintas.

9. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi

- Keterbatasan SDM bidang komunikasi dan informasi yang memiliki kompetensi di tahun 2024.
- Jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik di tahun 2023 yaitu terdapat 13 layanan sesuai dengan yang telah ditargetkan.

10. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya koperasi yang mendapat izin; Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha; Jumlah UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal; Persentase koperasi aktif; Persentase Usaha Mikro dan Kecil; Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan tahun 2023 tidak mencapai target.
- Terbatasnya kapasitas SDM Koperasi dalam manajemen koperasi, penguasaan teknologi, inovasi pengembangan produk. Salah satu penentu keberhasilan, keunggulan mutu bersaing suatu usaha adalah SDM. Maka penanganan SDM ini harus bersifat strategis dan unity.

11. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal

- Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2023 tidak bisa dievaluasi karena data terberi dalam bentuk jumlah bukan rasio.
- Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2023 tidak bisa dievaluasi karena tidak ada

- Belum adanya data dan informasi potensi investasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

- ### 13. **Urusan Pemerintah Bidang Statistik**

14. Urusan Pemerintah Bidang Persandian.

15. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat membawa dampak signifikan terhadap budaya lokal. Masyarakat cenderung lebih mudah terpapar budaya luar negeri melalui media sosial, film, dan musik. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat di Kabupaten Minahasa.
- Pengelolaan budaya lokal yang belum optimal, yang ditandai dengan minimnya kegiatan gelar seni dan budaya serta minimnya kelompok seni/budaya yang terfasilitasi;
- Perlunya fasilitasi kelompok seni untuk dapat tampil di fasilitas publik;
- Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal;
- Semakin berkurangnya pelaku budaya dengan kompetensi yang baik karena minimnya pembinaan serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali budaya/sejarah lokal Minahasa;
- Belum adanya Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten.

16. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

- Indikator pembentuk angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) masih sulit dihitung demikian juga belum dapat ditentukan Nilai Indeks Literasi
- Tenaga Pustakawan tidak tersedia

17. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua PD mengelola arsip dengan baik.

- b. Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai.
Semakin tingginya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak pula;
- c. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip belum memadai.
Belum semua perangkat daerah mempunyai tenaga fungsional arsiparis, sehingga untuk layanan kearsipan, perangkat daerah menggunakan ASN non arsiparis ataupun tenaga non ASN; serta
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip belum optimal.

2.3.2.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan PDRB sektor perikanan tahun 2023 (11%) belum mencapai target tahun 2023 (13%). Hal ini menunjukkan ruang pengembangan yang perlu dikejar oleh pemerintah Minahasa.
- Jumlah total produksi perikanan baik tangkap dan budidaya tahun 2023 (98,122) belum mencapai target tahun 2023 (119). Selaras dengan produksi perikanan budidaya dan tangkap yang belum mencapai target 2023.
- Sub Bidang Perikanan Budidaya
 - 1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Budi daya
 - 2. Kualitas SDM Pelaku Usaha Budi daya
 - 3. Keterbatasan Modal Usaha
 - 4. Lokasi Budidaya Di Danau Tondano belum teratur
- Sub Bidang Perikanan Tangkap
 - 1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Nelayan dalam Penguasaan Teknologi Penangkapan Ikan
 - 2. Terbatasnya Ketersediaan Armada Penangkapan Khususnya Kapasitas < 5GT
 - 3. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan)/TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Atep Oki
 - 4. Belum Tersedinya PPI/TPI di Minahasa Bagian Barat

5. Penggunaan Bom Dan Racun Ikan Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan
- Sub Bidang Penguatan Daya Saing dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 1. Unit Pengolahan Ikan Masih Kurang
 2. Ketersediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Pesisir
 3. Pemboman Ikan/Karang
 4. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pengolahan
 5. Menurunnya ketersediaan benih ikan.
 6. Tingginya harga pakan ikan.
 7. Masih kurangnya permodalan bagi kelompok-kelompok, Dikarenakan resiko tinggi bagi perbankan.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Dari beberapa indikator kinerja yang diampu di Bidang Pariwisata, ternyata ada beberapa yang tidak mencapai target di tahun 2024 seperti kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang masih rendah, dan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Minahasa serta Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Minahasa masih rendah. Meskipun laju pertumbuhannya cenderung membaik di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota di tahun 2024 masih relatif kurang, meskipun kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan.
- Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi menyebabkan perkembangan objek wisata kurang optimal;
- Pengelolaan destinasi, daya tarik ataupun kawasan pariwisata yang masih lemah, belum didukung dengan

kelembagaan/manajerial yang baik.

- Ketersediaan sarana dan parasarana pariwisata yang memenuhi standard yang masih terbatas ;
- Dukungan akses dan sarana/prasarana transportasi yang masih terbatas;
- Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang masih lemah;
- Belum optimalnya promosi pariwisata daerah;
- Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata serta keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan belum tersedia aturan secara detail yang mengatur tentang pelaku ekraf.
- Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata yang disebabkan karena kurangnya pembinaan serta pendampingan dimulai dari perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata, serta kurangnya peningkatan intensitas pembinaan atau pendampingan desa wisata;
- Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- Alih fungsi lahan meningkat.
- Masih kurangnya ketersediaan benih yang berkualitas dan pupuk;
- Tingginya biaya produksi.
- Alih penerapan budidaya pertanian teknologi pengolahan lahan dan hasil pertanian yang belum optimal.
- Dampak perubahan iklim ekstrem.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, Pengawasan Barang Beredar, belum mencapai target.
- Peran perdagangan dalam memajukan perekonomian daerah yang

belum meksimal

5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah, jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah, jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya dikeluarkan instansi terkait di daerah kabupaten/kota; Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini, tidak ada data tahun 2023 sehingga tidak dapat dievaluasi.
- Sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi belum berperan secara optimal.
- Kualitas SDM yang terampil masih terbatas baik kemampuan berwirausahaan, manajerial, product development, desain maupun kemampuan teknis dan penguasaan teknologi di bidang Industri Kecil dan Menengah

2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- Belum adanya regulasi tentang tata cara kerja sama daerah sebagai turunan dari aturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Jumlah persetujuan (MoU) kerja sama pemerintah, dalam negeri dan luar negeri baik dengan pemerintah dan dunia usaha terbatas;
- Belum ada regulasi tentang batas wilayah Kabupaten

Minahasa serta penetapan nama dan batas wilayah desa;

2. Unsur Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya dukungan perencanaan kerja dari masing-masing alat kelengkapan dewan; serta
- b. Adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing parpol dalam pembahasan produk hukum daerah.

2.3.2.5 Unsur Pengawasan urusan pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Jumlah temuan BPK tahun 2023 (22) di atas jumlah yang ditargetkan(12). Ini menunjukkan perlunya ketertiban administrasi pelaksanaan program-program.
- Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) tahun 2023 (60,6) masih jauh dari yang ditargetkan (100).
- Kematangan implementasi SPIP; Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP); Tingkat kematangan implementasi SPIP, tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan.
- Belum semua SKPD mendapatkan pembinaan ZIWBK/WBBM.

2.3.2.6 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

- Pencapaian PPD belum maksimal. Target 2023 tidak tercapai. 4 aspek yang dinilai tentang pembangunan daerah belum maksimal dikembangkan.
- Koordinasi dan konvergensi kegiatan dengan OPD-OPD belum maksimal.

2. Urusan Keuangan

Belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi SIPD sehingga menghambat proses penatausahaan sampai pada pelaporan

3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi (diklat dasar) tercapai; Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasi, di tahun 2023 bisa mencapai target yang ditetapkan dan hal ini menunjukkan pengembangan SDM sudah hampir maksimal. Lain halnya dengan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; Persentase pegawai yang datanya akurat; Persentase pegawai Minahasa yang Memiliki sertifikat diklat Peningkatan kompetensi (Diklat PIM II, III dan IV); Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi, pada tahun 2023 tidak mencapai target. Hal ini menunjukkan secara umum pengembangan SDM yang belum maksimal.
- Pengangkatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi.
- Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 (50,75) belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 yaitu (61,24)

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan daerah yang diidentifikasi dalam dokumen-dokumen perencanaan belum menjadi rujukan utama dalam penentuan cakupan riset yang hendak dikembangkan tahun yang bersangkutan.

2.3.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah.

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja tahun 2022, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Minahasa adalah (berkaitan dengan tema) :

1. Belum tercapainya Sumber Daya Manusia yang berkualitas
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator mengukur kinerja pemerintah untuk pembangunan kualitas sumber

daya manusia yang berkualitas, dasar perhitungan IPM terdapat 3 (tiga) dimensi, yaitu : (a) Kesehatan, yang diukur dengan Angka Kelahiran Hidup; (b) Pendidikan, yang dihitung dari Angka Harapan Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah serta; (c) Standar hidup layak, yang dihitung dari Produk Nasional Bruto per kapita.

- a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Minahasa pada tahun 2022 sebesar 76,18 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 (75,73). Capaian IPM Kabupaten Minahasa Tahun 2022 (73,81) dan Tahun 2023 (76.96). Capaian IPM Kabupaten Minahasa berada diatas Provinsi Sulawesi Utara, dan berada di peringkat ke tiga setelah Kota Manado dan Kota Tomohon
- b. Angka Harapan Hidup Kabupaten Minahasa tahun 2022 sebesar 71,49 tahun dan terjadi kenaikan dibanding dengan tahun 2021 (71,16 tahun). Angka Harapan Hidup Kabupaten Minahasa tahun 2022 (71,49) dan di tahun 2023 (71.82). Nilai AHH Minahasa berada dibawah Provinsi Sulawesi Utara. Capaian tersebut Kabupaten Minahasa berada dibawah Kota Tomohon, Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara.
- c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Minahasa tahun 2022 sebesar 9,82 dibanding dengan tahun 2021 (9,73) terjadi kenaikan. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Minahasa tahun 2022 (9,82) dan di tahun 2023 Angka Rata – Rata Lama Sekolah KAbupaten MInahasa Meningkat menjadi (10.11). Nilai Kabupaten Minahasa berada diatas Provinsi Sulawesi Utara.
- d. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Minahas tahun 2022 sebesar 14,17 dan terjadi kenaikan dibanding dengan tahun 2021 (14,15). Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Minahasa tahun 2022 (14.17) dan di Tahun 2023 (14.18) dan berada diatas Provinsi Sulawesi Utara (12,96) dan berada dibawah Kota Manado (14.19) dan Tomohon (14,24).
- e. Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Minahasa Tahun 2023 sebesar (13.027) meningkat dari tahun 2022 sebesar (12.690). Capaian Pengeluaran Per Kapita Minahasa lebih besar dari capaian Provinsi Sulawesi sebesar 11.497. Namun Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Minahasa Tahun 2023 masih berada dibawah Kota Manado.

Upaya untuk tercapainya Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan;
- b. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik serta kesetaraan mutu lembaga pendidikan negeri dan swasta;
- c. Peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan;
- d. Peningkatan kualitas tenaga medis dan tenaga Kesehatan;
- e. Optimalisasi Kesehatan lingkungan;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Masih Rendahnya Daya Saing Perekonomian Minahasa

- a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tahun 2023 sebesar (5.55) meningkat dari capaian Tahun 2022 sebesar 5,47%. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Minahasa Tahun 2023 berada di peringkat kedua di Provinsi Sulawesi Utara di bawah Kota Bitung (5.66). Dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa lebih tinggi dari Capaian Sulawesi Utara (5.48).
- b. Angka Kemiskinan Kabupaten Minahasa tahun 2023 (6.87%) menurun di bandingkan angka kemiskinan tahun 2022 sebesar (7,05%) mengalami penurunan dibanding tahun 2021 (7,67%), dan capaian tahun 2023 berada dibawah Provinsi Sulawesi Utara (7,38).
- c. Gini Ratio Kabupaten Minahasa tahun 2023 0.327 lebih besar dari tahun 2022 sebesar 0,308 namun lebih kecil dibandingkan angka capaian Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara (0,370). Capaian Gini Ratio tahun 2023 Kabupaten Minahasa masuk dalam urutan ke 5(lima) terkecil dibandingkan Gini Ratio Kabupaten Kota lainnya.
- d. Tingkat Pengangguran Kabupaten Minahasa Tahun 2023 (7.65) naik dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar 7%, dan berada diatas capaian Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,10%. Dan Capaian Kabupaten Minahasa termasuk dalam 4 besar capaian TPT yang masih tinggi di Provinsi Sulawesi Utara.

Upaya-upaya peningkatan daya saing perekonomian Kabupaten Minahasa :

- a. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan;

- b. Peningkatan daya saing industry termasuk penguatan kewirausahaan serta daya saing UMKM dan koperasi;
- c. Peningkatan daya saing di bidang pariwisata;
- d. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai peranan penting berjalannya pemerintahan daerah. Permasalahan dalam tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berdampak luas, khususnya di Kabupaten Minahasa yang cukup luas. Demikian pentingnya hal ini sehingga perlu ada perbaikan atas tata Kelola pemerintahan di daerah dan telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN), peningkatan pelayanan public kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik pusat dan daerah. Hal tersebut kemudian disusul dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hasil Reformasi birokrasi sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolak ukur dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kabupaten Minahasa baru mulai melaksanakan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021. Hasil capaian Hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Minahasa tahun 2021 adalah 41,03 dan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 48,13. Capaian tahun 2021 dan 2022 masih berada pada kategori C. Selanjutnya berkaitan dengan Nilai SAKIP, hasil yang didapatkan Kabupaten Minahasa secara berurutan dari tahun 2018–2022 adalah 46,43; 50,04; 60,16; 60,26; dan 60,94. Meskipun mengalami kenaikan nilai setiap

tahunnya namun apabila dilihat lebih lanjut dari kategori Nilai SAKIP yang ada, maka Nilai SAKIP Kabupaten Minahasa tahun 2018 kategori C, tahun 2019 kategori CC dan tahun 2020-2023 baru masuk kategori BB. Selain itu untuk melihat sejauh mana perbaikan tata Kelola pemerintahan juga digunakan indikator lain berupa Opini BPK, Indeks Merit Sistem, dan Indeks SPBE. Opini BPK untuk Kabupaten Minahasa dari tahun 2018-2023 mendapatkan Opini WTP, sedangkan untuk Indeks Merit Sistem tahun 2022 mendapatkan nilai 254 pada kategori III (Baik). Indeks SPBE Kabupaten Minahasa di tahun 2020 berada di angka 1,99 dengan predikat Cukup, apabila dilihat dari predikat Cukup, hal ini tentu perlu ditingkatkan, supaya ke depannya bisa meraih predikat Baik. Dari beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa tersebut, terlihat bahwa Sebagian besar indikator yang ada masih perlu upaya perbaikan dan dapat lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

Upaya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik :

- a. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki Rencana Aksi turunan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021-2023;
- b. Belum optimalnya penerapan *E-Government*;
- c. Belum optimalnya penguatan sistem *manajemen* SDM, antara lain *assessment* pegawai belum dilakukan secara menyeluruh, ukuran kinerja individu belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh, dan belum menerapkan kebijakan *system* merit dan manajemen talenta;
- d. Rendahnya produktivitas ASN;
- e. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK.

4. Belum tercapainya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Pemahaman akan kualitas

lingkungan hidup ini sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Capaian IKLH Kabupaten Minahasa di tahun 2023 adalah 63,39 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 62,46. Penurunan hanya terjadi pada parameter indeks kualitas air sebagai salah satu indikator pembentuk dalam IKLH. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa belum optimal dilihat dari tiga indikator/parameter pengukuran lingkungan hidup, yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks tutupan lahan.

- a. Pada tahun 2023, capaian sasaran IKA adalah 48,00 meningkat dari tahun sebelumnya, dan sesuai kategori berada kualifikasi marginal, hanya satu level di atas kualifikasi buruk. Hal ini berarti masih jauh dari kondisi baik, merupakan tanda awas dan perlu diupayakan agar pencemaran air tidak semakin parah. Pencemaran air tersebut terutama disebabkan karena aktivitas masyarakat sekitar, alih fungsi lahan terutama di daerah tangkapan air.
- b. Pengukuran IKU menggunakan parameter pengukuran oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). NO₂ merupakan emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ merupakan emisi industri yang menggunakan bahan bakar solar sekaligus bahan yang mengandung sulfur lainnya. Hasil pengukuran IKU di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 adalah 93,48 lebih baik dari tahun sebelumnya, yang berarti tingkat pencemaran udara di Kabupaten Minahasa masih cukup rendah.
- c. Pengukuran kualitas lingkungan hidup lainnya adalah tutupan lahan yang mencapai angka 35,43 pada tahun 2023 dan meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Tutupan lahan merupakan kenampakan material fisik permukaan bumi, dan menggambarkan kenampakan vegetasi. Hal yang perlu menjadi perhatian mengenai tutupan lahan di Kabupaten Minahasa antara lain belum optimalnya penambahan/pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan keanekaragaman hayati.

Permasalahan sampah perlu menjadi perhatian penting dalam pengelolaan Lingkungan hidup. Berdasarkan data pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 jumlah volume produksi sampah cenderung meningkat dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan peningkatan volume sampah dari tahun 2022 yang meningkat sebesar 1,47 %, maka peningkatan volume sampah di tahun 2023 cenderung lebih sedikit hanya sebesar 0,45%. Hal ini berarti masyarakat sudah mulai mengurangi sampahnya atau sudah mulai melakukan pemilahan sampah. Dari volume produksi sampah tersebut sudah dilakukan pengelolaan sebesar 92,86%. Namun layanan pengelolaan sampah tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Minahasa dan lebih terkonsentrasi pada kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan yang tersedia dan beroperasi. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sangat mempengaruhi target pengurangan sampah. Sebagian besar sampah langsung diangkut dan dibawa ke TPA tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau Bank Sampah. Hal ini menyebabkan TPA akan cepat penuh dan berumur lebih pendek dari yang direncanakan.

Pembangunan infrastruktur tentunya akan memberi dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Itulah sebabnya infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial ekonomi daerah. Beberapa komponen yang termasuk dalam infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, sumber daya air, drainase, infrastruktur air bersih, air limbah maupun persampahan. Keberadaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Minahasa dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan air baku untuk minum dan irigasi. Sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 luas daerah irigasi yang ada di Kabupaten Minahasa adalah 8.429 ha, terdiri dari kewenangan Provinsi Sulawesi Utara 1.286 ha yaitu D.I. Noongan, kewenangan Kabupaten Minahasa 7.143 ha yang terdiri dari 26 Daerah Irigasi seluas 5.235 ha dan luas sisanya sebagai irigasi desa. Kondisi jaringan irigasi

yang baik akan mempengaruhi layanan jaringan irigasi. Pada tahun 2023, Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada mencapai angka 94 persen dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya namun dari data rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi hanya berada pada angka 0,0204. Hal ini berarti sebagian besar kebutuhan air bagi pertanian dapat terpenuhi namun layanan operasional jaringan irigasi masih rendah dan belum menjangkau seluruh daerah irigasi kewenangan Kabupaten. Hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah perlu upaya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pada sistem irigasi dan juga sebagai sumber air minum, serta dilakukan kegiatan untuk menjaga agar kondisi jaringan irigasi tetap beroperasi dengan baik sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.

Perkembangan Infrastruktur jalan di Kabupaten Minahasa, pada tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 249 tahun 2017, panjang jalan 681,15 km dengan kondisi jalan mantap 78,17% yang terdiri dari 493,19 km kondisi baik dan 52,9 km kondisi sedang. Pada Tahun 2023 terjadi perubahan panjang jalan Kabupaten sesuai SK Bupati Nomor 737 tahun 2023 menjadi 880,42 km, sehingga capaian tingkat kemantapan jalan menjadi 64,51% dengan dimana terdapat 528,22 km jalan dalam kondisi baik, 39,75 km kondisi sedang, 110,02 km kondisi rusak ringan dan 202,44 km rusak berat. Hal ini berarti masih terdapat 35,49 % jalan dalam kondisi rusak berat dan ringan. Dengan kondisi tersebut maka masih sangat perlu dilakukan upaya penanganan terhadap jalan kabupaten untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, produktivitas dan konektivitas masyarakat.

Penyediaan air minum dan sanitasi juga merupakan salah satu layanan infrastruktur. Hingga tahun 2023, capaian kinerja untuk layanan ini masih belum optimal karena belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 91,12 %, turun dari tahun sebelumnya sebesar 91,12%. Hal ini berarti masih terdapat masyarakat yang rentan karena belum memiliki akses air minum layak. Disamping itu perlu juga upaya untuk pencapaian akses air minum aman untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, untuk akses sanitasi di Kabupaten Minahasa sampai dengan Tahun 2023 sesuai data

BPS Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak di Kabupaten Minahasa menunjukkan angka 90,24 %, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 90,18%. Hal ini berarti cakupan layanan sanitasi sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan terutama untuk mendukung pencapaian akses aman. Dalam hal ini perlu dilaksanakan pengolahan terhadap air limbah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan sekitar. Pengoperasian IPLT merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan untuk pencapaian akses aman sanitasi. Selain itu, perlu pula dukungan terhadap pengelolaan persampahan terutama penyediaan sarana dan prasarannya.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur antara lain: 1) Kondisi infrastruktur sumber daya air perlu ditingkatkan melalui operasi dan pemeliharaan serta penyediaan sumber air baku; 2) Peningkatan Kondisi infrastruktur jalan dan konektivitas; 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; Berbagai permasalahan ini harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk segera ditangani. Sehingga aksesibilitas, konektivitas, serta perumahan, dan permukiman yang layak huni dapat semakin ditingkatkan realisasinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memperhatikan faktor bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity).

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Minahasa pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2022, Kabupaten Minahasa berada pada kelas risikonya berada >144 (tinggi). Kabupaten Minahasa adalah salah satu Kabupaten yang tertinggi indeks risikonya pada tahun 2021 dan 2022 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa berada pada indeks risiko bencana paling tinggi dan selalu menduduki peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Utara. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Minahasa tahun 2021 adalah 199,40, turun pada tahun 2022 dan 2023 (193,85). Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa yaitu bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan ancaman tsunami.

5. Belum terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai;

Kehidupan masyarakat yang aman dan damai memegang peranan penting untuk terciptanya suasana yang kondusif, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kasus Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang menjadi salah satu pokok konflik sosial di Kabupaten Minahasa tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak terdapat kasus SARA. Pemerintah Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 telah berhasil melakukan penanganan konflik di masyarakat, seperti diskriminasi, rasisme, dan kekerasan, melalui proses konsolidasi, mediasi, dan arbitasi. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 sebesar 89 persen dan Pemilihan Umum tahun 81 persen. Jumlah Tindak Kriminal di Kabupaten Minahasa telah tertangani dengan baik tahun 2023 sebesar 226 kasus, yang terdiri dari kasus Pembunuhan 5 kasus, Penganiayaan 193 kasus, Pencurian 15 kasus, dan Kasus Penipuan 13 Kasus. Jumlah Tindak Kriminal tahun 2023 terjadi penurunan dibanding tahun 2022 (583 kasus).

Upaya terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai :

- a. Peran warga masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban;
- b. Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu;
- c. Mengaktifkan peran orang tua, dan lembaga Pendidikan dalam mendidik anak;
- d. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat;

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran kondisi perekonomian suatu daerah secara umum dalam kurun waktu tertentu merupakan wujud atau realisasi dari perekonomian daerah. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Sulawesi Utara, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Minahasa. Diperlukan dukungan sumber pendanaan Non APBD Kabupaten Minahasa berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang

terbatas. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD juga melalui APBN; APBD Provinsi; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP); Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

RKPD merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan, yang dalam hal ini target kinerja pembangunan pada RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 mengacu terhadap target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan APBD Tahun 2026. Untuk mensinkronkan antara kebutuhan dengan kapasitas keuangan daerah, perlu ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengukur keuangan daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap RKPD Kabupaten Minahasa 2026 sehingga dapat ditetapkan rancangan struktur keuangan daerah. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisa Standar Biaya

merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Ketepatan analisis standar biaya akan mempengaruhi dalam Penetapan proyeksi keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem untuk pengelolaan informasi tentang pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis elektronik. Proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah diwajibkan menggunakan SIPD.

Dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah dituangkan dalam struktur APBD Kabupaten Minahasa terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional akan mewarnai arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD maupun APBD Tahun 2026

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 dan juga merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 menetapkan

arah Kebijakan tahun 2026 adalah Peningkatan daya saing daerah, reformasi dan tata Kelola pemerintahan serta wawasan lingkungan berkelanjutan, dengan program prioritas: 1). Penguatan kapasitas SDM; 2). Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik; 3). Peningkatan kualitas pelayanan publik; 4). Mengoptimalkan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif; 5) Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan; 6). Pemberdayaan UKM/IKM; 7). Meningkatkan Investasi PMDN dan PMA; dan 8). Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Memperhatikan kebijakan tersebut, maka rumusan dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2026, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2025. Selain itu RKPD tahun 2025 harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa pada tahun tahun 2020 sebesar -1,02 persen (terkontraksi akibat pandemi Covid-19), tahun 2021 sebesar 3,96 persen, tahun 2022 sebesar 5,47 persen, tahun 2023 naik menjadi 5,55 persen, dan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa sebesar 5,49 persen sedikit menurun dibanding pertumbuhan tahun 2023. Pada tahun 2024 lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa lainnya yang pertumbuhannya sebesar 11,46 persen, kemudian Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,23 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan 8,12 persen.

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga di Provinsi Sulawesi Utara. Selama kurun waktu lima tahun 2021-2024 (pasca covid-19) rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa sebesar 5 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa berdasarkan PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar Rp 24.046,51,- milyar sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Rp 14.265,62,-milyar. Pada tahun 2024 sektor usaha yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB didominasi oleh lapangan usaha antara lain: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,67%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,81%; dan Konstruksi sebesar 12,05%.

Sementara realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2020 sebesar Rp 1,227,192,314,256.00 dan tahun 2021 naik menjadi Rp 1,252,881,034,299.89, kemudian pada tahun 2022 sedikit turun menjadi Rp 1.250.387.719.645,24; tahun 2023 pendapatan daerah naik menjadi Rp 1.264.520.671.363,34.- dan tahun 2024 naik menjadi Rp 1,332,891,813,900,-. Peningkatan Pendapatan Daerah tahun 2024 ini disebabkan oleh naiknya PAD dimana pada PAD dan dana transfer. Sementara PAD Kabupaten Minahasa tahun 2020 sebesar Rp 115,849,507,478, tahun 2021 menurun menjadi sebesar Rp 94.887.781.440,24; tahun 2022 turun lagi menjadi sebesar Rp 94,887,781,440,-, tahun 2023 naik menjadi Rp 107.035.294.000,34 dan PAD pada tahun pada tahun 2024 naik lagi menjadi sebesar Rp 115,045,834,371,-.

Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2024 dan prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2025. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa pada tahun 2025 diharapkan kembali meningkat dari tahun 2024 yakni sebesar 5,49 persen ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian daerah.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Minahasa Tahun 2026

No	Indikator	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.20 – 7.30
2.	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	80.00-80.50
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6.4 – 6.0
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6.36 – 6.01

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

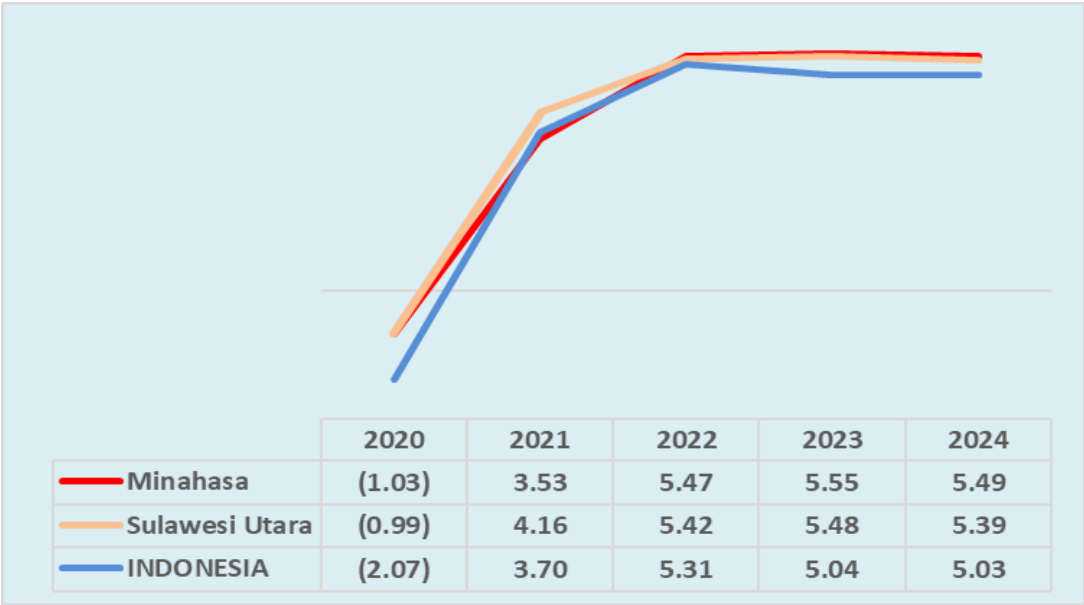
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dapat tumbuh sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk itu perlu upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pemerintah Daerah pada hakekatnya telah mengusahakan agar ekonomi Kabupaten Minahasa tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa nampak pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi
Kabupatem Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional**

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Minahasa	- 1,02	3,96	5,47	5,55	5,49
Provinsi Sulawesi Utara	- 0,99	4,16	5,42	5,48	5,39
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,04	5,03

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tahun 2020 sebesar -1,02 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 3,96 persen dan meningkat lagi tahun 2022 menjadi 5,47 persen dan tahun 2023 naik menjadi 5,55 persen, dan pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi sebesar 5,49 persen.

**Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Dan Indonesia
Tahun 2020-2024**



Pada gambar diatas nampak pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa secara umum masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa pada pada tahun 2020 dan tahun 2021 berada sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tahun 2020 sebesar -1,02 persen dan tahun 2021 sebesar 3,96 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada pada tahun 2020 sebesar -0,99 persen dan tahun 2021 sebesar 4,16 persen. Namun pada tahun 2022 dan 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara bahkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa tahun 2022 sebesar 5,47 persen dan tahun 2023 sebesar 5,55 persen. Tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi sebesar 5,48 persen dan Nasional sebesar 5,04 persen. Artinya bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa telah menjadi pendorong ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara bahkan secara nasional.

Disisi lain, apabila dilihat dari kontribusi sektoral terhadap perekonomian Minahasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuh belas sektor pembentuk PDRB terdapat 4 Lapangan usaha tumbuh positif tertinggi Jasa Lainnya, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Gambaran realisasi pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Minahasa 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2021 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Minahasa
Tahun 2020-2024

No.	Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2022	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.15	4.06	7.27	4,97	5,04
B	Pertambangan dan Penggalian	-1.76	3.76	0.97	4,24	3,16
C	Industri Pengolahan	1.63	6.03	7.46	8,17	4,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.07	8.14	12.37	5,45	5,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.35	3.13	0.17	0,16	2,51
F	Konstruksi	-6.05	3.25	4.67	6,05	3,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1.05	3.75	6.72	6,49	6,53
H	Transportasi dan Pergudangan	-13.05	3.95	11.55	8,58	5,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-20.04	13.63	9.86	11,26	7,16
J	Informasi dan Komunikasi	11.87	4.94	8.34	6,86	9,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.36	4.93	-4.83	1,56	4,20
L	Real Estate	-0.16	-0.07	1.84	4,01	6,14
M,N	Jasa Perusahaan	-4.87	3.94	5.28	10,06	5,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.15	3.25	2.49	2,37	8,12
P	Jasa Pendidikan	2.10	3.49	5.05	5,73	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.22	6.38	1.56	2,11	6,97
R,S, T,U	Jasa lainnya	-10.57	2.44	11.50	12,81	11,46
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1.02	3.96	5.47	5,55	5,49

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian pada suatu daerah. PDRB ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu periode tertentu. Perhitungan PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.Salah satu dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB Kabupaten Minahasa menunjukkan keseluruhan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi di

wilayah Kabupaten Minahasa selama kurun waktu tertentu. Guna melihat secara riil perkembangan PDRB, maka digunakan pendekatan tahun dasar atau atas dasar harga konstan (ADHK). Perkembangan dan PDRB Kabupaten Minahasa Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Minahasa Tahun 2020 - 2024

No.	Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)/ Dan Distribusi PDRB (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.951.067	3.070.974	3.295.028	3.458.761	3,633.06
		25.25	25.28	25.71	25,58	25.47
B	Pertambangan dan Penggalian	785.635	815.194	821.129	855.976	883.01
		6.72	6.71	6.42	6,33	6.19
C	Industri Pengolahan	933.847	990.114	1.062.385	1.149.139	1,198.10
		7.99	8.15	8.30	8,52	8.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.527	20.036	22.223	23.434	24.67
		0.16	0.16	0.18	0,17	0.17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.965	16.465	16.493	16.519	16.93
		0.14	0.14	0.13	0,12	0.12
F	Konstruksi	1.755.275	1.812.275	1.897.908	2.012.791	2,085.71
		15.02	14.92	14.80	14,88	14.45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.413.273	1.466.273	1.571.740	1.673.754	1,783.14
		12.09	12.07	12.21	12,40	12.50
H	Transportasi dan Pergudangan	559.778	581.878	649.065	704.733	740.76
		4.79	4.79	5.07	5,21	5.20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.018	112.518	123.609	137.524	147.37
		0.85	0.93	0.96	1,02	1.03
J	Informasi dan Komunikasi	301.628	316.528	342.925	366.433	400.24
		2.58	2.61	2.68	2,71	2.81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	303.008	317.947	297.601	302.249	314.93
		2.59	2.62	2.36	2,23	2.21
L	Real Estate	560.377	559.977	570.257	593.099	629.51
		4.80	4.61	4.45	4,39	4.41
M,N	Jasa Perusahaan	7.618	7.918	8.336	9.174	9.72
		0.07	0.07	0.07	0,07	0.07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	922.126	952.126	975.862	999.034	1,080.15
		7.89	7.84	7.62	7,39	7.57
P	Jasa Pendidikan	340.597	352.497	370.315	391.516	418.94
		2.91	2.90	2.89	2,90	2.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512.500	545.200	553.705	565.369	604.78
		4.39	4.49	4.32	4,18	4.24
R,S T,U	Jasa lainnya	205.125	210.125	234.289	264.298	294.60
		1.76	1.73	1.83	1,95	2.07
		11.685.361	12.148.044	12.812.868	13.523.803	14,265,620

	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian. Struktur ekonomi memperlihatkan kontribusi dari sektor dalam perekonomian menurut lapangan usaha. Sumbangan terbesar sektor perekonomian dianggap sebagai sektor penopang ekonomi daerah. Struktur ekonomi tergambar dalam struktur PDRB yang menunjukkan kemampuan output dari sumber daya ekonomi suatu daerah. Nilai PDRB yang kecil menggambarkan sumber daya ekonomi yang kecil, begitu pula sebaliknya nilai PDRB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar.

Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diidentikkan dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi di Kabupaten Minahasa ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Harga Konstan. PDRB harga konstan Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebesar Rp 14,265 triliun. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB harga konstan yaitu sebesar Rp 3,633.06 trilyun yang berkontribusi sebesar 25,47 persen, sektor Konstruksi menempati posisi kedua dengan nilai PDRB sebesar Rp 2,085.71 triliun yang berkontribusi sebesar 14,45 persen, sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar Rp 1,783.14 triliun dengan kontribusi sebesar 12,56 persen, dan sektor industri pengolahan dengan nilai Rp 1,198.10 triliun atau dengan kontribusi sebesar 8,40 persen.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB harga berlaku

menurut lapangan usaha Kabupaten Minahasa terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Minahasa Tahun 2020 - 2024

No.	Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)/ Dan Distribusi PDRB (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.725.076	5.023.866	5.471.901	5.867.933	6,413.90
		27,11	27,08	26,86	26,52	26.67
B	Pertambangan dan Penggalian	1.083.392	1.150.253	1.223.538	1.317.951	1,372.20
		6,22	6,18	6,01	5,96	5.71
C	Industri Pengolahan	1.251.641	1.369.580	1.532.963	1.695.008	1,844.94
		7,18	7,75	7,53	7,66	7.67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.271	22.919	26.239	28.372	30.96
		0,12	0,12	0,13	0,13	2.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.703	23.803	23.871	24.289	26.31
		0,13	0,13	0,12	0,11	0.11
F	Konstruksi	2.197.122	2.380.131	2.589.819	2.793.957	2,897.67
		12,61	12,73	12,71	12,63	12.05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.097.278	2.220.932	2.488.678	2.766.209	3,079.30
		12,03	11,95	12,22	12,50	12.81
H	Transportasi dan Pergudangan	981.959	1.061.761	1.293.470	1.523.976	1,652.79
		5,63	5,70	6,35	6,89	6.87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142.908	168.153	187.270	212.302	235.16
		0,82	0,90	0,92	0,96	0.98
J	Informasi dan Komunikasi	434.987	465.992	512.992	558.889	626.47
		2,50	2,50	2,52	2,53	2.61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	425.198	469.535	482.260	499.479	527.14
		2,44	2,52	2,37	2,26	2.19
L	Real Estate	717.067	729.052	747.904	797.992	883.61
		4,11	3,91	3,67	3,61	3.67
M,N	Jasa Perusahaan	12.509	13.312	14.834	16.984	18.53
		0,07	0,07	0,07	0,08	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.651.966	1.731.102	1.829.179	1.909.995	2,057.95
		9,48	9,29	8,98	8,63	8.56
P	Jasa Pendidikan	570.361	608.861	661.840	728.659	829.56
		3,27	3,27	3,25	3,29	3.45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	751.303	817.300	838.687	876.660	967.28
		4,31	4,38	4,12	3,96	3.45
R,S T,U	Jasa lainnya	340.386	386.590	443.659	509.332	582.73
		1,95	2,07	2,18	2,30	2.42
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.427.126	18.643.141	20.369.104	22.127.987	24,046.51
		100	100	100	100	100
	PDRB PERKAPITA	50.475.838,42	50.227.622,15	53.401.847,35	58.144.777,15	62.877.532,17

Pada tabel diatas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Minahasa berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada 2020 mencapai Rp 17.427.126 triliun dan hingga akhir tahun 2024 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 24,046.51 triliun. Dari sisi sektoral, perekonomian Kabupaten Minahasa didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Tiga kategori lapangan usaha pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kabupaten Minahasa adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Kontruksi. Sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan nilai nominalnya sebesar Rp 26.67 tiliun atau berkontribusi sebesar 26,67 persen, diurtan kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai nomonal sebesar 3,079.30 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 12.81 persen, kemudian lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,897.67 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 12,05 persen menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kabupaten Minahasa. Sementara PDRB perkapita tahun 2020 sebesar Rp 50,227,622.15 naik signifikan menjadi Rp 68,016,377.21 atau kenaikan sebesar 35 persen.

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. PDRB Pengeluaran ini merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024 nampak pada tabel berikut:

Tabel 3.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Minahasa Tahun 2020 – 2024

Pengeluaran PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	6,958,685	7,518,711	8,248,334	9.164.264	10,066.46
	40,14	40,28	40,74	41,41	41.86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	867,225	927,037	977,037	1.179.460	1,390.47
	4,97	4,97	4,89	5,33	5.78
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,440,187	1,464,767	1,426,018	1.577.914	1,719.45
	8,26	7,86	7,34	7,13	7.15
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	7,535,993	7,909,704	8,386,779	9.140.535	9,661.55
	43,23	42,43	41,26	41,31	40.18
Perubahan Inventori	0.15	0.16	0.17	0.19	0.23

Ekspor Barang dan Jasa	5,554,006	5,914,330	6,114,607	6.496.299	6,983.27
	31,68	31,77	29,28	29,36	29.04
Impor Barang dan Jasa	4,929,119	5,091,566	4,783,844	5.430.678	5,774.92
	28,28	27,31	23,53	24,54	24.02
PRODUK DOMESTIK BRUTO	17,427,126	18,643,140	20,369,103	22.127.987	24,046.51
	100	100	100	100	100

Pada Tahun 2024 sektor pengeluaran terbesar adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yang nilai nomonalnya sebesar Rp 10,066.46 triliun dengan kontribusi sebesar 41,86 persen, kemudian sektor pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dengan nimalnal sebesar Rp 9,661.55 triliun atas berkontribusi sebesar 40,18 persen dan sektor pengeluaran eksport barang dan jasa dengan nominal Rp 6,983.27 triliun atas berkontribusi sebesar 29,04 persen.

Tabel 3.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Minahasa Tahun 2020–2024

Pengeluaran PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5,009,395.21	5,273,200.21	5,610,710.21	5.971.404,23	6.297.090,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	519,836.00	542,946.00	561,432.00	640.584,13	702.970,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,319,707.00	1,361,822.00	1,338,880.00	1.388.469,68	1.477.240,00
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,280,284.12	4,413,000.12	4,635,873.12	4.770.272,54	5.006.240,00
Perubahan Inventori	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14
Ekspor Barang dan Jasa	4,002,495.00	4,065,791.77	4,092,552.89	4.429.226,73	4.458.270,00
Impor Barang dan Jasa	3,446,469.00	3,508,832.49	3,426,703.40	3.676.287,02	3.676.340,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO	11,685,361.40	12,148,043.73	12,812,867.96	13.523.802,56	14.265.620,00

Nilai PDRB ADHK Kabupaten Minahasa menurut pengeluaran selama tahun 2020-2024 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga dengan nilai nominalnya pada tahun 2024 sebesar 6.297.090,00 juta rupiah, sementara diurutan kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp 5.006.240,00 juta rupiah.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026

Perekonomian global pada Tahun 2025 dan 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berkisar antara 4 – 5 persen didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan kinerja ekspor. Namun, tantangan seperti perlambatan ekonomi global,

ketidakpastian geopolitik, dan fluktuasi pasar keuangan tetap menjadi perhatian. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan terarah akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Pertumbuhan global yang tidak merata, ketegangan perdagangan, dan risiko geopolitik menjadi tantangan utama yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Sementara tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi domestik.

Tantangan struktural seperti ketergantungan pada impor pangan dan ketimpangan ekonomi juga perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia dapat memicu volatilitas pasar keuangan dan mengganggu rantai pasokan global.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh positif, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Pemerintah akan melanjutkan kebijakan fiskal yang ekspansif dan terarah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Fokus pada reformasi struktural, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, akan menjadi kunci untuk pertumbuhan jangka panjang.

Peran Bank Sentral yakni Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi. Secara umum Tahun 2026 menawarkan prospek pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bagi Indonesia, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan global dan domestik. Kebijakan fiskal yang bijaksana, reformasi struktural, dan stabilitas moneter akan menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian Kabupaten Minahasa diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami sejumlah tantangan yang berpengaruh pada sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perekonomian global dan perekonomian nasional yang berpengaruh positif pada perekonomian daerah termasuk di Kabupaten Minahasa. Kebijakan pemerintah terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah dan PMTB. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Minahasa yaitu:

- a. Isu ketidakpastian global saat ini yang masih mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidakpastian ini dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina yang belum ada tanda-tanda selesai, perang di timur tengah termasuk perang Israel dan Iran.
- b. Kondisi nilai tukar rupiah yang relatif berfluktuatif pada awal tahun 2025 yang menyebabkan harga barang import khususnya barang modal merangkak naik berakibat pada harga barang dan jasa naik serta nilai utang yang membesar.
- c. Pada sektor pariwisata, industri, dan maritim, pengembangannya masih belum maksimal, pengembangan industri baik industri pengolahan maupun industri maritim serta pengembangan destinasi wisata masih harus terus ditingkatkan dengan menggandeng investor dan promosi.
- d. Pada sektor konsumsi, tantangan perekonomian daerah berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kenaikan harga komoditas pangan serta kenaikan indeks pengeluaran masyarakat. Sementara daya saing sektor produksi juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang terutama disebabkan oleh tingkat efisiensi faktor produksi dan rendahnya produktifitas.

Namun disisi lain prospek perekonomian di Kabupaten Minahasa masih memberikan optimisme dengan munculnya sektor-sektor ekonomi baru yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Maraknya industri pengolahan yang disokong tumbuhnya UMKM menjadi motor transformasi ekonomi termasuk mulai menggeliatnya sektor pariwisata. Inovasi pada sektor UMKM dan pariwisata terlihat semakin mampu berdaya saing untuk menjadi tuan rumah dalam tataran perekonomian lokal dan regional. Demikian pula kemajuan teknologi informasi mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Kabupaten Minahasa yang terutama disokong oleh maraknya kegiatan perdagangan virtual. Menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa semakin dirasakan berdampak ganda pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan munculnya usaha-usaha pariwisata di tingkat lokal. Sementara pemerintah pusat turut mendorong perputaran ekonomi daerah melalui kebijakan moneter yang semakin ekspansif menjadi pemicu meningkatnya perekonomian di Kabupaten Minahasa.

Merespon sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Minahasa Tahun 2026 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Minahasa tahun 2026 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB yakni sektor pertanian, sektor industri dan pariwisata juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2026, maka kondisi perekonomian Kabupaten Minahasa Tahun 2026 dapat diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tahun 2026 secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh sejumlah asumsi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi. Terjadinya pelambatan laju pertumbuhan sektor pertanian akibat faktor struktural seperti benih, pupuk, sarana produksi pertanian, perubahan pola iklim serta cuaca serta regulasi sub sektor perikanan yang menjadi kendala produksi perikanan tangkap. Namun demikian, melalui kebijakan merevitalisasi sektor pertanian, arus investasi dan belanja pemerintah yang berkeadilan, perluasan dan pemerataan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan izin usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan elestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna maka diharapkan perekonomian Kabupaten Minahasa akan tumbuh positif. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa

diproyeksikan pada Tahun 2025 sebesar 5-6 persen. Disisi lain tingkat inflasi sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, akan terkendali pada kisaran 3,0%-3,5% melalui upaya optimalisasi peran TPID dalam menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

- b. Penurunan angka kemiskinan dari 6.87 persen pada tahun 2023 menjadi 6.53 persen tahun 2024 di Kabupaten Minahasa dan penurunan ini sangat signifikan. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa dapat tercapai karena didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Kebijakan pengentasan kemiskinan diprioritaskan melalui; upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan pendataan, intervensi kegiatan, kemitraan, pendampingan dan regulasi kelembagaan; program rumah sederhana layak huni sebagai upaya mengurangi beban pengurangan dengan bantuan stimulant perbaikan rumah tidak layak huni; pemberian beasiswa anak berprestasi keluarga miskin dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
- c. Ada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 7.65 persen pada tahun 2023 menjadi 7.22 persen tahun 2024. Karenanya akan terus diupayakan untuk adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha, melalui metode training unit, bursa tenaga kerja, pengembangan wirausaha muda; dan peningkatan kompetensi (keahlian) tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi serta fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2026, maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Selain penyesuaian terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan

daerah pada tahun 2026 juga masih diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. Arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian, maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah daerah.

Pada struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan/Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa serta arah kebijakan Pemerintah tentang sinergitas APBN dan APBD .

Pertimbangan angka 1 dan 2 diatas maka Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana perimbangan/dana transfer;
3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui strategi:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi:

- **Intensifikasi:** Meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber PAD yang sudah ada, misalnya melalui peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- **Ekstensifikasi:** Memperluas basis pajak dan retribusi, misalnya dengan menambah jenis pajak dan retribusi baru, atau memperluas cakupan wilayah yang dikenakan pajak dan retribusi

2. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah:

- Mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan (seperti Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang optimal.
- Mengeksplorasi potensi pendapatan dari sumber daya alam yang ada di daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi.
- Penerapan e-Government dapat mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi, serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan

4. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada (SIMPATDA, SISMIOP/e-PBB).

Potensi pajak daerah akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengukur besarnya pendapatan pajak yang sebenarnya dapat dipungut dengan potensi sebenarnya yang belum tercapai. Pajak daerah dapat dilakukan terhadap objek pajak PBB sudah lama tidak

pernah berubah. Realitas antara Nilai Jual Objek Pajak dengan harga pasar sudah jauh kesenjangannya. Ini akan dikaji untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian akan dianalisis Pajak Kendaraan Bermotor antara jumlah kendaraan yang membayar pajak dengan realitas jumlah kendaraan yang sudah sangat berbeda. Demikian untuk objek pajak daerah lainnya akan diidentifikasi dan memanfaatkan pajak daerah potensi baru.

5. Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;
6. Penyederhanaan Proses Pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peningkatan kinerja keuangan BLUD yakni Rumah Sakut Daerah. Untuk meningkatkan pendapatan BLUD ini akan makin meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kuantitas kamar serta infrastruktur pelayanan lainnya termasuk peningkatan pelayanan Puskesmas.
8. Untuk mengoptimalkan PAD, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menerapkan strategi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi.

3.2.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Analisis kebijakan Keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset-aset daerah pada posisi yang sangat penting untuk menunjang penerimaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, pemerintah memiliki target pembangunan yang salah satunya berkaitan dengan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah dengan menerapkan reformasi fiskal. Strategi penguatan reformasi fiskal difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. APBD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 harus selaras dengan kebijakan APBN 2026 dimana *fokus APBN 2026 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan kemajuan antradaerah.*

Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif

fiskal. Peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Selain itu, dalam sasaran pembangunan Kabupaten Minahasa juga menetapkan prioritas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah, yakni:

- Meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD;
- Meralisasi belanja yang berkualitas;
- Melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien;

Berdasarkan beberapa poin tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa mengarahkan agar mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan akuntabel yang menunjang penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan level solvabilitasnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, pengalokasian anggaran serta pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat bermuara pada pengurangan pengangguran dengan menambah lapangan pekerjaan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM, memberi kepuasan layanan kepada masyarakat, pemenuhan SPM, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat kinerja UMKM, pembangunan kesetaraan gender, serta utamanya untuk penanganan, recovery pemulihan ekonomi khususnya bantuan untuk peternak babi, ayam dan lainnya untuk mengakselerasi produksi daging.

Kabupaten Minahasa sebagai daerah otonom berhak,

berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kewenangan untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa tahun 2025 di bidang keuangan daerah secara umum diarahkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka, dan bertanggung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan *money follow program priority* diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020-2024, dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Minahasa
Tahun 2019 – 2023

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALIASAI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	1,227,192,314,256	1,252,881,034,299	1.250.387.719.645	1.264.520.671.363,34	1,332,891,813,900.57
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95,615,427,961	94,336,838,565	94.887.781.440	107.035.294.000,34	115,045,834,371.72
Pendapatan Pajak Daerah	32,182,464,625	40,533,856,603	46.135.915.674	48.814.919.992,82	51,928,385,441.60
Pendapatan Retribusi Daerah	3,789,649,633	2,571,025,620	2.322.306.000	2.821.350.600,00	3,752,772,600.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,271,046,997	3,766,190,145	3.257.266.182	4.828.041.413,00	4,360,138,683.00
Lain-lain PAD yang Sah	56,372,266,706	47,465,766,197	43.172.293.583	50.570.981.994,52	55,004,537,647.12
PENDAPATAN TRANSFER	1,103,293,279,189	1,117,756,470,170	1.140.677.530.558	1.139.263.468.984,00	1,200,726,121,582.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28,283,607,106	40,787,725,564	14.822.407.647	18.221.908.379,00	17,119,857,946.85
BELANJA DAERAH	1,250.,817,378,785	1,251,476,918,127	1.320.280.411.402	1.254.911.730.914,00	1,305,633,393,511.78
BELANJA OPERASI	1.070.464.635.595	853,191,712,266	862.810.157.869	869.704.881.715,00	939,260,550,124.40

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

Belanja Pegawai	501,208,600,775	502,625,429,650	493.986.479.604	475.266.182.897,00	508,416,010,823.40
Belanja Barang dan Jasa	293.817.058.170	308,611,823,555	333.833.341.428	329.844.403.632,00	324,957,333,037.00
Belanja Bunga	-	808,010,971	3.672.686.902	9.866.174.181,00	7,064,049,830.00
Belanja Subsidi		-	-	-	-
Belanja Hibah	23,500,395,000	27,654,546,900	28.762.979.060	52.293.932.555,00	98,600,676,434.00
Belanja Bantuan Sosial	10,279,750,000	13,491,901,190	2.554.670.875	2.434.188.450,00	222,480,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	241,658,831,650	-	-	-	-
BELANJA MODAL	128,243,547,520	146,280,469,042	212.878.264.451	124.895.223.592,00	109,387,926,587.38
Belanja Modal Tanah	-	-	249.967.112	222.918.080,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,825,073,279	43,863,960,684	28.470.545.430	28.058.650.183,00	17,908,905,173.97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,575,936,516	65,667,434,735	66.826.229.436	76.568.647.360,00	54,482,851,530.41
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71,772,536,188	34,725,134,565	114.849.733.024	18.212.204.494,00	34,255,747,783.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,070,001,537	2,023,939,058	2.481.789.449	1.832.803.475,00	2,669,022,100.00
Belanja Modal Aset Lainnya		404,700,000			
BELANJA TIDAK TERDUGA	48,508,804,232	3,291,868,430	4.939.005.550	4.767.000.000,00	3,954,500,000.00
BELANJA TRANSFER	3,600,391,438	248,712,868,389	239.652.983.532	255.544.625.607,00	253,030,416,800.00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

SURPLUS / DEFISIT	-23,625,064,529	1,404,116,172	-69.892.691.757	9.608.940.449,34	27,258,420,388.79
PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)	65,894,360,941	78,563,486,129	204.330.120.966	110.340.261.074,90	47,879,526,259.24
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65,894,360,941	78,563,486,129	216.667.529.232	167.905.770.287,90	119,861,134,808.24
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	12.337.408.266	57.565.509.213,00	71,981,608,549.00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	42,269,296,412	79,967,602,302	134.437.429.208	119.949.201.524,24	75,137,946,648.03

Sumber : BPKAD Kabupaten Minahasa, data diolah

Adapun untuk tahun 2026 proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Minahasa Tahun 2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2026
4	PENDAPATAN	1,389,658,860,000.00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123,099,042,000.00
04.01.01	Pajak Daerah	53,981,594,400.00
04.01.02	Retribusi Daerah	4,752,772,600.00
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,360,138,000.00
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	59,004,537,000.00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1,248,755,166,000.00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	1,158,022,166,000.00
04.02.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	90,733,000,000.00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,804,652,000.00
04.03.01	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00
04.03.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	12,804,652,000.00
5	BELANJA	1,363,205,514,000.00
05.01	BELANJA OPERASI	986,223,577,000.00
05.01.01	Belanja Pegawai	548,089,291,000.00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	332,247,079,736.00
05.01.03	Belanja Bunga	7,064,049,830.00
05.01.05	Belanja Hibah	98,600,676,434.00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	222,480,000.00
05.02	BELANJA MODAL	114,857,322,000.00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,970,000,000.00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,482,851,000.00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35,500,000,000.00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,769,022,000.00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	135,449,000.00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	4,033,590,000.00

05.03.01	Belanja Tak Terduga	4,033,590,000.00
05.04	BELANJA TRANSFER	258,091,025,000.00
	Belanja Bagi Hasil	238,000,000,000.00
	Belanja Bantuan Keuangan	20,091,025,000.00
	SURPLUS / DEFISIT	26,453,346,000.00
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31,112,163,000.00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31,112,163,000.00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57,565,509,000.00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo(Hutang daerah)	57,565,509,000.00
PEMBIAYAAN NETTO		(26,453,346,000.00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		-
Total APBD		2,752,864,374,000

Berikut Program dan Kegiatan terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(dalam RKPD Tahun 2026 yang akan menunjang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung arah kebijakan keuangan daerah.

Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Keg :

1. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
3. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
4. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
5. Penilaian pbb-p2 dan BPHTB
6. Penetapan pajak daerah
7. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
8. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
9. Penagihan pajak daerah
10. Penyelesaian keberatan pajak daerah
11. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
12. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi

yang ada di Kabupaten Minahasa dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap semua jenis pajak.
2. Memanfaatkan transformasi digital dlm pengelolaan pajak daerah
3. Memperkuat sinergi antar OPD dalam tanggung jawab pengelolaan PAD
4. Memperkuat SDM Petugas pajak melalui diklat/ Pelatihan, menambah petugas pajak atau menghadirkan ASN yg telah mengikuti Diklat/ pelatihan perpajakan
5. Penerapan/ pemberlakuan sanksi berdasarkan aturan yg berlaku
6. Dukungan anggaran.

Memaksimalkan regulasi regulasi dlm meningkatkan pendapatan asli daerah :

1. Adanya sosialisasi yg berkelanjutan terkait aturan yg ada dlm proses pemungutan pajak daerah
2. Adanya Basis Data Pajak yg kuat dan akurat dengan memanfaatkan ketersediaan Aplikasi pajak
3. Meningkatkan pengawasan yg ketat baik internal maupun eksternal dlm pengelolaan pajak

Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2026 yaitu Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 Sebesar Rp. 1,420,771,023,000.00 terdiri dari Pendapatan sebesar Rp. 1,389,658,860,000.00, dan Penerimaan Pembiayaan Rp 31,112,163,000. Belanja Sebesar Rp. 1,363,205,514,000.00, sehingga Surplus/ Defisit Sebesar Rp. 26,453,346,000.00. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 31,112,163,000 dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembayaran Cicilan Pokok Utang) sebesar Rp. 57,565,509,000.00 didapat pembiayaan netto sebesar - Rp 26,453,346,000.00, Sehingga SILPA pembiayaan tahun berjalan sebesar nihil sebagaimana tercantum pada tabel diatas.

Berikut adalah proyeksi Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah kabupaten Minahasa Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2026

NO	URAIAN	Kapasitas Riil 2026
		(Rp)
A	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	1,420,771,023,000.00
1.	Pendapatan	1,389,658,860,000.00
2.	Penerimaan Pembiayaan (SILPA)	31,112,163,000.00
B	Belanja	1,363,205,514,000.00
C	Pengeluaran Pembiayaan (Pembayaran Cicilan Pokok Utang)	57,565,509,000.00
	Surplus/(defisit) =	26,453,346,000.00
	SILPA	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2026 berpedoman pada Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, juga mengacu pada RKP tahun 2026 dengan Tema : **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif serta Inklusif”** serta Tema Provinsi Sulawesi Utara : **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung oleh Regulasi dan Inovasi”**.

Demi terwujudnya keselarasan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara, maka ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Minahasa tahun 2026 adalah **“Penguatan landasan infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan sumber daya berbasis inovasi dan penyelarasan regulasi”**.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Minahasa dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian dengan dokumen perencanaan baik nasional maupun Provinsi Sulawesi Utara, urgensi penanganan isu strategis, prioritas program-program pembangunan, serta Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2025-2029.

Visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan **“Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera”**. Visi Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 yaitu **“Minahasa sebagai Daerah Pariwisata Integratif yang Maju dan Berkelanjutan”**.

Adapun maksud Visi RPJMD tahun 2025-2029 dijelaskan sebagaimana berikut:

PARIWISATA: Minahasa kawasan pariwisata rumah bagi ragam pariwisata alam, termasuk pantai, danau, kawasan lindung dan wisata buatan, serta budaya.

MAJU: Mewujudkan Minahasa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi di segala bidang dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

SEJAHTERA: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang aman dan makmur serta mampu mengelola pariwisata untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Sebagai landasan implementasi RKPD tahun 2026 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang pada RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045 serta penyelarasan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 yang berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045. Dimana Visi Ranwal RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 adalah **“MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”** yaitu, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh.**
- 3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima.**

Upaya untuk pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Minahasa, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dilihat dalam tabel di bawah sebagai berikut.

Strategi Minahasa pada RKPD 2026 mengikuti Rancangan RPJMD 2025-2029 mengacu pada rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan, Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Minahasa 2026 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA				
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MINAHASA YANG SEHAT, CERDAS, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING				
Tujuan 1.1	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia		
	Sasaran 1.1.1	Indeks Pendidikan ; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah	Memantapkan landasan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh rakyat Minahasa, terutama pendidikan karakter yang berwawasan kebangsaan, juga berupaya meningkatkan produktifitas pemuda dan olah raga
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			
	Sasaran 1.1.2	Angka Harapan Hidup	Memantapkan	Peningkatan kualitas pelayanan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Derajat Kesehatan Masyarakat	kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan
	Sasaran 1.1.3			
	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Pendapatan per Kapita ; Indeks Pembangunan Gender ; Angka Kemiskinan ; Tingkat Pengangguran	Memantapkan dan Meningkatkan Keterjangkauan Jaminan Sosial	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat, peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup termasuk pemenuhan hak-hak anak ; Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal ; juga Meningkatkan peluang kerja usia produktif dan perluasan lapangan usaha di daerah, dan Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh berbasis database kemiskinan yang valid
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI YANG TANGGUH				

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi ; Rasio Gini		
	Sasaran 2.1.1	PDRB, Indeks Daya Saing Daerah	Memantapkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringanan pajak bagi investor, dalam mencapai Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan industri, Koperasi dan UMKM, dan iklim investasi ramah lingkungan
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah			
	Sasaran 2.1.2	PDRB Sektor Pariwisata	Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata dalam Upaya Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	Memperkuat daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperpanjang lama tinggal (<i>length of stay</i>) dan belanja wisatawan (<i>tourist expenditure</i>)
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata			

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 2.1.3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur melalui pemantauan infrastruktur secara berkala, serta penanganan pemeliharaan yang responsive
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur			
	Sasaran 2.1.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem, penguatan tata kelola dan penegakan hukum, partisipasi publik dan Edukasi lingkungan, juga membangun pengelolaan persampahan yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis ekonomi sirkular
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
MISI 3 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL BERBASIS DIGITALISASI DAN INOVATIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA				
Tujuan 3.1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 3.1.1	Indeks Pencegahan Korupsi	Menguatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalistas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pangaduan
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan			
	Sasaran 3.1.2	Indeks Pelayanan Publik	Memastikan dasar Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Secara umum prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa sebagai berikut.

4.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2026

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan Negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah
17. Pelestarian seni budaya, Peningkatan ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Adapun 17 Program Unggulan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;
2. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi;
3. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan

Jaring Pengaman Sosial;

4. Penguatan Jaringan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase;
5. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing;
6. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
7. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;
8. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima;
9. Pengembangan Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan *MICE*;
10. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan OPD, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;
11. Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta Narkoba;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan;
13. Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan Sumberdaya Energi Terbarukan;
14. Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial;
15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan *Logistics Hub* sebagai *supporting unit* untuk IKN
17. Pembinaan Pertambangan Rakyat.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2026

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Minahasa dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Program Unggulan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN
Meningkatkan Kualitas SDM		1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatkan Kapasitas Modal Sosial	1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas; 2. Melanjutkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan daerah 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah 5. Meberdayakan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah		4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 5. Mengembangkan Potensi Daerah sebagai Destinasi Pariwisata 6. Melakukan Pemerataan Pembangunan Antarwilayah yang Berkelanjutan	6. Mengarusutamakan pariwisata dengan merehabilitas dan mengembangkan semua destinsi wisata, khususnya Danau Tondano sebagai Objek Vital dan Strategis (RD-VS); 7. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa 8. Meningkatkan investasi, secara khusus di sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja melalui pemberdayaan ekowisata, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri; 9. Memelihara daya dukung pariwisata melalui pengelolaan lingkungan hidup termasuk penanganan limbah yang baik 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pariwisata serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana 11. Mengembangkan Rencana Aksi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Sumber Daya Energi Baru
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah		
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		

			Terbarukan
Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		7. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel 8. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Yang Transparan, Cepat, Dan Mudah	12. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif; 13. Mendorong pelayanan publik yang prima 14. Melanjutkan bantuan pembangunan rumah ibadah, insentif bagi rohaniawan dan bantuan dana duka; 15. Mempercepat transformasi digital yang inklusif 16. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan 17. Mencegah dan memberantas KKN serta Narkoba
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		

Permasalahan Pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah sebagai Berikut:

- Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas;
- Melanjutkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan daerah
- Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting
- Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah
- Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas
- Mengarusutamakan pariwisata dengan merehabilitas dan mengembangkan semua destinsi wisata, khususnya Danau Tondano sebagai Objek Vital dan Strategis (RD-VS);
- Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa
- Meningkatkan investasi, secara khusus di sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja melalui pemberdayaan ekowisata, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri;
- Memelihara daya dukung pariwisata melalui pengelolaan lingkungan hidup termasuk penanganan limbah yang baik
- Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pariwisata serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana
- Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif
- Mendorong pelayanan publik yang prima

- 13 Melanjutkan bantuan pembangunan rumah ibadah, insentif bagi rohaniawan dan bantuan dana duka;
- 14 Mempercepat transformasi digital yang inklusif
- 15 Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan
- 46 Belum memadainya ketersediaan infrastruktur termasuk infrastruktur pelayanan dasar;
- 47 Pembangunan yang tidak sesuai Tata Ruang;
- 48 Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;
- 49 Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS);
- 50 makin menurun penggunaan kendaraan umum;
- 51 Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor;
- 52 Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik;
- 53 Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi;
- 54 perencanaan di SKPD kurang maksimal sehingga berpengaruh pada perencanaan di Tingkat Badan Perencanaan.

Adapun Rumusan Isu Strategis Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi pelayanan untuk pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
2. Penguatan pendidikan menggunakan teknologi informasi dan pemerataan kesempatan pendidikan terjangkau.
3. Penguatan ketahanan sosial
4. Penguatan jaminan sosial terintegrasi
5. Penguatan digitalisasi disegala bidang menopang data terintegrasi.
6. Penguatan IDM dan lembaga desa
7. Penguatan kualitas, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja
8. Pengarusutamaan industri pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, peningkatan SDM pariwisata, dan investasi berkelanjutan.
9. Penguatan pertanian, perikanan dan industri pengolahan.
10. Peningkatan jaringan irigasi dan drainase.
11. Peningkatan pengelolaan penataan ruang daerah.
12. Pemberdayaan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif
13. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang layak serta aman.
14. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan permukiman sehat.
15. Penataan kawasan kumuh
16. Peningkatan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman
17. Penguatan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan
18. Penguatan data based kependudukan dan kepegawaian
19. Peningkatan kualitas pelayanan publik
20. Penguatan lembaga penanganan masalah perempuan dan anak
21. Penguatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
22. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik

- internal maupun eksternal
- 23. Regulasi yang fleksibel, produktif dan adaptif
 - 24. Penguatan penetapan perda inisiatif
 - 25. Penguatan sistem informasi keluarga dan institusi masyarakat di desa
 - 26. Penguatan produktivitas kepemudaan dan daya saing keolahragaan
 - 27. Optimalisasi pengelolaan kebudayaan dan kearifan lokal.
 - 28. Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat
 - 29. Penguatan fasilitas kebencanaan dan peran non pemerintah mengantisipasi kebencanaan.
 - 30. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 31. Ketahanan energi air, pangan dan energi terbarukan

Dengan mendasarkan permasalahan yang ada dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026, juga dengan memperhatikan isu strategis pembangunan Kabupaten Minahasa serta mempertimbangkan tahapan dan capaian target pembangunan RPJMD tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun 2024 maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 yaitu **“Penguatan landasan infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan sumber daya berbasis inovasi dan penyelarasan regulasi”** maka Prioritas RKPD Kabupaten Minahasa tahun 2026 sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- 3 Meningkatkan Kapasitas Modal Sosial
- 4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- 5 Mengembangkan Potensi Daerah sebagai Destinasi Pariwisata
- 6 Melakukan Pemerataan Pembangunan Antarwilayah yang Berkelanjutan
- 7 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel
- 8 Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Yang Transparan, Cepat, Dan Mudah

Berikut disajikan persandingan prioritas Kabupaten Minahasa dengan prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dengan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Persandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Tahun 2026

MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
1. Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing	PPN 5. Pemberantasan kemiskinan	PP 1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatkan Kapasitas Modal Sosial
	PPN 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	PP 2. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi	
	PPN 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi	PP 3. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial	
	PPN 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	PPP 15. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	PPN 17. Pelestarian seni budaya, Peningkatan ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga	PP 14. Pembinaan olah raga, Pemuda dan generasi Milenial	
MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk	PPN 1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air	PPP 15. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 5. Mengembangkan Potensi Daerah sebagai Destinasi
	PPN 12. Menjamin ketersediaan	PPP 5. Peningkatan Agro-Produksi,	

MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
mewujudkan Ekonomi yang Tangguh	pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	Agro-Industri, dan Agro-Marketing;	Pariwisata 6. Melakukan Pemerataan Pembangunan Antarwilayah yang Berkelanjutan
	PPN 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota- kota inovatif- karakteristik- mandiri lainnya	PPP 7. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;	
	PPN 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	PPP 16. Peningkatan kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan Logistik Hub sebagai supporting untuk IKN	
	PPN 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup	PPP 17. Pembinaan pertambangan rakyat	
		PPP 9. Pengembangan Pariwisata Cerdas / <i>Smart Tourism</i>) Berkbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Keraifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan MICE	
MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	PPN 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara	PPP 8. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima;	7. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang

MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima	PPN 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi	PPP 10. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;	Akuntabel 8. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Yang Transparan, Cepat, Dan Muda
	PPN 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	PPP 11. Pencegahan dan Pemberantasan KKN sela Narkoba;	
	PPN 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba		
	PPN 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif PPN 16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah		

Target sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 mendukung pencapaian sasaran RKP Tahun 2026. Persandingan dukungan RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 dengan target makro pembangunan nasional dalam RKP 2026, dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Persandingan Target Makro Pembangunan
Provinsi Tahun 2026 dengan Target Makro RKPD
Kabupaten Minahasa 2026

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target Prov Sulawesi Utara Tahun 2026	Target Minahasa Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.49	6,05-7,05	6,20 - 7,30
2	Tingkat Kemiskinan	6.53	5,82-5,420	6,36-6,01
3	Indeks Gini	0.341	0.345	0,28 - 0,32
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.22	4.86-5.53	6.40 – 6.00
5	IPM	79.26	IMM 0.53	80,00 - 80,50
6	PDRB per Kapita	68.02	70,90-71,43	76.35
7	IKLH	66.16		67,50
8	-Kontribusi PDRB Provinsi		0.8	

Selengkapnya rencana Program Unggulan, Kegiatan Prioritas serta Perangkat daerah penanggung jawab pelaksana kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Program Unggulan, Kegiatan Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2026

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
1	Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas;	1	Peningkatan Status 13 Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap ; dan Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang jauh dari pusat pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
		2	Pemenuhan Sarana, Prasarana, Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dr. Sam Ratulangi ; termasuk Tenaga Medis Puskesmas	RSUD Dr. Sam Ratulangi ; Dinas Kesehatan
		3	Bantuan Pendidikan bagi Siswa kurang mampu yang berprestasi	Dinas Pendidikan ; Dinas Sosial
		4	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas	Dinas Pendidikan ; BKPSDM
		5	Penyiapan Fasilitas Internet Gratis di setiap Ibukota Kecamatan	Diskominfo
2	Melanjutkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan daerah	6	Pemberian Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi masyarakat kurang mampu dan Pekerja Rentan (Pembantu Rumah Tangga, Tukang Ojek, dll)	Dinkes ; RSUD ; Dinsos Disnaker
3	Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	7	Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, dan Menambah jumlah kegiatan Padat Karya	Disnaker ; OPD yang terkait ; DPMD
		8	Intensifikasi Pelayanan Prenatal Care di Posyandu ; dan Pemberian makanan bergizi pada Ibu Hamil dan Balita, termasuk keluarga miskin	Dinkes / Puskesmas / Dinas Pangan / DPPKB / DPMD (DD)
4	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	9	Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event event budaya dan kesenian daerah ; serta mewajibkan budaya daerah sebagai muatan lokal utk kegiatan ekstra kurikuler	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata / Dinas Pendidikan / Dinas Kepemudaan OR
5	Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	10	Pelatihan ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan Peralatan bagi perempuan dan Pemuda	Dinas Koperasi / Tenaga Kerja / DPPP / Dinas Kepemudaan OR / Dinsos
		11	Pelaksanaan event-event Olah Raga	Dinas Kepemudaan OR / Dinas Pendidikan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		12	Sosialisasi Hak-Hak Anak dan Sanksi Hukum atas kekerasan terhadap anak.	Dinas P3A / Setda (Bagian Hukum)

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
		13	Pemberian Bantuan bagi Kaum Disabilitas dan Lansia	Dinas Sosial
6	Rehabilitasi Danau Tondano sebagai objek Vital dan Strategis (RD-VS) melalui pengembangan kawasan danau Tondano sebagai destinasi wisata unggulan; dan Pengembangan Kawasan Pariwisata lainnya	14	Pembentukan Task Force Penyelamatan Danau mencakup wilayah Hulu, Tengah dan Hilir	Dinas Lingkungan Hidup / BPDAS / Setda (Bagian SDA)
		15	Pembangunan/perbaikan Jalan dan Drainase Ringroad (<i>Detention Canal</i>) dan <i>pathway</i>	Dinas PUPR / BPJN
		16	Pembangunan Infrastruktur <i>Retention Pond</i> dan <i>Detention Basin</i> , Pembuatan Tanggul Banjir dengan <i>Regulator Gate</i> dan Bangunan Pengendali Sedimen dan Pemasangan Trash Trap di mulut inlet sungai masuk ke Danau	DLH / Dinas PUPR / BWS
		17	Pengadaan Mesin Penyapu Eceng Gondok, dan Pembuatan Water Quality Control dan Instalasi Pembersihan Danau dan Pengelolaan Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup/PUPR/BWS / BPDAS
		18	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait untuk rehabilitasi dan pengembangan kawasan wisata Danau Tondano	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata / Dinas Lingkungan Hidup /Dinas PUPR / Dinas Perhubungan / Setda /BWS / BPPW
		19	Pembuatan Septic tank Komunal/ individual (SPALD) juga MCK Plus, dan SPAM di beberapa daerah sekitar danau.	Dinas PUPR / BPPW
		20	Pengendalian Eceng Gondok dan Gulma air lainnya secara padat karya dan juga pengangkatan secara mekanik (menggunakan eskavator).	Dinas Lingkungan Hidup / BWS / BPPW
7	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa	21	Pemberian bantuan alsintan, benih/bibit, pupuk bagi petani dan alat tangkap ikan, bibit ikan bagi nelayan	Dinas Perdagangan / Dinas Pertanian / Dinas Kelautan dan Perikanan
		22	Pengelolaan Stok dan Ketersediaan Produksi Komoditas	Dinas Perdagangan / Dinas Pertanian / Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
		23	Pemanfaatan Lahan Tidur untuk menjaga Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian / Dinas Pangan
8	Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	24	Pembangunan Pasar Desa sebagai akses produk-produk UKM Desa	Dinas Perdagangan
		25	Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan pengembangan usaha UMKM, dan Pelatihan pengolahan bahan baku menjadi produk turunan (<i>By Product</i>)	Dinas Koperasi / Dinas Pertanian / Dinas PMD / Dinas Perikanan dan Kelautan / Dinas Pangan / Dinas Tenaga Kerja
		26	Fasilitasi pembiayaan untuk UMKM dengan Program KUR (Perbankan) dan Ultra Mikro (Lembaga Keuangan Bukan Bank)	Dinas Koperasi ; Dinas Perdagangan ; BPKAD
9	Pengelolaan lingkungan hidup termasuk penanganan limbah yang baik	27	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT dan Pengoperasiannya	Dinas PUPR/ DLH / BPPW
		28	Pembangunan TPS3R (TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH <i>REUSE-REDUCE-RECYCLE</i>) di 22 Kecamatan	Dinas PUPR / Dinas LH / Kecamatan
		29	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai pedoman penyelenggaraan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
10	Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	30	Peningkatan konektivitas dan Perbaikan Ruas Jalan yang Rusak Ringan/Berat sepanjang 308 Km tersebar di 25 Kecamatan	Dinas PUPR / Dinas Perhubungan
		31	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di seluruh Kecamatan	Dinas PUPR
		32	Melengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman menjadi Kawasan Layak Huni, dan Pembangunan	Dinas Perkim / DPMD (DD)

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
			dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, termasuk Pembangunan MCK Individual bagi keluarga tidak mampu	
		33	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa ; dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pineleng, Tombulu, Mandolang, Pesisir Pantai Timur dan Langowan	Dinas PUPR
		34	Pengadaan 3 Unit Mobil Pemadam Kebakaran	Dinas Damkar
11	Mengembangkan Rencana Aksi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Sumber Daya Energi Baru Terbarukan	35	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ; Adaptasi Perubahan Iklim ; dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Dinas Lingkungan Hidup ; Dinas Perdagangan
12	Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif;	36	Penyusunan Rencana Aksi OPD, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa	Inspektorat / Setda (Bagian Ortal) / Seluruh OPD
		37	Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengaplikasian Basis Data Digital yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia	Diskominfo / BAPPELITBANGDA / BPS / Seluruh OPD
		38	Penyusunan dan implementasi inovasi Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah maupun ASN	BAPPELITBANGDA / Setda (Bagian Ortal) / Seluruh OPD
		39	Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Perangkat Daerah ; dan Pelaksanaan Diklat/Bimtek Fungsional bagi ASN	BKPSDM / Seluruh OPD
13	Mendorong pelayanan publik yang prima	40	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik ; dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis layanan	OPD Pelayanan Publik

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
			publik, dan Pemberian Reward dan Punishment Perangkat Daerah Pelayanan Publik	
14	Mencegah dan memberantas KKN	41	Penguatan Pelaksanaan MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention) ; dan Penguatan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)	Inspektorat / OPD yang terkait
15	Peningkatan Ketahanan Sosial dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan;	42	Pemberian Bantuan bagi Rumah Ibadah dan Insentif bagi Rohaniawan, termasuk Pemberian Bantuan Dana Duka bagi Keluarga Tidak Mampu	Badan Kesbang / Setda (Bagian Kesra) / BPKAD
16	Mempercepat transformasi digital yang inklusif	43	Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Minahasa ; dan Penyiapan Arsitektur SPBE	Diskominfo / Seluruh OPD
17	Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	44	Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan di Desa/Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memantau keamanan dan ketertiban masyarakat	Seluruh Kecamatan / Satpol PP
		45	Mengintensifkan koordinasi Forkopimda dan FKUB	Badan Kesbang / Setda (Bagian Kesra)

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas Tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Minahasa dibahas dalam bagian ini.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2026 disusun dalam rangka pencapaian target rencana program kegiatan prioritas daerah Tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

- 1 Dinas Pendidikan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- 4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- 5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 6 Satuan Polisi Pamong Praja
- 7 Dinas Pemadam Kebakaran
- 8 Dinas Sosial
- 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 10 Dinas Tenaga Kerja
- 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- 12 Dinas Pangan
- 13 Dinas Lingkungan Hidup
- 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 16 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 17 Dinas Perhubungan
- 18 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 22 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 23 Dinas Perpustakaan

- 24 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 25 Dinas Pertanian
- 26 Dinas Perdagangan
- 27 Sekretariat Daerah
- 28 Sekretariat DPRD
- 29 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 31 Badan Pendapatan Daerah
- 32 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 33 Inspektorat
- 34 Kecamatan Tondano Barat
- 35 Kecamatan Tondano Timur
- 36 Kecamatan Tondano Utara
- 37 Kecamatan Tondano Selatan
- 38 Kecamatan Eris
- 39 Kecamatan Remboken
- 40 Kecamatan Kombi
- 41 Kecamatan Lembean Timur
- 42 Kecamatan Kakas
- 43 Kecamatan Kakas Barat
- 44 Kecamatan Pineleng
- 45 Kecamatan Mandolang
- 46 Kecamatan Tombulu
- 47 Kecamatan Tombariri
- 48 Kecamatan Tombariri Timur
- 49 Kecamatan Sonder
- 50 Kecamatan Kawangkoan
- 51 Kecamatan Kawangkoan Utara
- 52 Kecamatan Kawangkoan Barat
- 53 Kecamatan Tompaso
- 54 Kecamatan Tompaso Barat
- 55 Kecamatan Langowan Timur
- 56 Kecamatan Langowan Barat
- 57 Kecamatan Langowan Selatan
- 58 Kecamatan Langowan Utara
- 59 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Bab ini akan menyajikan indikasi rencana program Tahun 2026 dan pagu indikatifnya berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2026, yang mempertimbangkan prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna mendukung pembangunan secara menyeluruh.

Penyajian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra dan Renja wajib disajikan dalam Sistem SIPD.

Kemampuan Keuangan Daerah merupakan tolak ukur penentuan Pagu pada Program dan Kegiatan di RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026, dengan demikian bisa terjadi perbedaan dengan Padu di Dokumen RPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 antara lain disebabkan oleh Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023) yaitu:

- a. Dukungan penggajian PPPK Daerah;
- b. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. Dukungan bidang pendidikan;
- d. Dukungan bidang kesehatan; dan
- e. Dukungan bidang pekerjaan umum.

Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026 terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 diuraikan pada Tabel 5.1

TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Ruang	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					0 Orang	592.250.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			592.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					90 Orang	387.665.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			387.665.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					15 Dokumen	125.350.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			125.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
							-																	
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
							[Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah]	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	0 87	0 80	0 80	0 85	71.005.143.733,00										76.164.857.195,00	
							Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)																	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					80 Ruang	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

[illegible]

[illegible]

						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	0	0	0	0	71.005.143.733,00								76.164.857.195,00	
						Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)															
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					10 Ruang	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Ruang	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	0	0	0	0	71.005.143.733,00								76.164.857.195,00	
						Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		87	80	80	85										
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0 Orang	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0040	Peneembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					50 Orang	149.830.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			149.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					5 Ruang	430.322.310,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			430.322.310,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					0 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga- Peserta Didik PAUD																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia					20 Paket	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					0 Satuan Pendidikan	510.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Ruang	285.228.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Peserta Didik			285.228.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0	0	0	0	59.428.169.867,00							68.015.774.723,00	
						Angka Kematian Ibu (AKI)	100	100	100	10									
						Penemuan Kasus TBC	11.4	11.4	11.4	100									
						Penemuan Kasus TBC	1.4	123	123	109									
						Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	15.20	1.4	1.4	11.4									
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	23.4	15	15-0	1.4									
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai kesehatan	30	19.40	19.40	19									
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	40	23.4	23.4	20									
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai kesehatan	5-0	48.60	50	23.4									
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	60.6	57.6	57.6	57.8									
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	70	61.26	61.26	60									
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	85.50	80	80	65.30									
						Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	90	81	81	70									
						Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	94	8.3	8.3	85									
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.141.110.575,00			-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	31.906.471.095,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					333 Orang	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					333 Orang	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					333 Orang	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										333 Orang	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										333 Orang	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										333 Orang	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut										333 Orang	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										34250 Orang	337.015.800,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										6200 Orang	100.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										525 Orang	100.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										6500 Orang	100.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										2550 Orang	100.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)										1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					2350 Orang	418.193.800,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	-				40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-				-	620.639.641,00				-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		-		250.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	225.000.000,00				-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		-		225.000.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																			
													25.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-				25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						1 Unit	200.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-				200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN [Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan]																			
						Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100	100	100	100	674.500.000,00													1.256.000.000,00	
						Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	50	26	26	50															
						Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	90	34.78	40	96															
						Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi		92	96																
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					0,00													145.000.000,00	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					0,00			Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-				25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-				120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																			
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
											25.000.000,00			Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					529.500.000,00						-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		-		865.000.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					100 Orang	529.500.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-				865.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	-	531.703.000,00								-			544.675.450,00			
						[Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]																			
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-	259.449.000,00								2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		272.421.450,00		
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen			259.449.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB- PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-					2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		272.421.450,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang					272.254.000,00												272.254.000,00		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin					272.254.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB- PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-					2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		272.254.000,00	DINAS KESEHATAN	
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	604.258.000,00										-		341.758.000,00		
						[Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diperdayakan	35		11.54	13	15	604.258.000,00									-		341.758.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	291.758.000,00								2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		291.758.000,00		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																			
											291.758.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-					2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		291.758.000,00	DINAS KESEHATAN	
	X					NON URUSAN					25.000.000,00												438.746.500,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					25.000.000,00												438.746.500,00		
11	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	25.000.000,00										-		438.746.500,00		
						-																			
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	25.000.000,00								2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		438.746.500,00		
	X	XX	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			25.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		438.746.500,00	DINAS KESEHATAN	
						Puskesmas Walantakan					3.475.310.000,00												1.149.977.116,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.475.310.000,00												1.149.977.116,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.475.310.000,00												1.149.977.116,00		
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	3.475.310.000,00										-		1.149.977.116,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	3.475.310.000,00								2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		1.149.977.116,00		
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen			2.963.096.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-					2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		637.763.116,00	PUSKESMAS WALANTAKAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen			512.214.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-					2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-		512.214.000,00	PUSKESMAS WALANTAKAN	
						Puskesmas Pineleng					2.256.586.000,00												2.256.586.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.256.586.000,00												2.256.586.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.256.586.000,00												2.256.586.000,00		

13	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-						-	2.256.586.000,00						-	2.256.586.000,00			
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	2.256.586.000,00				2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		-	2.256.586.000,00		
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen		1.141.936.000,00	Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		1.141.936.000,00	PUSKESMAS PINELENG	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen		1.114.650.000,00	Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		1.114.650.000,00	PUSKESMAS PINELENG	
						Puskesmas Sonder							1.922.967.000,00								1.922.967.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.922.967.000,00								1.922.967.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.922.967.000,00								1.922.967.000,00		
14	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.922.967.000,00						-		1.922.967.000,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.922.967.000,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		-	1.922.967.000,00	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen		1.141.936.000,00	Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		1.141.936.000,00	PUSKESMAS SONDER	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen		781.031.000,00	Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		781.031.000,00	PUSKESMAS SONDER	
						Puskesmas Tonsea Lama							1.356.907.152,00								1.356.907.152,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.356.907.152,00								1.356.907.152,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.356.907.152,00								1.356.907.152,00		
15	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.356.907.152,00						-		1.356.907.152,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.356.907.152,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		-	1.356.907.152,00	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen		846.503.652,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		846.503.652,00	PUSKESMAS TONSEA LAMA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen		510.403.500,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		510.403.500,00	PUSKESMAS TONSEA LAMA	
						Puskesmas Tandengan							1.320.725.347,00								1.320.725.347,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.320.725.347,00								1.320.725.347,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.320.725.347,00								1.320.725.347,00		
16	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.320.725.347,00						-		1.320.725.347,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.320.725.347,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		-	1.320.725.347,00	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen		761.075.347,00	Kab. Minahasa, Eris, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		761.075.347,00	PUSKESMAS TANDENGAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen		559.650.000,00	Kab. Minahasa, Eris, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		559.650.000,00	PUSKESMAS TANDENGAN	
						Puskesmas Tombulu							1.747.415.387,00								1.747.415.387,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.747.415.387,00								1.747.415.387,00		

		02	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.747.415.387,00						1.747.415.387,00					
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.747.415.387,00				-	1.747.415.387,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.747.415.387,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	1.747.415.387,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen	1.058.403.387,00	Kab. Minahasa, Tombulu, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		1.058.403.387,00	PUSKESMAS TOMBULU			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	689.012.000,00	Kab. Minahasa, Tombulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		689.012.000,00	PUSKESMAS TOMBULU			
						Puskesmas Kombi							1.290.121.500,00							1.290.121.500,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.290.121.500,00							1.290.121.500,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.290.121.500,00							1.290.121.500,00				
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.290.121.500,00					-	1.290.121.500,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.290.121.500,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	1.290.121.500,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen	765.774.500,00	Kab. Minahasa, Kombi, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		765.774.500,00	PUSKESMAS KOMBI			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	524.347.000,00	Kab. Minahasa, Kombi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		524.347.000,00	PUSKESMAS KOMBI			
						Puskesmas Seretan							993.678.140,00							993.678.140,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							993.678.140,00							993.678.140,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							993.678.140,00							993.678.140,00				
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	993.678.140,00					-	993.678.140,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	993.678.140,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	993.678.140,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen	482.633.140,00	Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		482.633.140,00	PUSKESMAS SERETAN			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	511.045.000,00	Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		511.045.000,00	PUSKESMAS SERETAN			
						Puskesmas Kakas Barat							1.276.276.258,00							1.276.276.258,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.276.276.258,00							1.276.276.258,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.276.276.258,00							1.276.276.258,00				
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.276.276.258,00					-	1.276.276.258,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.276.276.258,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	1.276.276.258,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen	779.345.258,00	Kab. Minahasa, Kakas Barat, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		779.345.258,00	PUSKESMAS KAKAS BARAT			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	496.931.000,00	Kab. Minahasa, Kakas Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		496.931.000,00	PUSKESMAS KAKAS BARAT			
						Puskesmas Tumaratas							1.650.331.486,00							1.650.331.486,00				

1	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.650.331.486,00							1.650.331.486,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.650.331.486,00							1.650.331.486,00					
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.650.331.486,00				1.650.331.486,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.650.331.486,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.650.331.486,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12 Dokumen	957.236.486,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	957.236.486,00	PUSKESMAS TUMARATAS			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	693.095.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	693.095.000,00	PUSKESMAS TUMARATAS			
						Puskesmas Tanawangko					1.943.649.400,00							1.943.649.400,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.943.649.400,00							1.943.649.400,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.943.649.400,00							1.943.649.400,00					
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.943.649.400,00				-	1.943.649.400,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.943.649.400,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.943.649.400,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12 Dokumen	1.224.034.400,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.224.034.400,00	PUSKESMAS TANAWANGKO			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	719.615.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	719.615.000,00	PUSKESMAS TANAWANGKO			
						Puskesmas Papakelan					1.362.164.739,00							1.362.164.739,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.362.164.739,00							1.362.164.739,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.362.164.739,00							1.362.164.739,00					
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	1.362.164.739,00				-	1.362.164.739,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	1.362.164.739,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.362.164.739,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12 Dokumen	852.164.739,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	852.164.739,00	PUSKESMAS PAPAKELAN			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	510.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	510.000.000,00	PUSKESMAS PAPAKELAN			
						Puskesmas Kawangkoan					2.059.714.000,00							2.059.714.000,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.059.714.000,00							2.059.714.000,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.059.714.000,00							2.059.714.000,00					
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-				-	2.059.714.000,00				-	2.059.714.000,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	2.059.714.000,00			2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	2.059.714.000,00				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12 Dokumen	1.096.178.000,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan Utara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	548.089.000,00	PUSKESMAS KAWANGKOAN			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	963.536.000,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	481.768.000,00	PUSKESMAS KAWANGKOAN			

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	399.471.000,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		399.471.000,00	PUSKESMAS KAWANGKOAN BARAT
							Puskesmas Koya					2.443.983.100,00							1.221.991.550,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.443.983.100,00							1.221.991.550,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.443.983.100,00							1.221.991.550,00	
29	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	2.443.983.100,00						-	1.221.991.550,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	2.443.983.100,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.221.991.550,00	
	1	02	02	2.02	0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1.553.280.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		776.640.000,00	PUSKESMAS KOYA
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	890.703.100,00	Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		445.351.550,00	PUSKESMAS KOYA
							Puskesmas Lolah					1.092.099.257,00							1.092.099.257,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.092.099.257,00							1.092.099.257,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.092.099.257,00							1.092.099.257,00	
30	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	1.092.099.257,00						-	1.092.099.257,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	1.092.099.257,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.092.099.257,00	
	1	02	02	2.02	0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	672.777.257,00	Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		672.777.257,00	PUSKESMAS LOLAH
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	419.322.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		419.322.000,00	PUSKESMAS LOLAH
							Puskesmas Kakas					1.763.186.985,00							1.763.186.985,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.763.186.985,00							1.763.186.985,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.763.186.985,00							1.763.186.985,00	
31	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	1.763.186.985,00						-	1.763.186.985,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	1.763.186.985,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.763.186.985,00	
	1	02	02	2.02	0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	925.590.985,00	Kab. Minahasa, Kakas, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		925.590.985,00	PUSKESMAS KAKAS
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	837.596.000,00	Kab. Minahasa, Kakas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		837.596.000,00	PUSKESMAS KAKAS
							PUSKESMAS TATELI					1.887.988.985,00							1.887.988.985,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.887.988.985,00							1.887.988.985,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.887.988.985,00							1.887.988.985,00	
32	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	1.887.988.985,00						-	1.887.988.985,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	1.887.988.985,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	1.887.988.985,00	
	1	02	02	2.02	0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1.050.539.985,00	Kab. Minahasa, Mandolung, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		1.050.539.985,00	PUSKESMAS TATELI

	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	837.449.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-			837.449.000,00	PUSKESMAS TATELI
						PUSKESMAS TOMPASO						2.030.479.771,00								2.030.479.771,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.030.479.771,00								2.030.479.771,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.030.479.771,00								2.030.479.771,00	
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	2.030.479.771,00						-		2.030.479.771,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	2.030.479.771,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	2.030.479.771,00	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1.138.165.771,00	Kab. Minahasa, Tompaso, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-			1.138.165.771,00	PUSKESMAS TOMPASO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	892.314.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-			892.314.000,00	PUSKESMAS TOMPASO
						Puskesmas Tompaso Barat															
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.219.611.000,00								1.219.611.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	1.219.611.000,00						-		1.219.611.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat															
												702.000.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa							702.000.000,00	PUSKESMAS TOMPASO BARAT
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
												517.611.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-			517.611.000,00	PUSKESMAS TOMPASO BARAT
						PUSKESMAS TONDANO BARAT						0,00								1.221.991.550,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00								1.221.991.550,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	0,00						-		1.221.991.550,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat															
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						PUSKESMAS KAWANGKOAN BARU						0,00								1.029.857.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00								1.029.857.000,00	
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	0,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	1.029.857.000,00	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-			548.089.000,00	PUSKESMAS KAWANGKOAN BARU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SAM RATULANGI TONDANO						39.000.000.000,00								36.000.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0004	koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																				
	1	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																				
	1	03	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																				
	1	03	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN																				
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																				
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	0,00				-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-		550.975.214,00			
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			5.250.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			82.143.983,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			6.902.770,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																				
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				415.581.461,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			27.972.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar																	
1	03	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor																	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
1	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	0,00				-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			913.314.822,00	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			50.472.072,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				862.842.750,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya					0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				7.810.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				118.125.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi					0 Ha	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada undefined	-					92 Persen undefined undefined	0,00						-	3.152.270.000,00	
					[Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Kapasitas Air Baku Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	11.94 2.3 66.36 79.92	1.1 2.3 37.70 56.78	2.3 2.77 39.35 58.62	2.3 3.23 41.27 58.62	0,00								-	3.152.270.000,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																
1	03	02	2.01	0103	Peningkatan Tanggul Sungai																
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai																
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																
1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-					-	0,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-		3.152.270.000,00	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun						0 KM	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-				237.590.094,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya					880.42 KM	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-				488.528.205,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0049	Pelebaran Jembatan																			
							Panjang jembatan yang dilebarkan					0 Meter	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-				500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																			
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur					0 KM	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-				2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin					4 KM	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-				330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																			
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya					2,35 KM	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-				45.343.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan																			
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan					0 KM	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-				2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					1 Dokumen	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-			66.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang					1 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																			
							Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat																			
	1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang																			
							DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.516.860.734,00											13.484.499.694,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.516.860.734,00											13.484.499.694,00	
51	1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-			2.876.860.734,00									-		3.205.628.179,00	
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	BB	C	CC	CC	2.876.860.734,00											3.205.628.179,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
								-		-			2.377.086.024,00					Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		2.428.807.901,00		
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

[illegible]

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						23 Paket	42.550.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat			19.635.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0 Orang	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat			500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						23 Orang	45.802.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat			48.092.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-					-	143.298.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		270.746.380,00		
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	30.551.696,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat			32.079.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						0 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat			4.357.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah					1 Dokumen	2.500.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			3.045.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					1 Dokumen	2.500.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			735.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi					1 Dokumen	2.500.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			2.885.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
	1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
													0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
													0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	-			500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					0 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			34.676.775,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																	
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang					1 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			7.663.425,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																	
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					2 Lokasi	950.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Masyarakat			3.500.417.292,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						8.202.475.494,00									8.612.475.494,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.082.665.494,00									8.492.665.494,00	
56	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	BB	B	B	B	3.471.617.504,00									3.821.617.504,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
													8.376.800,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Satpol PP Kabupaten Minahasa	-		8.376.800,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	5.305.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Satpol PP Kabupaten Minahasa			5.305.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

[illegible]

[illegible]

1		05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
						[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	4.611.047.990,00							4.671.047.990,00	
1		05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	67.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Masyarakat		67.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]														
						[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	4.611.047.990,00							4.671.047.990,00	
1		05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 %	100 %	100 %	100 %	4.611.047.990,00							4.671.047.990,00	
						[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]														
1		05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	4.500.897.990,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 14. Mempercepat transformasi digital yang inklusif	Masyarakat	-	4.500.897.990,00	
1		05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				24 Laporan	897.990,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 14. Mempercepat transformasi digital yang inklusif	Masyarakat		897.990,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 %	100 %	100 %	100 %	4.611.047.990,00							4.671.047.990,00	
1		05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				9 Laporan	4.500.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Masyarakat		4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]														
	X					NON URUSAN						119.810.000,00							119.810.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
58	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	119.810.000,00						-	119.810.000,00	
						-														
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.810.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	-	-	119.810.000,00	
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	119.810.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	-		119.810.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Survei Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Terselenggaranya Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran pada Gedung, perusahaan, toko dan tempat usaha					12 Bulan 270 Desa/Kelurahan	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima	-	2.000.000,00	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima		1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima		1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]																					
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terselenggaranya Pemeriksaan Layanan atas Pemadaman	-				270 Desa/Kelurahan	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima	-	1.000.000,00	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman atas pencegahan terjadinya kebakaran	-				270 Desa/Kelurahan	90.000.000,00				-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima	-	152.966.105,00	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						94 0	90.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima		150.966.105,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						0 Desa/Kelurahan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima		1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																
						Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima		1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
-																					
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				50 Petugas Pemadam	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima	-	111.336.000,00	

	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
						[Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]																	
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi																	
						DINAS SOSIAL						6.241.938.682,00										876.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.241.938.682,00										876.000.000,00	
61	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Sosial yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	A	CC	B	B	3.899.087.674,00										44.000.000,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.502.300,00					-	-	-	-	-	0,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	3.522.300,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	3.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0 Dokumen	1.980.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					0 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0 Laporan	7.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						0 Orang/bulan	2.465.701.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0 Laporan	878.400,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-				0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
	1	06	01	2.03	0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
	1	06	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-			21.700.500,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		-		0,00	
	1	06	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					0 Paket	21.700.500,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-				0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-			360.998.954,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		-		22.000.000,00	
	1	06	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	1	06	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	1	06	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	1	06	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
	1	06	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	257.412.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-				0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	1	06	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	68.430.080,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-				0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1	06	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			480.946.000,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		-		0,00	
	1	06	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	5.110.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-				0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
													27.036.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-				0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	448.800.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-				0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			411.930.440,00				-	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	-		-		0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0 Dokumen	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0 Laporan	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		4.440.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					0 Dokumen	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya															
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	45.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		45.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor															
											0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya					0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota					250 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						-																
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					100 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						[Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]																
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana					16 Orang	599.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		547.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya					12 laporan	20.796.559,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		8.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

[illegible]

							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					300 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
													1.748.326.559,00								3.040.755.240,00		
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit							0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						[Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat]	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	100	100	100	100		1.748.326.559,00								3.040.755.240,00		
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
						[Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana]	-	-	-	-	-		1.748.326.559,00								3.040.755.240,00		
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pelaksanaan Sistem PB Persentase Pelaksanaan Sistem PB	-				17 % 25 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa	-		103.700.000,00		
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah					0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa					
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																	
													1.748.326.559,00								3.040.755.240,00		
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					0 Dokumen	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3PI) Kab/Kota																	
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					0 Dokumen	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Kabupaten Minahasa		0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1.748.326.559,00									3.040.755.240,00		
						DINAS TENAGA KERJA						10.223.654.899,00									12.402.200.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.223.654.899,00									12.402.200.000,00		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
69	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai Sakip	-			4 Indeks B Nilai	4.373.664.288,00									-	4.567.200.000,00	
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP	4 BB	4 B	4 B	4	4.373.664.288,00									4.567.200.000,00		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	6.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL Dinas Tenaga Kerja		6.500.000,00		DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-			95 Persen	2.470.922.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Dinas Tenaga Kerja	-	2.500.000.000,00			
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15 Orang/bulan	2.470.922.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Dinas Tenaga Kerja		2.500.000.000,00		DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	44.909.500,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	ASN Dinas Tenaga Kerja	-	50.000.000,00			
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					17 Paket	34.909.500,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	ASN Dinas Tenaga Kerja		38.000.000,00		DINAS TENAGA KERJA	

	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	10.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Wulauan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Dinas Tenaga Kerja		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.845.359,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL Dinas Tenaga Kerja		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	1.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL Dinas Tenaga Kerja		1.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	ASN dan THL Dinas Tenaga Kerja		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL Dinas Tenaga Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	26.156.329,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL Dinas Tenaga Kerja		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					80 Orang	500.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Masyarakat Pencari Kerja			3.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja					100 Unit	1.000.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Wulauan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	Masyarakat Pencari Kerja			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
72	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																	
							[Meningkatkan penempatan tenaga kerja]	0	0	0	0	210.351.000,00										260.000.000,00	
							Persentase Pekerja informal																
							Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	68	49.54	51	54												
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	82 %	82 %	82 %	82 %												
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					300 Orang	160.351.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Masyarakat			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja																	
73	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																	
							Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	-				53 %	4.132.639.611,00								-	4.333.000.000,00	
							[Meningkatkan pekerja Indonesia yang terlindungi]	53 %	2	3	4	4.132.639.611,00										4.333.000.000,00	
							Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	8	53 %	53 %	53 %												
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	DPPPA			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	8.925.500,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	DPPPA			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8 Laporan	280.140.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	DPPPA			280.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
75	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-				-	80.000.000,00								-	140.000.000,00	
						[Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan Peran perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	38 %	25 %	27 %	29 %	80.000.000,00										140.000.000,00	
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan																
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																	
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							-	-				-	40.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Perempuan	-		50.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	

							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi					15 Lembaga	40.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Perempuan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						-	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00								140.000.000,00	
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
	2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																
76	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-					-	450.660.000,00							-	462.000.000,00	
						[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]																
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						-	400.660.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Perempuan Korban Kekerasan	-		402.000.000,00	
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota						50 orang	400.660.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Perempuan Korban Kekerasan			402.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	50.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		60.000.000,00	
	2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)						15 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
77	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																
						-	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00								97.000.000,00	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
	2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga yang terlayani di puspaga	-				100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Keluarga	-		52.000.000,00	

[illegible]

							jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Laporan	40.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha			45.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
80	2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																		
							[Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]							35.000.000,00									92.000.000,00		
	2	08	07	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	2	08	07	2.03	0007		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
	2	08	07	2.03	0013		Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	2						DINAS PANGAN						0,00										4.765.501.011,00		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						0,00										4.765.501.011,00		
81	2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	BB	B	B	B	0,00										3.370.778.568,00		
	2	09	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	09	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	09	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	09	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			3.500.000,00		DINAS PANGAN	
	2	09	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			3.500.000,00		DINAS PANGAN	
	2	09	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			3.500.000,00		DINAS PANGAN	
	2	09	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			3.500.000,00		DINAS PANGAN	
	2	09	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			3.500.000,00		DINAS PANGAN	

[illegible]

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					2 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				60.000.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																						
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				3.500.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					12 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				3.500.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																						
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					12 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				3.500.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																						
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					4 Orang	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				40.000.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					4 Orang	0,00		-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				2.500.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					8 Orang	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				5.000.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
																	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							25.000.000,00	DINAS PANGAN	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				15.000.000,00	DINAS PANGAN
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif					15.000.000,00	DINAS PANGAN			
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif					100.000.000,00	DINAS PANGAN				
2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																						

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				20.000.000,00	DINAS PANGAN	
82	2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-		-			-	0,00				-			-		185.000.000,00		
						[Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]																			
	2	09	02	2.01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-			-	0,00				-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 7. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa	-		-	185.000.000,00	
	2	09	02	2.01	0003		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
	2	09	02	2.01	0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
	2	09	02	2.01	0006		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
83	2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-		-			-	0,00							-		1.070.850.000,00		
							[Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor Pola Pangan Harapan	97	92	92	93	0,00										1.070.850.000,00		
	2	09	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																		
	2	09	03	2.01	0002		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
	2	09	03	2.01	0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
	2	09	03	2.01	0007		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					60 Keluarga	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 7. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa	-			20.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2	09	03	2.01	0008		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
	2	09	03	2.01	0009		Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
	2	09	03	2.01	0010		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan					5 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 7. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa	-			10.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2	09	03	2.01	0011		Pemantauan Stok Pangan																		
							Informasi Stok Pangan					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-		-		5.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2	09	03	2.01	0012		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota					1 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-		-		5.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2	09	03	2.01	0014		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Terasilitasi	-				100 %	419.421.228,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor	-		360.000.000,00		
2	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1x12 Paket	8.190.800,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor			10.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	265.390.428,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor			150.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	62.500.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor			100.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1x12 Laporan	33.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor			40.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	50.340.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor			60.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
2	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	903.980.365,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor	-		1.390.000.000,00		
2	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1x12 Laporan	30.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor			50.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1x12 Laporan	26.955.365,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kebutuhan/Keperluan Kantor			50.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa			32.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa			27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						1 Dokumen	25.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																			
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																			
	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																			
	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																			
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						1 Dokumen	30.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																			
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						129 Laporan	2.764.088.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																			

							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					1 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa					1 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa		27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, BUM Desa, Desa		32.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																
103	2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG	-			100 % 15,85 %	675.000.000,00						-	1.905.000.000,00	
					[Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]																
2	13	05	2.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan TTG Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyelenggaraan kegiatan TP-PKK	-			25 desa 25 desa 295 Lembaga 15 kegiatan	675.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, LKD, Masyarakat	-	1.905.000.000,00	
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat					0 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	Pemerintah Desa, LKD, Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				0 %	0,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-	0,00		
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Penzadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																	

										0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0 %	0,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-	0,00	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				0 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan				0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				57 %	57.200.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-		57.200.000,00		
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
							Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					3 Laporan	57.200.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-		57.200.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	-				0 %	0,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-		0,00		
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				0 %	350.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-		0,00		

[illegible]

							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					0 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	03	2.04			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-	0,00			
	2	15	03	2.04	0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
	2	15	03	2.13			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				30 %	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	-	0,00		
	2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau							0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau							0 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 10. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.447.011.803,00								10.082.011.803,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.409.367.263,00								10.024.367.263,00		

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					1 Dokumen	22.826.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat Umum dan Asn		32.826.225,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0032	koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE					1 Aplikasi	22.826.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat Umum dan Asn		32.826.225,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali					12 Laporan	593.188.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat Umum dan Asn		693.188.164,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																
							Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					1 Laporan	22.826.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat Umum dan Asn		32.826.225,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					1 Dokumen	19.372.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat Umum dan Asn		20.372.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																
	2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							18.822.270,00								28.822.270,00	
114	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																
						[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100	40	50	60	18.822.270,00									28.822.270,00	
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral																
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							18.822.270,00								28.822.270,00	
115	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																
									-	-	-	-	18.822.270,00								28.822.270,00	
	2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian					1 Dokumen	18.822.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		28.822.270,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.141.571.458,00							4.557.500.000,00			
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
116	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	3.655.950.000,00						-	4.061.500.000,00		
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]																
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					-	15.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Dinas Koperasi dan UKM	-	16.500.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Dinas Koperasi dan UKM		6.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						-	-	-	-	-	-	3.655.950.000,00								4.061.500.000,00		
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4.750.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Dinas Koperasi dan UKM		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]																
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-	3.205.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Dinas Koperasi dan UKM	-	3.705.500.000,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					20 Orang/bulan	3.200.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Dinas Koperasi dan UKM		3.700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						-																
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Dinas Koperasi dan UKM		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	BB	B	B	B	3.655.950.000,00								4.061.500.000,00		
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	2	17	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						-																
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						-	3.655.950.000,00								4.061.500.000,00	
						-																
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	BB	B	B	B	3.655.950.000,00								4.061.500.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0,00										163.960.000,00			
	2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-			8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						3 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			45.980.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						12 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah	-			117.980.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				

[illegible]

							Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
125	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL [Meningkatkan kemudahan berinvestasi]	Realisasi total terhadap target investasi	-				130000000000 Rp	0,00						-	2.394.000.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi wewenang Kabupaten	-				14 Dokumen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	DPMPTSP, Instansi Terkait, Masyarakat/ Pelaku Usaha	-	2.283.750.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal															
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota															
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko															
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi Kabupaten/Kota	-				23 Dokumen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	DPMPTSP, Masyarakat/ Pelaku Usaha	-	110.250.000,00	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	DPMPTSP, Masyarakat/ Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)															
						Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi						23 Daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	DPMPTSP, Masyarakat/ Pelaku Usaha		52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
126	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL [Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal]	-				-	0,00							-	182.500.000,00	

	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-					-	0,00					8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			182.500.000,00	
	2	18	03	2.01	0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	18	03	2.01	0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
127	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-					-	0,00									330.000.000,00	
					[Meningkatkan perizinan berusaha berbasis resiko]																	
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-					-	0,00					8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			330.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
	2	18	04	2.01	0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
	2	18	04	2.01	0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					50 Pelaku Usaha	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
128	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Penanaman Modal bagi PMA dan PMDN di Kabupaten Minahasa	-				100 %	0,00									349.945.000,00	
						[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	20	0	10.24	10.24	0,00									349.945.000,00	
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	18	05	2.01	0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					8 Kegiatan Usaha.	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			84.945.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																	
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	400.000.000,00					-	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	410.000.000,00	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penehuhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																	
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					20 Orang	400.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-			1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		410.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
133	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																	
					[Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga]	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	55	25	30	35	2.258.049.346,00										2.340.451.000,00	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	228.582.000,00					-	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	232.560.000,00	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-					-	942.868.400,00					-	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	1.000.000.000,00	
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-					-	933.733.946,00					-	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-	-	947.461.000,00	
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																	
						Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan					6 Laporan	325.890.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas	-		330.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																	
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																	
134	2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																	
					[Meningkatkan kualitas kepramukaan]																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						[Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengembangan kesenian tradisional]	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	100,00	50,00	50,00	62,50	80.000.000,00								259.632.544,00			
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-			2 Jenis	80.000.000,00				Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Masyarakat dan Stakeholder Kesenian Tradisional	-	259.632.544,00			
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	80.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Masyarakat dan Stakeholder Kesenian Tradisional		194.294.840,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				0 Sertifikat	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Masyarakat dan Stakeholder Kesenian Tradisional		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																	
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Masyarakat dan Stakeholder Kesenian Tradisional		65.337.704,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
139	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																	
						[Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan]	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	18.18	0	3.64	7.27	50.000.000,00								55.000.000,00			
							Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	19.88	3.64	5.20	8.86												
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	50.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Stake holder Kebudayaan, Pemerintah/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
140	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN																	
						[Meningkatkan tata kelola museum]	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	20	0	0	2	5.000.000,00								530.000.000,00			
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota																	
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																	
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
												5.081.115.000,00								4.992.580.674,00			
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
141	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																	
							Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	-			5 %	2.200.000.000,00							-	1.954.470.672,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					85 Orang	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 6. Rehabilitasi Danau Tondano sebagai objek Vital dan Strategis (RD-VS) melalui pengembangan kawasan danau Tondano sebagai destinasi wisata unggulan dan Pengembangan Pariwisata Lainnya	Masyarakat dan Stakeholder Ekonomi Kreatif				201.390.529,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							DINAS PERPUSTAKAAN						3.491.692.990,00									3.900.515.810,00	
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.491.692.990,00									3.900.515.810,00	
		2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3.434.692.990,00									3.750.015.810,00	
145	2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	3.071.805.872,00							-		3.700.015.810,00	
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Perpustakaan yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	A	C	B	B	3.071.805.872,00									3.700.015.810,00	
	2	23	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	2	23	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-				1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-				1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
	2	23	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-				1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					0 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-				1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-				3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-				3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	2	23	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	2	23	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	220.000.000,00			-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		-		21.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	77.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							254.930.180,00			-				360.700.000,00	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
												5.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										-					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	45.915.180,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	204.015.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			193.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70.860.000,00			-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			130.000.000,00	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										-					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	27.930.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	27.930.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN

[illegible]

	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																
						Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				2 Arsip	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN	
						[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	100 %	65 %	70 %	80 %	57.000.000,00								126.500.000,00		
	2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota																	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				34 Pengguna	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	45.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		68.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN	
148	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-				0,00							-	12.000.000,00		
						[Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK]																
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00				-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-	-	12.000.000,00		
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				12 Arsip	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				12 Arsip	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN	
149	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0,00								-	12.000.000,00		
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup]	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	100 %	65 %	70 %	75 %	0,00								12.000.000,00		
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00				-	5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-	-	12.000.000,00		
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																
						Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				12 SOP	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN	
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																
						Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				12 Arsip	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal 4. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN	
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					0,00									14.970.186.784,00		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					0,00									14.970.186.784,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	10.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				10.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	150.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	315.500.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		315.500.000,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					350 Laporan	3.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	30.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	88.480.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		88.480.000,00	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	38.480.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			38.480.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
156	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-				-	50.000.000,00						-		50.000.000,00		
						[Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian]																	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-				-	50.000.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM 7. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa	-		-		50.000.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
157	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-				-	185.000.000,00						-		185.000.000,00		
						[Meningkatkan penendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-						-		6.469.530,00				-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-				7.500.000,00		
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-					1 Dokumen		6.469.530,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 8. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	-				7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN	
						BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									315.437.550,00												331.209.427,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									315.437.550,00												331.209.427,00	
166	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-		-	-	-	-	-		315.437.550,00												331.209.427,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan																						
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																						
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																						
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																						
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									705.840.025,00												583.632.026,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									705.840.025,00												583.632.026,00	
167	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-		-				-		705.840.025,00									-			583.632.026,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																						
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							2 Dokumen		539.545.305,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				409.022.570,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																						
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							6 Dokumen		73.169.360,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				76.827.828,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebilaikan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																						
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							3 Dokumen		93.125.360,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				97.781.628,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						BAGIAN HUKUM																						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									482.891.270,00												507.035.833,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									482.891.270,00												507.035.833,00	
168	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																					507.035.833,00	

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	848.413.853,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Tounkuramber	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		890.834.545,00	BAGIAN KERJASAMA
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					130.961.700,00							137.509.785,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					130.961.700,00								
171	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-			-	130.961.700,00						-	137.509.785,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan													
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	29.878.300,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		31.372.215,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					297.338.967,00							312.205.914,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					297.338.967,00							312.205.914,00	
172	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	297.338.967,00						-	312.205.914,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
						BAGIAN SUMBER DAYA ALAM					190.504.805,00							200.030.044,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					190.504.805,00							200.030.044,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH													
173	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	190.504.805,00						-	200.030.044,00	
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam													
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
						BAGIAN UMUM					33.806.384.578,00							34.755.152.463,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					33.806.384.578,00							34.755.152.463,00	
174	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	33.806.384.578,00						-	34.755.152.463,00	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah													
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

[illegible]

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	15.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif			15.750.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	150.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		157.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						616.568.500,00															
						Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa															
						759.731.700,00															
						BAGIAN UMUM															
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						850.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif			892.500.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	11.569.520.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		9.175.950.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit	499.728.600,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		524.715.030,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	49.720.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		52.206.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	882.474.676,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		5.297.369.091,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	1.043.198.258,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		570.358.170,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	4.009.900.000,00				-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-	4.210.395.000,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	92.853.710,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN, ANGGOTA DPRD DAN ASN SETWAN			0,00		SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	3.826.855.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN, ANGGOTA DPRD DAN ASN SETWAN	-		0,00			
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN, ANGGOTA DPRD DAN ASN SETWAN			0,00		SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	252.855.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN, ANGGOTA DPRD DAN ASN SETWAN			0,00		SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					50 Laporan	3.564.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN, ANGGOTA DPRD DAN ASN SETWAN			0,00		SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-				-	20.283.723.686,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	-		0,00			
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					35 Orang/Bulan	19.192.723.686,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			0,00		SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					1 Paket	933.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			0,00		SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1 Dokumen	13.320.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		0,00		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan															
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat															
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah															
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		0,00		SEKRETARIAT DPRD
						[Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]															
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	687.760.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	-	0,00		
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD															
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					1 Dokumen	381.540.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		0,00		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi															
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD															
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	3.327.257.105,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	-	0,00		
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD					1 Laporan	555.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		0,00		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD															
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun					1 Dokumen	726.641.420,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		0,00		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					1 Dokumen	2.044.615.685,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		0,00		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah															

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			367.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-			-	0,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-		345.000.000,00	
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

						0					12 0	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				405.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				7.420.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
181	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-			-	0,00							-				619.695.550,00	
						[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah]																	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-			-	0,00					-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				516.898.500,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				15.153.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				50.939.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0004	koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				24.189.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				116.433.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0006	Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	

							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					425 Usulan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				20.984.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					12 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif				289.199.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																								
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																								
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																								
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																								
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-				-	0,00				-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			26.112.500,00							
	5	01	02	2.03	0001	koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota												0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			12.404.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah												0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			13.708.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-				-	0,00				-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			46.588.550,00							
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																								
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					2 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			7.491.300,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																								
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					5 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			24.997.750,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					59 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			14.099.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
182	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-				-	0,00								-		1.045.392.962,00							
						[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidane pemerintahan dan pembangunan manusia]																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Barang Milik Daerah		160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
188	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																				
						[Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15.03	9.04	9.04	10.06	961.605.320,00								1.487.000.000,00						
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah																				
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																				
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																				
																		0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																				
																		130.807.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak		156.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					10 Unit	198.515.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																				
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					50 Laporan	49.986.700,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak		56.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																				
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																				
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					500 Obyek Pajak	60.821.200,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak		260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																				
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					200 Dokumen	34.117.940,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																				
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					50 Layanan	24.050.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																				

							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					11 Dokumen	18.411.480,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					200 Dokumen	250.341.400,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Aparatur dan Wajib Pajak			240.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
						[Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100	100	100	100	961.605.320,00									1.487.000.000,00		
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
						[Meningkatkan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	1	1	1	1	961.605.320,00									1.487.000.000,00		
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5	03				KEPEGAWAIAN																	
189	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Nilai IKM Nilai SAKIP	-			0 0 4 NILAI 8 Predikat	15.175.142.693,00							-		16.863.512.920,00 15.557.512.920,00		
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	A	B	BB	BB	15.175.142.693,00									15.557.512.920,00		
	5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-				100 %	14.395.658.093,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN BKPSDM Minahasa	-		14.503.000.000,00		
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

[illegible]

						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130 Laporan	175.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD penunjang urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD	-			94 %	124.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	124.000.000,00	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	-			100 %	201.704.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	201.704.600,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		12.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
												22.389.600,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		22.389.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	166.815.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		166.815.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laiak fungsi	-			94 %	70.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	345.808.320,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 Unit	38.480.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		38.480.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	7.300.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		7.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	25.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			300.028.320,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
190	5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																														
							[Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian]	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	84	00		79.04	80	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
	5	03	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																	521.700.000,00													
	5	03	02	2.01	0004		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																	281.700.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			300.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
							[Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN]	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100	100		100	100	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
							[Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian]	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	84	00		79.04	80	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
	5	03	02	2.01	0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																														
								0				12 0	10.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			10.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
							[Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN]	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100	100		100	100	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
	5	03	02	2.01	0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																														
							[Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian]	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	84	00		79.04	80	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
	5	03	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN																														
	5	03	02	2.02	0001		Pengelolaan Mutasi ASN							10.000.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											10.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
	5	03	02	2.02	0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	10.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kabupaten Minahasa			10.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
							[Meningkatkan tata kelola pengembangan karir ASN]	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	80	80		80	80	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
	5	03	02	2.02	0003		Pengelolaan Promosi ASN																														
							[Meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi ASN]	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	75	75		75	75	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
	5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN		-			-	-	100.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-			200.000.000,00														
	5	03	02	2.03	0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																														
							-	-	-	-	-	-	-	1.187.700.000,00									1.306.000.000,00														
	5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																														
	5	03	02	2.04	0003		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																														
																								3.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										3.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							[Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN]																	1.187.700.000,00													
	5	03	02	2.04	0005		Pengelolaan Tanda Jasa baei Pegawai																										1.306.000.000,00				

							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa					250 Orang	40.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kabupaten Minahasa			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																	
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kabupaten Minahasa			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN																	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																1.850.000.000,00	
191	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
							[Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.850.000.000,00									1.850.000.000,00	
							Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	100 %	100 %	100 %	100 %												
							Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan																
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.850.000.000,00									1.850.000.000,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							1.850.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kabupaten Minahasa			1.850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							INSPEKTORAT DAERAH						16.647.902.206,20									17.208.085.814,88	
	6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						16.647.902.206,20									17.208.085.814,88	
	6	01					INSPEKTORAT DAERAH																
192	6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	13.263.673.856,20								-	13.188.085.814,88	
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Inspektorat Daerah yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	13.263.673.856,20									13.188.085.814,88	
	6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.336.798,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait	-		37.544.300,00		
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	4.747.578,90	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			7.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	284.645,70	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
													284.645,70	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	4.800.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			4.800.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	94.804.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			110.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	95.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			35.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					1 Unit	15.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			15.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5.754.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			3.500.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	22.225.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			25.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	103.200.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			35.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7 Unit	60.740.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait			60.740.000,00		INSPEKTORAT DAERAH

	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	112.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Inspektorat, Stakeholder terkait		0,00	INSPEKTORAT DAERAH		
193	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	-			100 % 80 % 90 %	3.067.350.000,00					-	3.390.000.000,00			
						[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]															
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Wajib Yang Dilaksanakan Persentase Program Prioritas Nasional Yang Mendapatkan Pengawasan	-			90 Persen 100 Persen	2.607.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Daerah, Desa, BUMD, BUMDesa	-	2.840.000.000,00		
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													425.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
											395.600.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Daerah, Desa, BUMD, BUMDesa					
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				253 Laporan	658.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Daerah, Desa, BUMD, BUMDesa					
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja															
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan															
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	72.100.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Daerah, Desa, BUMD, BUMDesa		85.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa															
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				44 Laporan	495.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Daerah, Desa, BUMD, BUMDesa		550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal															
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	369.750.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Daerah, Desa, BUMD, BUMDesa		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		

[illegible]

[illegible]

												42.267.690,00		Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN KECAMATAN TONDANO BARAT			205.850.600,00		KECAMATAN TONDANO BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	42.322.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN KECAMATAN TONDANO BARAT	-		42.324.150,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN KECAMATAN TONDANO BARAT			36.000.000,00		KECAMATAN TONDANO BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	36.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN KECAMATAN TONDANO BARAT			38.480.000,00		KECAMATAN TONDANO BARAT	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
196	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-				100 %	16.000.000,00							-		18.500.000,00		
						[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tondano Barat]																		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-				1 kali	10.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN & MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-		12.500.000,00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							10.500.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN & MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT			12.500.000,00		KECAMATAN TONDANO BARAT	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	-				1 kali	5.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN & MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-		6.000.000,00			
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
197	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-				100 %	1.441.000.000,00							-		1.747.000.000,00		
						[Meningkatnya PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kecamatan Tondano Barat]							1.441.000.000,00								1.747.000.000,00			

[illegible]

						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Rinegetan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	25.000.000,00	KELURAHAN RINEGETAN	
						KELURAHAN TOUNKURAMBER						172.000.000,00							190.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						172.000.000,00							190.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN															
205	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sakip	-			8 PREDIKAT CC PREDIKAT	12.000.000,00						-	15.000.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
												12.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Tounkuramber							15.000.000,00	KELURAHAN TOUNKURAMBER
206	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						160.000.000,00						-	175.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	175.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit		140.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Tounkuramber	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	150.000.000,00	KELURAHAN TOUNKURAMBER	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas		20.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Tounkuramber	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	25.000.000,00	KELURAHAN TOUNKURAMBER	
						KELURAHAN WAWALINTOUAN						172.000.000,00							190.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN															
	7	01				KECAMATAN						172.000.000,00							190.000.000,00		
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sakip	-		8 PREDIKAT CC PREDIKAT	12.000.000,00							-	15.000.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		12.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Wawalintouan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN & MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	15.000.000,00	KELURAHAN WAWALINTOUAN	
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-		100 %		160.000.000,00						-	175.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
												20.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Wawalintouan							25.000.000,00	KELURAHAN WAWALINTOUAN
						KELURAHAN REREWOKAN						172.000.000,00							200.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						172.000.000,00							200.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						172.000.000,00							200.000.000,00		
209	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sakip	-		8 PREDIKAT CC PREDIKAT	12.000.000,00							-	25.000.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Wewelan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN & MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT		15.000.000,00	KELURAHAN WEWELEN						
214	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-				29 kegiatan	160.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	175.000.000,00						
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	140.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Wewelan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT		150.000.000,00	KELURAHAN WEWELEN					
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
													20.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Wewelan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT		25.000.000,00	KELURAHAN WEWELEN					
							KELURAHAN MASARANG														172.000.000,00				190.000.000,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						172.000.000,00							190.000.000,00						
	7	01					KECAMATAN						172.000.000,00							190.000.000,00						
215	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN & MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	15.000.000,00							
	7	01	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
216	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-		100 %	160.000.000,00						-	175.000.000,00							
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-		29 kegiatan	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT	-	175.000.000,00							
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	140.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Masarang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT		150.000.000,00	KELURAHAN MASARANG						
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Barat, Masarang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	MASYARAKAT KECAMATAN TONDANO BARAT		25.000.000,00	KELURAHAN MASARANG						
							KECAMATAN TONDANO TIMUR																			
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					5.133.151.452,00							4.964.917.585,00							
	7	01					KECAMATAN																			
217	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah IKM SAKIP	-		100 % A Predikat B Predikat	5.092.651.452,00						-	4.903.917.585,00							
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Tondano Timur yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]														5.092.651.452,00			4.903.917.585,00		

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	15.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		32.000.000,00		KECAMATAN TONDANO TIMUR	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20.519.905,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		90.000.000,00		KECAMATAN TONDANO TIMUR	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	104.612.500,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL	-	115.800.000,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	7.807.500,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL		15.000.000,00		KECAMATAN TONDANO TIMUR	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	96.805.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan THL		100.800.000,00		KECAMATAN TONDANO TIMUR	
						-																	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	-			85 %	38.480.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN	-	210.000.000,00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.480.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN		35.000.000,00		KECAMATAN TONDANO TIMUR	
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Tondano Timur yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]																	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
											0,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa							175.000.000,00		KECAMATAN TONDANO TIMUR	
218.	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						14.500.000,00								-	28.500.000,00		
						[meningkatkannya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tondano Timur]						14.500.000,00								-	28.500.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-			1 kali	12.500.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	16.500.000,00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	

	7		01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	-					1 kali	1.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	6.000.000,00		
	7		01	02	2.03	0001	koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-					1 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR	
	7		01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								1.000.000,00								6.000.000,00		
	7		01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
															1.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN		6.000.000,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR	
219	7		01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-					100 %	12.500.000,00							-	13.000.000,00		
							[Meningkatkan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kecamatan Tondano Timur]	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100	99.35	100	100	100	100	12.500.000,00								13.000.000,00		
	7		01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
	7		01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																		
220	7		01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-				100 %	12.500.000,00								-	13.500.000,00		
							[Meningkatkan KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tondano Timur]								12.500.000,00							13.500.000,00			
	7		01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								12.500.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	13.500.000,00		
	7		01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1 Laporan	12.500.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		13.500.000,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR		
221	7		01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	-				100 %	1.000.000,00								-	6.000.000,00		
							[Meningkatkan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tondano Timur]																		
	7		01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	-				1 kegiatan	1.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	6.000.000,00			
	7		01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						1 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR		
							KELURAHAN TOLOUR								349.153.765,00								363.500.000,00		
	7						UNSUR KEWILAYAHAN								349.153.765,00								363.500.000,00		
	7		01				KECAMATAN								349.153.765,00								363.500.000,00		
222	7		01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah IKM SAKIP	-				100 % A Predikat B Predikat	169.598.345,00								-	173.500.000,00		
							-		-	-	-	-	-	-	169.598.345,00								173.500.000,00		
	7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		

[illegible]

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-					7 Unit	35.599.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kinjar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	40.000.000,00		KELURAHAN KINIAR
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	252.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan	-	252.000.000,00		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-					252 Laporan	252.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kinjar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan	-	252.000.000,00		KELURAHAN KINIAR
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-				36 kegiatan	199.750.460,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	210.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-					2 Pokmas / Ormas	38.966.720,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kinjar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	40.000.000,00		KELURAHAN KINIAR
						KELURAHAN TALER																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	01				KECAMATAN																		
226	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah IKM SAKIP	-				100 % A Predikat B Predikat	156.179.000,00							-	159.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-					2 Laporan	5.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Taler	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	6.000.000,00		KELURAHAN TALER
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-					7 Unit	43.179.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Taler	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	45.000.000,00		KELURAHAN TALER
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	108.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan	-	108.000.000,00		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					108 Laporan	108.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Taler	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan			108.000.000,00		KELURAHAN TALER		
227	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							191.930.580,00									200.000.000,00			
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							191.930.580,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		200.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	152.854.080,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Taler	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			160.000.000,00		KELURAHAN TALER		
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							KELURAHAN LININGAAN						385.897.000,00										395.000.000,00			
	7						UNSUR KEMILAYAHAN						350.770.000,00										355.000.000,00			
	7	01					KECAMATAN						350.770.000,00										355.000.000,00			
228	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							149.000.000,00									150.000.000,00			
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan adm. umum perangkat daerah yang terfasilitasi	-				100 %	5.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		6.000.000,00			
	7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	144.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan	-		144.000.000,00			
	7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							144.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Liningaan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan			144.000.000,00		KELURAHAN LININGAAN	
229	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							201.770.000,00									-	205.000.000,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-				36 kegiatan	201.770.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		205.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
														39.770.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Liningaan								40.000.000,00		KELURAHAN LININGAAN
	X						NON URUSAN							35.127.000,00										40.000.000,00		
	X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.127.000,00										40.000.000,00		
230	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah IKM SAKIP	-				100 % A Predikat B Predikat	35.127.000,00									-	40.000.000,00		
	X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase fasilitas pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBMD perangkat daerah	-				85 %	35.127.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		40.000.000,00			

	X		XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	35.127.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Linaingan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		40.000.000,00	KELURAHAN LININGAAN		
							KELURAHAN KATINGGOLAN						386.340.000,00								391.000.000,00		
						7	UNSUR KEWILAYAHAN						386.340.000,00									391.000.000,00	
						7	01	KECAMATAN						386.340.000,00								391.000.000,00	
231			7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah IKM SAKIP	-			100 % A Predikat B Predikat	174.000.000,00						-		176.000.000,00		
			7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan adm. umum perangkat daerah yang terfasilitasi	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	6.000.000,00			
			7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Katinggolan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		6.000.000,00	KELURAHAN KATINGGOLAN		
			7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00								26.000.000,00		
			7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
													25.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Katinggolan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		26.000.000,00	KELURAHAN KATINGGOLAN		
			7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	144.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan	-	144.000.000,00			
			7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
232			7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-			100 %	212.340.000,00						-	215.000.000,00			
			7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						212.340.000,00								215.000.000,00		
			7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
													173.370.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Katinggolan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		175.000.000,00	KELURAHAN KATINGGOLAN		
			7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	38.970.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Katinggolan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		40.000.000,00	KELURAHAN KATINGGOLAN		
							KELURAHAN KENDIS																
			7				UNSUR KEWILAYAHAN						420.001.385,00								428.500.000,00		
			7	01			KECAMATAN						420.001.385,00								428.500.000,00		
233			7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						206.849.000,00								208.500.000,00		
			7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	6.000.000,00			

7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kendis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		6.000.000,00	KELURAHAN KENDIS
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
											21.849.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kendis						22.500.000,00	KELURAHAN KENDIS
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan	-	180.000.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				180 Laporan	180.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kendis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan		180.000.000,00	KELURAHAN KENDIS
234	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-			100 %	213.152.385,00						-	220.000.000,00	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	174.182.385,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kendis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		180.000.000,00	KELURAHAN KENDIS
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	38.970.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Kendis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		40.000.000,00	KELURAHAN KENDIS
											348.001.385,00								356.500.000,00	
7						KELURAHAN WENGKOL														
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01					KECAMATAN					348.001.385,00								356.500.000,00	
235	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah IKM SAKIP	-			100 % A Predikat B Predikat	134.849.000,00						-	136.500.000,00	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah														
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase fasilitas pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBMD perangkat daerah	-			85 %	21.849.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-	22.500.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	21.849.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Wengkol	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat		22.500.000,00	KELURAHAN WENGKOL
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-			100 %	213.152.385,00						-	220.000.000,00	

			7		01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-				36 kegiatan	213.152.385,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		220.000.000,00		
			7		01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	174.182.385,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Wengkol	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			180.000.000,00		KELURAHAN WENGKOL
			7		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
									KELURAHAN RANOWANGKO																		
			7						UNSUR KEWILAYAHAN																		
			7		01				KECAMATAN																		
			237	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah IKM SAKIP	-				100 % A Predikat B Predikat	197.148.000,00							-		390.000.000,00		
			7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
			7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase fasilitas pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBMd perangkat daerah	-				85 %	48.148.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		50.000.000,00		
			7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					9 Unit	48.148.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Ranowangko	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			50.000.000,00		KELURAHAN RANOWANGKO
			7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			7		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					144 Laporan	144.000.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Ranowangko	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan			144.000.000,00		KELURAHAN RANOWANGKO
			238	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
			7		01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-				36 kegiatan	188.152.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		190.000.000,00		
			7		01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			7		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
										Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	39.302.000,00		Kab. Minahasa, Tondano Timur, Ranowangko	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			40.000.000,00		KELURAHAN RANOWANGKO
									KELURAHAN LUAAN																		
			7						UNSUR KEWILAYAHAN																		
			7		01				KECAMATAN																		
																349.572.000,00									356.500.000,00		

[illegible]

[illegible]

	7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	72.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan	-		72.000.000,00		
	7		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						72 Laporan	72.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Makalounsow	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Perangkat Lingkungan			72.000.000,00		KELURAHAN MAKALONSOUW	
244	7		01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
	7		01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-				36 kegiatan	213.152.385,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat	-		220.000.000,00		
	7		01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						1 Unit	174.182.385,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Makalounsow	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			180.000.000,00		KELURAHAN MAKALONSOUW	
	7		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2 Pokmas / Ormas	38.970.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Timur, Makalounsow	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN dan Masyarakat			40.000.000,00		KELURAHAN MAKALONSOUW	
							KECAMATAN TONDANO UTARA																		
							UNSUR KEWILAYAHAN																		
7																									
7	01						KECAMATAN																		
245	7		01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	3.195.767.718,00							-		3.215.401.970,00		
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Tondano Utara yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	Nilai SAKIP	A	B	BB	BB		3.195.767.718,00									3.215.401.970,00		
	7		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	-				undefined undefined	2.981.504.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-		2.981.504.000,00		
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						40 Orang/bulan	2.981.504.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			2.981.504.000,00		KECAMATAN TONDANO UTARA	
	7		01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	7		01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
7		01	01		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	49.184.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-		61.684.000,00		
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-				-	16.437.990,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		16.437.990,00		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-				-	88.190.980,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		91.795.980,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	13.190.980,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				13.190.980,00		KECAMATAN TONDANO UTARA		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						10 Laporan	74.000.000,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				77.605.000,00		KECAMATAN TONDANO UTARA		
						-	-	-	-	-	-	-	3.195.767.718,00											3.215.401.970,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
246	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-				100 %	9.866.030,00									-			9.866.030,00	
						[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tondano Utara]	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100	9.866.030,00												9.866.030,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan																				
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1 Laporan	9.866.030,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				9.866.030,00		KECAMATAN TONDANO UTARA		
247	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																				
						[Meningkatnya PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,Kecamatan Tondano Utara]	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100	99.35	100	100	648.000.000,00												648.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
248	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	-				100 %	5.800.000,00									-			5.800.000,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				kegiatan Paket	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan		50.000.000,00		KECAMATAN TONDANO SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				kegiatan Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan		21.000.000,00		KECAMATAN TONDANO SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan		7.200.000,00		KECAMATAN TONDANO SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan	-	33.930.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				kegiatan Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan		33.930.000,00		KECAMATAN TONDANO SELATAN
255	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
						[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tondano Selatan]	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	96.21	100	100	0,00								113.045.041,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan dan Masyarakat	-	15.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						-	-	-	-	-	-	0,00								113.045.041,00		
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																
												0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan			74.045.041,00		KECAMATAN TONDANO SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Tondano Selatan dan Masyarakat	-	24.000.000,00		

[illegible]

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-						-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		150.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-						100% Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Tataaran Patar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		150.000.000,00	KELURAHAN TATAARAN PATAR
						KELURAHAN MAESA UNIMA								0,00									150.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00									150.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00									150.000.000,00	
261	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-					-	0,00							-		150.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-					-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		150.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-						100% Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Maesa Unima	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		150.000.000,00	KELURAHAN MAESA UNIMA
						KELURAHAN TONSARU								0,00									200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	01				KECAMATAN								0,00									200.000.000,00	
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-						-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-					-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						KELURAHAN PALELOAN								0,00									150.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00									150.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN																		
263	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-					-	0,00							-		150.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-																	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-						100% Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Selatan, Paleloan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		150.000.000,00	KELURAHAN PALELOAN
						KELURAHAN URONGO																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00									150.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN																		
264	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-					-	0,00							-		150.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-					-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Masyarakat	-		150.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						KECAMATAN ERIS								1.815.136.702,00									1.712.275.639,00	

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	5.339.688,00	Kab. Minahasa, Eris, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		5.339.688,00	KECAMATAN ERIS
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	91.815.000,00	Kab. Minahasa, Eris, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		81.000.000,00	KECAMATAN ERIS
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-				1 unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit	179.763.201,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-	52.650.876,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1 Unit	38.480.000,00	Kab. Minahasa, Eris, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		2.650.876,00	KECAMATAN ERIS
					[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Eris yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]															
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
266	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Eris	-				100 %	10.900.000,00						-	12.000.000,00	
					[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Eris]	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	95.87	100	100	10.900.000,00								12.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan															
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
					-	-	-	-	-	-	-	10.900.000,00							12.000.000,00	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum															
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-	6.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Eris, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		6.000.000,00	KECAMATAN ERIS
267	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															

[illegible]

			01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terfasilitasi					95 %	94.207.750,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken	-		125.000.000,00		
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	10.000.000,00	Kab. Minahasa, Remboken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken			10.000.000,00		KECAMATAN REMBOKEN	
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	26.707.750,00	Kab. Minahasa, Remboken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken			30.000.000,00		KECAMATAN REMBOKEN	
	7		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	12.500.000,00	Kab. Minahasa, Remboken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken			15.000.000,00		KECAMATAN REMBOKEN	
	7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Minahasa, Remboken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken			70.000.000,00		KECAMATAN REMBOKEN	
	7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
	7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				95 %	73.277.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken	-		103.600.000,00			
	7		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	9.672.000,00	Kab. Minahasa, Remboken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken			10.000.000,00		KECAMATAN REMBOKEN	
	7		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	63.605.000,00	Kab. Minahasa, Remboken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken			93.600.000,00		KECAMATAN REMBOKEN	
	7		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	7		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	38.480.000,00	Kab. Minahasa, Remboken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Remboken			40.000.000,00		KECAMATAN REMBOKEN	
272	7		01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
							[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Remboken]	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100		99.49	100	100	14.000.000,00									25.000.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						[Meningkatkan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Kombi]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	0	100	100	0,00							17.500.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
						KECAMATAN LEMBEAN TIMUR						2.341.387.347,00							2.292.544.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																
	7	01				KECAMATAN						2.341.387.347,00							2.292.544.000,00			
282	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Lembean Timur yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	Nilai SAKIP	A	B	BB	BB	2.286.387.347,00							2.236.344.000,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	1.934.372.022,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Lembean Timur	-	1.934.394.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15 Orang/bulan	1.934.372.022,00	Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Lembean Timur		1.934.394.000,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					15 Paket	16.500.000,00	Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Lembean Timur		12.600.000,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	70.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Lembean Timur	-	53.200.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Lembean Timur		14.500.000,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	7.500.000,00	Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Lembean Timur		7.600.000,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Lembean Timur		18.100.000,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR	

[illegible]

						[Meningkatkan KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Lembean Timur]	[Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100	100	100	12.000.000,00								11.100.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
286	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	10.000.000,00							-	11.000.000,00		
						[Meningkatkan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Lembean Timur]																
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					-	10.000.000,00				-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		11.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	10.000.000,00		Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		11.000.000,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR
287	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
						[Meningkatkan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kecamatan Lembean Timur]	Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100	100	100	100	10.000.000,00									11.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi																
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
						KECAMATAN KAKAS						0,00									2.203.734.005,00	
	7					UNSLUR KEWILAYAHAN																
	7	01				KECAMATAN						0,00									2.203.734.005,00	
288	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
						[Meningkatkan Kinerja Kecamatan Kakas yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	Nilai SAKIP	A	B	BB	BB	0,00									2.158.734.005,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-		25.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			25.000.000,00	KECAMATAN KAKAS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							6.730.000,00	KECAMATAN KAKAS
												0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			14.950.000,00	KECAMATAN KAKAS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	7			01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBM Perangkat Daerah	-				100 %	55.968.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng	-	62.000.000,00		
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng			9.000.000,00		KECAMATAN PINELENG
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	55.968.000,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng			35.000.000,00		KECAMATAN PINELENG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	10.980.000,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng			13.000.000,00		KECAMATAN PINELENG
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/layak fungsi	-				100 %	66.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng	-	75.000.000,00		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	36.000.000,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng			36.000.000,00		KECAMATAN PINELENG
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng			5.500.000,00		KECAMATAN PINELENG
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
											0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng			4.000.000,00		KECAMATAN PINELENG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

298	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	-			100 %	12.356.325,00						-	24.000.000,00	
					[Meningkatkan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Pineleng]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	98.71	100	100	12.356.325,00							24.000.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20 Orang	0,00	Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat		4.500.000,00	KECAMATAN PINELENG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan													
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila													
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					0,00	Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa					1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG	
										0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat		1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat		4.000.000,00	KECAMATAN PINELENG
299	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
					[Meningkatkan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kecamatan Pineleng]	Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100	99.24	100	100	13.062.263,00							57.000.000,00	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	-			1 Kegiatan	13.062.263,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat	-	57.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan													

[illegible]

							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					4 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat			1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG	
	7	01	06	2.01	0014		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																	
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga					4 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat			1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG	
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					4 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat			1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG	
	7	01	06	2.01	0016		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					4 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat			1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					1 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat			1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG	
	7	01	06	2.01	0018		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Pineleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kecamatan Pineleng serta pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Masyarakat			1.500.000,00	KECAMATAN PINELENG	
KECAMATAN MANDOLANG																								
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						1.582.215.225,00										0,00	
	7	01					KECAMATAN						1.582.215.225,00										0,00	
300	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.559.822.725,00										0,00	
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Mandolang yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	Nilai SAKIP	A	B	BB	BB	1.559.822.725,00										0,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	500.000,00				-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-			0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	500.000,00		Kab. Minahasa, Mandolang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			0,00	KECAMATAN MANDOLANG	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	-				100 %	21.805.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2. Melanjutkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan daerah	Kecamatan Tombulu	-		45.794.458,00	
		7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tombulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2. Melanjutkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan daerah	Kecamatan Tombulu			13.664.458,00	KECAMATAN TOMBULU
		7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	81.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombulu	-		66.111.300,00	
		7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	72.000.000,00		Kab. Minahasa, Tombulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombulu			66.111.300,00	KECAMATAN TOMBULU
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	38.480.000,00		Kab. Minahasa, Tombulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombulu			39.000.000,00	KECAMATAN TOMBULU
		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							-	-	-	-	-	-	-	1.786.157.732,00									1.980.465.447,00	
		7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
														0,00		Kab. Minahasa, Tombulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2. Melanjutkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan daerah	Kecamatan Tombulu			0,00	KECAMATAN TOMBULU
305	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
							[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tombulu]	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	95	100	100		5.880.000,00							-		9.180.000,00	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				1 Kegiatan	5.880.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombulu	-		9.180.000,00	
		7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	5.880.000,00		Kab. Minahasa, Tombulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombulu			9.180.000,00	KECAMATAN TOMBULU

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	55.000.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Tombariri			0,00	KECAMATAN TOMBARIRI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 bulan Paket	3.000.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri			3.150.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Laporan	2.500.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Tombariri			0,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
												25.000.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri			19.950.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
												45.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri	-		21.000.000,00		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 unit Unit	45.000.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri			21.000.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 bulan Laporan	7.225.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Tombariri			7.500.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 orang Laporan	56.605.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri			55.650.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitas pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBM perangkat Daerah persentase fasilitas pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBM perangkat Daerah	-				1 unit 1 UNIT	61.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri	-		51.512.500,00		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 unit Unit	38.480.000,00	Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri			31.750.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
						-																
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 unit Unit	22.740.000,00		Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima				9.712.500,00	KECAMATAN TOMBARIRI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 unit Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri			10.050.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI	
308	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik IKM SAKIP	-				12 BULAN 1 kegiatan 8 PREDIKAT CC PREDIKAT	39.000.000,00									-	24.003.500,00		
						[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tombariri]																			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di laksanakan	-				6 document 1 kegiatan	39.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Tombariri	-		24.003.500,00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 kegiatan Laporan	21.500.000,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Tombariri			13.850.000,00	KECAMATAN TOMBARIRI		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
309	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	15.700.000,00									-	7.082.250,00			
						[Meningkatkan KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tombariri]																			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-					15.700.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri	-		7.082.250,00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1 kegiatan Laporan	15.700.000,00		Kab. Minahasa, Tombariri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri			7.082.250,00	KECAMATAN TOMBARIRI		
						KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR																			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.446.881.900,00										1.519.250.995,00		
	7	01				KECAMATAN							1.446.881.900,00										1.519.250.995,00		
310	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.427.381.900,00									-	1.498.750.995,00			
						[Meningkatkan Kinerja Kecamatan Tombariri Timur yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]																			

	7		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					100 % 100% 1 Tahun 100 %	1.237.926.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur	-		1.299.822.300,00		
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							9 Orang/bulan	1.237.926.000,00		Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur			1.299.822.300,00		KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
	7		01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
	7		01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur					
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						9 Stel Paket	24.450.000,00		Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur			25.672.500,00		KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
	7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					100 % 100% 1 Tahun	36.920.900,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur	-		38.766.945,00		
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						12 Paket	3.099.000,00		Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur			3.253.950,00		KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
															8.071.900,00		Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur			8.475.495,00		KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
	7		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						0 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Tombariri Timur			0,00		KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
	7		01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 bulan Laporan	17.750.000,00		Kab. Minahasa, Tombariri Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur			18.637.500,00		KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
							-																			
	7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					100% 1 Tahun	23.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tombariri Timur	-		24.150.000,00		
	7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	0,00		Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder		0,00		KECAMATAN SONDER	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	35.038.000,00		Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder		31.061.040,00		KECAMATAN SONDER	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	-				100 %	35.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder	-	18.666.000,00			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	35.000.000,00		Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder		18.666.000,00		KECAMATAN SONDER	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	11.060.250,00		Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder		11.220.000,00		KECAMATAN SONDER	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	73.210.000,00		Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder		67.320.000,00		KECAMATAN SONDER	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	38.480.000,00		Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder		35.700.000,00		KECAMATAN SONDER	
					-		-	-	-	-	-	-	1.866.815.267,00									1.749.980.085,00		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	100.000.000,00		Kab. Minahasa, Sonder, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Sonder		0,00		KECAMATAN SONDER	
314	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-				1 kegiatan	12.800.000,00								-	13.056.000,00		
					[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sonder]		Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	95.91	100	100	12.800.000,00										13.056.000,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan																			

[illegible]

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		11.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		33.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan	-	200.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		200.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		11.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		1.100.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		42.328.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
					-	-	-	-	-	-	0,00							4.737.328.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		250.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
318	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan pemerintahan publik	-			3 Angka 50 Kegiatan	0,00						-	20.000.000,00	

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	-			undefined	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kawangkoan	-	20.000.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kawangkoan		20.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
319	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00							-	2.045.000.000,00	
					[Meningkatkan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,Kecamatan Kawangkoan]	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100	99.36	100	100	0,00								2.045.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
											0,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan		20.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	Kecamatan Kawangkoan		175.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
					-	-	-	-	-	-	0,00								2.045.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
											0,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa						1.500.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
					[Meningkatkan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,Kecamatan Kawangkoan]						0,00								2.045.000.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	0,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	-		350.000.000,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
320	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	0,00							-	45.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Kawangkoan	-	45.000.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
					[Meningkatkan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kecamatan Kawangkoan]	Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100	99.30	100	100	0,00								45.000.000,00	
						Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)														
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
					KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA						2.854.872.545,00								3.349.500.000,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Laporan	6.400.000,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				7.000.000,00		KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA	
	7						KELURAHAN TALIKURAN BARAT							364.400.000,00											438.000.000,00		
	7	01					LINSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																				
327	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	164.400.000,00								-			238.000.000,00		
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	5.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kelurahan Talikuran Barat	-			2.000.000,00			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 Paket	5.000.000,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan Utara, Talikuran Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kelurahan Talikuran Barat				2.000.000,00		KELURAHAN TALIKURAN BARAT	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2 Unit	15.400.000,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan Utara, Talikuran Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kelurahan Talikuran Barat				20.000.000,00		KELURAHAN TALIKURAN BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-	144.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kelurahan Talikuran Barat	-			216.000.000,00			
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	144.000.000,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan Utara, Talikuran Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kelurahan Talikuran Barat				216.000.000,00		KELURAHAN TALIKURAN BARAT	
328	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-					-	200.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kelurahan Talikuran Barat	-			200.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
	X					NON URUSAN								5.000.000,00											3.000.000,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								5.000.000,00											3.000.000,00		
329	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-					-	5.000.000,00								-			3.000.000,00		
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2 Laporan	5.000.000,00		Kab. Minahasa, Kawangkoan Utara, Talikuran Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-				3.000.000,00		KELURAHAN TALIKURAN BARAT	
							KELURAHAN TALIKURAN							405.400.000,00											495.000.000,00		
	7						LINSUR KEWILAYAHAN																				
	7	01					KECAMATAN							405.400.000,00											495.000.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	9.184.400,00	Kab. Minahasa, Tompaso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			23.684.400,00	KECAMATAN TOMPASO
344	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	18.636.000,00					-	-	-	18.636.000,00	
							[Meningkatkan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tompaso]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	98.71	100	100	18.636.000,00					-	-	18.636.000,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	18.636.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-	-	18.636.000,00	
	7	01	05	2.01	0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	18.636.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		18.636.000,00	KECAMATAN TOMPASO
							KECAMATAN TOMPASO BARAT					1.425.027.400,00								1.816.710.702,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					1.425.027.400,00								1.816.710.702,00	
	7	01					KECAMATAN					1.425.027.400,00								1.816.710.702,00	
345	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	1.378.027.400,00					-	-	-	1.726.710.702,00	
							[Meningkatkan Kinerja Kecamatan Tompaso Barat yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	-	-	-	-	1.378.027.400,00								1.726.710.702,00	
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.168.227.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat	-		1.301.527.400,00	
	7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	1.168.227.400,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat		1.301.527.400,00	KECAMATAN TOMPASO BARAT
							-	-	-	-	-	1.378.027.400,00								1.726.710.702,00	
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat	-		50.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	20.000.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat		50.000.000,00	KECAMATAN TOMPASO BARAT
							[Meningkatkan Kinerja Kecamatan Tompaso Barat yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	-	-	-	-	1.378.027.400,00								1.726.710.702,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						-		16.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat	-		51.000.000,00			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan		16.000.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat			51.000.000,00		KECAMATAN TOMPASO BARAT	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-					-		35.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat	-		100.000.000,00			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						3 Unit		35.000.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat			100.000.000,00		KECAMATAN TOMPASO BARAT	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-		103.800.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat	-		157.183.302,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan		12.000.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat			31.183.302,00		KECAMATAN TOMPASO BARAT	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan		91.800.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat			126.000.000,00		KECAMATAN TOMPASO BARAT	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-		35.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat	-		67.000.000,00			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						1 Unit		35.000.000,00	Kab. Minahasa, Tompaso Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Kecamatan Tompaso Barat			67.000.000,00		KECAMATAN TOMPASO BARAT	
346	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-					-		35.000.000,00							-		60.000.000,00			
						-	-	-	-	-	-	-	-		35.000.000,00									60.000.000,00			

								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	1.759.539.020,00	Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			3.519.078.040,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					100 %	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur	-		24.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket	12.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			24.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terfasilitasi Persentase layanan adm. umum perangkat daerah yang terfasilitasi	-					100 % 100 %	98.500.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur	-		196.928.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	15.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			30.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	28.964.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			57.928.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
								-	-	-	-	-		2.072.568.708,00								4.153.426.040,00	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	12.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			24.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Langowan Timur yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	Nilai SAKIP	AA	CC	CC	BB	2.072.568.708,00										4.153.426.040,00	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	ASN Kantor Camat Langowan Timur			25.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Laporan	30.036.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			60.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase fasilitasi pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBM Perangkat Daerah	-				1 Unit 100 %	50.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur	-		100.000.000,00			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	50.000.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			100.000.000,00		KECAMATAN LANGOWAN TIMUR	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	68.049.688,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur	-		136.420.000,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	5.339.688,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			11.000.000,00		KECAMATAN LANGOWAN TIMUR	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	62.710.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			125.420.000,00		KECAMATAN LANGOWAN TIMUR	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/laik fungsi Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/laik fungsi Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	-				85 % 85 %	84.480.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur	-		177.000.000,00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	38.480.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			77.000.000,00		KECAMATAN LANGOWAN TIMUR	
						-	-	-	-	-	-	-	2.072.568.708,00										4.153.426.040,00		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	46.000.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	ASN Kantor Camat Langowan Timur			100.000.000,00		KECAMATAN LANGOWAN TIMUR	
349	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-				100 %	16.000.000,00								-		32.000.000,00		
						[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Langowan Timur]	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99	95	94	95	16.000.000,00											32.000.000,00		

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-				100 %	16.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Pemerintah Desa	-		32.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	16.000.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Pemerintah Desa	-		32.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
350	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	-				100 %	28.000.000,00							-		56.000.000,00	
						[Meningkatkan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,Kecamatan langowan timur]	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	99		0	0	95	28.000.000,00									56.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-				1 Keg	16.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Pemerintah Desa	-		32.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					16 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Pemerintah Desa	-		32.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
						-	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00									56.000.000,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-				-	12.000.000,00				-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-		24.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					24 Keluarga	12.000.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			24.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
351	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-				100 %	12.000.000,00							-		24.000.000,00	
						[Meningkatnya KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan langowan timur]	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	94.5		92.2	92.5	93	12.000.000,00									24.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-				1 kali	12.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	Pemerintah Desa	-		24.000.000,00	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	25.530.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			27.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2.207.800,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			2.500.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	32.500.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			25.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	28.727.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			40.500.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBM PD Daerah	-					100 %	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-	25.000.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	20.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			25.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-					100 %	91.435.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-	102.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	6.220.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			12.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	85.215.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			90.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	-					85 %	68.480.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-	71.000.000,00	

	7		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.480.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			36.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
												347.415.800,00								389.800.562,00	
	7		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			35.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
353	7		01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan Presentyasi Peningkatan Perkembangan Desa Kelurahan	-		100 % 90 %	15.000.000,00						-		30.000.000,00	
	7		01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-		1 Keg	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-	30.000.000,00	
	7		01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			30.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
354	7		01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-		100 %	15.000.000,00						-		30.000.000,00	
							[Meningkatkan KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Langowan Barat]	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100		86.49	100	100	15.000.000,00						30.000.000,00	
	7		01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-		100 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-	30.000.000,00	
	7		01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-			30.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
355	7		01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	15.000.000,00						-		30.000.000,00	
							-	-	-	-	-	15.000.000,00								30.000.000,00	
	7		01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-		-	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-	30.000.000,00	
							Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														

	7		01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT	
		X					NON URUSAN				1.822.591.021,00							1.791.640.672,00		
		X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				1.822.591.021,00							1.791.640.672,00		
356		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM SAKIP	-	8 Predikat cc predikat	1.822.591.021,00						-	1.791.640.672,00		
		X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan adm. umum perangkat daerah yang terfasilitasi Presentase fasilitas AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 %	1.822.591.021,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-	-	1.791.640.672,00		
		X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			16 Orang/bulan	1.822.591.021,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		1.791.640.672,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT	
							KECAMATAN LANGOWAN SELATAN				2.317.353.072,00							2.252.944.072,00		
		7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.317.353.072,00							2.252.944.072,00		
		7	01				KECAMATAN				2.317.353.072,00							2.252.944.072,00		
357		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM SAKIP 100%	-	8 Predikat CC Predikat undefined undefined	2.255.353.072,00						-	2.190.944.072,00		
							[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Langowan Selatan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	-	-	-	2.255.353.072,00							2.190.944.072,00		
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	undefined undefined	1.947.679.022,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN	-		1.947.679.022,00	
		7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	1.947.679.022,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		1.947.679.022,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	27.750.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	-	-	0,00		
		7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	27.750.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	-		0,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	60.075.816,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN	-		39.395.816,00	

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		5.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.379.150,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		15.379.150,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.315.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		7.315.000,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	8.701.666,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		8.701.666,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	23.680.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		3.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
						-	-	-	-	-	2.255.353.072,00							2.190.944.072,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBM Perangkat Daerah	-		100 %	30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN	-	30.001.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		30.001.000,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Langowan Selatan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien]	-	-	-	-	2.255.353.072,00							2.190.944.072,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	68.694.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN	-	68.694.050,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	6.484.050,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		6.484.050,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	62.210.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN		62.210.000,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	2.255.353.072,00	121.154.184,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN	-		2.190.944.072,00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.480.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN				22.500.000,00		KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	82.674.184,00		Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN				82.674.184,00		KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
358	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			100 %	25.000.000,00							-			25.000.000,00			
						[meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Langowan Selatan]	-		-	-	-	25.000.000,00										25.000.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-			1 Dokumen	25.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN	-			25.000.000,00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	25.000.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	LANGOWAN SELATAN				25.000.000,00		KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
359	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	12.000.000,00							-			12.000.000,00			
						[Meningkatnya PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,Kecamatan Langowan Selatan]	-	-	-	-	-	12.000.000,00										12.000.000,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	12.000.000,00				-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	-	-			12.000.000,00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12.000.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	-				12.000.000,00		KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
360	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-			100 %	25.000.000,00							-			25.000.000,00			
						[Meningkatnya KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Langowan Selatan]	-	-	-	-	-	25.000.000,00										25.000.000,00			

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.689.550,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				123 Laporan	29.401.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif			27.200.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-			-	0,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		25.000.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			-	68.466.960,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		83.600.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.366.960,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		11.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	59.100.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		72.600.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			-	27.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		76.195.935,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.000.000,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		36.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		40.195.935,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-					-	6.800.000,00					-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		10.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	6.800.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		10.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA	
365	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				-	6.800.000,00								-	-		10.000.000,00		
						[Meningkatkan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kecamatan Langowan Utara]	Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100	99.24	100	100		6.800.000,00									-	-		10.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-				-	6.800.000,00					-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		10.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					1 Dokumen	6.800.000,00		Kab. Minahasa, Langowan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11. Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif	-		-		10.000.000,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA	
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							0,00											16.465.832.000,00		
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							0,00											16.465.832.000,00		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							0,00											16.465.832.000,00		
366	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	0,00								-	-		4.178.850.000,00		
						[Meningkatkan Kualitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional]	Nilai SAKIP	AA	B	B	BB		0,00											4.178.850.000,00		
8	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	0,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-				12.250.000,00		
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1.550.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					4 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.100.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			81.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-				-	0,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-		602.000.000,00		
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			400.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					4 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			100.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			51.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			51.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-				-	0,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-		295.600.000,00		
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10.100.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			25.500.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			260.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-				-	0,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-		148.100.000,00		

	8		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		41.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12. Mendorong pelayanan publik yang prima	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
367	8		01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-		-	0,00						-	1.170.800.000,00	
							[Meningkatkan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	99	98	98	0,00							1.170.800.000,00	
	8		01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembentukan Karakter Generasi Muda akan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Persentase Pemuda Mendapatkan Pembinaan Karakter, Tumbuhnya Jiwa Patriotisme, Budaya Prestasi dan Profesionalisme	-		97 % 98 %	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	1.170.800.000,00	
	8		01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	0,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8		01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					50 Orang	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		5.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					200 Orang	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					8 Laporan	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
371	8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	0,00						-		3.040.200.000,00	
							[Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	99	97	97	97	0,00								3.040.200.000,00	
	8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	0,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	3.040.200.000,00	
	8	01	06	2.01	0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
								Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					4 Dokumen	0,00	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8		01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				7 Orang	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				13 Orang	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		4.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
							si Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0,00		Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		885.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, perlu ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini berguna sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2026.

Indikator kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja yang akan dicapai berdasarkan sasaran, tujuan dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap setelah kegiatan selesai dan difungsikan. Selain itu, penetapan indikator kinerja akan menggambarkan tolok ukur capaian kinerja yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja. Beberapa fungsi indikator kinerja antara lain:

- a) Berfungsi memperjelas tentang apa, berapa atau kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
- b) Berfungsi sebagai konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait guna menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan Kebijakan/program/kegiatan atau dalam meniai kinerja pelaksanaannya; dan
- c) Berfungsi membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Perencanaan Pembangunan baik RPJMD maupun RKPD.

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Minahasa sampai tahun 2024, maka pemerintah Kabupaten Minahasa menetapkan target Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan daerah tahun 2026 Kabupaten Minahasa tertuang pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Minahasa
Tahun 2024 dan Target capaian Tahun 2025 dan 2026

No	Indikator	Satuan	Target	
			2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79.50 - 80,00	80,00 - 80,50
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60 – 6,00	6,20 - 7,30
3	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	71.78	76.35
4	Rasio Gini	Angka	0,30 - 0,34	0,28 - 0,32
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.95	4.1 0
6	Angka Kemiskinan	Persen	6,40 – 6,35	6,36-6,01
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,90-6,50	6.40 – 6.00
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,00	67,50
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B	B
10	PDRB Sektor Pariwisata	Milyar RP	249.27	267.27
11	Nilai PDRB	Milyar Rp	25.488,76	27.246,23
12	Indeks Pencegahan Korupsi	Indeks	80	81
13	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3	3,5

Tabel 6.2. Indikator Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa
Tahun 2025 s.d 2026

No	Indikator	Satuan	Target	
			2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79.50 - 80,00	80,00 - 80,50
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60 – 6,00	6,20 - 7,30
3	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	71.78	76.35
4	Rasio Gini	Angka	0,30 - 0,34	0,28 - 0,32
5	Angka Kemiskinan	Persen	6,40 – 6,35	6,36-6,01

No	Indikator	Satuan	Target	
			2025	2026
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,90-6,50	6.40 – 6.00
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,00	67,50
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	54,9	58,34
	a. Kumulatif	Persen	14,66	15,4
	b. Tahunan	Persen	24,59	26,33
9	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	12,9	13

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Minahasa terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Minahasa, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 6.3

Tabel 6.3
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa
Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		KET.
			2025	2026	
1	2	3	4	5	
I					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,61	79,62	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5.59	6,03	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	51.958.078,00	51.009.836,00	
4	Akses Rumah Tangga terhadap konsumsi air Minum	%	91,5	92	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,00	67,50	
6	Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0	0	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/Tahun	46,500,00	50.000	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh pengumpulan Sampah	%			
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%			
10	Indeks Resiko Bencana	Angka	193,85	192	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	31	33	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,2	1,1	
13	Rasio Penduduk	%	103,31	103,06	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km	311,06	312,38	
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	89.40%	89.50%	
II	ASPEK KESEJAKTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 – 6,00	6,20 - 7,30	
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,40 – 6,35	6,36-6,01	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	71.78	76.35	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,90-6,50	6.40 – 6.00	
5	Indeks Gini	Angka	0,30 - 0,34	0,28 - 0,32	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79.50 - 80,00	80,00 - 80,50	Indeks Pembangunan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		KET.
			2025	2026	
1	2	3	4	5	
					Manusia Untuk Kab/Kota
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,35	75,5	
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,4	0,5	
9	Prevalensi Stunting	%	19,20	19	Data SSGI/SKI (%)
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	14,2	14,25	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,75	
12	Angka Literasi/Numerasi	%	58,53	61,03	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	66,8	67,8	
14	Indeks Literasi Digital	Angka	66,25	67,25	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	26.339	49.592	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	8	8	
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	10,14	13,86	
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka	65,06	65,64	
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	79,37	79,48	
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,357	0,355	
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,9	96,92	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	35	38	
23	Persentase balita gizi buruk		8	7,5	
24	Angka partisipasi Angkatan Kerja	Orang	182.750	183.000	
25	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Orang	118.787	120.780	
26	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	65	66	

III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Indikator	Satuan	2025	2026	Ket
1	Angka Ketergantungan	%	48,26	48,64	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7.51	7.75	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0.96	0.98	

4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%			
5	Rasio Kewirausahaan	%	45.85	46	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49,54	50,55	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	> 40	> 55	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	36	36	
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka			
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	4	4.5	
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,05	6,1	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.	41.31	41.40	
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.	29.36	29.38	
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65	67	
15	Rumah Tangga dengan Layanan Akses Hunian Layak	%	91	91	
16	Indeks Desa	Angka	188	190	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.23	0.28	
18	Tingkat Inflasi	%	2.87	2.75	

IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Indikator	Satuan	2025	2026	Ket
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	55,1	60	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,65	2,76	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3	3,5	
4	Indeks Integrasi Nasional	Angka	70,25	72,45	
5	Presentase Penegakan Perda	%	100	100	
6	Presentase Capaian Aksi HAM	%			
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	7	7	
8	Indeks Rasa Aman	Angka	82	84	
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	82	84	
10	Indeks Daya Saing	Angka	3.95	4.1 0	

Indikator Kinerja Kunci

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
1. Urusan Pendidikan				
Skor Literasi/Numerasi	%	58,53	61,03	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,75	
Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	14,20	14,25	
Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		82,44	85,41	
Persentase anak usia 4-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		99,58	99,84	
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal		100	100	
Indeks Pemerataan Guru		0,61	1,51	
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		43,66	44,56	
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui		100	100	
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Disesuaikan dengan konteks daerah		72	73	
2. Urusan Kesehatan				
Umur Harapan Hidup		75,35	75,5	
Angka Kematian Ibu (AKI)		123/100.000 KH	109/100.000 KH	
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		19,20	19	
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan		0	96	
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		80%	82%	
Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan		13	15	
Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi		100%	100%	
Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk		0,0076	0,0077	
Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk		0,00181	0,00182	
Menurunkan insidensi TB per 100.000 penduduk		334,4	333	
Menurunkan insidensi HIV		0,25	0,25	
Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		75%	80%	
Persentase Rumah Sakit terakreditasi		100%	100%	
Persentase FKTP sesuai standar		80%	85%	
Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		34.78%	44%	
Persentase ketersediaan obat esensial dan obat kebutuhan lainnya		80%	82%	
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	65	67	Ind. Tujuan
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	63,24	58,47	Ind. Sasaran
Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	51,14 %	53,47 %	
Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	39.35%	41.27%	
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	Persen	86,41 %	87,28 %	
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	63,43 %	63.43%	
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	71.26%	72.76%	
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	55,0 %	55,50 %	
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	73,36 %	74,09 %	
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	80,04 %	80,84 %	
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	70 %	70 %	
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	62.43%	62.70%	
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	41,61 %	42,03 %	
presentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Provinsi	Persen	80 %	80 %	
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	18%	24%	Ind. Tujuan
1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	2 %	2 %	
2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0 %	0 %	
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	1,65 %	0 %	
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	50 %	45 %	
ersentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persen	20 %	25 %	
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	c	82	84	
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	
Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100	
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	
Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	100	
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Desa	60	116	
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	
Urusan Sosial				
Indeks Kesejahteraan Sosial				
1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	persen	100	100	
2. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	persen	100	100	
3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	persen	100	100	
4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	10	30	27 Org
5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	persen	30	50	40 LKS
1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	orang	4	4	
2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	persen	100	100	
1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	
2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	65	70	
4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	65	70	
5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	70	75	
6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas				
7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia				
8. Indeks Peranan Sosia				
1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100	
2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	persern	10	20	
3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	persen	70	75	
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	persen	100	100	
Urusan Tenaga Kerja				
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	131, 2	132, 2	
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	90	90	
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	75	75	
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	70	70	
Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	5.573	5.635	
Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	4.821	4.951	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Ratio	96,90.	96,92.	
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,357	0,355	
3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,06	65,64	
1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	15, 61 Persen	20 Persen	
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		49,54	50,55	

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	0,04 Persen	0,05 Persen	
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	10 Persen	15 Persen	
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	100 Persen	100 Persen	
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	60	63	
1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	75 Persen	76 Persen	
2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	70 Persen	72 Persen	
Urusan Pangan				
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		79,61	79,62	
Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	10 Persen	50 Persen	
Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93	94	
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	18 Persen	15 Persen	
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	40 Persen	50 Persen	
urusan lingkungan hidup				
Indeks kualitas Lingkunagn Hidup (IKLH)	Indeks	66,16	66,16	Ind. Tujuan
Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100 %	100 %	
1. Indeks Kualitas Air	Indeks	57,16 Indeks	57,26 Indeks	
2.Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	35,88 Indeks	35,98 Indeks	
3.Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,13 Indeks	91,23 Indeks	
persentase RTH	Persen	50 %	52 %	
Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	52 %	53 %	
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	100 %	100 %	
Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	0 %	100 %	
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	0 %	0 %	
persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	0 %	59 %	
persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persen	100 %	100 %	
indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	46 Indeks	46,50 Indeks	

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
urusan administrasi kependudukan dan pencataan sipil				
indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Nilai/Angka	A 91	A 92,02	A 93,99
1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	3,21	30	80
2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	39,95	62	90
1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	
2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	96,2	99,5	
3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	66,92	100	
4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	83,65	100	
persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%			
persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	
cakupan pengelolaan profil kependudukan	Jumlah	100	100	
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa				
indeks desa	Desa	188	190	Berdasarkan Indeks Desa (Indeks Desa Membangun telah diubah menjadi Indeks Desa mulai Tahun 2025); Base data IDM 2024 , Desa Mandiri 187
persentase fasilitas penataan desa	%	61	66,51	
persentase fasilitas kerjasama desa	%	33,48	34,36	
1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	73,45	74,48	Aparatur Desa = 3556 BPD = 1285 Seluruh

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
				nya = 4841
2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	
1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	%	100	100	Fasilitasi LKD (PKK) 270 Desa/Kel urahan
2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat	%	100	100	Fasilitasi Kader Pembang unan Manusia (KPM)22 7 Desa/1 Kader
urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
indeks pembangunan keluarga (iBangga)		79,37	79,48	
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)		1,97	1,97	
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		24	19	
1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)		81	81	
2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		11	11	
Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga		62	62	
urusan perhubungan				
Rasio Konektivitas	Rasio	0,3	0,31	Ind. Tujuan
Konektivitas darat		0,29 Nilai	0,30 Nilai	
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	0.024%	0.026%	
Konektivitas Laut		0 Nilai	0 Nilai	
urusan komunikasi dan informatika				
Nilai indeks transformasi digital pilar pemerintah		6,05	6,10	
persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	70%	78%	
indeks SPBE	Nilai	2,65	2,76	
Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah				
kontribusi UMKM terhadap PDRB				

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	12	15	
persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	10	12	
persentase koperasi aktif	Persen	36,2	40,2	
persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Persen	15	18	
persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	7	9	
1. persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	5	7	
2. pertumbuhan wirausaha	Unit Usaha	125	125	
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	UKM	5	5	
persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	15	15	
urusan penanaman modal				
persentase peningkatan investasi	%	76,47	82,35	
realisasi total terhadap target investasi	Rp	130.000.000.000	140.000.000.000	
persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	16	18	100
persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	16,36	18,00	99,99
persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	0,00%	12,50%	
persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	20	20	100
persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	20	20	100
urusan kepemudaan dan olahraga				
1. indeks pembangunan pemuda (IPP)	%	35	38	
2. indeks partisipasi olahraga	%	40	45	
rasio wirausaha pemuda	%	30	35	
persentase atlet yang masuk pelatnas	%	10	20	
tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	30	35	
urusan statistik				
indeks pembangunan statistik (IPS)		2,6	2,6	
Indeks pembangunan ststistik (IPS)		2,6	2,6	
urusan persandian				
indeks SPBE (terkait keamanan)		2.6	2.9	
tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah		60	60	

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
urusan kebudayaan				
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	10,14	13,88	Ind. Tujuan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	0.539 %	0.547 %	
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	50,00 %	62,50 %	
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	0 %	0,50 %	
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	Persen	3.64 %	7.27 %	
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	5.20 %	8.86 %	
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	0 %	2 %	
urusan perpustakaan				
indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)	Angka	66,80	67,80	
Indeks Literasi Digital	Angka	66,25	67,25	
nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		68.2	70.2	
persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki				
persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang perpustakaan		50.25	52.25	
urusan kearsipan				
indeks hasil pengawasan kearsipan pada ruang lingkup pemerintahan daerah				
tingkat ketersediaan arsip		25	29	
persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip		30	35	
persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup		10	10	
persentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya		50	50	
urusan kelautan dan perikanan				
1. Nilai tukar nelayan (NTN)	NTP	106	107	
2. Nilai tukar pembudidayaan perikanan (NTPi)	NTPi	1,3	1,3	
kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	12,76	12,95	
jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	21000	21500	
jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	50500	51000	
luasan kawasan konservasi	Ha	15	15	
angka konsumsi ikan	Kg/Perkapita	59	60	
urusan pariwisata				
Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan, minum	Rasio	0,9801	0,99869	Ind. Tujuan

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	8,97	9,29	
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	4 %	5 %	
Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	Persen	5.5 %	6 %	
Tingkat hunian Akomodasi	Persen	32.79 %	33.61 %	
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	61.54 %	69.23 %	
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	0 %	20 %	
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	26.01 7%	26.28 %	
urusan pertanian				
nilai tukar petani (NTP)	%	116	117	
1. peningkatan produksi tanaman pangan	%	5	5	
2. peningkatan produksi hortikultura	%	3	3	
3. peningkatan produksi komoditas peternakan	%	1	1	
cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	0	0	
1. tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	50	50	
2. persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Verteriner)	%	28,57	42,86	
1. persentase penanganan bencana pertanian		0	0	
2. persentase penangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		0	0	
persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan		0	0	
1. persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	67	75	
1. peningkatan produksi tanaman pangan	%	5	5	
2. peningkatan produksi hortikultura	%	3	3	
3. peningkatan produksi komoditas peternakan	%	1	1	
cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	0	0	
1. tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	50	50	
2. persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Verteriner)	%	28,57	42,86	
1. persentase penanganan bencana pertanian		0	0	
2. persentase penangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		0	0	
persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan		0	0	
1. persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	67	75	

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
2. persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi		0	0	
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				
1. Porsi EBT dalam Bauran Energi				
2. Rasio Elektrifikasi				
1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota				
2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota				
1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah				
2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR				
1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT				
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi				
Rasio Elektrifikasi				
Urusan Perdagangan				
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	6,53	6,54	
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya				
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	80	80	
Urusan Perindustrian				
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	4,27	4,28	
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	5	6	
Unsur Sekretariat Daerah				
Indeks Reformasi Birokrasi		B	B	
Indeks Kematangan Organisasi				
1. Efektivitas Kerja Sama Daerah				
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan				
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	75	80	
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	95	95	
Tingkat Kematangan UKPBJ	%	67	70	
Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan				
Unsur Sekretariat DPRD				
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekertariat DPRD	Presentase	100%	100%	
1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Presentase	98%	98%	
2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Presentase	98%	98%	
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	Presentase	98%	98%	
Unsur Perencanaan				
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	70	70	
1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	85%	85%	
2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	&	85%	85%	
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	85%	85%	
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	85%	85%	
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	85%	85%	
Unsur Keuangan				
Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	
1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		≥35	≥35	
2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		27.32	≥30	
1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		52	50	
2. Persentase Penurunan SILPA		-36	-36	
Persentase laporan keuangan tepat waktu		100	100	
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		3.75	3.75	
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,04%	10,06%	
Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Kali	4	4	
Unsur Kepegawaian				

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
Indeks Profesionalitas ASN		82.80	82.85	
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi		89	89	
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		75	75	
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		80	80	
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		100	100	
Unsur Pendidikan dan Pelatihan				
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		32.60	32.62	
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional		65	66	
Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		100	100	
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		80	80	
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		80	80	
Unsur Penelitian dan Pengembangan				
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		≥30	≥30	
Persentase rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		75%	75%	
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pengembangan Potensi Unggulan yang termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		75%	75%	
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		75%	75%	
Persentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		75%	75%	
Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan		75%	75%	
Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah		75%	75%	
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		75%	75%	
Persentase fasilitasi , pembinaan , bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		75%	75%	
Unsur Pengawasan				

Indikator	Satuan	TARGET		
		2025	2026	Ket
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL	2	3	
Tindak LanjutRekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	79,84	81	
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL	2	3	
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	LEVEL	2	3	
Unsur Pemerintahan Umum		98	98	
Indeks Demokrasi Indonesia		7	7	
Indeks Harmonisasi Indonesia				
Indeks Reformasi Hukum	Angka	55,1	60	80
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3	3,5	
Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		98	98	
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		96	96	
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif		97	97	
Persentase kebijakan di bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan.		97	97	
Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan		97	97	

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045, serta mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2026.

Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2026, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Minahasa, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, BAPPELITBANGDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2024 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2026.
2. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar terus difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kebutuhan/ kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala.
4. Secara proaktif, BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2026 serta menghimpun dan menganalisis laporan (setiap bulan atau 3 (tiga) bulanan) pelaksanaan dari masing-masing Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2026, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati.

Akhirnya, Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Minahasa mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kabupaten Minahasa secara menyeluruh.

BUPATI MINAHASA,

ROBBY DONDOKAMBEY